



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 148);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra BRIN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra BRIN Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

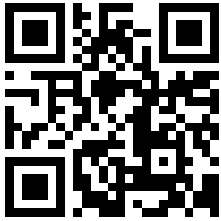
Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra BRIN Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRACL merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BRIN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2026

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIF SATRIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kemajuan riset dan inovasi. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan kemajuan teknologi yang pesat, Indonesia perlu beradaptasi dan berinovasi. Hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dengan besarnya potensi perubahan pesat yang akan terjadi hingga tahun 2045 seperti demografi global, geopolitik, geoekonomi, perkembangan teknologi, serta persaingan sumber daya alam, Indonesia harus mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada secara maksimal. Riset dan inovasi berperan sebagai fondasi utama dalam mencapai tujuan tersebut, dengan harapan keduanya dapat menghasilkan solusi untuk berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Riset yang berkualitas tinggi dan relevan akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, serta untuk mendukung pengembangan teknologi dan industri yang berkelanjutan.

Mengacu pada salah satu struktur agenda pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045, yakni Transformasi Ekonomi yang difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung transformasi ini melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), inovasi, dan produktivitas ekonomi. Sebagai lembaga yang mengoordinasikan seluruh kegiatan riset dan inovasi di pemerintahan Indonesia, BRIN bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem kolaborasi riset dan inovasi. Hal ini mencakup kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam upaya menghasilkan riset dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. Penciptaan ekosistem riset dan inovasi yang kuat merupakan langkah krusial dalam menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan fokus utama pada pengembangan bidang *science, technology, engineering, art, and mathematics* (STEAM) akan memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan teknologi, sehingga mereka mampu berkontribusi secara inovatif dalam industri modern

serta menyesuaikan diri dengan dinamika pasar kerja yang terus berubah. Dengan diimbangi peningkatan kapasitas di pusat lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam pengembangan riset dan inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dari tahapan pembangunan sebelumnya, masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan yang harus dilakukan, terutama yang berkaitan dengan kualitas SDM, riset dan inovasi, serta produktivitas sektor ekonomi produktif. Pembangunan SDM yang berkualitas merupakan landasan untuk mencapai kemajuan dalam semua sektor, sedangkan kemajuan sains dan teknologi berperan penting dalam mendorong inovasi. BRIN memiliki peran sentral dalam mewujudkan agenda tersebut. Dengan mengembangkan SDM yang sejalan dengan kemajuan Iptek serta perkembangan global, Indonesia akan siap menyambut cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa yang cerdas dan berkarakter. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk bersaing dan berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia.

Transformasi ekonomi adalah salah satu elemen penting untuk membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) dengan berfokus pada pengembangan perekonomian yang mengedepankan ekspor nilai tambah tinggi. Implementasi transformasi ini akan memungkinkan negara dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan, menjadikan perekonomian lebih efisien dan produktif, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Sehubungan dengan iptek dan riset, transformasi ekonomi perlu dilakukan melalui berbagai reformasi struktural dan kebijakan pemerintah terutama pada penerapan teknologi informasi dan investasi yang besar dalam riset dan inovasi. Transformasi ekonomi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden terpilih:

"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut adalah Delapan Misi yang disebut *Asta Cita* yang menjadi panduan pembangunan nasional:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Secara khusus, BRIN berkontribusi dalam pencapaian misi keempat Asta Cita untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Gambar 1. Kerangka Pikir Hubungan Visi, Misi, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden



Sebagai langkah konkret dalam mendukung visi dan misi Presiden terpilih, BRIN berkomitmen memperkuat riset dan inovasi sebagai orkestrator pembangunan nasional. Melalui Rencana Strategis 2025–2029, BRIN merumuskan kebijakan strategis yang mendukung transformasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan teknologi yang relevan, guna mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Capaian Indikator RPJMN 2020-2024 bidang Iptek

Sebagai lembaga yang dibentuk melalui integrasi berbagai entitas riset nasional pada tahun 2021, BRIN Nasional memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsinya selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Capaian kinerja BRIN akan dievaluasi dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024 bidang iptek yang telah disesuaikan melalui Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 49/I/HK/2023 tentang Penyelarasan Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Rencana Strategis BRIN Tahun 2022-2024. Penyelarasan target ini merupakan langkah

strategis untuk memastikan bahwa BRIN dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Tabel 1. Capaian atas Penyelarasan Indikator RPJMN Tahun 2020-2024 Sektor Iptek dengan Rencana Strategis BRIN Tahun 2022-2024

Sasaran/Indikator		Target Akhir RPJMN	Satuan	2022		2023		2024	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya produktivitas dan daya saing									
1	Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional	31.159	artikel	2.691	3.257	3.518	5.284	4.505	6.117
2	Jumlah sitasi di jurnal internasional	59.770	sitasi	14.583	41.043	20.416	31.105	26.541	52.981
3	Jumlah produk inovasi dari <i>tenant</i> perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) yang dibina	700	produk	150 ^{*)}	165	300 ^{*)}	315 ^{*)}	450 ^{*)}	483 ^{*)}
4	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	210	produk inovasi	125	62	150	258	175	303
5	Permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas kekayaan intelektual (domestik)	3.000	paten	500	356	600	762	700	1.117
6	Pemberian paten (Domestik)	1.000	paten	150	133	200	181	300	287
7	Persentase SDM Iptek Berkualifikasi S3	20 ^{*)}	Persen	17 ^{*)}	22,62	18 ^{*)}	25,77 ^{*)}	20 ^{*)}	29,12 ^{*)}
8	Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) yang ditetapkan	138 ^{*)}	PKR	10 ^{*)}	15	35 ^{*)}	28 ^{*)}	70 ^{*)}	63 ^{*)}
9	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)	75 ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan	10 ^{*)}	infra struktur	10 ^{*)}	8	10 ^{*)}	8 ^{*)}	10 ^{*)}	9 ^{*)}
11	Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan	3 ^{*)}	unit	4 ^{*)}	4	4 ^{*)}	4 ^{*)}	4 ^{*)}	4 ^{*)}

Sasaran/Indikator		Target Akhir RPJMN	Satuan	2022		2023		2024	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	hingga beroperasi secara penuh: berbasis non-Perguruan Tinggi								
12	Jumlah inovasi dan produk Riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	40*)	produk	-	-	30*)	15*)	40*)	37*)
13	Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam	24	teknologi	15	14	20	149	24	239
14	Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	35	teknologi	35	20	35	15	35	44

*) Angka Kumulatif

BRIN melakukan penyesuaian dengan target RPJMN sektor Iptek untuk periode 2022-2024. Penyesuaian ini sebagai bentuk kontribusi BRIN terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Indikator 1: Jumlah Publikasi Ilmiah (Artikel) Internasional

Pada tahun 2023, melalui SK Kepala BRIN Nomor 49/I/HK/2023, nomenklatur indikator ini diselaraskan menjadi Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional yang bereputasi. Berdasarkan data *Scopus*, BRIN berkontribusi sebesar 3.257 publikasi di tahun 2022 dan 5.284 publikasi di tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian untuk indikator jumlah publikasi ilmiah adalah 6.117 dari target 4.505 atau sebesar 135,78%. Dari capaian tersebut, sebanyak 1.182 merupakan publikasi terindeks Q1. Jurnal Q1 umumnya dianggap sebagai jurnal paling bergengsi dan berpengaruh di bidangnya dengan proses *review* yang sangat ketat. Mempublikasikan artikel di jurnal Q1 menandakan bahwa penelitian tersebut diakui oleh komunitas internasional sebagai karya yang berkualitas.

Indikator 2: Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional

Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional digunakan untuk mengukur sejauh mana publikasi digunakan sebagai referensi pada karya ilmiah lain. Pada tahun 2023, penyelarasan dilakukan pada indikator ini menjadi Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional yang Bereputasi sehingga dapat menjadi motivasi untuk perbaikan kualitas publikasi ilmiah. Untuk mengukur capaian indikator ini, BRIN menggunakan data yang diambil dari *Scopus*.

Pada tahun 2022, target awal yang ditetapkan adalah 14.583 sitasi, namun realisasinya jauh melampaui dengan capaian sebesar 41.043 sitasi. Pada tahun 2023, target meningkat menjadi 20.416 sitasi. Meskipun jumlah sitasi yang diperoleh mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 31.105 sitasi, angka ini tetap berada di atas target yang telah ditentukan. Pada tahun 2024, target menjadi 26.541 sitasi. Namun, capaian yang diperoleh justru meningkat secara signifikan hingga mencapai 52.981 sitasi. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah sitasi yang diperoleh, capaian setiap tahunnya selalu melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator 3: Jumlah Produk Inovasi dari *Tenant* Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang Dibina

Hilirisasi hasil riset diharapkan dapat berkontribusi pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk inovatif hasil riset dari perusahaan pemula binaan yang berdaya saing tinggi. Pada indikator ini dilakukan penyelarasan nomenklatur menjadi Jumlah Produk Inovasi yang Dihasilkan oleh Mitra Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR). Pada tahun 2022, capaian yang diraih mencapai 110% dari target dengan proses karena proses seleksi dan tahap pra-inkubasi perusahaan rintisan yang cukup ketat demi memastikan kualitas perusahaan yang dihasilkan. Pada tahun 2023 terjadi perbaikan pada pelaksanaan kegiatan dengan disertai dengan regulasi yang mendukung sehingga realisasi target mencapai 105%. Tahun 2024 telah tercapai 168 produk inovasi, sehingga secara akumulasi pencapaian indikator PPBR dari tahun 2021 sebanyak 483 buah. Tabel 2 menunjukkan status PPBR yang dibina BRIN sejak tahun 2022-2024.

Tabel 2. Status PPBR BRIN 2022-2025

No	Tahun	Status		Hasil Inkubasi
		Masih Beroperasi	Sudah Tidak Beroperasi	
1	2022-2023	11	5	<ol style="list-style-type: none">1. Pendampingan Legalitas PT. Umum, Perseroan Terbatas, Persekutuan Modal, Perseroan Terbatas (PT) Perorangan2. Penambahan kelas merek3. Proses pendampingan sertifikasi SNI, pengurusan produk pengujian testing dosimeter, pupuk, BPOM, SDP, Pakan, dan HKI4. Produksi secara maklon

No	Tahun	Status		Hasil Inkubasi
		Masih Beroperasi	Sudah Tidak Beroperasi	
2	2023-2024	20	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Legalitas PT Umum, PT Perorangan, dan CV 2. Pendampingan Pendaftaran Merek, Paten, Paten Sederhana, Desain Industri dan Hak Cipta 3. Pendampingan Proses sertifikasi SNI, BPOM, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pakan, Izin Edar, Kelayakan Produksi, MD Terdaftar, PIRT dan CPPOB 4. Pendampingan Proses Perizinan Alkes 5. Pendampingan Pendaftaran LPSE
3	2024-2025	18	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Legalitas PT Umum, CV 2. Pendampingan Pendaftaran Merek, registrasi SIDOPI Kemenhub, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, CoA, PSE Kominfo dan NIE PKRT 3. Pendampingan Proses sertifikasi SNI, BPOM, Halal dan Uji Produk.

Indikator 4: Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Industri/Badan Usaha

Produk inovasi adalah produk hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi). Indikator ini diselaraskan menjadi Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan masyarakat, industri, dan UMKM dengan harapan produk inovasi dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2022, capaian jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan sebesar 49,60% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi karena proses bisnis yang terkait dengan indikator ini baru saja diimplementasikan, sehingga pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target belum berjalan secara optimal. Di tahun 2023, terjadi peningkatan capaian sebesar 172% apabila dibandingkan dengan target di tahun 2022. Tahun 2024, capaian sudah mencapai 173,14% dari target sebesar 175 produk. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian antara lain berupa sosialisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi, *coaching*, *mentoring*, konsultasi daring maupun luring, pembinaan atau bimbingan teknis, kunjungan lapangan kepada mitra pemanfaatan, dan penandatanganan kerja sama lisensi.

Indikator 5: Permohonan Paten yang Memenuhi Syarat Administrasi Formalitas Kekayaan Intelektual (Domestik)

Permohonan paten adalah permohonan paten atau paten sederhana yang diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau *patent cooperation treaty* untuk pengajuan paten internasional. Syarat formalitas adalah kelengkapan formalitas mulai dari deskripsi, surat pernyataan, serta pengalihan hak. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor terhadap hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang).

Indikator permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas kekayaan intelektual (domestik) pada RPJMN 2020-2024 dengan target sebesar 3.000 paten merupakan target secara nasional, yang tidak hanya berasal dari kontribusi BRIN saja. Indikator ini telah diselaraskan menjadi jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat formalitas (paten terdaftar). Indikator ini merupakan luaran dari kegiatan fasilitasi layanan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dari hasil-hasil riset mitra periset di lingkungan BRIN. Selama periode tahun 2022-2024 menunjukkan perkembangan yang baik ditunjukkan dengan meningkatnya permohonan paten dari 356 paten atau 71,2% di tahun 2022 menjadi 127% pada tahun 2023. Peningkatan kinerja ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh BRIN, antara lain dengan memberikan jadwal audiensi perbaikan paten antara periset dengan pemeriksa paten, sehingga dapat menjadi solusi percepatan paten *granted*; usulan penambahan SDM *drafter* paten, seperti pelibatan peneliti di bidang kepakarannya; dan mengoptimalkan kerja sama/*MoU* antara BRIN dan Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI dalam pengelolaan KI. Ketercapaian indikator Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat formalitas sangat bergantung pada proses yang ada di eksternal dimana jumlah permohonan paten merupakan hasil dari penetapan target pada Organisasi Riset yang ada di BRIN. Sedangkan, untuk jumlah paten *granted* diperoleh setelah proses yang ada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum selesai. Pada tahun 2024, permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI Domestik sebesar 159,57% dari target yang telah ditetapkan. BRIN melakukan percepatan perlindungan paten dengan melakukan komunikasi dua arah dalam rangka persamaan persepsi antara *reviewer* dan *inventor* langsung sehingga penyusunan paten dapat terkawal dan terjadwal. Selain itu, pada pencapaian kinerja akhir tahun, BRIN melakukan beberapa proses kegiatan seperti pelaksanaan evaluasi perlindungan KI yang telah dilakukan setiap tahunnya.

Indikator 6: Pemberian Paten (Domestik)

Target pada RPJMN Sektor Iptek sebesar 1.000 paten untuk indikator pemberian paten (domestik) merupakan target secara nasional, yang tidak hanya berasal dari kontribusi BRIN saja. Pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 49/I/HK/2023, indikator Pemberian paten (domestik) diselaraskan menjadi jumlah paten *granted*. Paten *granted* adalah capaian tertinggi dari bidang penelitian dan pengabdian yang diberikan oleh pemerintah. Pemegang paten mendapatkan hak eksklusif atas penemuannya.

Tahun 2022, capaian indikator Jumlah paten *granted* mencapai 133 paten *granted* atau paten dapat dikabulkan permohonan mendapatkan sertifikat *granted* oleh DJKI Kementerian Hukum. Persentase kenaikan perubahan capaian terjadi sebesar 36,09% di tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Sebagai langkah proses percepatan paten *granted* dilakukan

komunikasi teknis dengan DJKI, dalam rangka mengatasi teknis klaim-klaim paten atau proses paten *granted* agar dapat tercapai. Pada tahun 2024, diperoleh capaian sebesar 95,67% dari target sebesar 300 paten. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan telah dilakukan dari awal tahun 2024 seperti penelusuran paten masa pemeriksaan substantif sebagai upaya identifikasi calon paten *granted* serta pendampingan perbaikan substantif ke inventor dan penyampaian kembali dokumen perbaikan substantif paten ke DJKI.

Indikator 7: Persentase Sumber Daya Manusia Iptek berkualifikasi S3

SDM Iptek yang dihitung pada indikator ini adalah dosen, periset, dan perekayasa. Percepatan pencapaian target ini dilakukan dengan penyelenggaraan program *Degree by Research*, beasiswa lainnya, dan rekrutmen PNS dengan kualifikasi S3, serta dengan mensyaratkan kualifikasi S3 bagi pemangku jabatan fungsional bidang riset saat menduduki jenjang level Madya. Komposisi SDM Iptek berkualifikasi S3 terdiri atas jabatan fungsional dosen/lektor, peneliti, dan perekayasa, dengan rincian per tahunnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi SDM Iptek Berkualifikasi S3
2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Dosen/Lektor	4	4	4
Peneliti	1720	1978	2177
Perekayasa	215	228	244
Total	1939	2210	2426

Sumber: Laporan Rencana Kerja Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek, 2022-2024

Program peningkatan kualifikasi talenta riset dan inovasi dalam skema pendidikan pascasarjana berbasis riset atau *Degree by Research* merupakan salah satu strategi percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 bagi SDM Iptek. Program ini ditetapkan dalam Peraturan BRIN Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Pengembangan SDM melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset. Skema program tersebut juga terbuka bagi ASN di luar BRIN dan masyarakat umum dengan syarat berbasis kolaborasi riset antara *awardee* dengan periset BRIN selaku *co-promotor*. Dilakukan juga kerja sama dan sosialisasi ke Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan kelas *Degree by Research*.

Indikator 8: Pusat Unggulan Iptek yang Ditetapkan

Indikator Pusat Unggulan Iptek (PUI) yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, telah diselaraskan menjadi Jumlah Pusat Kolaborasi Riset (PKR) di BRIN. PKR merupakan kerja sama antara BRIN dengan perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, dan/atau industri yang diharapkan dapat menjadi platform untuk riset dan inovasi, yang bertujuan memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan daya saing global, serta mewujudkan kemandirian bangsa. PKR bersifat multi dan interdisipliner serta dalam pelaksanaannya akan difasilitasi dengan pendanaan yang dapat diberikan selama tiga tahun sampai tujuh tahun. Capaian pada tahun 2022 sebesar 150% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Jumlah PKR pada tahun 2023 sebanyak 28 PKR, di mana 15 PKR merupakan lanjutan dari tahun 2022 dan 13 PKR baru. Penurunan capaian PKR pada tahun 2023 dipengaruhi keterbatasan waktu penjaringan kandidat

PKR serta masih adanya proposal mitra yang belum memenuhi kriteria. Sehingga, pada tahun 2024, total akumulasi PKR mencapai 63.

Indikator 9: Jumlah Pranata Litbang yang Terakreditasi

Berdasarkan SK Penyelarasan RPJMN dan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh entitas kelitbang telah diintegrasikan ke dalam BRIN. Dengan demikian, proses akreditasi terhadap lembaga litbang tidak lagi dilaksanakan, sehingga tidak ada capaian untuk indikator Jumlah Pranata Litbang yang Terakreditasi.

Indikator 10: Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dikembangkan (Infrastruktur)

Infrastruktur riset yang dikembangkan melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bertujuan untuk mendukung riset nasional serta ekonomi berbasis riset. Dari target pengembangan 10 infrastruktur, sejak tahun 2022 hingga Triwulan III tahun 2024 telah tercapai 9 infrastruktur, yaitu Infrastruktur Pusat data Hayati dan Kekayaan Intelektual; Infrastruktur fasilitas Kawasan Geodiversitas Indonesia di Karangsembung; Infrastruktur Rumah Kaca Biodiversitas *Tropical* Terpadu; Infrastruktur Fasilitas Laboratorium Teknologi Tepat Guna; Infrastruktur Fasilitas Laboratorium Pengolahan Mineral Lokal Strategis Berbasis Teknologi *Low-Cost* dan *Zero Waste*; Infrastruktur Fasilitas Gedung Inkubasi dan Laboratorium Integrasi Layanan Data dan Informasi Penginderaan Jauh; Infrastruktur Bandung *Advanced Sciences and Creative Engineering Space*; Infrastruktur Fasilitas Stasiun Bumi Pengendali dan Penerima Data Satelit; dan Infrastruktur Fasilitas Akselerator Elektron Energi Tinggi (AEET) (proses pengadaan alat dan proses pembangunan kawasan AEET). Satu infrastruktur lainnya, yaitu *Procurement of Multi Purposes Research Vessels* (penyiapan dokumen tender kapal, tender di LPSE ICB untuk tahap prakualifikasi) pada tahun 2024 telah dicapai proses tender kapal, tersusunnya dokumen *Request for Proposal Shortlist*, dokumen perubahan ruang lingkup pekerjaan dari Kementerian Keuangan, dan *Pre-bid Meeting* dan *Survey Galangan* di Spanyol. Proyek pengadaan dua unit kapal (1 kapal penjelajah samudera dan 1 kapal penjelajah pesisir) ditargetkan selesai pada tahun 2027. Proyek ini berlangsung dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. BRIN memastikan proses infrastruktur *Procurement of Multi Purposes Research Vessels* tetap berlangsung di tahun 2025 hingga tahun 2027, dan di tahun 2025 akan diadakan pekerjaan konstruksi kapal.

Indikator 11: Jumlah *Science Techno Park* (STP) yang Dikembangkan hingga Beroperasi Penuh

Indikator ini diselaraskan menjadi jumlah kawasan sains dan teknologi (KST) strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh. Pada periode 2022 hingga 2024, BRIN telah memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan, yaitu sebanyak 4 (empat) KST, dengan rincian sebagai berikut:

a. KST Soekarno, Cibinong

KST Soekarno, Cibinong dirancang sebagai tempat pengembangan riset dasar, yang berfungsi untuk kegiatan alih teknologi berupa diseminasi kepada masyarakat atau industri. Selain itu, KST ini difokuskan sebagai

pusat riset hayati yang terintegrasi (pangan, kesehatan, dan lingkungan). Terdapat pula fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh.

- b. KST Bacharuddin Jusuf Habibie, Serpong
KST Bacharuddin Jusuf Habibie, Serpong dirancang sebagai kawasan yang memiliki peralatan riset dengan teknologi terkini. Dengan SDM yang terdidik dan terlatih, KST ini menyediakan pelayanan teknis terlengkap di Indonesia.
- c. KST Samaun Samadikun, Cisit
Kawasan yang difokuskan pada pengembangan berbagai teknologi cerdas, termasuk kecerdasan artifisial dan big data.
- d. KST Gerrit Augustinus Siwabessy Pasar Jumat, Jakarta Selatan
Kawasan ini difokuskan untuk layanan pemanfaatan teknologi nuklir. Di dalamnya terdapat fasilitas bagi industri sterilisasi, baik pangan maupun alat kesehatan. Selain itu, ada juga penyediaan produk radiofarmaka, serta terapi medis berbasis iradiasi; seperti terapi proton bagi penderita kanker.

Indikator 12: Produk Inovasi dan Produk Riset Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan

Indikator ini diselaraskan menjadi Produk Inovasi dan Produk Riset Prioritas Riset Nasional yang dilisensikan, dengan tujuan untuk memastikan hasil riset memiliki nilai tambah bagi industri atau masyarakat. Pada tahun 2022, baik target maupun capaian masih 0 karena pada tahun tersebut produk riset yang dihasilkan masih dalam tahap proses riset laboratorium, dan untuk menjadi sebuah produk diperlukan proses yang panjang. Selanjutnya di tahun 2023 terdapat 15 (lima belas) produk atau 50% dari target yang telah ditetapkan.

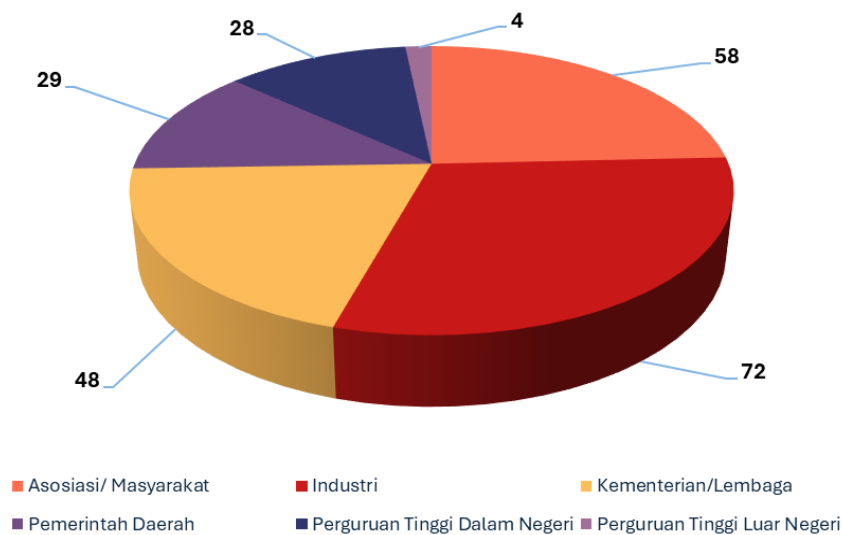
Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan riset dan inovasi nasional yang terarah, sistematis, dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan tahun 2023-2024, telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 104/I/HK/2023 tentang Percepatan Program Prioritas Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2023-2024. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat program prioritas riset dan inovasi nasional. Oleh karena itu, realisasi indikator ini hingga akhir periode tahun 2024 yang dicatatkan termasuk dari capaian *quick win*. Dikarenakan target dan capaian merupakan akumulasi, capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 37 produk.

Indikator 13: Penerapan Teknologi untuk Keberlanjutan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Indikator ini diselaraskan menjadi Penerapan Teknologi dan Model Sosial untuk Keberlanjutan Pemanfaatan SDA. Pada tahun 2022, indikator ini tercapai sebanyak 14 teknologi dari target 15 teknologi, dan mengalami peningkatan pesat pada tahun 2023 dengan capaian 149 teknologi dari target 20 teknologi. Hingga akhir tahun 2024, tercatat 239 teknologi terimplementasi dengan rincian jenis mitra sebagai berikut:

- 1) 58 Asosiasi/ Masyarakat;
- 2) 72 Industri;
- 3) 48 Kementerian/Lembaga;
- 4) 29 Pemerintah Daerah;
- 5) 28 Perguruan Tinggi Dalam Negeri;
- 6) 4 Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Gambar 2. Capaian Teknologi Terimplementasi Tahun 2024



Langkah yang dilakukan BRIN untuk mencapai target adalah dengan mendorong SDM iptek untuk menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai upaya, seperti membuka kesempatan pengajuan riset (Rumah Program, RIIM, LPDP Rispro), melakukan seleksi proposal penelitian agar selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah dan dokumen perencanaan lainnya, serta mendorong kolaborasi riset dengan industri, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga. Selain itu, BRIN memberikan dukungan manajemen dan administrasi, termasuk penyusunan Proses Bisnis, Sistem Kerja, dan SOP Riset, sekaligus mengakomodasi pengajuan bahan riset serta melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kualitas dan keselarasan riset dengan target pembangunan.

Indikator 14: Penerapan Teknologi untuk Pencegahan dan Mitigasi Pasca Bencana

Indikator ini diselaraskan menjadi Indikator Penerapan Teknologi dan Model Sosial untuk Pencegahan dan Mitigasi Pasca Bencana. Pada tahun 2022, indikator ini tercapai sebanyak 20 teknologi, dan pada tahun 2023 tercapai 15 teknologi, dengan penerima manfaat berasal dari masyarakat yang tinggal di lokasi bencana, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga (K/L), akademisi, asosiasi, dan industri. Pada tahun 2024, capaian indikator sebanyak 44 teknologi.

1.1.2 Capaian Kinerja BRIN 2022-2024

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis BRIN tahun 2022-2024, selain mengukur capaian indikator RPJMN 2020-2024 bidang iptek, kinerja BRIN juga dinilai berdasarkan pencapaian sasaran strategis serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, mengatasi kendala, dan menggali peluang perbaikan dalam upaya mencapai target perkembangan riset dan inovasi nasional.

Analisis yang digunakan adalah metode *trend analysis* dan *gap analysis*. *Trend analysis* merupakan metode analisis yang membandingkan data antar waktu, mengamati kecenderungan data secara menyeluruh, dan melihat rata-rata perubahan suatu data dari waktu ke waktu. Jika rata-rata perubahan

bertambah disebut tren positif atau tren mempunyai kecenderungan meningkat, dan jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. *Trend analysis* digunakan dalam melakukan Evaluasi Akhir Renstra K/L dengan menggunakan data realisasi tahun akhir dan data target tahun terakhir. Selanjutnya *gap analysis* dengan membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai atau realisasi) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai).

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BRIN Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja		Satuan	2022	2023	2024
Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing (SS1)					
1.1	Inovasi yang dimanfaatkan masyarakat, industri, dan badan usaha	Inovasi yang Dimanfaatkan	150	200	300
1.2	Rasio jumlah periset per sejuta penduduk	Rasio	2.000 - 2.250	2.000 - 2.580	2.580 - 2.880
1.3	Rasio anggaran riset non-pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah	Rasio	0,20 - 0,30	0,20 - 0,30	0,30 - 0,35
1.4	Rasio Dampak Sitasi BRIN terhadap Sitasi Global	Rasio	-	-	0,75 - 0,87
Tata kelola BRIN yang efektif, efisien, dan akuntabel (SS2)					
2.1	Indeks reformasi birokrasi BRIN	Indeks	83	85	86
2.2	Opini penilaian laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP

Rencana Strategis kementerian/lembaga merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu pada periode pemerintahan yakni 2020–2024. BRIN merupakan badan yang berdiri pada pertengahan tahun 2021, serta Renstra BRIN dibuat dan disahkan untuk periode 2022–2024. Pada akhir periode Rencana Strategis akan dievaluasi untuk melihat ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, dan indikator kinerja kegiatan sebagai bentuk kontribusi pada pencapaian pembangunan nasional. Selain evaluasi diperlukan untuk menganalisis faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan. Jika mengacu pada kelompok analisis tren, BRIN termasuk pada kelompok dengan ketersediaan data dan informasi yang terbatas serta histori data yang kurang konsisten (seperti perbedaan satuan indikator antar tahun atau target tahun 2024 yang bersifat kualitatif), yaitu hanya berdasarkan perhitungan pertumbuhan tahunan rata-rata hingga capaian terkini.

Indikator 1: Inovasi yang Dimanfaatkan Masyarakat, Badan Usaha, dan Industri

Capaian pada indikator ini dihitung berdasarkan jumlah inovasi di BRIN yang dimanfaatkan industri/badan usaha pada tahun berjalan dengan dilengkapi data dukung seperti PKS/MoU, Surat Pernyataan Pemanfaatan, Lisensi, dan lain-lain. Pada tahun 2022, capaian indikator ini hanya diambil dari

capaian Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi (DPRI). Namun pada tahun 2023 dan 2024, indikator ini mengalami penambahan definisi yang memungkinkan naskah/rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dapat dihitung sebagai capaian. Pada tahun 2023, satuan kerja yang berkontribusi pada capaian indikator ini adalah Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, dan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan. Pada tahun 2024, ada 2 (dua) Organisasi Riset (OR) yang ikut berkontribusi dalam capaian indikator yaitu OR Hayati dan Lingkungan serta OR Kebumihan dan Maritim.


Tabel 5. Target dan Capaian Inovasi yang Dimanfaatkan Masyarakat, Badan Usaha, dan Industri




Tahun	2022	2023	2024
Target	150	200	300
Capaian	62	258	303
Persentase Capaian	41,33	129	101

Berdasarkan hasil evaluasi, pemanfaatan inovasi oleh masyarakat, badan usaha, dan industri menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang 2022–2024. Pada 2022 capaian masih di bawah target dengan realisasi 41,33%, namun pada 2023 terjadi lonjakan signifikan hingga melampaui target sebesar 129%. Pada 2024, target kembali terlampaui dengan capaian 101%, meskipun persentase pencapaiannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya peningkatan target yang cukup signifikan.

Tabel 6 menyajikan bentuk konkret hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, badan usaha, dan industri, antara lain Sistem Perangkat Akuisisi Data Telemedis, Metode Pengemudian Jarak Jauh Pada Kendaraan Listrik Otonom, dan lain-lain.

Tabel 6. Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Masyarakat, Badan Usaha dan Industri 2022-2024

NO	NAMA PRODUK/ INOVASI	DESKRIPSI	GAMBAR
1	Sistem Perangkat Akuisisi Data Telemedis, dan Metoda Untuk Layanan Telemedis Terpadu	Invensi ini mengungkap mengenai suatu sistem telemedis terpadu, yang terdiri dari: perangkat akuisisi telemedis data, server telemedis, dan <i>viewer</i> telemedis di mana <i>viewer</i> telemedis ini berupa halaman berbasis web yang bisa diakses melalui browser pada ponsel maupun laptop. Suatu perangkat akuisisi telemedis data sesuai invensi ini terdiri dari: pemroses utama/ <i>main controller</i> , perangkat medis, dan perangkat operasional, dan unit catu daya. Di mana pada perangkat medis, terdiri atas alat ECG, alat USG, alat radiografi, alat vital <i>sign</i> monitor, dan alat stetoskop digital. Sedangkan pada perangkat operasional, terdiri atas: video kamera, <i>microphone</i> , layar monitor, pelantang/ <i>speaker</i> , pembaca	

NO	NAMA PRODUK/ INOVASI	DESKRIPSI	GAMBAR
		kartu penduduk elektronik, papan ketik, dan tetikus. Untuk metode akuisisi telemedis data, terdiri dari: mengakses data rekam medis pasien, mengecek ketersediaan dokter, mengambil data, mengonversi data, mengirim data, mengakses data, menyimpan dan akhirnya data diagnosa dikirim kembali ke pasien.	
2	Pakan ternak berbahan lokal dengan fortifikasi, antara lain mineral blok untuk suplemen pakan sapi	Invensi ini berkaitan dengan penyediaan suplemen mineral untuk sapi potong dalam bentuk mineral blok yang terbuat dari kulit kacang tanah dan proses pembuatannya. Tujuan invensi ini adalah menyediakan suplemen mineral untuk mengatasi kekurangan mineral yang banyak terjadi pada sapi potong di peternak. Invensi ini dibuat khusus dari kombinasi antara tepung kulit kacang tanah dengan garam, semen putih, dan bubuk mineral. Invensi ini juga menyediakan proses pembuatan mineral blok yang meliputi penyediaan formula, pembuatan mineral blok, dan pengeringan serta pengemasan mineral blok. Mineral blok ini sesuai digunakan sebagai suplemen mineral pada sapi potong di peternak yang hanya mengandalkan pakan berupa pakan hijauan.	
3	Metode Pengemudian Jarak Jauh Pada Kendaraan Listrik Otonom	Invensi ini berupa suatu metode pengemudian jarak jauh pada kendaraan listrik otonom, dengan perwujudan peralatan terdiri dari sistem kemudi berupa setir berbentuk bundar dan <i>throttle</i> maupun rem berupa pedal yang dilengkapi dengan kabel koneksi yang terhubung ke suatu media komputer atau laptop dan unit kendali berupa mikrokontroler yang terpisah satu sama lain dengan unit kendali berupa mikrokontroler dan antena penerima berbasis <i>Wi-Fi</i> yang terpasang pada kendaraan listrik, sehingga kendaraan listrik dapat dikendalikan dan dikemudikan secara jarak jauh pada area yang diinginkan.	
4	Sistem Pendukung Keputusan Kajian Awal Musim Jangka Madya (KAMAJAYA)	Sistem yang memberikan informasi prediksi secara dinamis akan suatu musim pada waktu dan wilayah yang ditentukan.	

NO	NAMA PRODUK/ INOVASI	DESKRIPSI	GAMBAR
5	Pengembangan Sistem Pemantauan Bergerak (<i>Mobile Monitoring System</i>) Kualitas Udara Perkotaan Berbasis <i>Citizen Science</i>	SI PUBER merupakan instrumen pemantauan polusi udara perkotaan secara spasial dan temporal berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT) yang tepat, cepat dan akurat, SI PUBER menggunakan perangkat IoT berbasis sensor, mikrokontroler unit (MCU), modul GSM (<i>Global System for Mobile Communications</i>), dan dilengkapi dengan GPS (<i>Global Positioning Systems</i>) sehingga akan menghasilkan data yang cepat, tepat, dan akurat secara menyeluruh, serta sensor orientasi 3D yang terintegrasi dalam sistem informasi berbasis web dan android.	

Sumber: Laporan Kinerja BRIN Tahun 2024

Indikator 2: Rasio Jumlah Periset per Sejuta Penduduk

Berdasarkan data Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) jumlah periset per sejuta penduduk di Indonesia masih sangat rendah yaitu berada pada angka 1.071 periset per sejuta penduduk, oleh karena itu BRIN menetapkan indikator jumlah periset per sejuta penduduk di dalam perjanjian kinerjanya. Indikator ini baru menjadi target BRIN pada tahun 2023 dan tahun 2024, sehingga pada tahun 2022 tidak ada data capaian. Pada Tahun 2023 capaian Rasio berada pada nilai 2.383,33 dengan target 2.000-2.580, maka capaian IK ini adalah 100%. Sedangkan di tahun 2024 dengan target rasio 2.580-2.880, tercapai 1.574 atau capaiannya hanya 61,01%. Capaian tahun 2023-2024 untuk indikator ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Capaian Rasio Jumlah Periset per Sejuta Penduduk pada tahun 2024 adalah 1.574 di mana hanya tercapai 61,01% dari target yang ditetapkan yaitu ambang bawah pada nilai 2.580. Penurunan capaian Rasio Jumlah Periset per Sejuta Penduduk ini didasari karena terjadi perubahan pada Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) BRIN pada tahun 2024, yaitu pembagi pada tahun ini adalah terhadap jumlah seluruh penduduk Indonesia, sedangkan pada capaian Laporan Kinerja BRIN tahun 2023 menggunakan pembagi jumlah penduduk Indonesia yang berada pada rentang usia produktif (Angkatan Kerja).

Tabel 7. Target dan Capaian Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk

Tahun	2022	2023	2024
Target	2.000 - 2.250	2.000 - 2.580	2.580 - 2.880
Capaian	-	2.383,33	1.574
Persentase Capaian	-	100	61,01

Indikator 3: Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah terhadap Anggaran Riset Pemerintah

Rasio anggaran riset non-pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah menjadi salah satu indikator dalam mengukur tingkat partisipasi dan kontribusi sektor non-pemerintah dalam ekosistem riset nasional. Melalui indikator ini dapat dilihat sejauh mana dunia usaha, industri, dan pemangku kepentingan lainnya berperan aktif dalam mendukung pembiayaan riset, sehingga tercipta keseimbangan dan keberlanjutan dalam pendanaan riset di luar alokasi anggaran pemerintah.

Anggaran riset pemerintah diperoleh dari anggaran riset yang ada di BRIN, Pemerintah Daerah, LPDP, dan Setditjen DIKTI Kemendikbud Ristek. Sedangkan anggaran riset non pemerintah merupakan anggaran yang bersumber dari pembiayaan sektor privat. Jumlah anggaran riset non pemerintah diperoleh dari hasil survei indikator iptek yang dilakukan oleh Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi. Indikator ini dijadikan target kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan cara perhitungan rasio. Berdasarkan Buku Indikator IPTEK anggaran riset di Indonesia dari berbagai sektor ditunjukkan oleh data dalam Tabel 8.

Tabel 8. Anggaran Riset Indonesia dari Berbagai Sektor

No	Sektor	Anggaran Riset	
		2023	2024
Anggaran Riset Pemerintah			
1	BRIN	6.355.164.560.000	5.176.786.171.552
2	Pemerintah Daerah	982.365.233.377	1.090.379.553.553
3	LPDP	247.241.383.909	344.651.885.400
4	Perguruan Tinggi	3.029.724.677.000	9.385.954.837.278
	Total	10.614.495.854.286	15.997.772.447.783
Anggaran Riset Non Pemerintah			
1	Bisnis	2.963.369.254.279	4.397.217.936.223

Pada tahun 2023 BRIN menetapkan target indikator rasio anggaran riset non pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah yaitu sebesar 0,20-0,30. Sedangkan pada tahun 2024 BRIN menetapkan target indikator rasio anggaran riset non pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah yaitu sebesar 0,30-0,35. Untuk menghitung rasio dana non pemerintah dengan anggaran pemerintah digunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio = \left(\frac{\text{Anggaran Riset Non Pemerintah}}{\text{Anggaran Riset Pemerintah}} \right) \times 100$$

Tabel 9. Target dan Capaian Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah terhadap Anggaran Riset Pemerintah

Tahun	2023	2024
Target	0,20 - 0,30	0,30 - 0,35
Capaian	0,279	0,274
Persentase Capaian	100	91,3

Rasio yang dicapai adalah sebesar 0,274 pada tahun 2024, meskipun secara rasio belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi secara nominal belanja dari sektor bisnis telah mengalami peningkatan sebesar 48,38% berdasarkan data pada Tabel 8. Hal tersebut diakibatkan dari berbagai faktor, diantaranya anggaran yang terbatas dengan biaya riset tinggi, prioritas bisnis yang lebih fokus pada keuntungan cepat dengan hasil jangka pendek, serta kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang manfaat riset. Berbagai hambatan seperti anggaran riset yang terbatas, tingginya biaya penelitian, serta rendahnya kepercayaan sektor bisnis terhadap manfaat riset jangka panjang membuat BRIN berinisiatif untuk mendorong sektor bisnis memanfaatkan fasilitas riset BRIN agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh ekosistem riset swasta.

Indikator 4: Rasio Dampak Sitasi BRIN terhadap Sitasi Global

Indikator ini ditetapkan pada tahun 2024 dengan target 0,75–0,87. Rasio dampak Sitasi atau *Field-Weighted Citation Impact* (FWCI) yang bersumber dari basis data *Scopus*. Berikut penjelasan penilaian rasionya:

1. Rasio = 1,00 menunjukkan bahwa publikasi entitas tersebut telah dikutip persis seperti yang diharapkan berdasarkan rata-rata global untuk publikasi serupa.
2. Rasio > 1,00 berarti bahwa publikasi entitas tersebut telah menerima lebih banyak sitiran daripada rata-rata global untuk publikasi serupa.
3. Rasio < 1,00 menunjukkan bahwa publikasi entitas tersebut telah menerima lebih sedikit sitiran daripada rata-rata global untuk publikasi serupa.

Pada tahun 2024, capaian BRIN dengan rasio 1,11 dari rentang target rasio 0,75-0,87 atau sebesar 127,58% dari total target. Pada akhir tahun 2024 per tanggal 31 Desember 2024, BRIN mencapai rasio *Field-Weighted Citation Impact* (FWCI) sebesar 1,11 di tahun 2024. Dengan demikian, FWCI sebesar 1,11 menunjukkan bahwa publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh peneliti atau institusi disitasi 11% lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata sitasi global untuk bidang yang sama.

Capaian sitasi BRIN menunjukkan peningkatan signifikan dalam *Field-Weighted Citation Impact* (FWCI) dari tahun 2022 hingga 2024, dengan skor meningkat menjadi 1,11 per tanggal 31 Desember 2024. Secara rinci nilai FWCI BRIN dari tahun ke tahun ditunjukkan pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Perbandingan Nilai Rasio Dampak Sitasi BRIN 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Target	-	-	0,75 - 0,87
Capaian	0,84	0,8	1,11
Persentase Capaian	-	-	127,58%

Indikator 5: Indeks Reformasi Birokrasi BRIN

Pada tahun 2024, capaian Indeks Reformasi Birokrasi BRIN sebesar 87,33 dari target 86 atau sebesar 101,55%. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi BRIN dari tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi BRIN

Tahun	2022	2023	2024
Target	83	85	86
Capaian	75,01	75,84	87,33
Persentase Capaian	90,37	89,21	101,55

Indikator 6: Opini atas Laporan Keuangan BRIN

Opini atas laporan keuangan BRIN konsisten mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2022 hingga tahun 2024, dengan capaian kinerja yang mencapai 100%. Ini menempatkan indikator Opini atas Laporan Keuangan BRIN dalam kategori tercapai. Capaian untuk indikator Opini atas Laporan Keuangan BRIN dari tahun 2022 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Target dan Capaian Opini atas Laporan Keuangan BRIN

Tahun	2022	2023	2024
Target	WTP	WTP	WTP
Capaian	WTP	WTP	WTP
Persentase Capaian	100	100	100

Opini WTP diberikan untuk menunjukkan kewajaran informasi pada laporan keuangan, namun dengan opini tersebut bukan berarti BRIN terbebas dari permasalahan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan BRIN pada tahun anggaran 2023 terdapat beberapa pokok permasalahan di antaranya:

1. Penerimaan dari kerja sama penelitian pada lima satuan kerja BRIN digunakan langsung, sehingga mengakibatkan kurang saji pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Selain itu terdapat ketidakjelasan klasifikasi penerimaan dana eksternal sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau hibah;
2. Kinerja pengelolaan anggaran Belanja Modal pada BRIN rendah yaitu sebesar 63,07% dari anggarannya, sehingga berpotensi dikenakan sanksi;
3. Pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin pada 8 (delapan) satuan kerja BRIN kurang memadai, antara lain aset tetap hasil pengadaan tahun anggaran 2023 belum digunakan sehingga berpotensi rusak dan hilang. Selain itu terdapat Aset Tetap yang akan dihapuskan masih tercatat dalam kondisi baik, sehingga nilai aset tetap peralatan dan mesin dalam laporan keuangan BRIN belum menggambarkan kondisi sebenarnya.

Berikut rekomendasi perbaikan, berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) supaya lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas penerimaan dan penggunaan dana kerja sama penelitian serta menyusun pedoman yang mengatur tentang penerimaan dan penggunaan dana eksternal melalui mekanisme APBN.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas realisasi Belanja Modal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
3. Kuasa Pengguna Barang (KPB) supaya lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta segera memanfaatkan Aset Tetap hasil pengadaan tahun berjalan. Memerintahkan petugas BMN untuk lebih cermat dalam melakukan penatausahaan BMN.

1.1.3 Infrastruktur Riset dan Inovasi Strategis

BRIN mengembangkan infrastruktur riset, mulai dari laboratorium hingga pusat data, untuk mendukung kegiatan iptek, teknologi terapan, keantariksaan, dan ketenaganukliran. Dengan pendekatan platform terbuka, infrastruktur tersebut memperkuat kolaborasi nasional dan internasional serta menjadi dasar pengembangan ekonomi berbasis riset dan inovasi. Pada periode RPJMN 2020–2024, BRIN telah menuntaskan pembangunan berbagai sarana dan prasarana iptek strategis. Infrastruktur riset dan inovasi yang telah dibangun pada periode tersebut, antara lain adalah:

1. Akselerator Elektron Energi Tinggi (AEET)
Terletak di KST GA Siwabessy, Pasar Jumat, Jakarta Selatan yang merupakan kawasan dengan fokus untuk layanan pemanfaatan teknologi nuklir berupa penyediaan fasilitas bagi industri sterilisasi baik pangan maupun alat kesehatan, penyediaan produk radiofarmaka, serta terapi medis berbasis iradiasi seperti terapi proton bagi penderita kanker. Pemanfaatan teknologi AEET mampu meningkatkan daya saing industri alat kesehatan dan pangan melalui pemanfaatan teknologi radiasi dalam melakukan sterilisasi.
2. Fasilitas *Cryo-Electron Microscopy*
Terletak di Laboratorium Genomic, KST Ir. Soekarno, Cibinong, Bogor, fasilitas ini merupakan satu-satunya fasilitas yang terlengkap di Asia Tenggara untuk mendukung akselerasi pengembangan obat dan vaksin dan memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi serangan pandemi penyakit infeksi.
3. Pusat Data Hayati dan Kekayaan Intelektual
Pusat Repositori Nasional di bidang Kekayaan Hayati (Kehati) mencakup infrastruktur dan konten informasi yang dibangun untuk mengatasi permasalahan pada pengembangan dan penelitian bidang kekayaan hayati di Indonesia seperti minimnya sumber kekayaan hayati yang telah dimanfaatkan (tidak sampai 5%) dan baru mengkonservasi 29% dari spesies tumbuhan Indonesia yang terancam kepunahan.
4. Bandung *Advanced Science and Creative Engineering Space* (BASICS)
BASICS adalah lingkungan ramah inovasi yang juga mendukung pengembangan industri kreatif melalui kegiatan riset dan inovasi, serta sebagai *hub* (jembatan) antara peneliti, akademisi dan industri dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia.
5. Laboratorium Integrasi Layanan Data dan Informasi Penginderaan Jauh
Pembangunan infrastruktur fasilitas gedung inkubasi dan laboratorium integrasi layanan data dan informasi penginderaan jauh merupakan bentuk akselerasi penyediaan infrastruktur untuk mendukung percepatan

pencapaian target penginderaan jauh pada Prioritas Nasional, Prioritas Riset Nasional, dan dukungan terhadap *Major Project* Nasional.

6. Observatorium Nasional Timau

Observatorium astronomi nasional yang dibangun di kaki Gunung Timau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dibangun di lahan perbukitan seluas 34 hektar pada ketinggian 1.347 meter di atas laut, observatorium ini dilengkapi teleskop utama berdiameter 3,8 meter—terbesar di Asia Tenggara dan salah satu dari tiga teleskop besar di belahan Bumi Selatan. Observatorium ini direncanakan untuk diresmikan pada Maret 2026.

7. Fasilitas *High Performance Computing* (HPC)

HPC terbesar di Indonesia yang memungkinkan analisis yang tidak mungkin dilakukan komputer biasa. Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan besar untuk repositori data simulasi iklim, data satelit dan data riset nasional lainnya. Fasilitas HPC dapat mempercepat proses riset inovasi karena simulasi produk riset dapat dilakukan secara simultan.

8. Fasilitas Riset Pembuatan Obat dan Vaksin

Satu-satunya fasilitas riset terlengkap nasional untuk produksi prototipe obat dan vaksin dalam satu Lokasi, yang terdiri dari *Biosafety Laboratory Level 3*, *Animal Biosafety Laboratory Level 3*, dan *Current Good Manufacturing Practice*. Fasilitas ini dapat mempercepat pengembangan obat dan vaksin, mengembangkan stok virus untuk uji preklinis riset dan industri farmasi, serta mempercepat transisi dari uji klinis ke produksi komersial.

9. Fasilitas Riset dan Uji Kekuatan Struktur

Satu-satunya fasilitas pengujian seluruh komponen kereta, bantalan kereta, pengujian dinamis struktur sipil dan bangunan di Indonesia, yang terletak di KST BJ Habibie, Serpong. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan daya saing industri perkeretaapian nasional, meningkatkan tingkat keselamatan publik dari produk sipil nasional, mempercepat sertifikasi dan implementasi teknologi konstruksi baru, dan menurunkan biaya dan waktu pengembangan proyek melalui verifikasi awal.

1.1.4 Aspirasi Masyarakat tentang BRIN

Aspirasi masyarakat menjadi landasan utama dalam penyusunan arah kebijakan dan pengembangan BRIN. Aspirasi tersebut mencerminkan harapan, kebutuhan, dan kepercayaan publik terhadap program riset dan inovasi yang berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Berbagai masukan yang terhimpun dari pemangku kepentingan menjadi pertimbangan strategis dalam merumuskan kebijakan, memperkuat layanan publik, dan meningkatkan relevansi serta daya guna hasil riset.

1. Kementerian/Lembaga

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020–2024, Sandiaga Uno, kegiatan riset dan inovasi yang dilaksanakan telah berperan penting dalam membantu pemerintah menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Melalui analisis pola perjalanan dan pengembangan pariwisata berkualitas di destinasi super prioritas seperti

Danau Toba dan Borobudur, kegiatan tersebut mampu mendukung penyusunan program yang tepat sasaran, bermanfaat, dan tepat waktu. Upaya ini memberikan kontribusi signifikan bagi kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kolaborasi BRIN dengan Badan Pangan Nasional juga menjadi contoh nyata pemenuhan kebutuhan barang publik di sektor pangan. Melalui pemanfaatan sumber daya genetik, penerapan teknologi pascapanen, dan peningkatan produksi padi berbasis riset, kemitraan ini memperkuat ekosistem pangan nasional, membangun cadangan pangan strategis, dan mendorong reformasi pertanian menuju keberlanjutan.

2. Pelaku Usaha dan Industri

Dari sisi pelaku UMKM, program Pendampingan Usaha Mikro Berbasis IPTEK (PUMI) telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan daya saing produk. Melalui pendampingan dan penelitian intensif, pelaku usaha seperti Bumi Omah Hensin berhasil meningkatkan masa simpan produk dari tiga bulan menjadi satu tahun pada suhu ruang, sehingga memenuhi persyaratan pasar ekspor. Hal ini menunjukkan peran BRIN dalam menyediakan layanan publik yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

3. Dunia Pendidikan dan Talenta Riset

Melalui program bantuan riset seperti BARISTA (Bantuan Riset bagi Talenta Riset dan Inovasi), BRIN membuka akses luas bagi mahasiswa dan peneliti muda untuk mengembangkan kapasitas riset. Pengalaman yang dibagikan oleh salah satu penerima manfaat, Zahwa Devarrah, menunjukkan bahwa bimbingan mentor dan kesempatan kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial tidak hanya memudahkan pengumpulan dan analisis data, tetapi juga memperkaya proses penyelesaian tugas akhir di bidang Teknik Industri.

4. Komunitas Akademik dan Peneliti Internasional

Program mobilitas periset, seperti *Visiting Researcher*, menjadi sarana strategis BRIN dalam memperkuat jejaring riset internasional. Menurut Edwin P. Wieringa, Profesor Filologi Indonesia di *Institute for Languages and Cultures of the Islamic World–University of Cologne*, program ini merealisasikan peran BRIN sebagai produsen pengetahuan, sekaligus membuka peluang kolaborasi riset di berbagai pusat riset yang dikelola BRIN.

Selain melalui interaksi langsung dengan pemangku kepentingan, aspirasi masyarakat juga dapat dihimpun dari media elektronik dan/atau metode penjangkaran aspirasi lainnya yang akuntabel. Informasi yang diperoleh dari sumber-sumber ini mencerminkan persepsi, ekspektasi, dan respons publik terhadap kinerja BRIN, sehingga dapat menjadi masukan strategis dalam perumusan kebijakan dan program kerja.

Pada November 2024, sentimen pemberitaan di media masa mayoritas menunjukkan *tone* positif. Hal ini didorong oleh berbagai pemberitaan terkait penganugerahan *Habibie Prize 2024* kepada lima ilmuwan, keberhasilan meraih *L'Oréal–UNESCO Women in Science Awards 2024*, serta pemberian apresiasi talenta dan inovasi di bidang antariksa dan dirgantara melalui *Nurtanio Award*. Khusus penghargaan *L'Oréal–UNESCO FWIS*, empat peneliti perempuan

Indonesia menerima apresiasi atas penelitian di bidang ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan ketangguhan bencana. Pencapaian ini menegaskan komitmen BRIN dalam memberdayakan peneliti perempuan sebagai penggerak inovasi sains dan teknologi nasional.

Memasuki awal tahun 2025, aspirasi publik yang terpantau melalui media menunjukkan dominasi sentimen netral. Hal ini berkaitan dengan pemberitaan beragam isu, mulai dari bencana alam, perkembangan politik, astronomi, anggaran, hingga SDM. Meski demikian, *tone* positif tetap muncul, salah satunya melalui pemberitaan mengenai kolaborasi BRIN dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dalam pengembangan teknologi radiasi nuklir untuk penanganan limbah plastik. Inovasi ini ditargetkan dapat dikomersialisasi pada tahun 2027, hal ini mencerminkan peran BRIN dalam memecahkan persoalan lingkungan melalui solusi teknologi yang aplikatif.

Aspirasi yang dihimpun melalui media elektronik dan metode penjangkauan lainnya menjadi sumber informasi penting untuk memahami persepsi publik secara luas, termasuk mengidentifikasi peluang penguatan citra, memperbaiki kinerja layanan publik, serta memastikan bahwa setiap program riset dan inovasi yang dijalankan selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pembangunan kualitas SDM merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 74,39 ini diraih melalui peningkatan akses pendidikan yang telah memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat, peningkatan penduduk yang menempuh pendidikan tinggi, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, dan penurunan kesenjangan akses pendidikan.

Dua aspek yang menjadi batas dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kapasitas ruang fiskal. Ruang fiskal Indonesia saat ini relatif terbatas di tengah upaya Indonesia untuk keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju. Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Indeks Modal Manusia (IMM) merefleksikan potensi kontribusi SDM terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan yang tersedia selama periode tumbuh kembang manusia. Dalam lima tahun ke depan, IMM ditargetkan meningkat dari 0,54 (2020) menjadi sasaran pembangunan nasional dengan target 0,56 (2025) dan 0,59 (2029).

Total Factor Productivity selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang tertinggal, terutama pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas

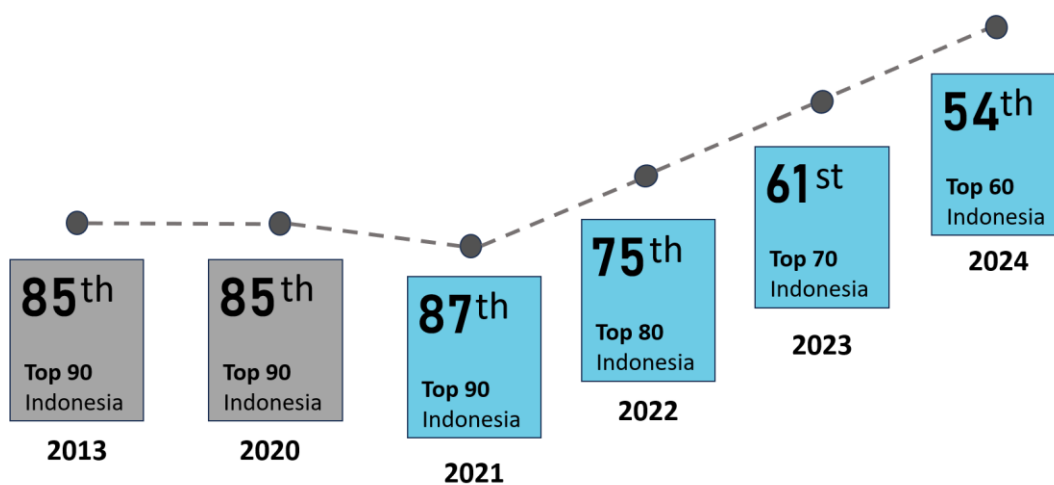
yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat.

Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan salah satu strategi besar transformasi ekonomi dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Di tengah tantangan global, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan riset dan inovasi, baik di kawasan Asia maupun dunia, khususnya dalam bidang kemaritiman, biodiversitas, teknologi material, serta kebencanaan dan mitigasi bencana. Meski Indonesia memiliki berbagai peluang strategis, kenyataannya, negara ini masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi anggaran penelitian dan pengembangan yang terbatas maupun kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana kondisi saat ini mempengaruhi daya saing Indonesia di kancah global, penting untuk mengevaluasi lebih rinci alokasi anggaran untuk riset, kesiapan SDM dalam mendukung riset dan inovasi, serta peran aktif BRIN dalam mendukung peringkat Indeks Inovasi Global Indonesia.

1.2.1 Indeks Inovasi Global (*Global Innovation Index*)

Indonesia mengakhiri periode 2020–2024 dengan pencapaian inovasi yang signifikan. Pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat 61 dalam Indeks Inovasi Global 2023, yang menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya besar untuk memperbaiki posisi tersebut. Kemudian, pada tahun 2024, Indonesia berhasil masuk dalam 60 besar dunia dalam pemeringkatan *Global Innovation Index* (GII) dengan menempati peringkat 54 dari 133 negara, menunjukkan adanya perbaikan yang cukup berarti dalam kinerja inovasi nasional.

Gambar 3. Tren Indeks Inovasi Global Indonesia



Global Innovation Index (GII) merupakan indikator penting yang mengukur kinerja inovasi suatu negara berdasarkan beberapa pilar, seperti *Institutions*, *Human Capital & Research*, *Infrastructure*, *Market Sophistication*, *Business Sophistication*, *Knowledge & Technology Outputs*, dan *Creative Outputs*. Sebagai lembaga riset dan inovasi nasional, BRIN memiliki peran strategis dalam meningkatkan peringkat GII Indonesia melalui berbagai pilar seperti *Institutions*, *Human Capital & Research*, *Infrastructure*, dan *Knowledge & Technology Outputs*.

Salah satu kontribusi utama BRIN adalah memperkuat pilar *Institutions* dengan menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi. BRIN memfasilitasi kolaborasi antar-lembaga riset, universitas, dan industri untuk

menghilangkan duplikasi riset dan memaksimalkan sumber daya. Selain itu, BRIN juga bekerja sama dengan pemerintah untuk menyederhanakan regulasi yang menghambat inovasi, seperti proses perizinan riset dan komersialisasi hasil penelitian, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan dana riset.

Di bidang *Infrastructure*, BRIN berperan dalam pengembangan infrastruktur riset dan teknologi yang memadai sebagai fondasi untuk mendukung aktivitas inovasi. BRIN membangun fasilitas riset berkelas dunia, seperti laboratorium nasional dan pusat riset, serta memastikan akses terbuka terhadap hasil riset dan data riset. Selain itu, BRIN juga mendukung penguatan infrastruktur digital, termasuk teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi riset kolaboratif dan pengembangan teknologi berbasis digital. Dalam pilar *Knowledge & Technology Outputs*, BRIN mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas output pengetahuan dan teknologi melalui pendanaan riset strategis, pelatihan bagi peneliti untuk mempublikasikan hasil riset di jurnal internasional, serta fasilitasi hilirisasi hasil penelitian melalui kerja sama dengan industri.

BRIN juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas *Human Capital & Research* dengan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi peneliti, merekrut dan mempertahankan talenta terbaik, serta menjalin kolaborasi internasional untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Di sisi lain, BRIN turut mendukung pilar *Creative Outputs* dengan mendorong inovasi di bidang kreatif, seperti seni, budaya, dan industri kreatif, melalui pemanfaatan teknologi mutakhir seperti *artificial intelligence* (AI). Dengan peran aktif BRIN dalam memperkuat berbagai pilar GII, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan peringkat GII secara signifikan, menjadi negara dengan ekonomi berbasis inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui inovasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia menunjukkan kemajuan yang positif di sektor-sektor yang mendukung kematangan pasar dan kualitas lembaga, tantangan terbesar terletak pada penguatan kapasitas riset, peningkatan kualitas SDM, serta memperkuat sektor bisnis agar lebih kompetitif dan berorientasi pada inovasi teknologi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi dalam Indeks Inovasi Global, berbagai tantangan struktural harus segera diatasi, salah satunya adalah pemenuhan indikator utama dalam *Global Innovation Index* (GII) yang hingga kini belum tercapai secara optimal.

Beberapa tantangan utama yang menghambat kemajuan ini meliputi proses registrasi kekayaan intelektual yang birokratis, kesulitan dalam mengakuisisi pengetahuan lokal, dan fenomena *brain drain* yang mengurangi potensi riset dalam negeri. Selain itu, pengelolaan infrastruktur riset yang belum optimal serta rendahnya komersialisasi produk riset menjadi hambatan besar dalam mendorong hilirisasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, BRIN sebagai lembaga strategis riset dan inovasi nasional, memiliki peran kunci dalam memperbaiki sistem pengelolaan riset, mempercepat hilirisasi hasil penelitian, serta menciptakan insentif yang lebih efektif untuk mempertahankan talenta riset dalam negeri. Upaya perbaikan yang lebih komprehensif diperlukan dalam hal regulasi kekayaan intelektual, pengelolaan infrastruktur riset yang efisien, dan penguatan sistem komersialisasi riset yang dapat mendukung sektor bisnis

berbasis inovasi dan teknologi. Tanpa langkah-langkah terstruktur dan terkoordinasi dalam area-area tersebut, Indonesia akan kesulitan untuk mencapai posisi yang lebih baik dalam GII.

Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi sebagai upaya mempercepat pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tabel 13 menyajikan indikator-indikator terkait Indeks Inovasi Global yang mendukung peningkatan kontribusi iptek dan inovasi.

Tabel 13. Matriks Program Prioritas Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Penguatan kapasitas iptek dan inovasi	Meningkatnya kualitas infrastruktur iptek & inovasi	Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dibangun	infrastruktur	8	1	10
Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	Meningkatnya peran BRIDA dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi	Jumlah BRIDA/ekosistem daerah yang beroperasi optimal	lembaga	-	2	15
	Meningkatnya peran <i>Science Techno Park</i> dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	Jumlah hub tematik yang dikembangkan di BRIN	lembaga	-	0	4
		Jumlah penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN	miliar rupiah	-	20	125
	Meningkatnya peran sektor (K/L) terkait dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di sektor-sektor prioritas	Jumlah hub iptekin di K/L yang mampu bidang prioritas yang dibentuk	lembaga	-	0	4

Sumber: Lampiran II RPJMN 2025-2029

1.2.2 Anggaran Penelitian dan Pengembangan

Salah satu permasalahan utama dalam upaya meningkatkan peringkat Indonesia dalam Indeks Inovasi Global adalah rendahnya anggaran penelitian dan pengembangan (R&D). Dalam periode 2016-2020, *Gross Expenditure on Research and Development* (GERD) Indonesia tetap berada di bawah 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah standar internasional yang

umumnya berkisar antara 1 persen hingga 3 persen untuk negara-negara maju. Singapura mempertahankan GERD di kisaran 2,1%, sementara anggaran Korea Selatan mencapai sekitar 4,2%, dan Jepang di kisaran 3,15%. Anggaran yang terbatas ini menghambat kemampuan lembaga riset dan universitas untuk melakukan penelitian yang berkualitas dan berkelanjutan.

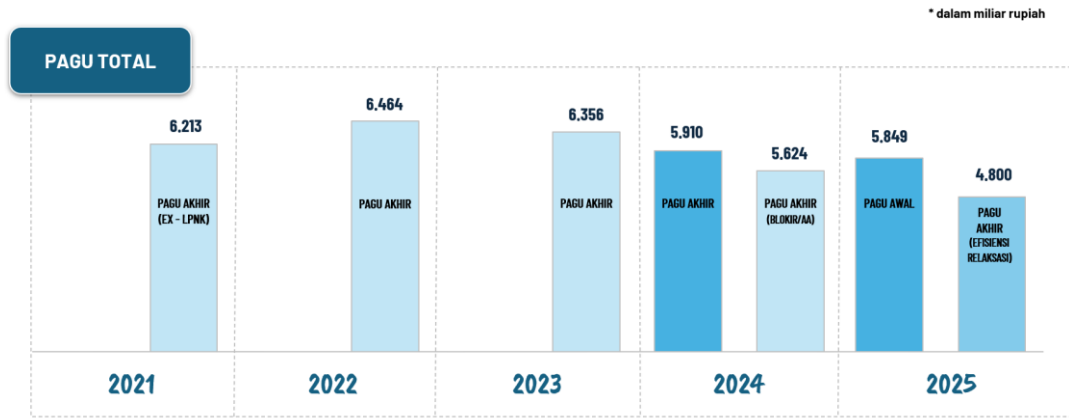
Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada anggaran pemerintah—di mana 85-90 persen dana R&D berasal dari sumber publik—menunjukkan bahwa peran sektor swasta dalam pengembangan dan pemanfaatan iptek masih sangat rendah. Hal ini menciptakan ekosistem inovasi yang kurang seimbang, di mana inovasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan dalam industri atau masyarakat.

Sebagai bagian dari visi menuju tahun 2045, Indonesia menargetkan pengeluaran untuk iptek dan inovasi mencapai 2,2 persen dari PDB. Untuk mencapai sasaran ini, perlu ada langkah-langkah strategis yang mengarah pada peningkatan investasi, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Hal ini telah diulas dalam arah kebijakan transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan anggaran iptekin nasional menuju komersialisasi oleh industri, melalui percepatan peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), termasuk pengembangan dana abadi untuk litbangjirap serta peningkatan proporsi kontribusi swasta, serta mendorong pengembangan industri menuju komersialisasi. Upaya ini diiringi juga dengan penguatan peran dan kapasitas pusat penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi atau lembaga iptek.

Dengan meningkatkan investasi di sektor swasta, pemerintah dapat menciptakan insentif yang menarik bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam riset. Selain itu, penguatan kolaborasi antara institusi pendidikan, lembaga riset, dan industri akan meningkatkan terfasilitasinya transfer teknologi dan pengetahuan. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan bergerak menuju pencapaian peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam Pembangunan Nasional.

Untuk itu, strategi kunci BRIN dalam mengintervensi peningkatan pengeluaran iptek dan inovasi adalah dengan (1) mengidentifikasi dan menghitung jumlah anggaran riset perusahaan *unicorn* di Indonesia; (2) merencanakan program pemberian insentif ke industri seperti *super tax deduction* dengan promosi yang lebih intens (sosialisasi berkala, *talkshow* yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, BRIN, dan industri) dan hibah kolaboratif kepada pelaku usaha dan industri yang berinvestasi dalam penelitian; (3) meningkatkan kerja sama riset/kolaborasi riset dengan berbagai skema; (4) optimalisasi *platform* Sebaris BRIN; dan (5) optimalisasi *science park*/fasilitas riset BRIN sebagai pusat difusi teknologi.

Gambar 4. Grafik Perbandingan Pagu BRIN Tahun Anggaran 2021-2025



Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran BRIN menunjukkan tren penurunan yang cukup menjadi perhatian. Pada tahun 2021, pagu anggaran pasca penyatuan LPNK mencapai Rp 6.213 miliar, kemudian naik tipis di 2022 menjadi Rp 6.484 miliar. Namun, sejak 2023, terjadi penurunan bertahap dengan anggaran turun menjadi Rp 6.356 miliar (2023), kemudian mengalami penurunan signifikan ke Rp 5.624 miliar (2024), dan 2025 hanya Rp 4.800 miliar setelah relaksasi pasca efisiensi.

Penurunan anggaran tersebut berpotensi menghambat perkembangan riset dan inovasi di Indonesia. Riset ilmiah memegang peran strategis dalam mendorong kemajuan teknologi, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan energi terbarukan, serta mendukung upaya mitigasi bencana. Keterbatasan anggaran dapat menimbulkan tantangan dalam pendanaan proyek-proyek riset strategis, peningkatan kapasitas peneliti, maupun pemeliharaan dan pengembangan fasilitas riset yang memadai. Apabila tren ini berlanjut, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan global yang semakin bergantung pada inovasi berbasis sains. Keterbatasan dukungan finansial juga berpotensi menurunkan daya tarik karir di bidang riset, yang pada gilirannya dapat memperburuk fenomena *brain drain* serta menghambat regenerasi peneliti. Oleh karena itu, alokasi anggaran riset perlu diprioritaskan kembali sebagai bentuk investasi jangka panjang yang strategis bagi kemajuan bangsa.

Meningkatkan peran iptek dan inovasi merupakan langkah strategis untuk mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dan kompetitif, sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Pada Tabel 14, dapat dilihat sejumlah indikator terkait anggaran penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk memperkuat kontribusi iptek dan inovasi.

Tabel 14. Matriks Program Prioritas Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional

Program Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam Pembangunan Nasional	Meningkatnya proporsi anggaran iptek dan inovasi terhadap PDB untuk mendukung pembangunan nasional	Pengeluaran iptek dan inovasi	persen PDB	0,28 (2020)	0,30	0,45
		Proporsi anggaran litbang non pemerintah / swasta	persen	12,5 (2020)	25	35

Sumber: Lampiran II RPJMN 2025-2029

1.2.3 Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Kapabilitas SDM Iptek

Kapasitas Iptek untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. SDM Iptek, berdasarkan Frascati Manual, setara dengan istilah *R&D Personnel* yang meliputi individu yang terlibat langsung dalam kegiatan riset, termasuk layanan penelitian. Rasio SDM Iptek di Indonesia tahun 2023 per satu juta penduduk adalah 1.596. Sedangkan untuk periset/peneliti, yang didefinisikan sebagai SDM Iptek yang melaksanakan kegiatan riset, kecuali kegiatan layanan riset, pada tahun 2023 Indonesia memiliki total 439.349 periset dengan periset di sektor pendidikan tinggi menempati porsi terbesar yaitu 96,62 persen dari total periset nasional. Rasio periset per satu juta penduduk hanya 1.574. Hal ini mencerminkan masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas SDM periset di Indonesia.

Tabel 15. Periset Nasional Tahun 2023

Sektor	Komponen	Jumlah	Persentase
Pemerintah	Pusat (BRIN)	7.911	1,96%
	Daerah	706	
		8.617	
Pendidikan Tinggi	Dosen	339.305	96,62%
	Mahasiswa S3 Terdaftar	85.176	
		424.481	
Badan Usaha/Industri		6.251	1,42%
Total Periset Nasional		439.349	100,00%

Sumber: Buku Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi, 2024

Setelah memperoleh gambaran umum mengenai kondisi riset dan inovasi di Indonesia, perlu dilakukan telaah lebih mendalam terhadap potensi dan permasalahan yang terdapat pada BRIN. Sebagai lembaga yang memegang peran strategis dalam pengelolaan riset dan inovasi nasional, BRIN diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pengembangan iptek yang berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BRIN memiliki capaian kinerja yang signifikan, dengan mayoritas indikator kinerja utama pada periode 2021–2024 melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencakup ribuan publikasi bereputasi, lisensi inovasi, serta berbagai hasil riset yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, BRIN menginisiasi skema pendanaan riset yang tidak semata-mata bergantung pada anggaran negara, tetapi juga memanfaatkan sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta, guna memastikan keberlanjutan program riset. Melalui dana abadi penelitian, BRIN menggagas Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) dengan skema inovatif yang mendorong penelitian relevan dan aplikatif. Pemanfaatan infrastruktur riset yang terbuka serta dukungan pengembangan talenta melalui program

magang, *postdoctoral*, dan kolaborasi lintas institusi telah menciptakan ekosistem riset yang dinamis.

Reputasi BRIN sebagai institusi riset berdaya saing internasional juga semakin kuat, ditandai dengan masuknya sembilan peneliti ke dalam daftar ilmuwan terbaik dunia (tercermin dari masuknya sembilan peneliti dalam *World's Top 2% Ranking Scientist*) serta peningkatan peringkat Indonesia dalam *Global Innovation Index* yang kini berada di posisi ke-54 dunia. Seluruh pencapaian ini mencerminkan komitmen BRIN untuk menghadirkan riset berkualitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam RPJMN, penguatan iptek dan inovasi menjadi strategi untuk mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing. Tabel 16 menampilkan indikator terkait peningkatan SDM iptek, mencakup aspek kuantitas, kualitas, dan kapabilitas, sebagai fondasi pengembangan iptek dan inovasi.

Tabel 16. Matriks Program Prioritas Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Penguatan kapasitas iptek dan inovasi	Meningkatnya kualitas SDM iptek dan inovasi	Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya	persen	-	25	50
		Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10	persen	0,12	0,15	0,35
		Jumlah kekayaan intelektual (KI) per 100 periset	KI per 100 periset	1,62	4,56	8,48
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	Terwujudnya talenta riset inovasi, seni budaya, dan olahraga yang memperoleh rekognisi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah SDM iptek yang mendapatkan rekognisi internasional	orang	95	99	116
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Terciptanya SDM Iptek yang memiliki kompetensi tingkat internasional	Rasio SDM Iptek per sejuta penduduk	SDM iptek per 1 juta penduduk	1.151 (2023)	1.265	1.721
		Jumlah SDM iptek masuk ke dalam pemeringkatan <i>World's Top 2% Scientists</i>	orang	95 (2023)	99	116

Sumber: Lampiran II RPJMN 2025-2029

BRIN masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu segera diatasi seperti hilirisasi hasil riset yang masih belum optimal, sehingga hanya segelintir pihak, seperti akademisi, yang dapat memanfaatkannya. Selain itu, kolaborasi dengan *stakeholder* juga perlu ditingkatkan agar hasil riset dapat berdampak lebih luas bagi UMKM, industri, dan masyarakat. Dari segi SDM, penggabungan 14.000 pegawai dari berbagai lembaga menghasilkan heterogenitas yang memerlukan waktu dan strategi adaptasi untuk mencapai ekosistem kerja yang stabil.

BRIN memiliki peluang strategis yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan riset dan inovasi nasional. Regulasi seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/ atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman mendukung pemberian royalti kepada peneliti sehingga dapat memotivasi mereka untuk menghasilkan karya inovatif. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif membuka jalan bagi komersialisasi hasil riset melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sehingga menjadikannya aset bernilai ekonomi tinggi yang menarik investasi. Dalam hal pendanaan, BRIN dapat memanfaatkan berbagai sumber, seperti Dana Abadi Riset, Dana Pendidikan, dan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta insentif *super tax deduction* yang memperkuat kolaborasi dengan industri. Di bidang infrastruktur, periode 2025–2029 merupakan peluang untuk membangun fasilitas riset kelas dunia dengan dukungan pendanaan kreatif, termasuk pinjaman dan hibah, serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional hadir menjadi landasan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang Iptek melalui ajang, portofolio, dan pengakuan internasional. Dengan peluang-peluang ini, BRIN dapat memperkuat perannya sebagai pusat riset yang mampu berkontribusi pada kemajuan Indonesia di tingkat global.

Selama periode 2021 hingga saat ini, BRIN menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat pengembangan riset dan inovasi di Indonesia. Pada sektor industri, tingkat pemanfaatan hasil riset masih relatif rendah, yang antara lain disebabkan oleh terbatasnya eksposur terhadap inovasi yang dihasilkan. Selain itu, persaingan global di bidang riset menjadi tantangan signifikan, mengingat negara-negara maju terus meningkatkan investasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila infrastruktur riset di Indonesia tidak segera diperkuat, posisi Indonesia dalam persaingan internasional berisiko melemah, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti teknologi, energi, dan kesehatan.

Di sisi lain, fenomena *brain drain* menjadi ancaman serius ditandai dengan banyaknya peneliti berbakat yang memilih berkarir di luar negeri akibat terbatasnya dukungan dan peluang riset di dalam negeri. Kurangnya tenaga peneliti baru dapat mengancam keberlanjutan regenerasi ilmuwan Indonesia, di mana banyak peneliti senior akan segera memasuki masa purna tugas tanpa adanya pengganti yang memadai. Kekurangan dalam kuantitas, kualitas, dan

kapabilitas SDM iptek berdampak langsung pada terhambatnya pelaksanaan proyek-proyek penelitian strategis, baik di BRIN maupun di perguruan tinggi, khususnya pada bidang-bidang prioritas seperti pangan, kesehatan, dan energi. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi, Indonesia berisiko semakin tertinggal dalam penguasaan teknologi kunci serta semakin bergantung pada negara lain untuk penyelesaian masalah-masalah nasional yang memerlukan solusi berbasis riset. Situasi tersebut menjadi tantangan signifikan dalam menjaga konsistensi, fokus, dan keberlanjutan program riset di masa mendatang.

Selanjutnya, tata kelola sentralistis BRIN masih menghadapi sejumlah keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Model sentralisasi terbukti berhasil mengonsolidasikan lebih dari 14.000 SDM iptek dari berbagai lembaga litbang ke dalam satu wadah, sehingga mengurangi duplikasi program dan memperkuat standarisasi mutu riset. Konsolidasi ini juga mendukung peningkatan paten *granted* yang mencapai 287 paten pada 2024, mendekati target 300, berkat fasilitasi satu pintu bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Namun, di sisi lain, sentralisasi memperlihatkan keterbatasan pada implementasi. Pada skema RIIM Ekspedisi tahun 2024, target 450 hari layar hanya terealisasi 130 hari dikarenakan keterlambatan administrasi dan keterbatasan kesiapan infrastruktur kapal riset Baruna Jaya. Selain itu, produktivitas publikasi dari ekspedisi juga timpang, di mana non-BRIN menghasilkan 30 publikasi, sementara BRIN hanya menghasilkan 8 publikasi. Data ini menunjukkan bahwa mekanisme sentralistis masih perlu diimbangi dengan fleksibilitas operasional, khususnya pada level organisasi riset dan mitra daerah.

Keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan riset juga masih terbatas. Rasio anggaran riset non-pemerintah terhadap pemerintah pada tahun 2024 baru mencapai 0,274, di bawah target 0,30–0,35. Kondisi ini menandakan bahwa tata kelola pendanaan BRIN masih didominasi oleh APBN dan belum sepenuhnya berhasil menarik partisipasi dunia usaha. Padahal, keterlibatan swasta sangat penting untuk memperkuat hilirisasi hasil riset, memperluas pemanfaatan inovasi, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Dengan melihat capaian dan tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi BRIN tidak hanya berorientasi pada *output*, tetapi juga menunjukkan dampak nyata terhadap reputasi global, ketahanan sektor strategis, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbatasan tata kelola sentralistis dan rendahnya partisipasi pendanaan swasta menjadi faktor penghambat optimalisasi capaian. Oleh karena itu, peningkatan anggaran BRIN menjadi krusial, bukan sekadar untuk memperbesar jumlah *output*, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola agar lebih adaptif, meningkatkan fleksibilitas operasional, memperluas kemitraan dengan sektor industri, serta menjamin keberlanjutan infrastruktur riset strategis. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, capaian positif BRIN berisiko stagnan, padahal potensinya sangat besar untuk mempercepat transformasi Indonesia menuju negara berbasis inovasi sesuai Visi Indonesia Emas 2045.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

2.1 Visi BRIN

Sebagai lembaga utama yang menangani riset dan inovasi di Indonesia, BRIN memiliki peran vital dalam mendukung agenda pembangunan nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing global pada peringatan satu abad kemerdekaan Indonesia di tahun 2045.

Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, menekankan pentingnya pembangunan nasional yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inovatif sebagai respons terhadap dinamika perubahan global. Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, BRIN mengemban amanat sebagai menjadi motor penggerak riset dan inovasi nasional, dengan fokus pada penguatan kedaulatan bangsa melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, serta penciptaan solusi inovatif yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.

Sejalan dengan semangat Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 maka visi BRIN untuk periode 2025-2029 adalah:

“Menjadi Penghela Utama dalam Penguatan Ekosistem Riset
dan Inovasi yang Berdaya Saing dan Berkualitas untuk
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi ini mencerminkan komitmen BRIN untuk membangun ekosistem riset yang terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada hasil nyata, sehingga kegiatan riset dan inovasi tidak berhenti pada keluaran semata, tetapi mampu melahirkan solusi inovatif yang berdampak luas bagi masyarakat. Melalui penguasaan teknologi strategis, penguatan talenta unggul, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dan internasional, BRIN bertekad memperkuat kedaulatan bangsa. Arah kebijakan tersebut menempatkan riset dan inovasi sebagai penggerak utama pembangunan, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menghantarkan Indonesia menuju gerbang Indonesia Emas 2045 yang maju dan berdaya saing tinggi.

2.2 Misi BRIN

BRIN memegang peran kunci dalam mengarahkan masa depan bangsa menuju Indonesia yang berdaya saing tinggi, mandiri dalam teknologi, dan tangguh menghadapi tantangan global. Pada periode 2025–2029, BRIN menetapkan tiga misi utama, yaitu:

1. Memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional,
2. Meningkatkan kontribusi riset dan inovasi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dan
3. Memperkuat tata kelola yang berkualitas dalam penyelenggaraan riset dan inovasi.

Ketiga misi ini selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana diarahkan Presiden Republik Indonesia, yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, percepatan transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, peningkatan kualitas SDM, serta pembentukan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Misi pertama difokuskan pada konsolidasi riset nasional secara menyeluruh untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional. Secara horizontal, BRIN mendorong sinergi lintas kementerian/lembaga dan sektor industri; secara vertikal, BRIN memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satu instrumen utama dalam misi ini adalah pengembangan Rumah Inovasi Indonesia (RII) sebagai pusat kolaborasi antara inovator, industri, dan penyandang dana, baik di tingkat pusat maupun daerah. RII dirancang untuk mentransformasi hasil riset menjadi kedaulatan ekonomi berbasis inovasi yang berdaya saing. Sebagai etalase nasional dan titik simpul jejaring inovasi, RII berfungsi sekaligus sebagai layanan satu pintu bagi seluruh kebutuhan inovasi. RII mengoordinasikan peran dan potensi Kawasan Sains dan Teknologi (KST) serta berbagai hub inovasi di BRIN, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga tercipta ekosistem inovasi yang terintegrasi. Dengan posisinya sebagai simpul integrasi antara riset, inovasi, dan pemanfaatannya, RII berperan strategis dalam mendorong hilirisasi dan komersialisasi hasil riset menuju terwujudnya *innovation-based economy* yang tangguh dan berkelanjutan. Misi kedua difokuskan untuk memastikan kontribusi nyata riset dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8% pada tahun 2029. Dalam konteks ini, BRIN mengembangkan tiga jalur strategis, yaitu: (1) mendorong pemanfaatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing UMKM; (2) mendorong peningkatan kegiatan riset dan inovasi oleh industri dan sektor swasta di Indonesia; dan (3) memfasilitasi *co-development* teknologi maju dunia untuk mempercepat proses alih teknologi. Dengan pendekatan tersebut, BRIN menempatkan diri sebagai penghela utama yang tidak hanya memperkuat fondasi riset dan inovasi, tetapi juga memastikan bahwa riset dan inovasi hadir dan berdampak nyata bagi kemajuan bangsa. Sebagai bagian integral dari strategi hilirisasi, BRIN mengembangkan *BRIN Innovation App*, sebuah platform digital yang terintegrasi dengan Rumah Inovasi Indonesia (RII). Platform tersebut dirancang untuk menjadi sarana utama dalam memperkenalkan, memfasilitasi, dan mempercepat adopsi hasil riset oleh masyarakat, sekaligus memperkuat keterhubungan antara ekosistem riset dan kebutuhan pembangunan nasional. Misi ketiga difokuskan pada komitmen BRIN untuk membangun sistem tata kelola riset yang transparan, akuntabel, dan adaptif, serta memperluas jejaring kerja sama baik di tingkat nasional maupun internasional di bidang sains, teknologi dan inovasi.

2.3 Tujuan BRIN

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka tugas BRIN adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, visi, dan misi BRIN menjadi landasan strategis dalam perumusan arah pembangunan riset dan inovasi nasional yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta memastikan pelaksanaan tugas secara terarah dan terukur, BRIN menetapkan tujuan strategis dan indikator tujuan untuk periode 2025–2029 sebagai berikut:

Tujuan 1. Terwujudnya ekosistem riset inovasi yang berdaya saing global, dengan indikator tujuan:

- a. Peringkat Indeks Inovasi Global
- b. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (persen PDB)

Tujuan 2. Terwujudnya peningkatan kontribusi riset dan inovasi dalam pembangunan nasional, dengan indikator tujuan:

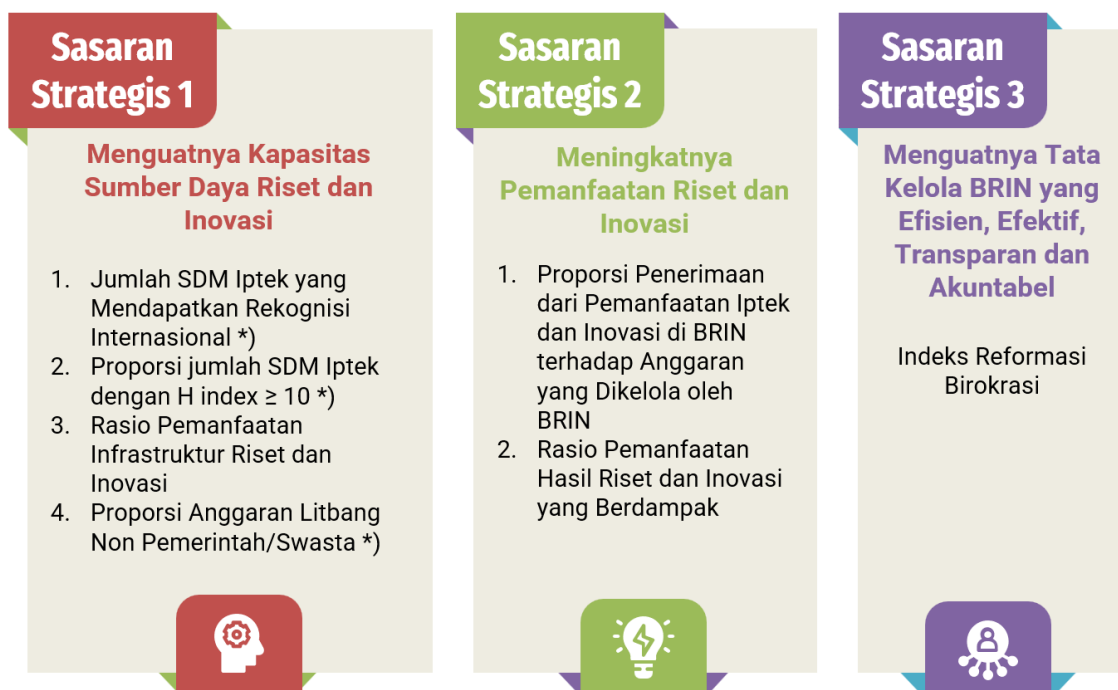
- a. Pertumbuhan Penerimaan atas Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Tujuan 3. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas dalam penyelenggaraan riset dan inovasi, dengan indikator tujuan:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi

2.4 Sasaran Strategis BRIN

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, BRIN menyusun sasaran strategis sebagai arah kebijakan yang lebih operasional dan terukur. Adapun BRIN menetapkan tiga sasaran strategis sebagai berikut:



Pencapaian dan kesuksesan Sasaran Strategis K/L akan mendukung pencapaian prioritas Presiden. Untuk meminimalkan risiko dan menghindari kegagalan dalam mencapai sasaran ini, telah dirancang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) untuk ketiga sasaran strategis di BRIN. MRPN adalah langkah antisipatif konkret untuk mengawal pencapaian prioritas Presiden. Di level organisasi, MRPN Organisasi bertujuan untuk mengawal Sasaran Organisasi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Organisasi.

Indikasi Risiko, Indikasi Perlakuan Risiko, dan Indikasi PJ Perlakuan Risiko untuk 3 (tiga) Sasaran Strategis BRIN dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) BRIN

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan (Mitigasi) Risiko	PJ
SS1. Menguatnya Kapasitas Sumber Daya Riset dan Inovasi	1.1. Jumlah SDM Iptek yang Mendapatkan Rekognisi Internasional	<p>Partisipasi SDM Iptek dalam berbagai aktivitas ilmiah global masih rendah yang disebabkan oleh:</p> <p>1) terbatasnya jumlah SDM Iptek berkualifikasi S3 yang mampu berkolaborasi riset dengan lembaga riset global; dan</p> <p>2) terbatasnya kemampuan diplomasi ilmu pengetahuan pada organisasi ilmiah internasional.</p> <p>Sehingga berdampak pada rendahnya daya saing SDM Iptek Nasional di tingkat global dan menurunnya pengaruh Indonesia dalam pengambilan keputusan global, serta semakin terbatasnya akses jaringan riset strategis.</p>	<p>Menynergikan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan SDM Iptek berkualifikasi S3 dengan platform pendanaan riset</p> <hr/> <p>Meningkatkan aktivitas mobilitas periset ke lembaga riset, perguruan tinggi, maupun industri</p> <hr/> <p>Meningkatkan partisipasi BRIN dalam organisasi internasional dan berinisiatif mengambil peran dan posisi strategis dalam aktivitas ilmiah global</p> <hr/> <p>Meningkatkan jejaring kerja sama riset dengan lembaga riset, institusi pendidikan, dan industri di level nasional dan global</p> <hr/> <p>Meningkatkan profesionalitas SDM Iptek melalui pembinaan karir fungsional SDM Iptek dan sertifikasi profesi di bidang riset dan inovasi, serta kompetensi diplomasi ilmu pengetahuan SDM Iptek</p>	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek
	1.2. Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H index ≥ 10	<p>Masih rendahnya produktivitas periset dalam menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas tinggi yang disebabkan oleh:</p>	<p>Memperkuat <i>science diplomacy</i> dalam kerja sama <i>Science, Technology, and Innovation (STI)</i>, baik itu secara bilateral maupun multilateral untuk mengembangkan,</p>	Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi

		<p>1) masih minimnya kolaborasi riset di tingkat regional maupun global; dan</p> <p>2) program dan kebijakan dalam rangka peningkatan sitasi dan kualitas publikasi belum terintegrasi secara optimal.</p> <p>Sehingga berdampak pada rendahnya proporsi publikasi pada jurnal bereputasi tinggi dan minimnya sitasi yang diperoleh.</p>	<p>mempromosikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan platform kolaborasi riset.</p>	
			<p>Mengoptimalkan mobilitas periset melalui penempatan periset pascadoktoral dan periset tamu sebagai kolaborator untuk menghasilkan publikasi ilmiah yang lebih berkualitas</p>	<p>Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek</p>
			<p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi global, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memfasilitasi akses kolaborasi riset internasional melalui MoU dan <i>joint research</i>. 2) Menyelenggarakan pelatihan <i>scientific writing</i> dan manajemen sitasi. 3) Menyediakan dukungan pendanaan riset berbasis kompetisi yang mendorong publikasi bereputasi. 4) Memperluas akses ke <i>database jurnal internasional dan open access repository</i>. 	<p>Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi</p>
			<p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas Naskah Kebijakan / Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dari Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkuat mekanisme <i>stakeholder engagement</i> sejak awal proses perumusan kebijakan. 	<p>Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; dan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah</p>

			<p>2) Menyusun naskah kebijakan yang lebih aplikatif, berbasis bukti, dan sesuai kebutuhan pengguna.</p> <p>3) Menyesuaikan jadwal penyusunan rekomendasi kebijakan dengan siklus perencanaan pembangunan nasional</p> <p>4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam penulisan <i>policy brief</i>, analisis kebijakan, dan komunikasi kebijakan.</p> <p>5) Memperluas saluran diseminasi melalui seminar, forum lintas sektor, dan publikasi strategis.</p> <p>6) Melakukan <i>monitoring</i> pemanfaatan naskah kebijakan dan tindak lanjut</p>	
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas Naskah Kebijakan / Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dari Kegiatan Perumusan Kebijakan Riset dan Inovasi dan juga Kegiatan Perumusan Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas Naskah Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dari Kegiatan Perumusan Kebijakan, Fasilitasi dan Pemantauan, serta Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
	1.3. Rasio Pemanfaatan Infrastruktur Riset dan Inovasi	Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur bersama (<i>sharing</i>)	Penyederhanaan Regulasi: Merumuskan regulasi yang lebih fleksibel dan prosedur yang lebih	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi

		<p><i>facility</i>) yang disebabkan oleh: 1) tata kelola dan regulasi pemanfaatan belum optimal; 2) platform digital belum berorientasi pada pengguna global/internasional; 3) kurangnya promosi dan sosialisasi; 4) kolaborasi lintas institusi, industri, dan internasional belum optimal; dan 5) kurangnya SDM yang terampil dalam mengoperasikan dan mengelola infrastruktur riset dan inovasi yang kompleks.</p> <p>Sehingga berdampak terhadap infrastruktur tidak dapat dioperasikan secara maksimal, hasil riset kurang berkualitas, dan menurunnya daya saing institusi.</p>	<p>sederhana untuk akses fasilitas bersama.</p> <p>Pengembangan Platform Digital: Membangun platform <i>online</i> terpusat untuk manajemen fasilitas bersama, termasuk penjadwalan, pembayaran, dan pelacakan penggunaan.</p> <p>Skema Biaya Fleksibel: Menerapkan skema biaya yang berjenjang (misalnya, diskon untuk kolaborasi) dan memberikan insentif bagi pusat riset yang aktif berbagi fasilitas.</p> <p>Peningkatan Promosi: Secara aktif mempromosikan keberadaan dan manfaat fasilitas bersama melalui <i>workshop</i>, seminar, dan media komunikasi</p> <p>Peningkatan kerja sama dengan universitas, industri, dan lembaga riset baik dalam dan luar negeri untuk pemanfaatan bersama.</p> <p>Penguatan SDM pengelola infrastruktur melalui pelatihan teknisi/operator.</p>	
	<p>1.4. Proporsi Anggaran Litbang Non Pemerintah/Swasta</p>	<p>Masih rendahnya kontribusi swasta dalam pendanaan litbang yang disebabkan oleh Insentif fiskal kurang menarik,</p>	<p>Memberikan insentif pajak lebih kuat kepada swasta yang berinvestasi pada kegiatan riset dan inovasi (<i>Super Tax Deduction</i>)</p>	<p>Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi</p>

		<p>skema <i>co-funding</i> belum optimal, dan kualitas riset kurang menarik bagi industri, sehingga dampaknya dapat menghambat daya saing dan inovasi nasional.</p>	<p>Menciptakan dana pendamping (<i>Matching fund</i>) pihak eksternal di bidang SDM Iptek serta di bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi</p>	<p>Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek dan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi</p>
			<p>Menciptakan dana pendamping (<i>matching fund</i>) pihak eksternal di bidang SDM Iptek serta di bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi</p>	<p>Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek dan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi</p>
			<p>Meningkatkan kerja sama di bidang kebijakan pembangunan: 1) Mengembangkan strategi <i>fundraising</i> dan diplomasi pendanaan untuk menarik mitra eksternal. 2) Memperluas jejaring kerja sama dengan lembaga internasional, donor, serta sektor swasta. 3) Meningkatkan kualitas proposal kerja sama agar lebih sesuai dengan kebutuhan mitra. 4) Menyusun regulasi atau mekanisme insentif untuk mendorong partisipasi pendanaan eksternal. 5) Menyelaraskan program kebijakan pembangunan dengan prioritas mitra potensial. 6) Membentuk unit khusus fasilitasi kerja sama dan manajemen pendanaan eksternal.</p>	<p>Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan</p>
			<p>Meningkatkan kerja sama di bidang kebijakan riset dan inovasi</p>	<p>Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi</p>

			Meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur riset dan inovasi	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
			Meningkatkan kapasitas SDM Iptek dalam hilirisasi dan paten.	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek dan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
SS 2. Meningkatkan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	2.1. Proporsi penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN terhadap anggaran yang dikelola oleh BRIN	<p>Rendahnya penerimaan anggaran yang bersumber dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi 2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam memfasilitasi dan negosiasi kerja sama pemanfaatan hasil riset dengan pengguna. 3) Hasil riset dan inovasi belum dirancang dengan mengacu pada kesiapterapan dan tingkat kesiapan teknologi. <p>Sehingga berdampak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rendahnya kontribusi penerimaan non-APBN terhadap anggaran yang dikelola oleh BRIN. 	Mengidentifikasi dan mengelompokkan hasil riset yang siap dimanfaatkan serta hasil riset yang memerlukan tahapan pengembangan lebih lanjut untuk mendukung pemanfaatan oleh pengguna.	Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM melalui pelatihan pengelolaan kekayaan intelektual, penyusunan materi promosi teknologi, serta peningkatan kemampuan fasilitasi dan negosiasi kerja sama pemanfaatan hasil riset dengan pengguna.	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek
			Meningkatkan diseminasi, promosi, dan komunikasi hasil riset dan inovasi kepada pemangku kepentingan melalui berbagai media dan forum strategis, serta meningkatkan kolaborasi kemitraan strategis dengan industri, pemerintah, dan pengguna untuk meningkatkan pemahaman serta	Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi

		<p>2) Tingginya ketergantungan pendanaan BRIN terhadap APBN.</p> <p>3) Terbatasnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi oleh pengguna, sehingga nilai tambah ekonomi dan sosial yang dihasilkan belum optimal.</p>	adopsi hasil riset dan inovasi.	
	2.2. Rasio Pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang berdampak	<p>Masih rendahnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha/industri. Hal ini disebabkan oleh:</p> <p>1) Belum tersedianya data yang komprehensif, sistem pelacakan, dokumentasi, dan diseminasi yang terintegrasi untuk</p>	<p>Penguatan sistem data, pelacakan, dokumentasi, dan diseminasi dampak hasil riset dan inovasi secara terintegrasi, serta pemanfaatannya sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan</p> <p>Mengarahkan perencanaan dan pendanaan riset dan inovasi berbasis <i>outcome</i> dan <i>impact</i>, selaras dengan kebutuhan pengguna dan prioritas pembangunan.</p>	Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi

		<p>mengukur dan menyajikan bukti dampak lanjutan (<i>evidence-based impact</i>) dari hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh pengguna.</p> <p>2) Pemanfaatan hasil riset dan inovasi belum secara sistematis diarahkan pada penciptaan dampak terukur, melainkan masih berfokus pada output dan luaran administratif.</p> <p>3) Belum terbangunnya keterlibatan end user secara sistematis dan berkelanjutan dalam seluruh siklus riset dan inovasi</p> <p>Sehingga mengakibatkan:</p> <p>1) Lemahnya bukti empirik (<i>evidence-based impact</i>) atas pemanfaatan hasil riset dan inovasi, sehingga kontribusi nyata riset terhadap pembangunan sulit dibuktikan, dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan,</p>	<p>Penguatan keterlibatan <i>end user</i> secara sistematis dalam seluruh siklus riset dan inovasi guna memastikan keselarasan dengan kebutuhan nyata serta penciptaan dampak</p>	
--	--	---	---	--

		<p>serta dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan riset ke depan.</p> <p>2) Pemanfaatan riset cenderung bersifat jangka pendek, tidak menghasilkan perubahan substantif bagi pengguna.</p> <p>3) Terjadinya kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan nyata pengguna, rendahnya tingkat adopsi dan keberlanjutan pemanfaatan, serta terbatasnya penciptaan dampak yang relevan, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.</p>		
<p>SS 3. Menguatnya Tata Kelola BRIN yang Efisien, Efektif, Transparan, dan Akuntabel</p>	<p>3.1. Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BRIN belum selaras dengan kebijakan RB Nasional, hal ini disebabkan oleh:</p> <p>1) layanan publik BRIN yang tidak berdampak langsung ke masyarakat</p>	<p>Meningkatkan kualitas layanan publik BRIN dengan mempercepat proses hilirisasi hasil riset dan menambahkan fitur umpan balik dari pengguna layanan sebagai bagian dari perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik</p>	<p>Sekretariat Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Data dan Informasi 2. Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariaan 3. Biro Perencanaan

		<p>sehingga tidak dapat langsung dirasakan/bermanfaat untuk masyarakat, hal ini mengurangi penilaian Indeks RB BRIN;</p> <p>2) perencanaan kinerja belum optimal;</p> <p>3) pohon kinerja masih sebatas menerjemahkan kondisi eksisting dan belum mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja;</p> <p>4) kurang memperhatikan target atas Kegiatan Utama terhadap target Reformasi Birokrasi nasional sehingga Indikator <i>Output</i> atas Rencana Aksi kurang relevan dan tidak cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan;</p> <p>5) kurangnya koordinasi dengan unsur <i>pentahelix</i> lainnya untuk memastikan penetapan sasaran dapat menjawab permasalahan yang diselesaikan terkait dengan program Reformasi Birokrasi Tematik BRIN;</p> <p>6) kurang memperhatikan kerangka logis penyusunan rencana aksi yang</p>	<p>Memastikan kembali penetapan kinerja BRIN yang SMART dan berorientasi pada dampak / <i>outcome</i> terutama di level Eselon I</p> <hr/> <p>Menyempurnakan pohon kinerja dengan cara memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan <i>Critical Success Factor</i> (CSF) yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar unit kerja dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dapat terbangun secara cukup baik</p> <hr/> <p>Memastikan kembali dalam penyusunan rencana aksi untuk menyelaraskan target kegiatan utama dengan target reformasi birokrasi nasional sehingga indikator keluaran atas rencana aksi relevan dan cukup menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan</p> <hr/> <p>Menyempurnakan rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi yang nyata dengan unsur <i>pentahelix</i> lainnya</p> <hr/> <p>Memastikan rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB tematik</p>	<p>dan Keuangan</p> <p>4. Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan</p> <p>5. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia</p> <p>6. Biro Hukum dan Kerja Sama</p>
--	--	---	--	--

		mendukung ketercapaian indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Tematik; dan 7) kurangnya kapabilitas APIP terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga berdampak terhadap nilai Indeks Reformasi Birokrasi tidak maksimal.	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh APIP mulai aspek pemenuhan sampai dengan aspek pemanfaatan pada setiap komponen evaluasi	Inspektorat Utama c.q Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III
--	--	--	--	--

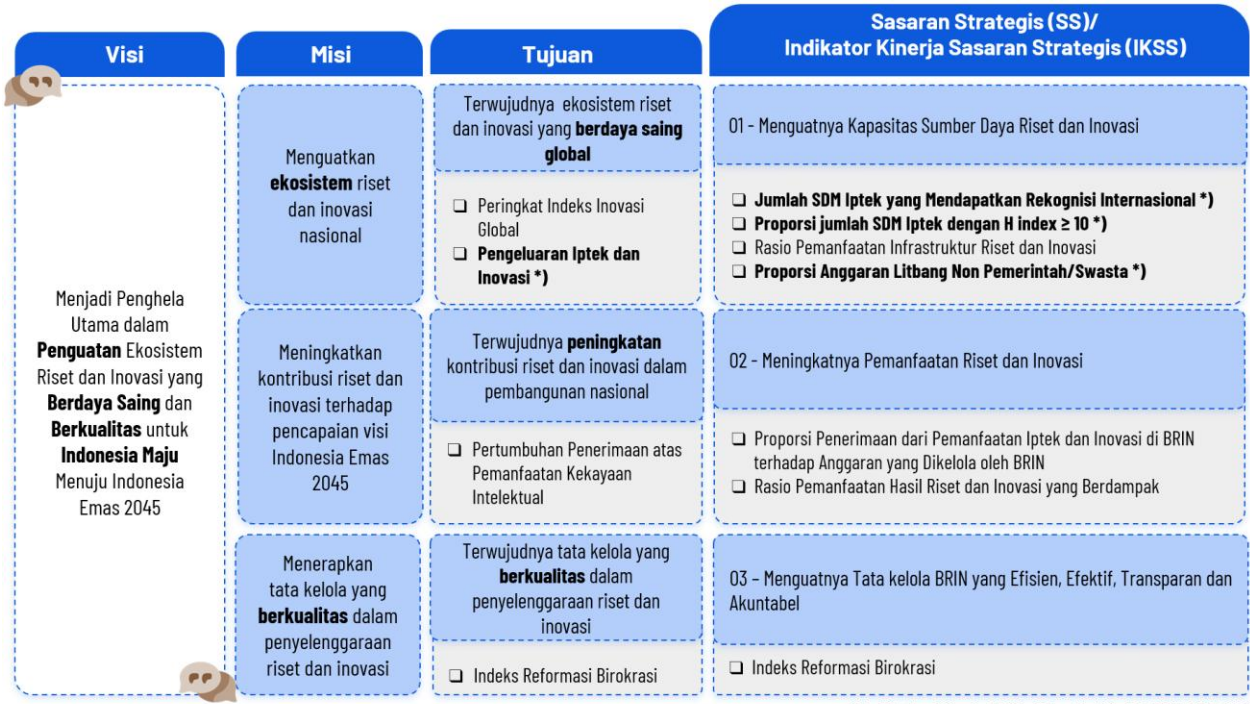
Seluruh Indikator Kinerja BRIN merujuk pada Visi, Misi Presiden, dan RPJMN 2025-2029, serta Matriks Penugasan Kinerja Kementerian/Lembaga. Sebagaimana tercantum pada Matriks Penugasan Kinerja Kementerian/Lembaga, BRIN memiliki 18 (delapan belas) indikator yang dimasukkan ke dalam Rencana Strategis BRIN dan disesuaikan kembali berdasarkan konteks serta level indikatornya. Indikator Kinerja yang dimaksud yaitu sebagai berikut, dengan definisi operasional untuk indikator-indikator tersebut dapat merujuk pada Sublampiran 4:

1. Pengeluaran iptek dan inovasi
2. Proporsi anggaran litbang non pemerintah/swasta
3. Jumlah SDM iptek yang mendapatkan rekognisi internasional
4. Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati
5. Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi
6. Pusat inovasi berbasis maritim
7. Proporsi SDM iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya
8. Proporsi jumlah SDM iptek dengan $H\ index \geq 10$
9. Jumlah kekayaan intelektual (KI) per 100 periset
10. Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dibangun
11. Jumlah BRIDA/ekosistem daerah yang beroperasi optimal
12. Jumlah hub tematik yang dikembangkan di BRIN
13. Jumlah penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN
14. Jumlah hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk
15. Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat pada bidang-bidang prioritas
16. Jumlah kerja sama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan industri/badan usaha pada bidang-bidang prioritas
17. Rasio SDM iptek per satu juta penduduk
18. Jumlah SDM iptek masuk ke dalam pemeringkatan *World's Top 2% Scientists*

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan BRIN hingga tahun 2029, diperlukan indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan pencapaian

target organisasi. Gambar 5 menyajikan infografis mengenai hubungan hierarkis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BRIN.

Gambar 5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BRIN



*) Indikator Kinerja BRIN dalam Matriks RPJMN 2025-2029

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, visi Indonesia Emas 2045 merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan dan melakukan analisa terhadap potensi perubahan pesat yang akan terjadi dalam berbagai bidang yang meliputi perubahan pada demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Nasional, 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi Iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan

- Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
 8. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2025-2029



Mengacu pada RPJPN 2025-2045 sebagai pedoman pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pembangunan Tahap 1 (2025-2029) mengusung tema Penguatan Transformasi. Salah satu fokus agenda pembangunan pada tahap ini adalah Transformasi Ekonomi, yang menitikberatkan pada hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, terdapat 20 upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*) yang salah satunya adalah upaya peningkatan anggaran iptekin nasional menuju komersialisasi oleh industri, masih merupakan bagian dari transformasi ekonomi yang difokuskan pada perwujudan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi dan poros maritim dunia melalui semakin besarnya SDM dan inovasi Indonesia yang berdaya saing global yang bertujuan untuk membawa Indonesia keluar dari *middle income trap*.

Pembangunan nasional didorong oleh kontribusi iptek dan inovasi melalui penguatan ekosistem riset hingga komersialisasi, dengan fokus utama meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas iptekin, penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan tata kelola, pengembangan infrastruktur pendukung, serta memperluas kolaborasi dengan industri. Selain itu, peran *hub* iptek dan inovasi di tingkat daerah dan sektoral akan diperkuat guna mempercepat adopsi teknologi, kolaborasi multi-pihak, dan kebijakan berbasis bukti.

Gambar 6. Prioritas Nasional



BRIN berperan penting dalam mendukung pelaksanaan prioritas nasional ke-2 sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, khususnya dalam aspek kemandirian bangsa. Melalui riset dan inovasi, BRIN menghadirkan solusi ilmiah untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan, mengembangkan energi terbarukan yang berkelanjutan, serta mengelola sumber daya air secara efisien. Selain itu, BRIN mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi berbasis teknologi yang mampu membuka peluang usaha baru dan meningkatkan daya saing. Di bidang ekonomi hijau dan ekonomi biru, BRIN berkontribusi dengan riset yang mendorong praktik pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pemanfaatan potensi sumber daya laut secara optimal. Dengan peran tersebut, BRIN menjadi katalis penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang inklusif serta berkelanjutan.

BRIN berperan penting dalam mendukung prioritas pembangunan nasional ke-3 melalui pengembangan infrastruktur riset yang menjadi dasar bagi peningkatan kualitas lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, serta agro-maritim di sentra produksi yang melibatkan koperasi. Infrastruktur riset yang dikelola oleh BRIN, meliputi kebun raya untuk penelitian keanekaragaman hayati, laboratorium berteknologi maju untuk pengembangan sains dan teknologi, serta kapal riset untuk eksplorasi sumber daya laut, berperan sebagai pusat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha maupun peneliti untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan di berbagai bidang strategis. Selain itu, BRIN juga mendorong terciptanya teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk di berbagai sektor. Melalui pendekatan riset yang terintegrasi dan kolaboratif, BRIN berkontribusi dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan dan industri kreatif. Peran tersebut menempatkan BRIN sebagai katalis dalam peningkatan daya saing nasional sekaligus mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam mendukung prioritas pembangunan nasional ke-4, BRIN memainkan peran penting dalam pembangunan SDM, sains, dan teknologi dengan menekankan pada peningkatan pendidikan dan kapasitas periset nasional. Upaya ini diperkuat dengan pengembangan jejaring kolaborasi BRIN, perguruan tinggi, dan mitra industri untuk mendorong transfer pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil riset yang dihasilkan diarahkan

untuk tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat serta dapat dihilirisasi untuk kebutuhan industri. Dengan demikian, BRIN turut memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan inovasi yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat nyata dalam menyelesaikan permasalahan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis riset.

Untuk mendukung prioritas pembangunan nasional ke-5, yakni melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, BRIN berkontribusi melalui riset terapan dan pengembangan teknologi yang mendorong pemanfaatan SDA secara efisien, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi. BRIN mengembangkan berbagai inovasi dalam pengolahan mineral, pertanian, kehutanan, kelautan, dan energi terbarukan. Selain itu, BRIN aktif menjembatani hasil riset dengan kebutuhan industri melalui skema hilirisasi riset, pendampingan teknologi, serta inkubasi bisnis berbasis hasil litbang. Dengan pendekatan ini, BRIN memastikan bahwa potensi SDA Indonesia tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mendukung pertumbuhan industri nasional dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa.

BRIN berkontribusi dalam mendukung prioritas pembangunan nasional ke-8 melalui penguatan riset dan inovasi yang berorientasi pada harmoni antara manusia, lingkungan, alam, dan budaya, serta mendorong kehidupan sosial yang inklusif dan toleran. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian lintas bidang, BRIN menjalankan perannya dalam menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang mendukung pelestarian lingkungan dan budaya, serta memperkuat nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, dan keadilan sosial. Melalui pendekatan ilmiah yang menyeluruh, BRIN mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang berkeadaban.

Gambar 7. Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Bidang Iptekin dalam RPJMN 2025-2029

PN: MEMPERKUAT SUMBER DAYA MANUSIA, SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS					
No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	K/L Penanggung Jawab
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					Kemenko PMK
21	Peringkat Inovasi Global	54	53	49	BRIN, Kemendiktisainstek
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	0,30	0,45	BRIN, Kemendiktisainstek
PP Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional					
Indikator:	1) Pengeluaran Iptek dan Inovasi		2) Proporsi anggaran litbang non pemerintah/swasta		

KP: Penguatan kapasitas iptek dan inovasi	KP: Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	KP: Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara massif di berbagai bidang termasuk pengawasan ketenaganukliran
<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas SDM iptek dan inovasi 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur iptek dan inovasi 3. Menguatnya regulasi, kelembagaan, dan proses bisnis iptek dan inovasi 4. Menguatnya riset dasar dan riset fundamental sebagai pondasi iptekin <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM Iptek (Dosen, Peneliti dan Perekayasa) per 1 juta penduduk 2. Jumlah SDM Iptek Berkualitas S3 di Bidang-Bidang Strategis 3. Proporsi jumlah SDM dengan H Index \geq 10 4. Proporsi jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset 5. Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dibangun dan dikembangkan 	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi dalam pengelolaan dan pemanfaatan iptek dan inovasi 2. Meningkatnya peran Science Techno Park (STP) dalam melakukan komersialisasi pemanfaatan iptek dan inovasi 3. Meningkatnya peran unit intermediasi iptekin di BRIN (Kedeputan Pemanfaatan dan Unit Layanan Intermediasi) 4. Meningkatnya peran daerah (BRIDA) dan/atau instansi terkait dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi 5. Meningkatnya peran sektro (K/L) terkait dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di sektor-sektor prioritas <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan pengabdian Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Jumlah BRIDA/ekosistem daerah yang beroperasi optimal 3. Jumlah Hub iptekin K/L yang mengampu bidang prioritas 4. Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya 5. Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar Jawa 6. Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi 7. Jumlah Start-up binaan yang kompetitif 8. Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRIN 9. Jumlah Penerimaan dari pemanfaatn iptekin di BRIN 	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemanfaatan iptek dan inovasi di industri dan badan usaha khususnya di bidang-bidang prioritas 2. Meningkatnya pemanfaatan iptek dan inovasi di Pemerintah dan Masyarakat khususnya di bidang-bidang prioritas 3. Meningkatnya skema Kerjasama antara penghasil iptekin dan pemanfaatnya termasuk riset dasar /fundamental untuk penguasaan ilmu pengetahuan <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptekin dengan industri/Badan Usaha pada bidang-bidang prioritas 2. Jumlah pemanfaatan produk hasil riset oleh Pemerintah dan Masyarakat pada bidang-bidang prioritas

Sebagai lembaga negara yang mengemban mandat strategis dalam bidang riset dan inovasi, BRIN memiliki fokus utama pada Prioritas Nasional 4 dengan Program Prioritas (PP) yakni peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional. Program ini didukung oleh berbagai Kegiatan Prioritas (KP) seperti penguatan kapasitas iptek dan inovasi, peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi, serta optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara massif di berbagai bidang termasuk pengawasan ketenaganukliran.

Di samping itu, BRIN turut mendukung berbagai Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) di luar bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (iptekin), termasuk dalam Prioritas Nasional 2 (PN 2) yang berfokus pada upaya mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Peran utama BRIN antara lain menjawab tantangan belum terintegrasinya riset kemaritiman dengan kebutuhan industri guna memperkuat perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan. BRIN juga mendorong kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati—meliputi ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik—serta mengoptimalkan pemanfaatannya melalui pendekatan berkelanjutan, seperti pengembangan bioekonomi dan bioprospeksi.

Dalam mendukung indikator RPJMN terkait PN 2, BRIN bertanggung jawab atas beberapa indikator kunci, yaitu: (1) jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati, (2) jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi, dan (3) pusat inovasi berbasis maritim. Selain itu, BRIN juga berperan aktif dalam pelaksanaan berbagai Kegiatan Prioritas PN 2, seperti:

1. Pengembangan Pangan Hewani
2. Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan
3. Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital
4. Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
5. Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan

Melalui kapasitas kelembagaan, sumber daya penelitian, dan kolaborasi strategis, BRIN berkomitmen untuk memberikan solusi berbasis iptek guna memperkuat pencapaian target pembangunan di berbagai bidang-bidang strategis. Dukungan ini sesuai dengan tujuan BRIN untuk

mewujudkan peningkatan kontribusi riset dan inovasi dalam pembangunan nasional.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BRIN

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis (SS) 1: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Riset dan Inovasi, dan Sasaran Strategis (SS) 2: Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan 1: Penguatan Kapasitas SDM Iptek, yang dilaksanakan dengan strategi:

Strategi 1: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Iptek

Strategi ini difokuskan pada meningkatnya jumlah dan kualitas SDM iptek nasional yang berkontribusi bagi kemajuan iptek dan penciptaan inovasi nasional dan meningkatnya rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio. Profil SDM iptek bertalenta unggul, setidaknya memiliki kriteria: berkualifikasi pendidikan S3 dengan pengalaman *postdoctoral*, publikasi di *peer-reviewed* jurnal dan menjadi *lead author*, memiliki h-index tinggi, berpengalaman memimpin kelompok riset/laboratorium, penerima hibah penelitian nasional dan internasional, memiliki paten, serta menunjukkan perilaku ilmiah yang konsisten dengan menghasilkan luaran berdampak luas bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Pembibitan dan Akuisisi Talenta SDM Iptek

Pembibitan dan akuisisi talenta SDM iptek unggul dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme *talent scouting* yang terbuka bagi masyarakat, mulai dari pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi, guna menjangkau talenta potensial yang selanjutnya dikembangkan kapasitas dan kompetensinya agar mampu berkontribusi dalam kegiatan riset dan inovasi. Pada jenjang pendidikan menengah, BRIN melaksanakan program *BRIN Goes to School* melalui kegiatan *BRIN Science Camp*, sebagai wahana pembinaan ilmiah remaja berbasis *inspiring lecture dan experiencing research* untuk menumbuhkan minat, motivasi, serta pemahaman awal terhadap riset dan inovasi. Peserta *BRIN Science Camp* merupakan finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) yang difasilitasi oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) serta pelajar SMA yang memiliki minat dan potensi di bidang riset. Melalui pembekalan oleh mentor BRIN dan pengalaman langsung melakukan riset di laboratorium BRIN, program ini menjadi fondasi awal dalam membangun ekosistem talenta iptek nasional sejak dini.

Pada jenjang pendidikan tinggi, penguatan *talent pool* dilaksanakan melalui berbagai skema, antara lain program magang riset tugas akhir mahasiswa dengan bimbingan dan mentoring periset, serta kompetisi riset tugas akhir yang diselenggarakan secara reguler melalui ajang IRIFair. Program magang riset tugas akhir memberikan ruang interaksi intensif antara periset dan mahasiswa, sekaligus menjadi sarana identifikasi potensi talenta untuk keterlibatan lanjutan dalam kegiatan riset. Sementara itu, peserta IRIFair yang menunjukkan capaian dan kapasitas

riset yang memadai diposisikan sebagai talenta potensial untuk dibina secara berkelanjutan melalui berbagai skema pengembangan talenta, sehingga mendukung terbentuknya SDM iptek unggul yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan iptek nasional.

2. Pengembangan Kapasitas Talenta Potensial

Pengembangan kapasitas talenta potensial SDM iptek dilaksanakan secara terintegrasi melalui pendekatan *end-to-end talent management*, yang mencakup tahap *talent scouting*, *talent development* hingga *talent retention and appreciation*. Salah satu instrumen utama dalam tahapan awal hingga pengembangan kapasitas adalah pelaksanaan *BRIN Goes to Campus*, sebagai platform penjangkaran, pembinaan, dan penguatan kompetensi talenta riset dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi. BRIN menjalin interaksi langsung dengan mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi potensi talenta di bidang riset, inovasi, serta kewirausahaan berbasis teknologi. Dalam kerangka ini, BRIN juga mengembangkan program talenta wirausaha teknologi yang ditujukan bagi lulusan D4/S1 yang memiliki minat menjadi *technopreneur*. Program ini dilaksanakan melalui pendampingan dan mentoring oleh periset dan praktisi, dengan tujuan membangun kapasitas inovasi, komersialisasi teknologi, serta menghasilkan startup berbasis hasil riset yang selanjutnya dibina dalam ekosistem inovasi nasional.

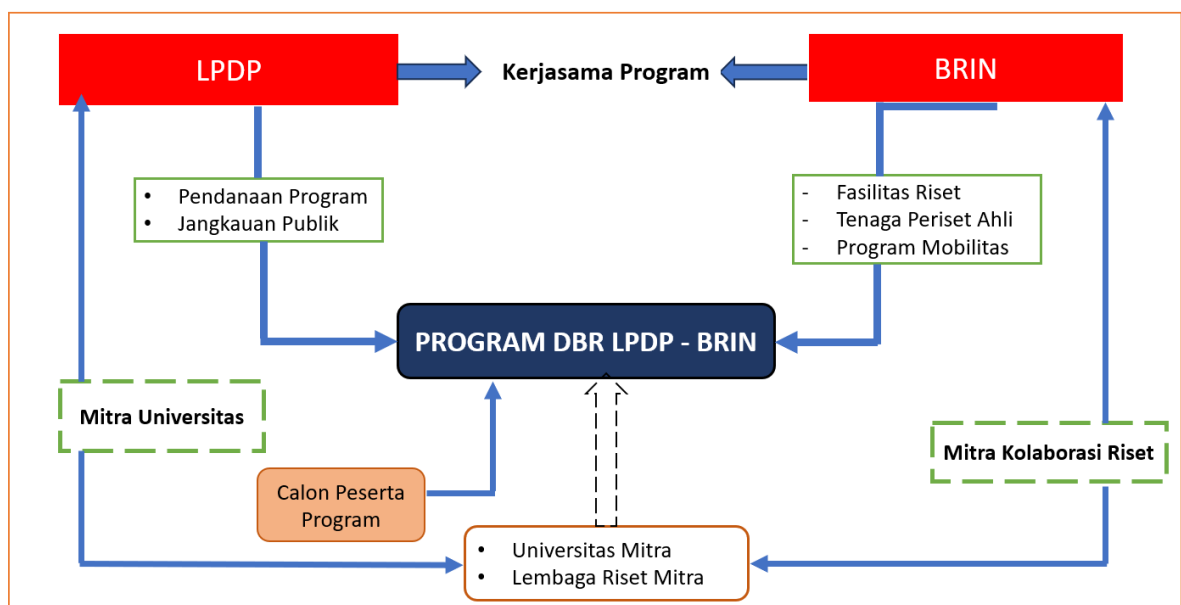
Sejalan dengan pengembangan kapasitas talenta potensial, program mobilitas periset menjadi platform utama kolaborasi riset dan transfer pengetahuan bagi SDM Iptek. Program ini memberikan peluang terbuka bagi SDM Iptek dari unsur akademisi perguruan tinggi, mahasiswa jenjang S2 dan S3, maupun *postdoctoral* untuk ikut berkolaborasi dan berinteraksi dengan periset BRIN dalam melaksanakan aktivitas riset bersama di BRIN. Skema *research assistant*, *postdoctoral* di BRIN menjadi upaya penting untuk meningkatkan kapasitas periset sehingga mampu menghasilkan luaran riset yang berkualitas. Interaksi yang terjalin selama mengikuti mobilitas periset sangat memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan pengetahuan (*idea and knowledge sharing*) atas riset yang dilakukan, sehingga meningkatkan kualitas luaran riset yang dihasilkan. Selain melalui skema *research assistant* dan *postdoctoral*, BRIN juga mengembangkan skema pengembangan kapasitas talenta potensial berbasis pendidikan gelar, yakni:

- a. Program *Degree by Research* (DBR) merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan kepada SDM iptek untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya melalui pendidikan formal berbasis penelitian, pengembangan, dan pengkajian iptek tanpa meninggalkan tugas kedinasan. Program unggulan ini diprioritaskan pada *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) dan dirancang untuk mempercepat peningkatan jumlah SDM iptek berkualifikasi Doktor (S3) yang saat ini masih tergolong rendah. Melalui DBR, SDM iptek dapat meraih gelar Doktor melalui aktivitas riset yang dilaksanakan di BRIN, dengan bimbingan dari dosen perguruan tinggi

mitra yang berkolaborasi bersama pembimbing pendamping dari periset BRIN.

- b. Program Beasiswa Doktor untuk Talenta Riset dan Inovasi Nasional, yang diselenggarakan bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), merupakan langkah strategis untuk menjangkau talenta SDM iptek unggul pada bidang-bidang ilmu yang dibutuhkan bagi pengembangan riset dan inovasi di Indonesia. Program ini secara khusus menargetkan empat bidang prioritas yang belum dapat dipelajari secara mendalam di dalam negeri sehingga memerlukan studi di luar negeri, yaitu: (1) Pemanfaatan Biodiversitas Maju, (2) Teknologi Laut Dalam Maritim, (3) Radiasi dan Teknologi Nuklir, serta (4) Penerbangan dan Antariksa. Penerima beasiswa akan dibiayai hingga jenjang doktor pada perguruan tinggi luar negeri, dan setelah menyelesaikan studi, mereka memperoleh kesempatan untuk bergabung melaksanakan riset di Indonesia melalui skema pascadoktoral (*postdoctoral*). Untuk memastikan keberlanjutan kontribusi para lulusan, program ini dirancang secara sistematis agar para penerima beasiswa tetap terhubung setelah kembali ke tanah air, antara lain melalui program kolaborasi riset dengan perguruan tinggi terkait di Indonesia.

Gambar 8. Kerangka Kerjasama Program DBR LPDP - BRIN



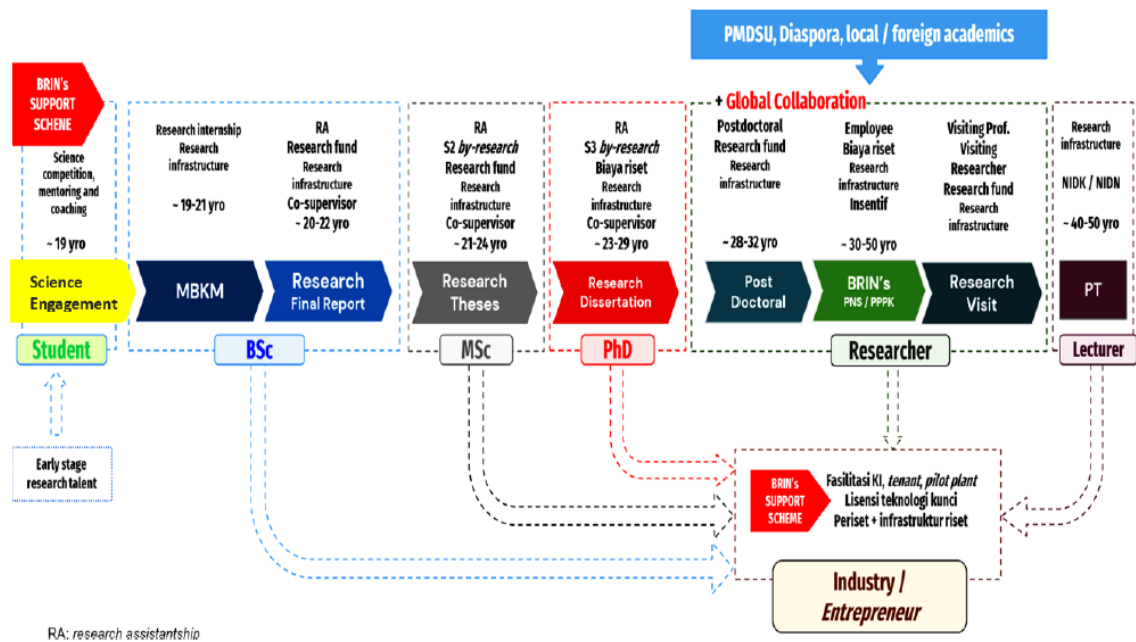
3. Penguatan Talenta SDM Iptek Unggul

Penguatan talenta SDM iptek unggul dilaksanakan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan eksposur internasional SDM iptek terhadap perkembangan iptek. Upaya ini dilakukan antara lain melalui fasilitasi transfer pengetahuan dan keilmuan dari *visiting research fellow* dan *visiting professor* yang diundang untuk berkolaborasi dalam kegiatan riset di BRIN dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, kesempatan dan fasilitasi yang diberikan kepada SDM iptek untuk melaksanakan *joint research/research visit*, maupun magang riset *postdoctoral* pada institusi riset di luar negeri juga merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan riset dan inovasi yang dilaksanakan

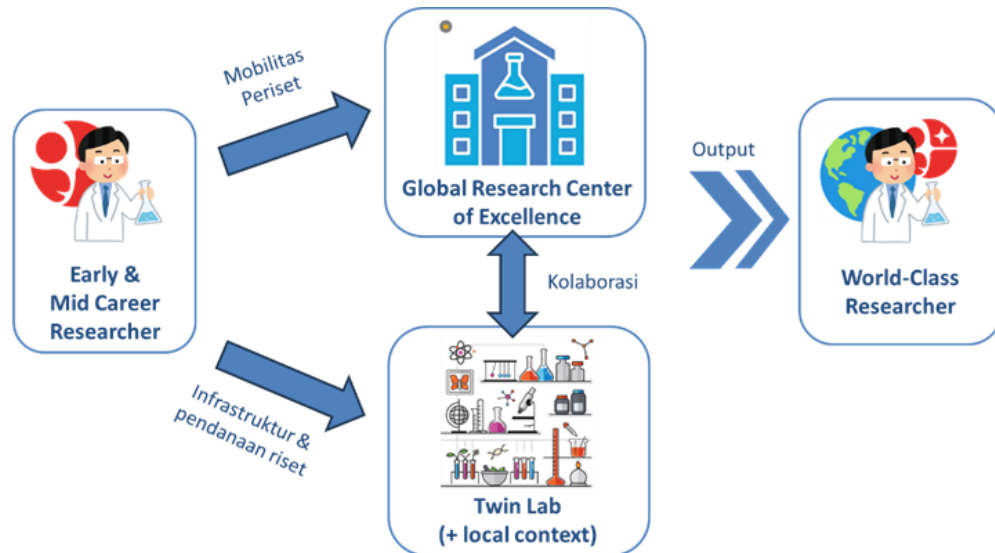
sesuai dengan perkembangan keilmuan dan teknologi, termasuk upaya menghasilkan luaran riset yang lebih berkualitas dan diakui secara internasional. Fasilitasi juga diberikan untuk hadir sebagai pembicara pada forum konferensi ilmiah internasional bagi SDM iptek, sehingga dapat mendiseminasikan hasil risetnya sekaligus memperluas jejaring pada komunitas keilmuan di tingkat global.

Gambar 9. Peta Jalan Pengembangan Talenta Riset dan Inovasi melalui Skema Dukungan BRIN



Sejalan dengan penguatan kapasitas, BRIN mengembangkan *Global Nobel Research Collaboration* sebagai program kolaborasi strategis untuk membangun ekosistem ilmiah kelas dunia dalam rangka mendukung inisiatif *BRIN Goes to Nobel*. Program ini dirancang untuk mendorong penciptaan pengetahuan global melalui kolaborasi riset jangka menengah dan panjang dengan *Nobel Laureates* serta periset unggulan dunia pada bidang-bidang *frontier science*. Pembangunan infrastruktur *Twin/Sister Laboratory* bersama mitra internasional menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan riset yang mendukung eksplorasi ilmiah mendalam dan pengembangan temuan terobosan. Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing global SDM iptek Indonesia serta membentuk periset berkelas dunia (*world class researcher*) yang mampu berperan aktif dalam agenda riset internasional dan menghasilkan karya ilmiah berdampak tinggi, termasuk yang berpotensi meraih pengakuan ilmiah tertinggi di tingkat global.

Gambar 10. Skema *Global Nobel Research Collaboration*



4. Perluasan rekrutmen SDM iptek dan periset muda berbasis meritokrasi perlu terus didorong guna meningkatkan rasio peneliti per sejuta penduduk. Upaya ini dilaksanakan melalui pemetaan kebutuhan SDM iptek yang diselaraskan dengan target-target pembangunan nasional, serta pembukaan rekrutmen periset secara terbuka dengan sistem penilaian yang berbasis pada kualifikasi ilmiah, rekam jejak riset, dan potensi kontribusi ke depan. Untuk mempercepat pencapaian *critical mass* SDM iptek, pemerintah mendorong percepatan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) guna mengisi formasi jabatan fungsional di bidang iptek, riset, dan inovasi. Setiap tahunnya dibutuhkan sekitar 500 formasi untuk calon ASN yang akan mengisi posisi sebagai peneliti, perekayasa, analis data ilmiah, maupun analis pemanfaatan iptek. Proses rekrutmen diprioritaskan bagi kandidat dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3), dengan batas minimal jenjang pendidikan Magister (S2), serta mendorong partisipasi aktif diaspora Indonesia. Melalui kebijakan ini, CPNS dan CPPPK yang direkrut diharapkan dapat langsung terlibat dan berkontribusi secara signifikan dalam kegiatan riset yang tengah berjalan, sesuai dengan bidang kompetensi dan keahliannya.

Sebagai bagian dari komitmen menciptakan ekosistem riset yang inklusif, kebijakan rekrutmen ini juga diiringi penerapan GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) secara konsisten. Pendekatan ini memastikan proses rekrutmen berjalan adil, transparan, dan memberikan kesempatan setara, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari latar belakang sosial-ekonomi rendah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, beberapa formasi khusus turut dibuka, antara lain: a) Formasi Putra-Putri Lulusan Terbaik/*Cumlaude*; b) Formasi Diaspora; c) Formasi Penyandang Disabilitas; d) Formasi Putra/Putri Wilayah Papua dan Papua Barat; e) Formasi Putra/Putri Wilayah Kalimantan.

5. Peningkatan produktivitas inovatif peneliti BRIN dalam menghasilkan paten, hak cipta, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan riset dengan kebutuhan industri atau masyarakat, sehingga tercipta integrasi riset dengan potensi komersialisasi;
 - b. Membangun sistem layanan terpadu yang memudahkan proses pengajuan dan perlindungan kekayaan intelektual;
 - c. Memfasilitasi pembiayaan paten baik nasional maupun paten internasional melalui *Patent Cooperation Treaty* (PCT);
 - d. Memperkuat valuasi kekayaan intelektual untuk mendorong produktivitas dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara lebih luas;
 - e. Memperkuat ekosistem inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
 - f. Merancang sistem monitoring berbasis indikator nyata seperti jumlah paten yang diajukan, *granted*, dikomersialisasikan, serta nilai lisensi atau kerja sama yang dihasilkan.
6. Mendorong peningkatan kualitas publikasi ilmiah melalui penguatan mutu riset, peningkatan intensitas publikasi, dan perluasan visibilitas karya ilmiah. Peningkatan kualitas SDM iptek tidak dapat dipisahkan dari kemampuan menghasilkan karya ilmiah yang bermutu, dan memiliki kontribusi terhadap pengembangan iptek. Oleh karena itu, BRIN mendorong peningkatan kualitas publikasi ilmiah melalui tiga pendekatan utama:
- a. Penguatan mutu riset: kualitas publikasi sangat ditentukan oleh kekuatan metodologi yang digunakan serta relevansi topik riset dengan isu-isu strategis. Untuk itu, BRIN memperkuat sistem penjaminan mutu riset melalui mekanisme *peer-review* internal yang ketat, serta mendorong peningkatan integritas akademik, antara lain dengan memastikan pencegahan plagiarisme, manipulasi data, dan fabrikasi hasil. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan riset yang tidak hanya valid dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga layak dipublikasikan di jurnal bereputasi tinggi.
 - b. Peningkatan intensitas publikasi: BRIN mendorong para periset untuk lebih aktif dalam menerbitkan hasil risetnya di jurnal internasional bereputasi. Skema pembinaan bagi kelompok riset yang produktif serta penguatan kolaborasi riset dengan mitra luar negeri turut menjadi strategi pendukung dalam mendorong tercapainya tujuan tersebut.
 - c. Perluasan visibilitas karya ilmiah: Selain dari sisi kuantitas dan kualitas, karya ilmiah perlu disebarluaskan dan diakses oleh komunitas global. BRIN mendorong pemanfaatan repositori terbuka, partisipasi dalam konferensi internasional, dan penerbitan di jurnal *open-access* berkualitas.

3.2.2 Arah Kebijakan 2: Penguatan Infrastruktur Riset dan Inovasi, yang dilaksanakan dengan strategi:

Strategi 1: Mengembangkan dan Mengintegrasikan Tata Kelola serta Pemanfaatan Infrastruktur Riset

Strategi ini difokuskan pada penguatan kapasitas, konektivitas, dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur riset nasional melalui tata kelola

yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan. Pengelolaan infrastruktur riset yang efektif diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas luaran riset, memperluas akses bagi pelaku riset lintas sektor, serta mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang inklusif. Pemanfaatan infrastruktur riset yang terintegrasi juga akan mengurangi duplikasi investasi, meningkatkan efisiensi pembiayaan, dan memperkuat kolaborasi multipihak baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Membangun infrastruktur riset strategis yang terintegrasi dengan agenda riset nasional, didukung oleh skema pembiayaan inovatif dan kolaboratif.

Melalui pendekatan platform terbuka, BRIN tidak hanya mendorong pemanfaatan bersama atas infrastruktur dan fasilitas riset yang telah tersedia, tetapi juga secara aktif menginisiasi pembaruan dan pengembangan infrastruktur riset agar selaras dengan perkembangan iptek. Langkah ini penting untuk menjamin keberlanjutan sekaligus memastikan relevansi fasilitas riset terhadap kebutuhan yang terus berkembang.

Sejalan dengan itu, keberlanjutan dan percepatan pembangunan infrastruktur riset memerlukan dukungan pembiayaan. Oleh karena itu, BRIN menginisiasi skema pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel dan tidak hanya bergantung pada alokasi Rupiah Murni (RM). Skema tersebut berbasis kemitraan dan mencakup antara lain:

- a. hibah dari lembaga nasional maupun internasional;
- b. pendanaan melalui pinjaman dari lembaga bilateral maupun multilateral;
- c. pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- d. penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- e. skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); serta
- f. kemitraan *Business to Business* (B2B) dengan pihak swasta.

Pendekatan ini diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan mitra global maupun industri, serta memperkuat upaya pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan infrastruktur riset berstandar tinggi.

Pada Gambar 11 yang memuat linimasa pembangunan infrastruktur riset dan inovasi, ditampilkan dua kategori rencana pembangunan infrastruktur, yaitu: (1) infrastruktur yang telah memperoleh persetujuan pembiayaan dan (2) infrastruktur yang masih dalam tahap penyiapan. Pembangunan infrastruktur yang telah mendapatkan persetujuan pembiayaan yakni:

- Pembangunan Laboratorium Penyakit Infeksi Tingkat Keamanan Tinggi, melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- Pengadaan Kapal Riset (*Procurement of Multi Purposes Research Vessels*), melalui pembiayaan Pembiayaan Hibah Luar Negeri (PHLN);
- Pembangunan Kawasan Penelitian Pertanian dan Pembangunan Infrastruktur Riset Pengolahan Sampah, melalui pembiayaan Rupiah Murni;

- Pembangunan Gedung Berkas Elektron dan peralatan mesin berkas elektron, melalui pembiayaan Rupiah Murni dan mekanisme hibah.

Selanjutnya, pada kategori infrastruktur yang masih dalam tahap penyiapan, terdapat Proyek Pengelolaan dan Pembangunan Armada Kapal Riset Nasional yang telah tercantum dalam *PPP Book 2025*. Pencantuman ini menunjukkan bahwa proyek tersebut telah diproyeksikan untuk dibiayai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan saat ini sedang dalam tahap persiapan menuju transaksi.

Gambar 11. Pembangunan Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN 2025-2029
(Penyelesaian/ *ongoing*)

INFRASTRUKTUR	2025	2026	2027	2028	2029
• Pembangunan Kawasan Penelitian Pertanian (Rupiah Murni)	2 Unit				
• Procurement of Multi Purposes Research Vessels (PHLN)	2 Unit				
• Pembangunan Infrastruktur Laboratorium Penyakit Infeksi dengan Tingkat Keamanan Tinggi (SBSN)		1 Unit			
• Pembangunan Infrastruktur Riset Pengolahan Sampah (Rupiah Murni)		1 Unit			
• Gedung dan Mesin Berkas Elektron (Rupiah Murni dan Hibah)	1 Unit				
• Fasilitas Laboratorium Riset Teknologi Akuakultur (Rupiah Murni)	1 Unit				
• Pengelolaan dan Pembangunan Armada Kapal Riset Nasional (KPBU)				2 Unit	

Sumber: Roadmap Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN 2025-2029

Sementara itu, selain pembangunan 7 (tujuh) infrastruktur riset dan inovasi yang telah ditetapkan untuk diselesaikan pembangunannya, terdapat rencana pembangunan infrastruktur lainnya yang masih bersifat indikatif atau berada dalam proses perumusan lebih lanjut. Rencana tersebut tercantum secara lengkap dalam *Roadmap Infrastruktur Riset dan Inovasi*, yang memuat daftar usulan infrastruktur jangka menengah. Berdasarkan *roadmap*, BRIN menetapkan sejumlah infrastruktur strategis sebagai fokus pembangunan, yang mencakup infrastruktur keantariksaan, infrastruktur *integrated farming* sapi perah dan sapi potong, infrastruktur riset kesehatan untuk mendukung pengembangan teknologi diagnosis dan terapi, serta infrastruktur yang mendukung penguatan Kawasan Sains dan Teknologi (KST). Penetapan prioritas ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur riset dan inovasi berkontribusi langsung terhadap penguatan kemandirian teknologi, pencapaian target pembangunan nasional, serta peningkatan kapasitas riset pada sektor-sektor yang memiliki urgensi tinggi.

Salah satu prioritas utama dalam *roadmap* tersebut adalah pembangunan infrastruktur keantariksaan, yang menegaskan urgensi penguasaan teknologi antariksa untuk mendukung kemandirian bangsa.

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah luas dan tingkat kerentanan bencana yang tinggi, Indonesia memerlukan sistem teknologi antariksa yang andal untuk mendukung pembangunan dan keselamatan nasional. Satelit penginderaan jauh menjadi infrastruktur strategis dalam penyediaan data spasial-temporal yang akurat dan cepat bagi sektor-sektor vital, termasuk mitigasi bencana dan perubahan iklim. Sejalan dengan arah RPJPN 2025–2045 yang menempatkan *space economy* sebagai salah satu *megatrend* global, BRIN akan menginisiasi pembangunan konstelasi satelit melalui skema *co-development* dengan negara mitra. Skema ini tidak hanya memungkinkan pembagian sumber daya dan keahlian, tetapi juga memperkuat transfer teknologi dan peningkatan kapasitas nasional. Infrastruktur riset yang kompleks seperti satelit membutuhkan kolaborasi internasional karena tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh satu negara secara mandiri. Lebih lanjut, sebagai bagian dari strategi integratif pengembangan infrastruktur keantariksaan nasional, BRIN juga merencanakan pembangunan bandar antariksa melalui skema *Business to Business* (B2B) yang melibatkan kemitraan dengan sektor usaha. Kehadiran bandar antariksa ini diharapkan memperkuat kemandirian Indonesia dalam peluncuran satelit sekaligus penguasaan rantai nilai industri keantariksaan secara menyeluruh.

BRIN juga menginisiasi pembangunan infrastruktur *integrated farming* sapi perah dan sapi potong yang sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan nasional akan ketersediaan protein hewani yang terjangkau dan berkelanjutan. Saat ini konsumsi susu dan daging masyarakat Indonesia terus meningkat, namun produksi dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan sehingga ketergantungan impor masih tinggi. Infrastruktur ini akan menjadi basis riset terintegrasi dari hulu ke hilir—meliputi perbibitan, teknologi pakan, kesehatan hewan, modifikasi lingkungan, hingga pengolahan produk—guna menghasilkan model peternakan adaptif terhadap iklim tropis, terutama di dataran rendah. Pembangunan infrastruktur ini selaras dengan agenda riset nasional, yang menekankan pada peningkatan kemandirian pangan, percepatan swasembada susu dan daging, serta penguatan kualitas SDM melalui pemenuhan gizi masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka menjawab tantangan kesehatan masyarakat akibat meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, khususnya kanker yang terus menunjukkan tren peningkatan di Indonesia, BRIN memandang perlu pembangunan fasilitas riset dan inovasi di bidang kedokteran (*Hadron Therapy*). Keterbatasan sarana riset kesehatan saat ini menjadi hambatan dalam pengembangan teknologi diagnosis dan terapi modern, seperti radiomik dan Hadron Terapi, yang terbukti lebih efektif dan presisi dibandingkan metode konvensional. Keberadaan fasilitas ini akan memperkuat kapasitas riset nasional melalui pengembangan metode pencitraan kuantitatif, terapi berbasis teknik nuklir, serta pengobatan personalisasi berbasis data genetik dan karakteristik pasien. Dengan demikian pembangunan fasilitas riset dan

inovasi kedokteran dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan berbasis iptek, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, serta memperpanjang harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Selain itu, dalam rangka mendukung kebijakan nasional pengelolaan dan hilirisasi mineral strategis, BRIN menginisiasi pembangunan Infrastruktur Laboratorium Pengolahan dan Karakterisasi Logam Tanah Jarang (LTJ) sebagai fondasi penguatan riset dan inovasi di bidang pengolahan mineral bernilai strategis. Infrastruktur ini dirancang untuk menjawab keterbatasan dan fragmentasi fasilitas riset yang selama ini belum terintegrasi, dengan menghadirkan laboratorium pengolahan dan karakterisasi LTJ dari hulu ke hilir pada skala *bench* yang aman dan berstandar tinggi. Keberadaan infrastruktur ini memungkinkan pengembangan, pengujian, dan optimasi parameter proses pengolahan, pemisahan, pemurnian, serta karakterisasi material LTJ secara presisi dan terstandar, sehingga menghasilkan data ilmiah yang kredibel sebagai dasar pengembangan teknologi hilirisasi dan perumusan kebijakan sektor mineral. Sejalan dengan agenda ketahanan sumber daya dan penguatan industri strategis nasional, laboratorium ini diharapkan menjadi pusat rujukan riset LTJ di Indonesia serta memperkuat peran BRIN dalam mendorong kemandirian teknologi pengolahan dan pemurnian logam tanah jarang bernilai tambah tinggi.

Dengan demikian, rencana pembangunan infrastruktur riset dan inovasi yang tercantum dalam *Roadmap* Infrastruktur Riset dan Inovasi merupakan instrumen strategis BRIN dalam memastikan arah pembangunan infrastruktur riset nasional berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan jangka menengah dan panjang. Selain penyelesaian pembangunan infrastruktur riset dan inovasi yang telah ditetapkan, pengembangan infrastruktur lain yang bersifat indikatif dilakukan secara bertahap dan terukur untuk menjamin kesinambungan kapasitas riset nasional. Melalui penetapan infrastruktur prioritas pada sektor keantariksaan, pangan dan gizi, kesehatan, serta pengolahan mineral strategis, BRIN mengarahkan penguatan infrastruktur riset yang terintegrasi, berstandar tinggi, dan berkelanjutan. Pengelolaan infrastruktur tersebut, termasuk pembangunan baru dan revitalisasi infrastruktur eksisting, diharapkan mampu mendukung kolaborasi lintas disiplin, meningkatkan kualitas dan relevansi keluaran riset, serta mempercepat penguasaan teknologi pada sektor-sektor yang memiliki urgensi tinggi. Secara keseluruhan, upaya ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional, mendorong kemandirian teknologi, serta meningkatkan kontribusi riset dan inovasi dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

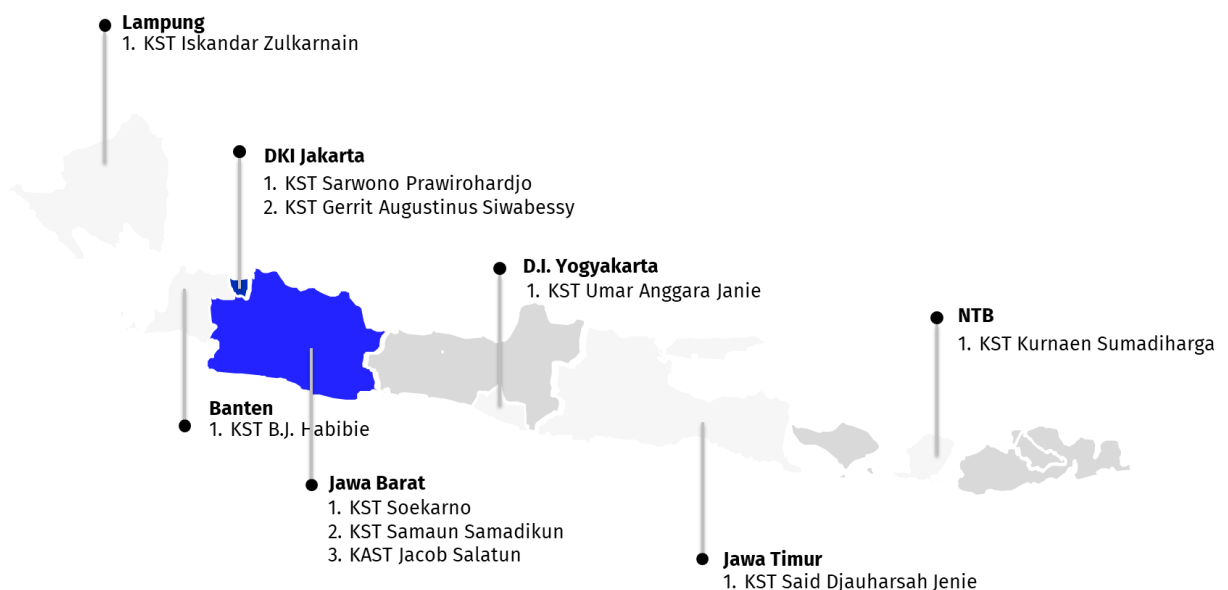
2. Mengembangkan dan memperkuat Kawasan Sains dan Teknologi (KST) dan hub inovasi sebagai pusat pertumbuhan inovasi berbasis kemitraan multipihak.

Selain menginisiasi pembaruan dan pengembangan infrastruktur riset dan inovasi yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan, salah satu komponen strategis dalam tata kelola infrastruktur riset adalah pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) serta hub inovasi. BRIN mengelola 10 (sepuluh) KST yang tersebar pada sejumlah lokasi fasilitas BRIN sebagaimana tercantum pada Gambar 12, yang berfungsi sebagai pusat pengembangan teknologi serta penguatan ekosistem riset dan inovasi. KST dan hub inovasi diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan penelitian, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi berbasis inovasi melalui kolaborasi antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat.

Mengacu pada *roadmap* infrastruktur riset dan inovasi, KST akan dilengkapi dengan fasilitas riset mutakhir, laboratorium berstandar internasional, serta ruang inkubasi bisnis dan komersialisasi hasil riset yang mendukung alih teknologi dan pemanfaatan hasil riset oleh sektor produktif. KST berperan sebagai simpul penggerak inovasi nasional melalui penyediaan infrastruktur berteknologi tinggi, fasilitas pengembangan prototipe, dan mekanisme hilirisasi yang memungkinkan hasil penelitian dimanfaatkan secara luas dan sistematis.

KST menjadi wadah kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perguruan tinggi, lembaga litbang, dan sektor industri untuk meningkatkan kapasitas penciptaan teknologi serta mendorong pembentukan perusahaan inovatif melalui program inkubasi dan *spin-off*. Sebagai simpul koordinasi nasional, KST memastikan integrasi antara riset dasar, riset terapan, dan pra-komersialisasi dalam satu alur yang berkesinambungan dan selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Gambar 12. Kawasan Sains dan Teknologi yang berada dalam Kawasan BRIN



3. Mengintegrasikan infrastruktur riset dan inovasi nasional untuk mewujudkan tata kelola layanan laboratorium dan peralatan riset yang terpadu dan efisien.

Strategi ini bertujuan menyatukan pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur riset melalui satu katalog laboratorium, satu katalog ketersediaan, satu mekanisme pertukaran data, satu proses bisnis, serta satu sistem layanan dan manajemen laboratorium. Integrasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi, interoperabilitas, dan kemudahan akses layanan infrastruktur riset bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk peneliti, perguruan tinggi, industri, dan mitra kolaborasi lainnya. Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan tetap menjamin keberlanjutan layanan laboratorium yang telah berjalan, guna mendukung ekosistem riset dan inovasi nasional yang terintegrasi dan berdampak.

4. Pengembangan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Ekosistem Riset dan Inovasi Maritim melalui Pusat Inovasi Maritim (PIM).

Pengembangan Pusat Inovasi Maritim memerlukan infrastruktur yang kokoh dan terintegrasi, mencakup seluruh rantai kegiatan riset dan inovasi mulai dari tahap hulu (penelitian dasar dan terapan), tengah (pengembangan teknologi dan uji coba), hingga hilir (komersialisasi dan pemanfaatan hasil riset). Infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai ekosistem pendukung yang mempercepat lahirnya inovasi berdampak langsung pada ketahanan maritim dan pembangunan ekonomi biru.

Dalam kerangka tersebut, telah ditetapkan enam lokus utama infrastruktur (*six locus support*) yang saling melengkapi dalam pengembangan pusat inovasi maritim:

- a. Kawasan Sains dan Teknologi Kurnaen Sumadiharga - Lombok

Kawasan Lombok dikembangkan sebagai pusat industri maritim berbasis riset dan inovasi terpadu, dengan fokus utama pada pengolahan pascapanen modern dan higienis, penelitian pangan, dan budidaya biota laut komersial. Kawasan ini dilengkapi laboratorium akuakultur modern untuk pengembangan teknologi budidaya ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Sebagai inkubator teknologi dan inovasi komersial kemaritiman, Lombok menyediakan fasilitas uji coba, pendampingan teknis, mentoring bisnis, serta akses jejaring pendanaan dan pasar bagi *startup* maritim.

- b. Kawasan Konservasi Ilmiah Baron

BRIN menginisiasi pembangunan fasilitas pendukung ekosistem kelautan dan maritim di Kawasan Konservasi Ilmiah Baron guna memperkuat ekosistem riset di bidang kelautan dan maritim. Kawasan Baron dikembangkan sebagai pusat konservasi ilmiah *ex-situ* biota laut berbasis teknologi tinggi, berfokus pada penyelamatan dan pengembangbiakan spesies terancam, endemik, atau bernilai ekologis-ekonomis melalui inovasi akuarium dan metode konservasi *ex-situ*. Kegiatan utamanya meliputi pengembangan sistem akuarium presisi, protokol perawatan spesifik, serta teknik reproduksi dan pembesaran terkendali. Kawasan ini juga berfungsi sebagai bank

koleksi biodiversitas laut Indonesia untuk riset taksonomi, fisiologi, genetika, dan ekologi terapan. Infrastrukturnya meliputi fasilitas akuarium riset, sistem filtrasi air laut, laboratorium, dan sarana edukasi.

- c. Kawasan Konservasi Terumbu Karang Pulau Pari
Kawasan Pulau Pari dikembangkan sebagai *Center of Excellence for Coral Reef*, kawasan unggulan untuk konservasi dan restorasi terumbu karang tropis Indonesia. Kawasan ini berperan strategis dalam penelitian, pelatihan, dan demonstrasi teknologi konservasi berbasis ekosistem pesisir, dengan fokus pada perlindungan terumbu karang, lamun, dan biota laut bernilai tinggi. Pengembangannya mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas, peningkatan kapasitas SDM, dan teknologi ramah lingkungan untuk rehabilitasi. Program utamanya meliputi pelatihan *scuba diving*, survei ekologi kelautan, serta restorasi karang menggunakan *artificial reef* dan *bio-reef substrate*. Fasilitas pendukung seperti dormitori, laboratorium lapangan, dermaga penelitian, dan kapal riset akan diperkuat untuk mendukung kegiatan *in-situ*. Kawasan Pulau Pari diharapkan menjadi pusat konservasi laut tropis dan penyedia data ilmiah bagi kebijakan nasional berbasis ekosistem.
- d. Kawasan Kerjasama Eksternal Atjep Suwartana - Ambon (Teknologi Laut Dalam dan Sistem Ketahanan Maritim)
Kawasan Ambon dikembangkan sebagai pusat riset teknologi kemaritiman dengan memanfaatkan keunggulan laut dalamnya, fokus pada eksplorasi mineral, energi, material dasar laut, serta fenomena fisik kelautan. Kawasan ini mengintegrasikan teknologi tinggi seperti *early warning system tsunami*, *Giant Sea Wall miniature*, dan pemetaan kerentanan bencana, didukung infrastruktur kapal riset, *ROV/AUV*, serta stasiun observasi laut dalam. Sebagai inkubator kolaboratif, Ambon menjadi wadah sinergi peneliti, akademisi, pemerintah daerah, industri maritim, dan masyarakat pesisir untuk memperkuat ketahanan maritim nasional dan diplomasi sains global.
- e. Kawasan Sains Aprilani Sugiharto - Ancol
Kawasan Ancol dirancang sebagai pusat integrasi data, kebijakan, dan rekomendasi teknis nasional bidang kelautan dan kemaritiman. Kawasan ini menjadi simpul utama perumusan kebijakan berbasis sains mencakup pengelolaan sumber daya laut, konservasi biodiversitas laut, ekonomi maritim, serta ketahanan wilayah pesisir. Sebagai pusat integrasi data, kawasan ini mengelola berbagai data kelautan nasional melalui sistem digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan. Proses penyusunan kebijakan berbasis data ilmiah dan masukan teknis dari berbagai riset, menjadikan kebijakan yang dihasilkan bersifat *evidence-based*, relevan, dan responsif terhadap dinamika lingkungan laut serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
- f. Kawasan Sains dan Teknologi Said Djauharsjah Jenie – Surabaya
Berfokus pada pengembangan teknologi transportasi laut, sistem pelabuhan, dan infrastruktur kelautan digital, KST Said Djauharsjah

Jenie dirancang sebagai pusat inovasi nasional dalam bidang desain kapal, teknologi propulsi hijau, serta sistem logistik dan pelabuhan cerdas. Kawasan ini memperkuat fungsi riset dan rekayasa kelautan melalui Laboratorium Dinamika Fluida Maritim dan Rekayasa Lepas Pantai BRIN, yang menjadi tulang punggung pengujian kapal, struktur lepas pantai, dan sistem energi laut terbarukan di Indonesia. KST Said Djauharsjah Jenie menjadi pusat riset dan inovasi infrastruktur pelabuhan berkelanjutan, termasuk *smart port system*, energi ramah lingkungan, serta mitigasi dampak perubahan iklim terhadap kawasan pesisir industri. Kawasan tersebut juga terhubung dengan jaringan akademik kuat, seperti ITS, PPNS, dan Universitas Hang Tuah, yang selama ini menjadi mitra riset dan pengembangan teknologi maritim nasional.

Selanjutnya, kapal riset merupakan infrastruktur strategis nasional yang bersifat *mobile* dan berfungsi sebagai penghubung lintas lokus Pusat Inovasi Maritim (PIM). Peran utama kapal riset adalah memfasilitasi penelitian lapangan, pengambilan data kelautan, pengujian instrumen, dan observasi oseanografi yang hasilnya akan digunakan oleh setiap PIM sesuai fokus risetnya. Data dan temuan lapangan dari kapal riset akan dikelola dalam sistem *Maritime Data Integration Hub* BRIN, sehingga dapat dimanfaatkan bersama oleh seluruh peneliti dan unit PIM secara *real-time*. Melalui pendekatan lintas-lokus ini, kapal riset menjadi "*living laboratory*" dan penggerak utama kolaborasi riset kemaritiman nasional.

Keenam lokus ini merepresentasikan seluruh rantai nilai inovasi, dari konservasi, riset dasar, rekayasa teknologi, hingga kebijakan dan hilirisasi. Setiap kawasan memiliki infrastruktur riset dan pengembangan serta infrastruktur pendukung inovasi yang saling terintegrasi. Untuk mendukung pemanfaatannya, dapat dibentuk Pusat Kolaborasi Riset (PKR) Maritim yang multidisiplin dan *multi-stakeholder*, bertujuan mengintegrasikan hasil riset menjadi solusi nyata bagi tantangan kemaritiman nasional. Dalam pengembangannya, penguatan fungsi intermediasi menjadi aspek krusial. Fungsi ini berperan sebagai jembatan antara hasil riset dengan kebutuhan industri, masyarakat, dan pemerintah, sekaligus memastikan proses transfer teknologi berjalan efektif. Intermediasi juga mendorong penyelarasan antara riset dasar dengan arah pengembangan teknologi terapan dan komersialisasi, termasuk membangun mekanisme pendanaan inovasi, skema kemitraan, serta regulasi pendukung. Dengan demikian, PKR Maritim tidak hanya menjadi pusat integrasi riset, tetapi juga katalis yang mempercepat transformasi pengetahuan menjadi produk, layanan, dan kebijakan yang berdampak nyata.

Pendekatan holistik melalui sistem terintegrasi ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi BRIN dalam mendukung *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) terkait ketahanan maritim, konservasi sumber daya laut, serta mendukung agenda ekonomi biru nasional melalui

komersialisasi hasil riset, percepatan teknologi akuatik, serta integrasi dengan program prioritas RPJMN.

3.2.3 Arah Kebijakan 3: Diversifikasi Sumber Pendanaan Riset dan Inovasi, yang dilaksanakan dengan strategi:

Strategi 1: Menginisiasi Skema-Skema Baru dan Strategis untuk Meningkatkan Partisipasi Sektor Swasta untuk Berkontribusi dalam Pendanaan Riset dan Inovasi

Strategi ini bertujuan mengembangkan mekanisme pendanaan alternatif yang inovatif untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung riset dan inovasi nasional. Partisipasi sektor swasta diharapkan dapat memperluas akses terhadap sumber daya non-anggaran negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. *Object Naming Right*

Object Naming Right merupakan pemberian hak nama atas objek (fasilitas riset, temuan baru, program) sebagai imbal balik finansial dari kontribusi publik dan sponsor finansial. *Object Naming Right* bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah (APBN) dengan membuka peluang pendanaan alternatif yang berbasis kontribusi publik dan sponsor komersial, sekaligus meningkatkan eksposur baik bagi BRIN maupun bagi sponsor, sebagai entitas yang mendukung kemajuan iptek.

Gambar 13. Ilustrasi *Object Naming Right*



2. *Public-Private Partnership*

Public-Private Partnership bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi strategis antara sektor publik dan sektor swasta dalam mengembangkan riset dan inovasi. Melalui skema ini, riset dan inovasi tidak hanya menjadi domain institusi pemerintah, tetapi berkembang menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan kontribusi aktif dari sektor swasta. Pendekatan ini memungkinkan pembiayaan bersama, pemanfaatan bersama infrastruktur riset, serta percepatan transfer pengetahuan dan teknologi dari lembaga penelitian ke sektor produktif. Pelaksanaan *Public-Private Partnership* dapat dilakukan melalui pengembangan proyek riset bersama,

co-funding untuk pembangunan infrastruktur riset strategis, atau program hilirisasi teknologi berbasis kebutuhan industri.

Strategi 2: Memperkuat Skema Pemberian Insentif Finansial dan Fiskal bagi Dunia Usaha yang Berkontribusi pada Riset dan Inovasi

Strategi ini difokuskan pada meningkatnya partisipasi dunia usaha dalam pendanaan dan pelaksanaan riset dan inovasi melalui pemberian insentif finansial dan fiskal yang kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

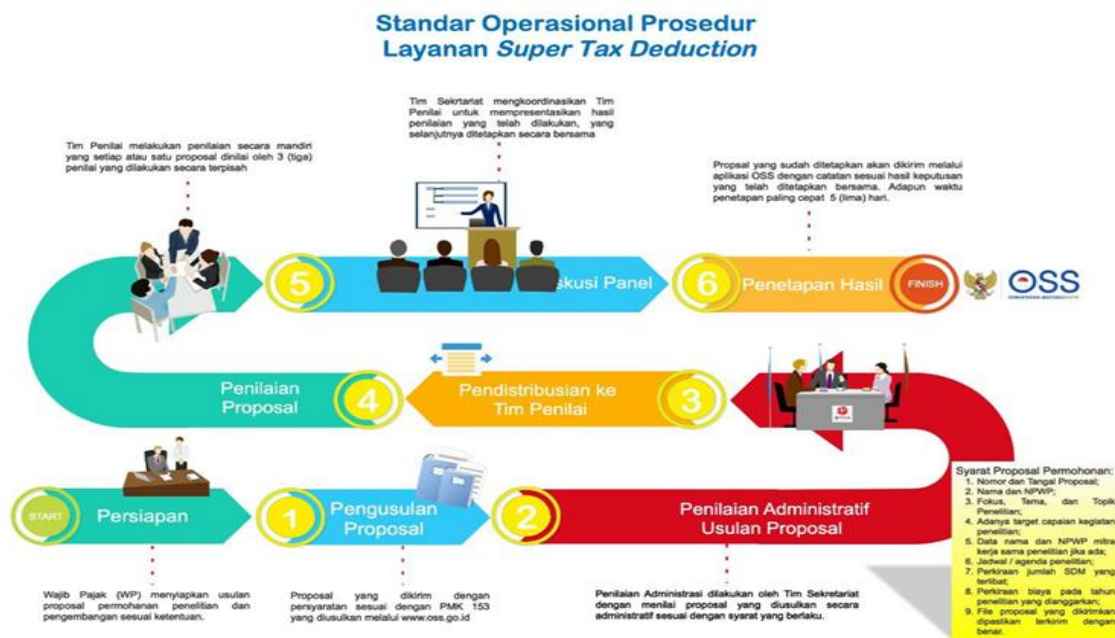
1. Skema *Royalty Sharing*

Royalty sharing merupakan pembagian imbalan yang diterima atas pemakaian suatu produk atau teknologi, atas dasar penggunaan, lisensi, atau komersialisasi produk tersebut antara pihak inventor, institusi, maupun pihak pendukung. Adanya royalti sharing mendorong pihak swasta untuk terlibat dan berkontribusi dalam pendanaan riset dan inovasi sehingga dapat memperoleh hak atas pembagian royalti terhadap produk/teknologi yang dihasilkan dan dikomersialisasikan.

2. Skema *Super Tax Deduction*

Skema ini memaksimalkan potongan pajak bagi dunia usaha yang melakukan kegiatan riset, sehingga mengurangi beban biaya dan meningkatkan minat investasi di bidang inovasi. Pelaksanaan *Super Tax Deduction* dilakukan melalui sinergi antara BRIN dengan Dirjen Pajak dan Kementerian Investasi/BKPM dalam mengawal pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan riset tertentu yang dilakukan oleh dunia usaha/industri.

Gambar 14. Diagram Alir *Super Tax Deduction*



Strategi 3: Meningkatkan Fasilitas Program *Matching Fund* dan *Competitive Grant* bagi Swasta

Strategi ini bertujuan untuk memperluas partisipasi sektor swasta dalam pendanaan riset dan inovasi, melalui skema insentif kolaboratif yang

dirancang untuk mempertemukan kepentingan dunia usaha dan kepakaran lembaga riset atau perguruan tinggi.

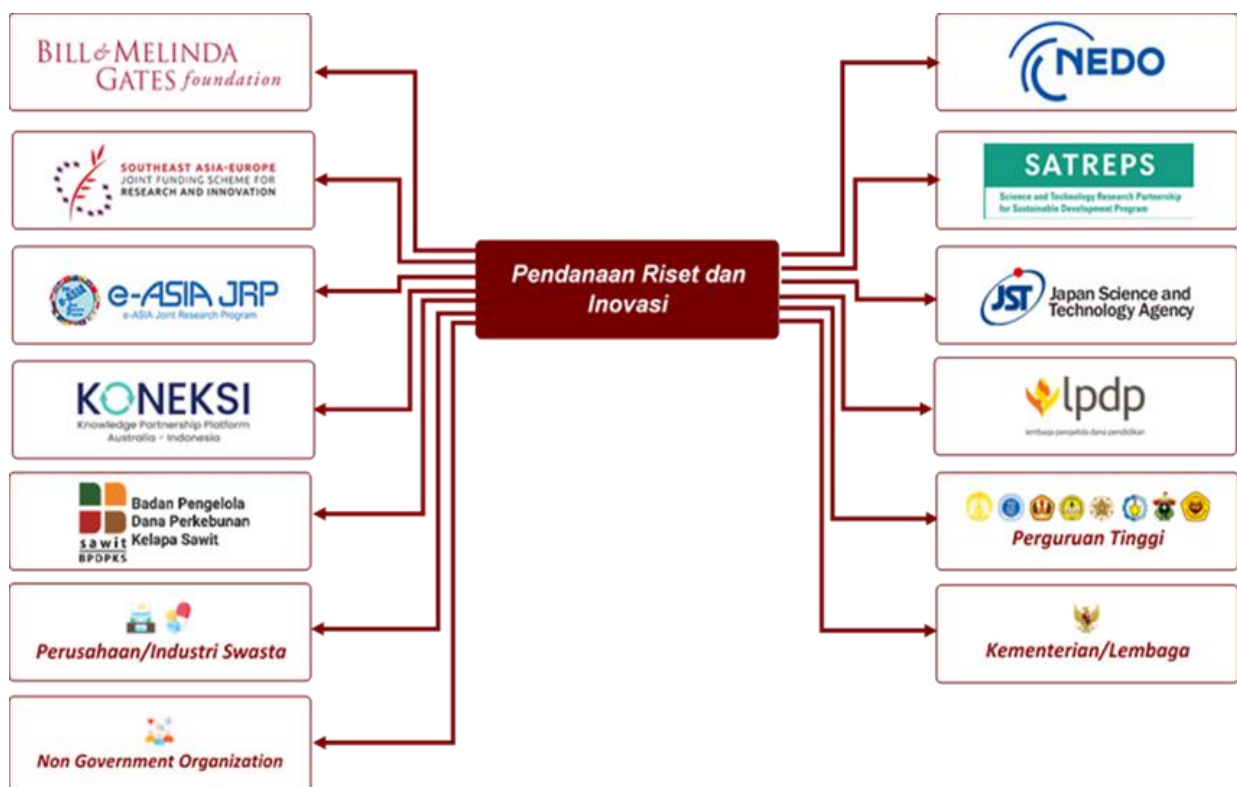
1. Skema *Matching Fund*: Membangun Kolaborasi melalui Pendanaan Bersama.

Skema *Matching Fund* difokuskan pada penciptaan mekanisme pendanaan bersama (*co-funding*) antara lembaga riset/ perguruan tinggi dan dunia usaha. Dalam skema ini:

- a. Swasta berkontribusi dalam pendanaan proyek riset atau inovasi yang sejalan dengan kepentingan bisnis mereka;
- b. Pemerintah atau lembaga riset memberikan pendanaan pendamping (*matching*) untuk memperkuat dukungan terhadap proyek tersebut;
- c. Kedua pihak berperan aktif dalam pelaksanaan riset, berbagi risiko, sumber daya, serta manfaat dari luaran yang dihasilkan.

Tujuan dari skema ini adalah mendorong keberlanjutan kerja sama riset, memperkuat kepercayaan antara sektor swasta dan lembaga riset, serta mempercepat hilirisasi teknologi dan adopsi inovasi oleh industri.

Gambar 15. Pemetaan Mitra Pendanaan dalam Skema *Matching Fund* Riset dan Inovasi



2. Skema *Competitive Grant*: Inovasi yang Dipicu oleh Permasalahan Industri

Skema *Competitive Grant* dirancang dengan pendekatan berbasis permintaan (*industry-driven*), di mana pihak swasta mengidentifikasi dan mengajukan tantangan atau permasalahan nyata yang dihadapi di sektor mereka. Skema ini juga memastikan hasil riset memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan pasar, memperkuat kemitraan antara peneliti dan industri, serta meningkatkan peluang hilirisasi dan adopsi teknologi secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Strategi 4: Mengoptimalkan Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Perumusan Proses Bisnis yang Efisien dan Transparan

Proses bisnis yang efisien memungkinkan pengelolaan sumber daya secara optimal, pengurangan duplikasi aktivitas, serta percepatan alur pelayanan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik dan akurasi perhitungan PNBP. Sementara itu, penerapan prinsip transparansi dalam setiap tahapan proses bisnis berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas, meminimalisasi potensi penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, integrasi efisiensi dan transparansi dalam proses bisnis merupakan prasyarat esensial untuk menciptakan sistem pengelolaan PNBP yang berkelanjutan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Penguatan Kerangka Regulasi

Pengenaan tarif layanan PNBP yang berlaku pada BRIN diatur dengan memperhatikan beberapa pertimbangan antara lain biaya penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan layanan PNBP, dampak pengenaan terhadap masyarakat, dunia usaha dan sosial budaya, serta aspek keadilan sesuai dengan masing-masing objek PNBP. Selain itu Jasa layanan PNBP pada BRIN akan berfokus pada layanan yang bersifat *customize* sesuai dengan kebutuhan/permintaan mitra melalui kontrak kerja sama.

3. Memperkuat Keandalan Data dan Sistem Informasi

Pengembangan sistem IT dalam rangka digitalisasi, simplifikasi, transparansi, dan integrasi sistem pengelolaan PNBP dalam kerangka pembangunan sistem informasi PNBP terintegrasi (ELSA – E-Layanan Sains).

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Optimalisasi penerimaan PNBP memerlukan dukungan SDM yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Salah satu pendekatan strategis untuk mencapai hal tersebut adalah melalui percepatan pengembangan kompetensi dan peningkatan kualifikasi SDM secara terstruktur dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk membentuk aparatur yang tidak hanya menguasai aspek teknis dalam penyediaan layanan PNBP, tetapi juga memiliki kualifikasi yang mampu merespons secara cepat dan tepat terhadap perubahan regulasi, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

3.2.4 Arah Kebijakan 4: Penajaman Arah Riset dan Inovasi, yang dilaksanakan dengan strategi:

Strategi 1: Merumuskan Agenda Riset dan Inovasi Nasional

Dalam kerangka pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, riset dan inovasi diposisikan sebagai pengungkit utama transformasi pembangunan nasional. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, disrupsi teknologi yang cepat, serta meningkatnya tantangan pembangunan berkelanjutan, diperlukan arah riset dan inovasi

yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan strategis jangka menengah dan panjang.

Melalui penyelarasan prioritas riset dengan kebutuhan strategis jangka menengah dan panjang, Agenda dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Nasional berperan dalam mendorong sinergi dan konsolidasi lintas sektor dan lintas aktor—meliputi akademisi, lembaga riset, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat—dalam membangun ekosistem riset dan inovasi nasional yang kuat, adaptif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan inovasi menjadi instrumen strategis untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, mempercepat adopsi teknologi, serta memperluas manfaat inovasi bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Agenda dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Nasional difokuskan sebagai instrumen pengungkit utama untuk:

1. mendorong transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam domestik yang bernilai tambah tinggi melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi maju; dan
2. mempercepat transformasi sosial dan masyarakat menuju SDM unggul, berdaya saing global, serta berakar pada nilai budaya dan jati diri bangsa.

Dalam mendukung transformasi tersebut, ditetapkan 8 (delapan) Agenda dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Nasional yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan strategis pembangunan nasional, meliputi:

1. Kedaulatan Pangan

Arah riset dan inovasi di sektor pangan diarahkan untuk mewujudkan sistem pangan nasional yang mandiri, berdaulat, bergizi, dan berkelanjutan sebagai pilar ketahanan ekonomi dan stabilitas nasional. Riset dan inovasi antara lain mencakup penguatan seluruh rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengembangan benih dan bibit unggul berbasis sumber daya genetik lokal, penerapan sistem produksi *on farm* yang presisi, adaptif terhadap perubahan iklim, dan ramah lingkungan, hingga penguatan *off farm* melalui teknologi pascapanen, hilirisasi, industrialisasi, dan logistik pangan. Agenda ini juga didukung oleh *enabler* berupa kebijakan pangan berbasis bukti ilmiah, digitalisasi sistem pangan, penguatan kelembagaan dan kemitraan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan keamanan dan mutu pangan, guna mengurangi ketergantungan pada impor pangan strategis dan meningkatkan nilai tambah domestik.

2. Kedaulatan Energi

Arah riset dan inovasi di sektor energi ditujukan untuk mendukung terwujudnya sistem energi nasional yang andal, efisien, berkelanjutan, dan berdaulat dalam kerangka transisi energi yang berkeadilan. Riset dan inovasi antara lain diarahkan pada pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (termasuk energi nuklir), peningkatan efisiensi dan konservasi energi, serta penguatan sistem penyimpanan dan manajemen energi berbasis digital dan kecerdasan buatan. Dalam masa transisi, agenda ini juga mencakup pemanfaatan sumber daya energi fosil domestik secara lebih bersih dan efisien sebagai solusi jembatan, pengembangan teknologi rendah karbon

termasuk *carbon capture storage (CCS)/ carbon capture utilization and storage (CCUS)*, serta penguatan rantai nilai mineral energi strategis. Seluruh upaya tersebut ditopang oleh pengembangan infrastruktur energi cerdas, penguatan regulasi dan pembiayaan hijau, serta peningkatan kapasitas SDM sektor energi.

3. **Ketahanan Air dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan**
Arah riset dan inovasi di sektor ketahanan air dan lingkungan hidup berkelanjutan diarahkan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Riset dan inovasi antara lain difokuskan pada pengelolaan sumber daya air secara terpadu (termasuk pengolahan air bersih dan air minum), peningkatan efisiensi dan keandalan sistem irigasi, serta penerapan teknologi pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan berbasis data dan IoT. Agenda ini juga mencakup perlindungan dan restorasi ekosistem darat, pesisir, dan laut, mitigasi serta adaptasi perubahan iklim, pengurangan pencemaran, dan pengelolaan risiko bencana. Pendekatan ekonomi sirkular dan biosirkular dikembangkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan, air, dan energi secara berkelanjutan.
4. **Kedaulatan Kesehatan**
Arah riset dan inovasi di sektor kesehatan diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan sistem kesehatan nasional sebagai modal utama pembangunan SDM unggul. Riset dan inovasi antara lain mencakup pengembangan obat, vaksin, bahan baku farmasi, dan alat kesehatan dalam negeri, serta pemanfaatan bioteknologi, genomik, dan teknologi kesehatan presisi. Agenda ini juga memperkuat sistem surveilans dan deteksi dini penyakit, pengembangan teknologi diagnostik dan terapeutik, serta inovasi sistem layanan kesehatan yang inklusif dan berbasis bukti. Seluruh upaya tersebut didukung oleh penguatan ekosistem riset dan industri kesehatan nasional, regulasi adaptif, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan.
5. **Penguatan Industri Strategis**
Arah riset dan inovasi di sektor industri strategis bertujuan mendorong transformasi struktur ekonomi nasional melalui industrialisasi berbasis nilai tambah dan penguasaan teknologi kunci. Riset dan inovasi antara lain diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam, pengembangan manufaktur maju, digitalisasi industri, serta penguasaan material dan teknologi strategis yang mendukung daya saing global. Agenda ini juga mencakup integrasi riset dengan kebutuhan industri, peningkatan kandungan lokal, serta penguatan ekosistem inovasi melalui kemitraan antara lembaga riset, industri, dan pemerintah, guna mempercepat difusi teknologi ke sektor produktif.
6. **Ketahanan Sosial, Masyarakat dan Budaya**
Agenda ini memastikan bahwa transformasi ekonomi dan teknologi berjalan seiring dengan penguatan kohesi sosial, pembangunan budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Riset dan inovasi antara lain mencakup kajian transformasi sosial, tata kelola

yang inklusif, penguatan nilai budaya dan jati diri bangsa, serta pengembangan kebijakan publik berbasis data sosial dan humaniora. Agenda ini juga mendukung peningkatan literasi sains dan digital, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan global secara adaptif dan berkeadilan.

7. Pengembangan Kedirgantaraan dan Keantariksaan

Arah riset dan inovasi di sektor kedirgantaraan dan keantariksaan diarahkan untuk memperkuat penguasaan teknologi strategis nasional di bidang dirgantara dan antariksa. Riset dan inovasi antara lain mencakup pengembangan sistem observasi bumi, satelit komunikasi dan navigasi, teknologi wahana berawak, nirawak, roket dan satelit, serta pemanfaatan data antariksa untuk mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan perencanaan pembangunan. Agenda ini juga mendorong penguatan industri antariksa dalam negeri dan kedaulatan data nasional sebagai bagian dari ekonomi berbasis teknologi tinggi.

8. Pengembangan Ketenaganukliran

Arah riset dan inovasi di sektor ketenaganukliran diarahkan untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi nuklir secara aman, selamat, dan berkelanjutan. Riset dan inovasi antara lain mencakup pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi, kesehatan, industri, air, dan pangan, termasuk pengembangan reaktor dan aplikasi non-energi. Agenda ini menekankan penguatan aspek keselamatan, keamanan, dan *safeguards*, pengelolaan limbah radioaktif, serta penguatan regulasi dan SDM sesuai dengan standar internasional.

Secara keseluruhan, delapan Agenda dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Nasional tersebut disusun sebagai kerangka strategis yang adaptif, terarah, dan berbasis kebutuhan pembangunan nasional. Perumusannya dilakukan melalui proses partisipatif dan konsultatif dengan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan keselarasan antara prioritas riset dan inovasi dengan kebutuhan riil sektor pembangunan dan dunia usaha. Dalam hal ini, koordinasi dan sinergi secara intensif dilakukan antara lain dengan berbagai kementerian/lembaga dan mitra strategis lainnya, agar arah pengembangan iptek tidak hanya responsif terhadap tantangan global, tetapi juga relevan dengan kebutuhan industri, penguatan kapasitas nasional, dan agenda transformasi ekonomi Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, Agenda dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Nasional diharapkan menjadi instrumen integratif yang mampu mengonsolidasikan sumber daya iptek nasional, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memastikan bahwa hasil riset dan inovasi memberikan dampak nyata bagi peningkatan daya saing, kemandirian, dan kesejahteraan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Strategi 2: Menentukan Kegiatan Riset *Top-Down*

Kegiatan riset *top-down* merupakan skema pelaksanaan kegiatan yang dirancang oleh BRIN untuk mempercepat penciptaan dampak riset dan inovasi nasional melalui pendekatan kolaboratif, lintas kepakaran dan lintas sektor. Skema ini difokuskan pada penyempurnaan purwarupa yang telah dihasilkan oleh BRIN, dengan orientasi pada kebutuhan industri dan pengguna, serta diarahkan untuk menghasilkan dampak signifikan dalam jangka pendek. Pelaksanaannya memprioritaskan riset dan inovasi terapan dengan *Technology Readiness Level/Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TRL/TKT)* tinggi (utamanya di atas TRL 7), guna mempercepat adopsi dan hilirisasi teknologi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi strategis dengan periset perguruan tinggi yang unggul di bidangnya, termasuk pelibatan *prominent professor*, serta dikaitkan secara terarah dengan riset dasar *frontier* atau *advanced science* yang berorientasi pada terobosan ilmiah kelas dunia. Untuk riset dasar yang bersifat sangat novel dan berorientasi *Nobel-class science*, persyaratan TRL tidak harus di atas 7. Selain itu, dalam konteks pelaksanaan *technology foresight*, BRIN dapat melaksanakan riset dengan tingkat kesiapterapan teknologi yang belum tinggi (TRL di bawah 7), mengingat karakter tantangan yang kompleks, berisiko tinggi, dan membutuhkan orkestrasi nasional serta kepemimpinan kelembagaan yang kuat.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan fleksibilitas pendanaan, kegiatan riset *top-down* dilaksanakan melalui kombinasi pembiayaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan dukungan pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Skema ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pembiayaan riset strategis nasional, meningkatkan daya ungkit investasi riset, serta memastikan kesinambungan pendanaan pada tahapan pengembangan teknologi hingga mendekati komersialisasi.

Berdasarkan prioritas riset dan inovasi yang tercantum dalam Agenda dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN telah menetapkan tematik dan fokus kegiatan riset *top-down* yang diarahkan untuk menghasilkan riset dan inovasi dengan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam jangka pendek, sebagaimana berikut:

1. Bidang Kedaulatan Pangan: pengembangan dan pemuliaan varietas unggul tanaman (terutama padi dan bawang putih); pengembangan teknologi pengawetan, pengemasan, penyimpanan makanan untuk mengurangi *food loss* dan *food waste*; riset dan inovasi untuk mendukung diversifikasi konsumsi serta produksi *future food & blue food*; pengembangan teknologi pengolahan pangan untuk mendukung siaga bencana; pengembangan teknologi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG); penguasaan dan pengembangan teknologi perikanan tangkap; dan pengembangan teknologi budidaya pembesaran (*rearing*).
2. Bidang Kedaulatan Energi: penguasaan dan pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan untuk mendukung transisi energi, termasuk PLTN.
3. Bidang Ketahanan Air dan Pengembangan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: pengembangan teknologi air bersih dan air minum;

- pengembangan sistem dan teknologi penanganan limbah; dan teknologi mitigasi dan penanganan bencana.
4. Bidang Kedaulatan Kesehatan: riset dan inovasi untuk mewujudkan kemandirian produk kesehatan terutama dalam teknologi pengembangan obat dan alat kesehatan (vaksin, obat, bahan baku obat, pengobatan presisi, dan *test kit*) ; dan *sports science*.
 5. Bidang Penguatan Industri Strategis: riset dan inovasi bidang kimia dasar, mineral, dan logam; penguasaan dan pengembangan teknologi material dan pendukung industri elektronik dan semikonduktor; dan riset dan inovasi untuk mendukung industri tekstil dan alas kaki.
 6. Bidang Pengembangan Kedirgantaraan dan Keantariksaan: penguasaan dan pengembangan teknologi wahana berawak (terutama N219 dan N219A), teknologi roket dan penyelenggaraan bandar antariksa.
 7. Bidang Pengembangan Ketenaganukliran: riset dan inovasi teknologi deteksi radiasi untuk keselamatan dan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan pengembangan teknologi *radiation portal monitor*.

Melalui kegiatan riset *top-down* tersebut, BRIN menegaskan perannya sebagai orkestrator nasional dalam mengintegrasikan sumber daya riset, menyinergikan kapasitas ilmiah dan kebutuhan industri, serta memastikan bahwa agenda prioritas riset dan inovasi menghasilkan keluaran yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap daya saing industri, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi 3: Meningkatkan Peran BRIN dalam Program Prioritas Nasional

Sebagai lembaga yang mengemban mandat nasional di bidang riset dan inovasi, BRIN memiliki peran strategis dalam menghadirkan solusi berbasis iptek untuk menjawab permasalahan pembangunan yang bersifat prioritas dan berdampak luas. Dalam kerangka pelaksanaan Agenda dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN juga menginisiasi *Champion Program* sebagai program unggulan berbasis pendekatan proyek (*project-based research*) yang dirancang untuk mengakselerasi kontribusi nyata riset dan inovasi terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Sejalan dengan RPJMN 2025–2029, program ini diarahkan secara khusus untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Dalam konteks ini, kontribusi BRIN melalui *Champion Program* difokuskan pada program *quick wins*, yaitu: (1) dukungan riset dan inovasi untuk penyediaan sistem dan teknologi pangan bergizi dalam program Makan Bergizi Gratis di sekolah dan pesantren, serta intervensi gizi bagi balita dan ibu hamil; dan (2) dukungan riset dan inovasi di bidang kesehatan untuk penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan penanganan dan eliminasi tuberkulosis (TBC), serta penguatan kesiapan teknologi dan sistem layanan rumah sakit berkualitas di tingkat kabupaten/kota. Dengan menempatkan *Champion Program* sebagai bagian integral dari Agenda dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Nasional serta kegiatan riset *top-down*, BRIN menegaskan perannya sebagai orkestrator nasional yang memastikan kesinambungan antara arah kebijakan pembangunan, pelaksanaan riset strategis, dan penciptaan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Program ini bertujuan untuk:

- a. Melaksanakan riset inovatif yang bersifat *problem solving* dan fokus pada isu-isu prioritas nasional.
- b. Memastikan hasil riset dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan yang menjadi fokus Presiden.
- c. Mengoptimalkan peran BRIN sebagai orkestrator riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Champion Program BRIN menjadi bagian dalam berbagai program prioritas pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis, Penuntasan Kasus TBC, dan Pengolahan Sampah Terpadu.

- a. Sinergi Riset dan Hasil Riset dalam Penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Salah satu program prioritas nasional yang menjadi fokus dukungan riset BRIN adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memiliki dampak strategis dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketahanan pangan. Dalam mendukung MBG, sejumlah riset lintas bidang tengah dan akan dilaksanakan oleh BRIN melalui pendekatan interdisipliner. Sinergi ini menunjukkan komitmen BRIN dalam memastikan bahwa iptek dan inovasi tidak hanya menjadi wacana, melainkan instrumen nyata untuk memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), riset dan inovasi BRIN dapat dimulai dari hulu hingga hilir program MBG. Pada hulu, riset pertanian dan pangan berperan melalui pengembangan varietas unggul, peningkatan nilai gizi pangan lokal, dan teknologi produksi berkelanjutan. Inovasi seperti pangan fungsional, biofortifikasi, fortifikasi, pemuliaan tanaman, dan pengemasan ramah lingkungan dan distribusi dalam rantai pasok akan membantu menyediakan pangan bergizi, aman, dan terjangkau.

Riset yang mendukung program MBG antara lain biofortifikasi dan peningkatan kualitas pangan lokal untuk mendukung ketahanan gizi. Upaya mencakup optimalisasi kandungan *zinc* pada padi melalui mikroba pelarut Zn dan teknologi genom *editing*, serta seleksi varietas sorgum dan ubi kayu rendah HCN berbasis metabolomik. Pengembangan ubi jalar kaya betakaroten dan pemanfaatan lahan hutan dengan tanaman garut memperkuat ketahanan pangan. Riset mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan juga melalui pengembangan bibit unggul berbasis molekuler untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas umbi kentang di lahan kering tropis. Riset *on-going* di bidang perkebunan menunjukkan kemajuan dalam penyediaan benih unggul dan pengelolaan tanaman strategis. Varietas unggul kakao, stevia, dan tebu dikembangkan untuk produksi tinggi dan budidaya ramah lingkungan.

Di bidang peternakan, peningkatan kualitas dan ketersediaan protein hewani guna mendukung ketahanan pangan dan pencegahan *stunting*. Suplementasi nanopartikel mineral seperti selenium dan tembaga pada kelinci, serta fortifikasi *zinc* dan zat besi pada itik dan ternak perah, terbukti meningkatkan kualitas daging dan susu. Budidaya sapi potong ramah lingkungan dengan pakan alga juga menghasilkan daging premium. Ke depan, riset difokuskan pada rekayasa genetik ternak termasuk ayam lokal dengan teknologi *Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats* (CRISPR), pemanfaatan metagenomik untuk optimasi mikrobiota usus ternak, serta karakterisasi protein susu kambing lokal. Selain itu,

pengembangan *mini-ranch* komunal, produksi protein alternatif dari limbah peternakan, dan vaksin DNA multivalen untuk ternak menjadi strategi penting dalam mendukung MBG dari sisi hulu secara berkelanjutan dan berbasis teknologi.

Selain itu, berbagai riset pangan fungsional dan teknologi pengemasan telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas gizi, keamanan, dan daya simpan produk pangan lokal. Inovasi meliputi formulasi beras analog dari ubi kayu, pasta sagu bernilai gizi tinggi, serta daging analog dari belalang dan kacang merah untuk terapi obesitas. Teknologi fermentasi tempe non-kedelai, kefir *high-fiber*, dan kolostrum kambing lokal dikaji melalui pendekatan multi-omik. Pengembangan bioplastik, kemasan cerdas, dan sistem deteksi keamanan pangan berbasis biosensor dan spektroskopi juga dilakukan untuk mendukung jaminan mutu produk. Riset mendatang berfokus pada inovasi *superfood*, teknologi pengawetan, dan sistem deteksi pangan halal, memperkuat ketahanan pangan nasional dan kesehatan masyarakat.

Pengembangan biokomposit, enkapsulasi herbal, dan *edible coating* berbasis bahan alami mendukung kualitas dan umur simpan produk hortikultura serta pangan fungsional. Teknologi gelatin ikan patin, dan bioplastik dari cascara memperkuat hilirisasi industri ramah lingkungan. Pendekatan berbasis IoT, spektra, dan *machine learning* meningkatkan efisiensi distribusi dan prediksi harga pangan. Klusterisasi pati lokal, modifikasi bahan, serta teknologi *blockchain* dan *supply chain* mendukung distribusi bahan pokok strategis dalam mendukung MBG secara berkelanjutan dan aman. Teknologi tepat guna melalui optimasi pengering silinder ganda untuk produksi tepung telur instan berbasis purwarupa pembangkit uap elpiji skala UMKM, serta pemanfaatan tepung ikan teri dalam mie sagu guna meningkatkan kandungan protein, fosfor, dan kalsium bagi anak *stunting*. Dalam lima tahun, teknologi ini menghasilkan produk pangan fungsional berbahan lokal dan sistem penyimpanan yang memperpanjang masa simpan serta memperkuat rantai distribusi pangan, berdampak nyata bagi peningkatan gizi dan keberlanjutan pangan masyarakat.

Pada sisi hilir, aspek keamanan pangan dalam program MBG menjadi komponen yang sangat krusial, mengingat kontaminasi pangan dapat membahayakan kesehatan masyarakat penerima, terutama anak-anak. Kurangnya standar higiene dan sanitasi dalam pengolahan serta distribusi makanan berpotensi menimbulkan kejadian keracunan massal, seperti yang telah dilaporkan di beberapa provinsi. Keamanan pangan sendiri merujuk pada jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi aman, bebas dari bahaya biologis, kimia, maupun fisik, sehingga tidak menimbulkan risiko kesehatan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya keamanan pangan meliputi kurangnya pengetahuan dan pelatihan bagi penjamah makanan, kondisi dapur yang tidak higienis, penyimpanan bahan pangan yang tidak sesuai standar, serta proses distribusi yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi. Selain itu, belum semua sekolah menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan. Permasalahan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah potensi makanan basi akibat penyimpanan yang tidak memadai.

Dalam upaya meningkatkan mutu pangan dan keamanan dalam program MBG, BRIN menawarkan teknologi pengawetan makanan menggunakan Iradiator Gamma Merah Putih. Teknologi radiasi ini berfungsi untuk melumpuhkan bakteri patogen dan mikroba dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme sekaligus memperpanjang masa simpan makanan, sehingga makanan tetap aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu lebih lama. Selain itu, riset dan inovasi terkait alat deteksi

kontaminasi makanan—baik pada bahan baku di gudang maupun pada makanan yang telah matang—merupakan solusi penting dalam menjamin keamanan pangan MBG. Kebersihan air yang digunakan dalam proses memasak di dapur MBG juga menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pengembangan alat untuk mengukur kebersihan air maupun teknologi pengolahan air agar menjadi layak pakai menjadi prioritas riset. Teknologi BRIN untuk mengubah air laut menjadi air minum yang layak melalui proses berbasis hidrogen turut mendukung ketersediaan air bersih dalam pengolahan makanan program MBG. Selanjutnya, ketersediaan fasilitas gudang penyimpanan bahan baku dan makanan matang dengan menggunakan teknologi *Controlled Atmosphere Storage* (CAS) menjadi bagian penting dalam menjaga mutu bahan pangan. Riset pengembangan alat ukur fisik anak untuk memastikan status gizi yang cukup juga merupakan inovasi BRIN yang berkontribusi dalam mendukung keberhasilan program MBG secara menyeluruh.

Riset ekonomi memiliki peran dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui perumusan strategi penyediaan dan distribusi pasokan pangan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan MBG, riset berjudul “Analisis Strategi Penyediaan dan Distribusi Pasokan/*Supply* Pangan dalam Pelaksanaan Program MBG” dilakukan dengan sejumlah tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi sumber penyediaan dan distribusi pasokan pangan, termasuk tingkat keterlibatan petani lokal, UMKM, dan BUMDes sebagai aktor utama dalam rantai pasok lokal. Tujuan ini penting untuk memahami pola dan kapasitas pasok pangan di berbagai wilayah. Kedua, menganalisis dukungan sumber daya yang mencakup alokasi anggaran, kecukupan SDM, serta kesiapan kelembagaan dalam memastikan kelancaran penyediaan dan distribusi pangan untuk program MBG. Ketiga, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program MBG, termasuk dari sisi ketepatan waktu distribusi, kualitas komoditas, harga, serta sinergi antar-lembaga dan aktor lapangan. Terakhir, riset ini bertujuan untuk merumuskan saran strategis dalam peningkatan sistem penyediaan dan distribusi pangan, guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas program MBG di berbagai konteks geografis dan kelembagaan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang bukan semata-mata sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi sebagai upaya sistematis untuk memutus mata rantai gizi buruk dan *stunting* sekaligus memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Meski demikian, dinamika pelaksanaan di lapangan masih menyisakan sejumlah tantangan—mulai dari rendahnya literasi gizi di kalangan penerima manfaat, keterbatasan materi edukasi yang kontekstual, hingga laju penyebaran informasi yang kerap kalah cepat dibanding arus hoaks di media sosial. Kondisi ini menuntut intervensi sosial-humaniora yang mampu menjawab kebutuhan edukasi gizi secara lebih adaptif, personal, dan luas cakupannya.

Riset yang berjudul “Edukasi MBG Berbasis AI-NLP dan *Transformative Thinking*: Kajian Respon Media Sosial” ini bertujuan (1) mengeksplorasi secara mendalam strategi edukasi gizi yang telah dan sedang diterapkan dalam Program MBG; (2) menganalisis bagaimana pendekatan kognitif—yang menitikberatkan pada proses pembentukan pengetahuan—dan *transformative thinking*—yang mendorong perubahan pola pikir dan perilaku—dapat meningkatkan efektivitas edukasi gizi di Program MBG; (3) menilai potensi pemanfaatan *Natural Language Processing-Artificial Intelligence* (NLP-AI) dan analisis sentimen media sosial untuk memperluas jangkauan, menyesuaikan pesan, serta memonitor respons publik terhadap kampanye gizi Program MBG; dan (4) merumuskan strategi edukasi gizi berbasis teknologi, kognitif, dan *transformative thinking* yang dapat

diadaptasi secara lokal, sejalan dengan keragaman budaya, bahasa, dan preferensi masyarakat penerima manfaat. Riset yang dilakukan akan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) sebagai pendekatan utama untuk menjawab permasalahan dan mencapai hasil yang diharapkan.

BRIN berperan sebagai entitas pendukung dalam Kegiatan Prioritas Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi. Upaya riset yang dilakukan BRIN untuk mendukung program tersebut antara lain:

No	Riset/Hasil Riset
a.	Pengembangan Alat Deteksi Kontaminasi untuk Bahan Baku Makanan
b.	Pengembangan Alat Deteksi Kontaminasi untuk Makanan
c.	Pengembangan Alat Deteksi Kontaminasi Air
d.	Teknologi Pengolahan Air Laut menjadi Air Minum
e.	Pengembangan Alat Ukur Fisik Anak yang Bergizi Cukup
f.	Pengembangan Gudang Penyimpanan Bahan Baku dan Makanan Matang menggunakan Teknologi <i>Controlled Atmosphere Storage</i> (CAS)
g.	Pengembangan menu makan bergizi gratis berbasis pangan lokal
h.	<i>Food Safety</i> pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)
i.	Perencanaan, implementasi, dan pengaruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap asupan harian, status gizi, dan tingkat kecerdasan anak sekolah
j.	Capaian, tantangan, dan pembelajaran awal/ <i>lessons learned</i> program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia
k.	Biofortifikasi tanaman pangan lokal untuk meningkatkan kandungan mikronutrien pada padi, jagung, dan umbi-umbian
l.	Pengembangan pangan fungsional berbasis sumber daya genetik lokal (formulasi produk berbahan lokal yang kaya antioksidan, serat, dan protein untuk mendukung gizi seimbang)
m.	Teknologi produksi dan pengemasan pangan bergizi untuk memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas nutrisi
n.	Deteksi dan keamanan pangan berbasis teknologi omik
o.	Pengembangan protein hewani alternatif
p.	Pemanfaatan lahan marginal untuk meningkatkan akses pangan sehat
q.	Iradiator Gamma Merah Putih untuk memperpanjang masa simpan makanan

b. Sinergi Riset dan Hasil Riset dalam Menuntaskan Kasus TBC

Prioritas Nasional ke-4 pemerintah tahun 2025-2029 menekankan pentingnya pembangunan SDM yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Untuk mendukung tujuan tersebut, salah satu program yang dirancang adalah penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di tingkat kabupaten. Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi langkah preventif yang penting agar penyakit dapat terdeteksi sejak dini dan ditangani sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Penanganan TBC secara sistematis juga sangat krusial mengingat Indonesia masih termasuk negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Deteksi dini dan pengobatan yang tepat dapat memutus rantai penularan dan menurunkan angka kesakitan.

Tuberkulosis (TBC), disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, merupakan salah satu dari sepuluh penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Global TB Report 2024, Indonesia berada pada peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus TBC, setelah India. Diperkirakan

terdapat 1.090.000 kasus dan 125.000 kematian setiap tahun, setara dengan sekitar 14 (empat belas) kematian per jam. Pada tahun 2024, tercatat sekitar 885 ribu kasus TBC, dengan distribusi yang menunjukkan 496 ribu kasus pada laki-laki, 359 ribu pada perempuan, dan 135 ribu pada anak-anak usia 0–14 tahun. Penyakit ini mudah menular jika tidak ditangani secara tepat, sehingga deteksi dini dan pengobatan efektif adalah kunci untuk memutus rantai penularan dan menekan angka kesakitan. Data ini menunjukkan perlunya intensifikasi upaya pencegahan dan pengobatan di seluruh Indonesia.

Tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor kunci. Pertama, notifikasi kasus yang belum optimal (*under reporting*) menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi (*missing case*) dan menjadi sumber penularan laten. Kedua, sering terlambatnya diagnosis akibat keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan. Ketiga, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan minum obat mengakibatkan pengobatan yang tidak tuntas (*loss to follow up*), yang diperparah oleh pemberian pengobatan pencegahan TB yang belum optimal. Selain itu, tingginya kasus TBC anak menunjukkan penularan aktif di masyarakat, sementara munculnya *Multiple Drug Resistance* (MDR) memperumit upaya pengendalian. Kombinasi masalah ini memperlihatkan perlunya perbaikan sistem surveilans, akses diagnostik, edukasi publik, dan penguatan layanan pengobatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BRIN senantiasa berperan aktif dalam Program Prioritas (PP) Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat, khususnya pada indikator Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk). Upaya riset yang dilakukan BRIN untuk mendukung program tersebut antara lain meliputi:

No	Riset/Hasil Riset
a.	Alat diagnostik deteksi cepat TB (RT LAMP dan RDT IFg)
b.	Pengembangan Sistem Deteksi Dini Penularan Tuberkulosis
c.	Peningkatan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien TB di Indonesia dengan menggunakan Aplikasi <i>Mobile-Phone</i> Interaktif
d.	Deteksi Faktor Risiko dan Dampak Ekonomi TB Anak
e.	Pengembangan obat Tuberkulosis (<i>Repurposing</i> dan Obat baru)
f.	Pengembangan Vaksin Tuberkulosa (VLP, mRNA)
g.	Percepatan Durasi Pengobatan Tuberkulosis
h.	Penanggulangan <i>Co-Infection</i> TB HIV
i.	Pengembangan Sistem Deteksi Tingkat keparahan penyakit paru Tuberkulosis berdasarkan CXR (<i>Chest X-Ray</i>) menggunakan <i>Machine Learning</i>

c. Sinergi Riset dan Hasil Riset dalam Pengelolaan Sampah Terpadu

Permasalahan terkait sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah yang tertuang dalam program prioritas presiden 2025-2029 yaitu menjamin pelestarian lingkungan hidup. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 27,74 juta ton. Dari jumlah tersebut, 64,21% atau 20,61 juta ton terkelola, sementara sisanya 35,79% atau 11,49 juta ton tidak terkelola. Jumlah timbunan sampah di Indonesia dapat dibilang sangat besar. Hingga saat ini belum ada teknologi pengolahan sampah di Indonesia dalam kategori *zero waste* (*max 12% residue*). Beberapa PLTSa yang sudah dibangun sulit untuk diterapkan di lokasi lain karena kendala finansial untuk investasi dan operasional. Tingginya biaya yang ditawarkan oleh

investor menyebabkan mayoritas daerah memilih menerapkan teknologi *open dumping*.

Pembuangan terbuka menyumbang sekitar 31% limbah, 19% dipulihkan melalui daur ulang dan pengomposan, dan 11% dibakar untuk pembuangan akhir. Pembuangan atau pengolahan limbah yang memadai, seperti tempat pembuangan akhir terkontrol atau fasilitas yang dioperasikan dengan lebih ketat, hampir secara eksklusif merupakan wilayah negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas (*World Bank 2018*). Dalam rangka memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Indonesia, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dari hulu ke hilir untuk mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke TPA dengan mempromosikan pendekatan “*Reduce, Reuse, Recycle*” dan pemanfaatan sampah menjadi bahan baku melalui pendekatan ekonomi sirkular.

Manajemen pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Manajemen pengelolaan sampah bisa disebut sebagai ‘pintu masuk’ untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan isu multi sektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi (*Winardi et al. 2024*). Manajemen pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumber daya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Riset pengolahan merupakan riset pengolahan sampah terpadu dan dilengkapi infrastruktur riset di BRIN sebagai salah satu langkah solusi permasalahan sampah di Indonesia yang handal, sesuai regulasi dan rendah biaya O/M (< Rp 100/Kg). Tujuan dari riset ini adalah:

- 1) Membangun ekosistem riset teknologi pengolahan sampah yang terpadu, *proven* dan siap diimplementasikan oleh Mitra (Manufaktur dan Pemda)
- 2) Membangun infrastruktur riset teknologi pengolahan sampah terpadu yang modern dan maju dengan kapasitas 2.5 ton/hari sebagai acuan teknologi pengolahan sampah di Indonesia.
- 3) Memberikan kesempatan *stakeholder* (Pemda dan Investor) untuk melihat dan menguji coba sampahnya, serta mendapatkan data yang lebih akurat mengenai pilihan-pilihan alternatif teknologi yang akan diaplikasikan di daerahnya.

BRIN berperan sebagai entitas pendukung dalam Kegiatan Prioritas: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan. Upaya riset yang dilakukan BRIN untuk mendukung kegiatan prioritas tersebut antara lain:

No	Riset/Hasil Riset
a.	Pengolahan Sampah Terpadu
b.	Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular di Kawasan Permukiman Perkotaan
c.	Efektivitas Program Bank Sampah dalam Mengurangi Timbunan Sampah di Kawasan Permukiman Padat Penduduk
d.	Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Kawasan Perkotaan

3.2.5 Arah Kebijakan 5: Penguatan Intermediasi Riset dan Inovasi melalui Jejaring/Kolaborasi Multipihak, yang dilaksanakan dengan strategi:

Strategi 1: Memperluas dan Memperkuat Jejaring Kolaborasi Riset Nasional dan Internasional melalui Konsorsium, Kemitraan Institusional, Proyek Global Strategis, dan Pemberdayaan Diaspora Ilmuwan Indonesia

Strategi ini dirumuskan untuk membangun serta mengembangkan jaringan kemitraan riset yang kuat dan berkelanjutan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi aktif dalam konsorsium riset nasional dan internasional yang bergengsi, seperti *Global Health Indonesia*, guna membuka peluang akses pendanaan kompetitif serta memperkuat jaringan riset internasional.
2. Memperluas dan memperkuat kemitraan strategis (*global strategic partnership*) dengan lembaga riset kelas dunia, organisasi dan asosiasi riset internasional untuk mendorong penelitian bersama (*joint research*), pertukaran pengetahuan (*knowledge exchange*) serta pengembangan skema kepemilikan bersama kekayaan intelektual (*co-ownership of intellectual property*), sehingga hasil riset tidak hanya dipublikasikan namun juga dikomersialisasikan secara global.
3. Meningkatkan keterlibatan dalam proyek riset global yang relevan dengan potensi nasional, seperti kerja sama dengan NEDO pada *Carbon Neutral Contribution Technology* untuk mendukung agenda perubahan iklim, serta *joint research* dengan Shandong Zhongnong Tiantai Seeds Company dalam pengembangan komoditas pangan strategis untuk ekspor nasional.
4. Mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai Asosiasi Peneliti dan memperkuat jejaring diaspora ilmuwan Indonesia (*Diaspora Engagement Program*). Pemanfaatan potensi diaspora difokuskan pada pengembangan skema mobilitas periset, termasuk *visiting professor* atau *joint research* dan bentuk kolaborasi lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas dan dampak riset nasional.

Strategi 2: Optimalisasi KST sebagai Penggerak Ekosistem Riset dan Inovasi

Strategi ini berfokus pada penguatan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) sebagai *engine* pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. KST diharapkan mampu menghubungkan secara efektif kapasitas akademik dan riset dengan kebutuhan industri serta masyarakat. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan *Innovation Value Chain* (Rantai Nilai Inovasi) dari hulu ke hilir, yang meliputi:

- a. Hulu (Riset Dasar & Terapan): fokus riset diarahkan pada tema-tema strategis nasional dan potensi unggulan daerah.
- b. Tengah (Pengembangan & Validasi): Inkubator bisnis dan *startup center* berperan dalam membina, memvalidasi ide, dan mengakselerasi pertumbuhan *startup* melalui *mentoring*, pembiayaan awal, dan akses jaringan.
- c. Hilir (Komersialisasi & Industri): pengembangan fasilitas *Teaching Industry* dan *piloting* sebagai jembatan bagi industri dan peneliti untuk melakukan *scaling-up* produk, simulasi proses produksi, dan uji coba

pasar. Memperkuat fungsi *Technology Transfer Office* (TTO) untuk memfasilitasi lisensi paten, *spin-off* perusahaan, dan kemitraan strategis.

KST yang optimal merupakan penggerak ekosistem yang mampu menciptakan nilai ekonomi dan sosial secara mandiri serta berkesinambungan melalui proses inovasi yang terintegrasi. KST harus menjadi ruang ekosistem di mana ide bertemu dengan sumber daya, talenta, dan modal, sehingga dapat tumbuh menjadi solusi yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan KST harus dapat diukur melalui indikator yang konkret, seperti *implementation indicators*, *outcome indicators*, dan *impact indicators*.

Strategi 3: Meningkatkan Kolaborasi dan Intermediasi Riset antara Pelaku Riset, Pemerintah, dan Industri sesuai Kebutuhan Nasional dan Potensi Daerah

Strategi ini bertujuan memperkuat sinergi dan intermediasi antara pelaku riset, pemerintah, dan industri guna mendukung pelaksanaan riset yang terintegrasi dan berdampak luas. Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Pengembangan dan Penguatan Rumah Inovasi Indonesia (RII) sebagai pusat berkumpulnya inovator, industri, dan *funder* untuk mentransformasi riset menjadi kedaulatan ekonomi berbasis inovasi. Rumah Inovasi Indonesia (RII) merupakan instrumen strategis terbaru yang diinisiasi oleh BRIN untuk menjawab tantangan dalam ekosistem inovasi nasional, khususnya kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan industri, pemerintah, serta masyarakat. Fragmentasi antaraktor, lemahnya fungsi orkestrasi, dan belum terbangunnya mekanisme hilirisasi yang terintegrasi menyebabkan potensi riset nasional belum memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

RII dirancang dan diposisikan sebagai titik simpul yang terintegrasi, sekaligus mendukung peran BRIN dalam menjembatani interaksi antaraktor utama, meliputi industri dan BUMN/D, investor, masyarakat, UMKM dan *startup*, pemerintah pusat (K/L) dan daerah, serta perguruan tinggi. Lebih dari sekadar pusat layanan, RII diproyeksikan sebagai ruang kolaboratif ekosistem inovasi nasional yang mempertemukan sekaligus mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan.

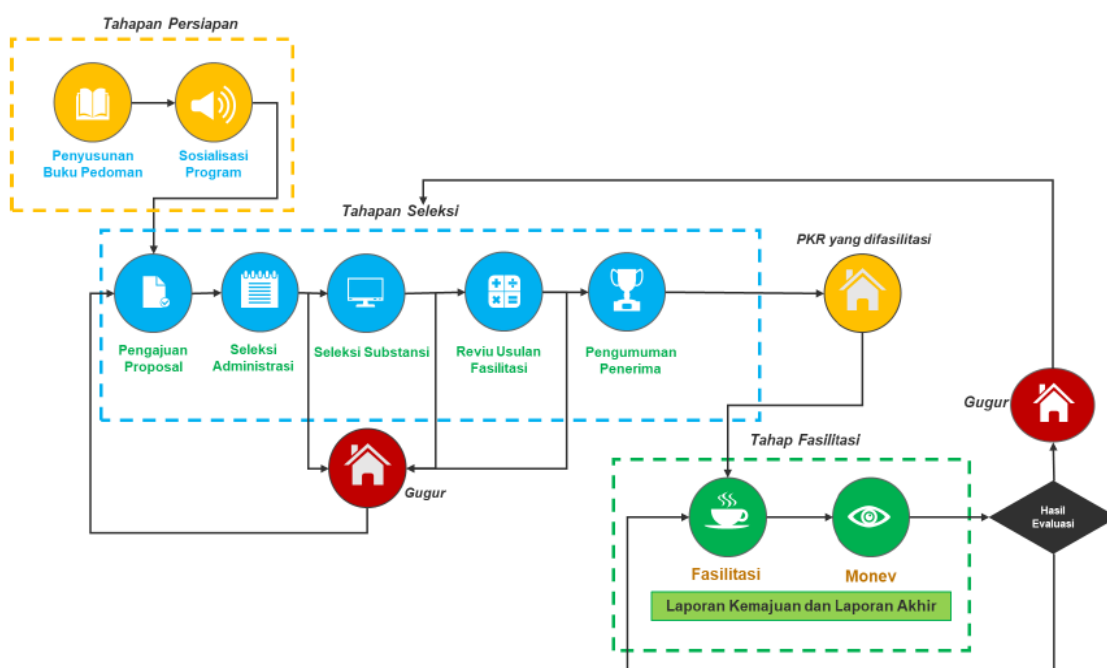
Melalui lima pilar, yaitu (1) etalase inovasi nasional; (2) *innovation hub*; (3) layanan terpadu (*one stop service*); (4) pemanfaatan data dan platform digital; serta (5) penguatan kapasitas dan budaya inovasi, RII berkomitmen memastikan keterhubungan antara sisi *supply* dan *demand* teknologi. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas inovasi nasional serta menghadirkan layanan yang transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Dengan adanya keterlibatan dan kolaborasi lintas aktor, RII diharapkan dapat memperkuat peran BRIN dalam mendorong pemanfaatan hasil riset, memperluas sinergi antaraktor, serta mendukung terwujudnya kebijakan berbasis sains dan kemandirian bangsa melalui inovasi.

2. Pembentukan dan penguatan hub tematik BRIN diarahkan untuk menjadi pusat kolaborasi strategis yang mewadahi perguruan tinggi dan industri dalam fokus tematik yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Hub Tematik berperan sebagai wahana kolaborasi lintas sektor untuk pertukaran pengetahuan, pengembangan inovasi, dan penciptaan solusi yang relevan dengan isu strategis nasional. Strategi pencapaian kinerja meliputi a) mengidentifikasi potensi riset-riset kolaboratif antara BRIN perguruan tinggi dan industri, dengan mengarusutamakan keunggulan tematik yang menjadi *flagship* di masing-masing mitra; b) memperluas cakupan dan kapasitas hub tematik, dengan memanfaatkan dukungan skema pendanaan dari program RIIM Kompetisi; c) mendorong pembentukan hub tematik baru berbasis riset Program RIIM yang terbukti memiliki luaran berkualitas tinggi serta jejaring kolaboratif yang kuat bersama BRIN.

Selain itu, model Pusat Kolaborasi Riset (PKR)—yang selama ini telah berjalan di dalam negeri—akan dikembangkan ke dalam skema PKR Internasional. Skema PKR Internasional mengusung konsep yang sama, yaitu riset kolaboratif lintas disiplin dan sektor, namun diperluas dalam lingkup kerja sama internasional. Pusat Kolaborasi Riset Internasional menyediakan platform untuk para periset dalam dan luar negeri dan pemangku kepentingan lainnya, untuk melaksanakan proyek riset bersama yang terintegrasi. Keberhasilan PKR membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta sehingga keberlanjutan serta keberhasilan proyek kolaboratif dapat terlaksana. Target luaran tahunan PKR meliputi capaian indikator *academic excellence*, *product/services*, dan *social and economic benefit*, dan *external funding*. Keberlanjutan pendanaan setiap tahunnya akan didasari hasil evaluasi capaian kinerja pada tiap tahun tersebut.

Gambar 16. Proses Bisnis Fasilitasi PKR Internasional



Gambar 17. Fasilitasi Skema PKR Internasional



3. Fasilitasi pendirian dan penguatan hub iptek berbasis sektoral di Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan bagian dari kebijakan strategis intermediasi BRIN untuk mempertemukan kebutuhan riset dan inovasi kementerian/lembaga pada tema tertentu yang memiliki nilai strategis. Sebagai *platform* kolaborasi yang dikoordinasikan oleh BRIN, hub iptekin berfungsi memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, pertukaran informasi serta pengembangan inovasi dan solusi yang mendukung agenda prioritas nasional. Untuk pencapaiannya dilakukan melalui: a) melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder*/mitra dalam merancang dan melaksanakan kegiatan yang mendukung kebutuhan riset dan inovasi pada bidang prioritas nasional; b) mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh *stakeholder*/mitra untuk dikembangkan dalam hub iptekin berbasis sektoral, sesuai mandat dan fokus tematik kementerian/lembaga; c) memberikan advokasi kebijakan dan pendampingan teknis kepada *stakeholder*/mitra sehingga kegiatan riset dan inovasi sejalan dengan arah pengembangan hub iptekin berbasis sektoral.
4. Pengembangan BRIDA atau hub iptekin di daerah diarahkan pada penguatan kelembagaan dan penguatan proses inovasi yang memberikan dampak langsung terhadap optimalisasi potensi serta penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara kolaboratif, sebagai *outcome* dari pembinaan BRIN. Penguatan ekosistem ini mencakup peningkatan efektivitas jejaring kolaborasi, penguatan dukungan kebijakan, serta optimalisasi koordinasi dan keberlanjutan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah.

Inisiasi pengembangan hub iptekin di daerah telah dilaksanakan melalui *pilot project* pengembangan hub iptekin di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok. *Pilot project* ini merupakan hasil kolaborasi multipihak antara Bappenas, BRIN, KONEKSI dan pemerintah daerah. Pada *pilot project* tersebut, selain melakukan penguatan kapasitas Ekosistem Inovasi/BRIDA, BRIN juga memberikan kontribusi melalui hasil riset dan inovasi maupun rekomendasi kebijakan yang dimiliki BRIN sebagai salah satu solusi atas permasalahan utama di Provinsi Jakarta dan Kota Depok.

Pada periode RPJMN 2025-2029, BRIN akan menginisiasi pengembangan 5 Rumah Inovasi Daerah (RID) setiap tahunnya sebagai bagian dari strategi perluasan jangkauan hub riset dan inovasi nasional. Inisiatif ini

ditujukan untuk memperkuat kapasitas riset dan inovasi lokal dalam menyelesaikan isu-isu spesifik wilayah. Pada tahun 2026, lokasi target pengembangan RID ada di provinsi Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Selaras dengan Rumah Inovasi Indonesia (RII), Rumah Inovasi Daerah (RID) akan menyediakan fasilitas riset terapan, ruang uji terap, dan layanan teknis untuk mendukung adopsi teknologi oleh industri kecil-menengah, pelaku usaha lokal, sektor publik, dan masyarakat.

Gambar 18. Ilustrasi Rumah Inovasi Daerah



5. Dalam rangka memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional, BRIN membangun kemitraan strategis dengan mitra dan pihak industri melalui berbagai skema kolaborasi, antara lain *co-funding*, *matching fund* dan *co-research*. Kolaborasi ini dilakukan melalui skema PKR-Industri dimana fokus skema ini adalah mendanai riset dan inovasi yang berfokus pada kebutuhan industri, dengan target tertentu baik dalam sains maupun industri. Pada skema ini BRIN mendanai SDM, bahan riset, dan infrastruktur, sementara industri memberikan kontribusi problem riset, bahan, fasilitas produksi, dan uji coba implementasi. Selain itu kolaborasi dengan industri dapat dilakukan melalui skema kolaborasi *co-development*, dimana skema ini dimulai dari pengiriman tim, perancangan produk bersama, hingga lisensi bersama. Skema kolaborasi dengan industri lainnya adalah Skema PPIK yang merupakan skema penyediaan laboratorium pengujian atau Organisasi Riset Kontrak (ORK) untuk melakukan pelaksanaan pengujian pra-klinik atau klinik atas kandidat produk inovasi kesehatan. Pengusulnya adalah industri yang bekerjasama dengan inventor pemilik KI dari BRIN, perguruan tinggi, dan atau lembaga riset lainnya. Sedangkan untuk pengujian pengujian produk inovasi pertanian, peternakan, dan perikanan, terdapat skema PPIP dimana skema ini terbuka bagi industri yang bekerjasama dengan *inventor* pemilik KI dari BRIN, perguruan tinggi, atau lembaga riset. Beberapa skema kolaborasi ini akan menciptakan nilai tambah bagi industri, meningkatkan kandungan lokal, dan mempercepat adopsi teknologi nasional.

3.2.6 Arah Kebijakan 6: Peningkatan Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset dan Inovasi, yang dilaksanakan dengan strategi:

Strategi 1: Meningkatkan Relevansi dan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dengan Kebutuhan Masyarakat dan Industri

Strategi ini difokuskan pada penyelarasan arah riset dan inovasi dengan kebutuhan nyata masyarakat, tantangan pembangunan nasional, dan permintaan industri. Tujuannya adalah memastikan hasil riset dan inovasi memiliki nilai guna yang tinggi, mudah diadopsi, dan memberi dampak langsung terhadap peningkatan daya saing nasional. Selain itu proses yang menjembatani antara hasil riset dan inovasi menjadi produk inovasi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna juga perlu diperkuat, diantaranya melalui skema-skema fasilitasi untuk mempercepat proses pengajuan kekayaan intelektual, pengujian produk hasil riset, hingga sertifikasi yang diperlukan agar hasil riset dan inovasi dapat menjadi produk yang siap dipasarkan atau dimanfaatkan oleh pengguna. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Memperkuat model *co-development* sebagai model kolaborasi strategis BRIN, yang menempatkan mitra industri dan calon pengguna akhir sebagai bagian dalam proses riset dan inovasi, mulai dari penyusunan kebutuhan riset, pembagian peran dan kontribusi, penyediaan dukungan pengujian bersama, perlindungan kekayaan intelektual hingga penyusunan strategi hilirisasi.
2. Mengakselerasi inisiatif BRIN *Goes to Industry* sebagai strategi interaksi BRIN-industri dengan tujuan memperluas pemanfaatan hasil riset, membuka kemitraan strategis, memastikan keberlanjutan kolaborasi berbasis kebutuhan industri dan mengenalkan skema, fasilitasi dan insentif dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
3. Melaksanakan analisis dan penilaian kekayaan intelektual (KI) sebagai dasar penentuan strategi pemanfaatan inovasi dengan menilai kesesuaian pasar, potensi komersial dan kebutuhan pengguna.
4. Menyelenggarakan *Innovation Summit* sebagai inisiatif temu bisnis dan kolaborasi strategis, yang menjadi ruang pertemuan langsung antara invensi periset BRIN dengan kebutuhan mitra industri, pemerintah, dan pengguna akhir, termasuk untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan terukur terhadap kebutuhan industri sebagai basis penyelarasan dan penguatan agenda riset BRIN.
5. Pengembangan model bisnis kerja sama pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang lebih adaptif dan fleksibel, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kapasitas mitra. Pendekatan ini memungkinkan pilihan skema kemitraan yang lebih beragam dan inklusif, sekaligus meningkatkan peluang pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
6. Menyebarkan dan mempermudah akses terhadap hasil riset dan inovasi melalui berbagai saluran, seperti sistem informasi (*platform*), diseminasi, dokumentasi, publikasi dan ekspose hasil riset dan inovasi.

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 3 (SS 3) yakni Menguatnya Tata kelola BRIN yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

3.2.7 Arah Kebijakan 7: Peningkatan Kualitas Tata Kelola BRIN yang Efisien, Efektif, Transparan, dan Akuntabel

Dalam menghadapi tantangan global serta dinamika pembangunan nasional, tata kelola yang baik menjadi pilar utama kesuksesan organisasi. Sebagai lembaga yang memikul peran strategis dalam memajukan riset dan inovasi di Indonesia, BRIN berkomitmen membangun sistem tata kelola yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, memprioritaskan kegiatan berdampak tinggi, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta menjunjung tinggi akuntabilitas atas hasil yang dicapai. Pengelolaan tata kelola di BRIN akan berpedoman pada arah kebijakan *Grand Design Roadmap* Reformasi Birokrasi (RB) Nasional terutama dalam pelaksanaan RB tematik, yaitu pendekatan dalam reformasi birokrasi yang berfokus pada tema atau sektor tertentu untuk mencapai hasil yang lebih spesifik dan terukur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, strategi yang dijalankan meliputi:

Strategi 1: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dalam Mencapai Optimalisasi Reformasi Birokrasi melalui Penguatan Pelayanan Publik, Sistem Digital, Akuntabilitas Kinerja, dan Budaya Kerja

1. Mengimplementasi transformasi digital pemerintah dengan melakukan penguatan kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital, penguatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintah, penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data untuk mendukung transformasi digital pemerintah, transformasi digital layanan publik prioritas, transformasi kapabilitas digital dan budaya digital Aparatur Sipil Negara, serta pengambilan keputusan berbasis bukti, yang dilaksanakan dengan meningkatkan strategi dan rencana, tata kelola dan manajemen, teknologi digital, audit teknologi digital, keamanan siber, kapabilitas dan budaya digital, pemanfaatan data dan informasi, keterpaduan layanan digital pemerintah, dan kepuasan layanan digital pemerintah. Penerapan transformasi digital pemerintah sebagai upaya terjadinya perubahan paradigma, budaya, proses bisnis, dan cara kerja birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang terpercaya, berkualitas, transparan, inklusif, dan efisien, dengan prinsip kedaulatan digital yaitu keterpaduan, kemudahan interoperabilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, inklusivitas, kesinambungan, keamanan, *digital by design*, *user centric*, *data enablement*, *once only principle* dan *security by design*.
2. Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan mulai dari proses perencanaan terintegrasi dan lintas sektor; peningkatan kualitas penyelarasan kinerja antar unit; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; serta peningkatan kualitas proses pelaporan kinerja.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengintegrasian sistem informasi untuk meningkatkan akses publik dalam rangka memperoleh informasi; pengelolaan pengaduan pelayanan publik terpadu; pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala; pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala; serta meningkatkan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas informasi ilmiah yang

komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, termasuk penyediaan data dan publikasi riset melalui skema *single content-multi platform* yang transparan dan terstruktur; proaktif dalam menyebarkan temuan-temuan krusial melalui berbagai platform digital dan kemitraan media; serta secara konsisten menyelenggarakan forum diskusi dan edukasi publik untuk menjembatani kesenjangan antara sains dan masyarakat. Di samping itu, penguatan kualitas layanan publik akan menjadi prioritas dengan meningkatkan standar pelayanan terhadap kebutuhan publik, memastikan setiap kanal komunikasi berfungsi secara optimal, termasuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik terpadu dan penguatan digitalisasi arsip dalam mendukung pelayanan publik; memastikan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, serta membangun citra BRIN sebagai lembaga yang agile, terbuka, responsif, dan terpercaya sebagai rujukan utama dalam mendukung ekosistem riset dan inovasi di Indonesia.

4. Penguatan budaya kerja di lingkungan BRIN yang sesuai dengan *core value* BerAKHLAK, yaitu: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Adaptif, dan Loyal. Implementasi BerAKHLAK dalam budaya kerja ASN dilakukan untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat dan mitra kerja dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Peningkatan kompetensi pegawai juga diperlukan untuk menjawab tantangan dan perkembangan dunia global untuk dapat meningkatkan kolaborasi kerja yang optimal dengan berbagai pihak.
5. Penguatan pengelolaan barang milik negara dan pengadaan melalui penatausahaan aset koleksi, kekayaan intelektual, dan purwarupa/prototipe; penataan rumah negara dan mess; utilisasi dan optimalisasi barang milik negara; serta pemanfaatan aplikasi SIMAN dan sistem pengadaan.
6. Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh bagian organisasi serta memperoleh hasil audit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan dan Barang Milik Negara serta pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku; pembangunan unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan penguatan efektivitas manajemen risiko.
7. Peningkatan kualitas kebijakan yang dilakukan mulai dari proses perencanaan dan formulasi kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan secara optimal. Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan sehingga selaras dengan konsep *evidence-based policy*. Selain itu, BRIN berperan dalam menghasilkan produk sains yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah (*science based policy*).

3.2.8 Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif, nilai, atau isu tertentu ke dalam seluruh tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Pengarusutamaan pembangunan ditujukan untuk mengoptimalkan kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak

diinginkan, sehingga terwujud pemerataan dan keadilan melalui inovasi yang inklusif dengan tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan hidup. Di dalam dokumen RPJMN 2025-2029, pengarusutamaan ini ditetapkan ke dalam 5 (lima) pendekatan, yaitu (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim. Pengarusutamaan ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan kelima pendekatan tersebut ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors* secara konsisten.

BRIN berkomitmen mengintegrasikan lima pengarusutamaan tersebut ke dalam Rencana Kerja periode 2025-2029 dengan kebijakan umum sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan inklusi sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Implementasi PUG dan inklusi sosial pada BRIN ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan melalui penciptaan ekosistem riset dan inovasi yang responsif gender serta inklusif, dengan strategi implementasi utama sebagai berikut:

- a. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Inklusi Sosial sebagai unit strategis yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengarusutamaan di seluruh lingkungan satuan kerja di BRIN.
- b. Penerapan prinsip GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) secara konsisten dalam rekrutmen SDM Iptek untuk menjamin kesetaraan akses bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, yang diwujudkan melalui pembukaan formasi khusus bagi lulusan terbaik, diaspora, penyandang disabilitas, serta putra-putri wilayah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan.
- c. Penguatan tata kelola administratif berbasis anggaran responsif gender, penyediaan infrastruktur riset dan laboratorium dengan standar aksesibilitas universal, contohnya dengan penyediaan sarana kantor dan laboratorium yang ramah kelompok rentan, seperti pengadaan dan pemeliharaan alat bantu aksesibilitas dan fasilitas laktasi melalui pagu anggaran rutin.
- d. Eksplorasi isu gender dan inklusi sosial melalui kegiatan riset dan inovasi yang dilakukan oleh peneliti bertemakan isu tersebut,

sebagai upaya menghasilkan solusi inovatif dan rekomendasi kebijakan (*evidence-based policy*), sehingga mampu memberikan dampak nyata dalam mempercepat kemandirian serta kesejahteraan kelompok rentan di masyarakat.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilakukan dengan mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah. Hal ini diwujudkan melalui penyelarasan setiap kebijakan pemerintah untuk mendukung percepatan pencapaian target SDGs 2030, serta pengintegrasian target-target tersebut ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMN dan RPJMD. Upaya ini diperkuat dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) melalui kolaborasi multi-pihak, yang disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi pencapaian target secara berkala. Selain itu, seluruh program pembangunan wajib mengimplementasikan prinsip inklusi sosial dengan fokus utama pada kelompok rentan dan marginal, serta senantiasa mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan oleh BRIN dilaksanakan dengan kontribusi BRIN sebagai salah satu instansi pengampu pencapaian Tujuan Global ke-2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Sasaran TPB dari tujuan ke-2 ini adalah: Meningkatnya jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang. Selain itu, BRIN juga menjadi instansi pengampu terhadap Tujuan Global ke-9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi pada Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat tiga (3) sasaran TPB yang didukung BRIN dari tujuan ke-9 ini, yaitu: 1) Meningkatnya proporsi pendanaan riset terhadap PDB; 2) Meningkatnya Jumlah SDM bidang iptek per sejuta penduduk; dan 3) Meningkatnya kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia. Kontribusi BRIN terhadap pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- a. Mendorong kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati meliputi ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik, serta mengoptimalkan pemanfaatannya melalui pendekatan berkelanjutan, seperti pengembangan bioekonomi dan bioprospeksi.
- b. Mengakselerasi rekrutmen terbuka berbasis meritokrasi bagi periset berkualifikasi tinggi (S2/S3) dan diaspora untuk mencapai *critical mass* SDM Iptek, guna mengisi formasi ASN peneliti secara berkelanjutan dan meningkatkan rasio peneliti per sejuta penduduk sesuai target pembangunan nasional.

- c. Menjembatani hasil riset dengan kebutuhan industri melalui skema hilirisasi riset, pendampingan teknologi, serta inkubasi bisnis berbasis hasil litbang guna mendukung pertumbuhan industri nasional dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa.
- d. Mengakselerasi peningkatan nilai tambah komoditas dan ekspor produk teknologi tinggi melalui perluasan jejaring kolaborasi strategis internasional serta pemberdayaan diaspora ilmuwan untuk melakukan riset bersama (*joint research*) yang berorientasi pada komersialisasi global dan kepemilikan bersama kekayaan intelektual (*co-ownership of IP*).

3. Transformasi Digital

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya, (3) meningkatkan kualitas SDM digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*). serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif, (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Implementasi Transformasi Digital pada BRIN dilaksanakan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- a. Memperkuat kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital, memperkuat teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintah, memperkuat ketersediaan dan pemanfaatan data untuk mendukung transformasi digital pemerintah, transformasi digital layanan publik prioritas, transformasi kapabilitas digital dan budaya digital Aparatur Sipil Negara, serta pengambilan keputusan berbasis bukti, yang dilaksanakan dengan meningkatkan strategi dan rencana, tata kelola dan manajemen, teknologi digital, audit teknologi digital, keamanan siber, kapabilitas dan budaya digital, pemanfaatan data dan informasi, keterpaduan layanan digital pemerintah, dan kepuasan layanan digital pemerintah.
- b. Memperkuat formasi jabatan fungsional tertentu yang belum tersedia atau belum mencukupi yang keahliannya dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital dan integrasi sistem informasi kelembagaan.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Pada RPJMN 2025-2029, strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca

dari sektor energi dan sumber daya mineral, (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (3) pencegahan, pengurangan, dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan, (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru, (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri, (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah, dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Implementasi Pembangunan Rendah Karbon pada BRIN dilaksanakan dengan dukungan kegiatan riset dengan tema terkait. BRIN sendiri memiliki klaster riset di bidang swasembada energi, dengan fokus riset di beberapa bidang, contohnya nuklir dan teknologi manufaktur. Salah satu aktivitas risetnya adalah riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan. Pada klaster ini terdapat dukungan riset energi terbarukan rendah karbon untuk meningkatkan bauran energi nasional dan menurunkan emisi menuju NZE 2060.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan Berketahanan Iklim bertujuan memperkuat sistem pembangunan dari dampak negatif perubahan iklim di sektor sosial, ekonomi, dan ekologi. Upaya ini difokuskan pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan sektor kesehatan. Strategi pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB dengan peningkatan ketahanan iklim pada empat sektor prioritas melalui (1) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (2) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (3) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, dan (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.

Secara umum, sebagai lembaga riset, strategi yang dilakukan BRIN dalam Pembangunan Berketahanan Iklim fokus pada tiga pilar utama: penyediaan data, pengembangan teknologi, dan rekomendasi kebijakan. BRIN dapat berkontribusi dengan pelaksanaan riset dan inovasi yang memperkuat kemampuan adaptasi dan mengurangi kerentanan sektor-sektor prioritas terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa contoh fokus riset terkait iklim yang dilakukan BRIN di antaranya:

- a. Pembangunan teknologi pengindraan jauh menjadi infrastruktur strategis dalam penyediaan data spasial-temporal yang akurat dan cepat bagi sektor-sektor vital, termasuk mitigasi bencana dan perubahan iklim.
- b. Pengembangan teknologi budidaya ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
- c. Pelaksanaan riset dan inovasi infrastruktur pelabuhan berkelanjutan, termasuk mitigasi dampak perubahan iklim terhadap kawasan pesisir industri.

Selain itu, BRIN juga berupaya meningkatkan keterlibatan dalam proyek riset global yang relevan dengan potensi nasional, seperti kerja sama dengan NEDO pada *Carbon Neutral Contribution Technology* untuk mendukung agenda perubahan iklim.

3.2.9 BRIN dalam Rencana Aksi Nasional

BRIN memberikan dukungan terhadap berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan arah kebijakan dan target masing-masing RAN, baik yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan maupun yang masih dalam tahap penyusunan (rancangan peraturan). Adapun bentuk dukungan BRIN terhadap RAN tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Dukungan BRIN untuk Rencana Aksi Nasional 2025-2029

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
Rencana Aksi Nasional dengan regulasi yang sudah berlaku				
1	<i>Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)</i>	<p>Pengelolaan keanekaragaman hayati untuk kepentingan kelestarian dan mengintegrasikan arah kebijakan, strategi di tingkat global dan kebutuhan di tingkat nasional. Sebagai lanjutan upaya strategis dari <i>Biodiversity Action Plan</i> Indonesia 1993 (BAPI 1993), IBSAP 2003-2020, dan IBSAP 2015-2020. Keanekaragaman hayati berkaitan dengan 17 Tujuan/<i>Goals</i> dalam TPB/SDGs. Keanekaragaman hayati Indonesia menyimpan potensi besar dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati Indonesia akan mendorong penguatan dan percepatan transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru, Keanekaragaman hayati memberikan dampak positif pada peningkatan kesehatan manusia (<i>One Health, Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases</i>) menjadi isu strategis dalam IBSAP. Mekanisme penandaan anggaran keanekaragaman hayati yang partisipatif dan menggunakan pendekatan <i>dynamic tagging</i> diharapkan dapat mengoptimalkan pendanaan dan pelaksanaan program pengelolaan keanekaragaman hayati. Berbagai pemangku kepentingan seperti BRIN dan Kementerian PPN/Bappenas turut dilibatkan agar pengelolaan ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Peran BRIN dalam IBSAP sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan secara ilmiah, berkelanjutan, dan</p>	Kementerian PPN/Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi 2. Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>inovatif, sesuai dengan arah pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam. Adapun kontribusi BRIN dalam IBSAP diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian dan Inovasi Keanekaragaman Hayati; b. Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati; c. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan; d. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); e. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi IBSAP; dan f. Mendukung Pemanfaatan Berkelanjutan Biodiversitas. 		
2	Keamanan Siber (Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber 2024-2028)	<p>Penguatan pertahanan dan keamanan negara yang andal dan berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan strategi Keamanan Siber nasional menjadi langkah konkret untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Keamanan Siber nasional mencakup 8 (delapan) fokus area strategi: tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan dan ketahanan, penguatan perlindungan infrastruktur informasi vital, kemandirian kriptografi nasional, peningkatan kapabilitas, kapasitas, dan kualitas, kebijakan Keamanan Siber, dan kerja sama internasional.</p> <p>BRIN memiliki peran strategis dalam mendukung Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber (RAN KS) di Indonesia. Berikut adalah beberapa kontribusi utama BRIN dalam upaya tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Riset dan Inovasi Keamanan Siber; b. Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT); c. Kolaborasi Antar Lembaga; dan 	Badan Siber dan Sandi Negara	Organisasi Riset Elektronika dan Informatika

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		d. Peningkatan Kapabilitas dan Kesadaran Keamanan Siber.		
3	<p>Penginternasionalan Bahasa Indonesia</p> <p>(Naskah Akademik Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia)</p>	<p>Dimensi-dimensi dalam naskah akademik peta jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia meliputi: 1) dimensi politik dan diplomasi; 2) dimensi pertahanan dan keamanan; 3) dimensi ekonomi, investasi, dan ketenagakerjaan; 4) dimensi kepariwisataan; 5) dimensi pendidikan dan kebudayaan; serta 6) dimensi kepemudaan dan keolahragaan.</p> <p>Berikut adalah beberapa peran utama BRIN dalam mendukung penginternasionalan Bahasa Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kajian Riset dan Pengembangan Bahasa; b. Kolaborasi dengan Badan Bahasa; c. Pengembangan Kosakata dan Terminologi; d. Publikasi Ilmiah dalam Bahasa Indonesia; dan e. Diplomasi Bahasa melalui Program BIPA. 	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra
4	<i>Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI)</i>	<p>RAN ini berfokus pada penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan ekonomi syariah pada periode 2025-2029 difokuskan pada penguatan “fondasi transformasi”, agar selaras dengan tahap 1 RPJPN, yang salah satunya adalah transformasi ekonomi. Penyusunan kerangka MEKSI 2025-2029 memadukan kerangka makro-meso-mikro, yaitu kerangka pikir penguatan rantai nilai industri halal, kerangka pikir penguatan keuangan syariah, dan kerangka pikir penguatan dana sosial syariah. Penguatan sektor-sektor ekonomi syariah (rantai nilai industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah) berfokus untuk penguatan “4 fondasi transformasi” ekonomi syariah, yaitu produktivitas ekonomi, pemerataan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan perlindungan sosial.</p> <p>Peran strategis BRIN dalam mendukung terlaksananya RAN MEKSI diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Riset dan Inovasi Produk Halal; b. Penyediaan Fasilitas Riset Pangan; c. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan; dan 	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi 2. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi 3. Organisasi Riset Kesehatan 4. Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat 5. Deputi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi 6. Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		d. Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah.		
5	<p>Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)</p> <p>(Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Tentang P4GN)</p>	<p>Salah satu fokus utama dalam kegiatan Penyusunan RAN P4GN Tahun 2025-2029 adalah pengembangan balai atau loka rehabilitasi. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 6 fasilitas rehabilitasi dan akan menambah jumlah fasilitas rehabilitasi, serta memperbaiki dan mengintegrasikan data sistem informasi rehabilitasi narkotika nasional dengan berbagai parameter dalam lima tahun ke depan untuk memastikan bahwa upaya rehabilitasi berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan RAN P4GN, BRIN turut terlibat dalam program a) Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; b) Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>	Badan Narkotika Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Utama 2. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
6	<p>Penanggulangan Bencana</p> <p>(Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2025 tentang RENAS Penanggulangan Bencana 2025-2029)</p>	<p>Wilayah Indonesia memiliki kelas bahaya dengan tingkat risiko tinggi sekitar 65,32% dari luas wilayah bahaya total sebesar 192.473.073 ha. Persentase luas bahaya pada kelas risiko tinggi terbesar berada di Provinsi Bengkulu (94,76%), Provinsi Gorontalo (84,05%), dan Provinsi Aceh (83,36%). Provinsi Papua (sebelum menjadi Daerah Otonom Baru), Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas multibahaya tertinggi dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki luas multibahaya terendah.</p> <p>Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah merumuskan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) sebagai bagian dari implementasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044, dengan 4 (empat) sasaran utama yang mencakup: (1) pengurangan jumlah penduduk terdampak bencana, (2) pengurangan dampak kerusakan dan kerugian, (3) peningkatan daya lenting daerah terdampak, dan (4) peningkatan kapasitas serta kualitas pelayanan penanggulangan bencana.</p> <p>Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, kebijakan penanggulangan bencana dirancang dengan berbagai strategi yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sistem penanggulangan bencana. Kebijakan RENAS PB 2025-2029 mencakup enam aspek utama, yakni: penguatan regulasi; peningkatan</p>	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Riset Kesehatan 2. Organisasi Riset Teknologi Nuklir 3. Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>kelembagaan dan pendanaan, investasi dalam pengelolaan risiko bencana; peningkatan ketangguhan masyarakat dan dunia usaha, penguatan kesiapsiagaan dan kedaruratan; serta peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Melalui sasaran yang telah dirumuskan dan kebijakan dengan aspek-aspek yang mendukungnya diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Kontribusi BRIN dalam Renas PB diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Infrastruktur Antariksa untuk Mitigasi Bencana; Penyediaan Data dan Informasi Kebencanaa b. Kolaborasi dengan Lembaga Nasional dan Internasional; c. Pengembangan Teknologi Kebencanaan; dan d. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat. 		
7	<p>Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia</p> <p>(Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia)</p>	<p>Potensi ancaman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia didominasi oleh ancaman nontradisional, seperti pelanggaran wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan orang dan/ atau barang, penyelundupan narkoba, pencemaran lingkungan. Sebagai langkah antisipatif dan penanggulangan, Pemerintah merumuskan Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) untuk menjadi acuan rencana strategi dan rencana kerja Badan, Instansi terkait, dan Instansi Teknis, dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kebijakan Nasional KKPH terdiri atas: a. peningkatan sinergi penyelenggaraan Patroli; b. peningkatan integritas penegakan hukum di laut; c. penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional; d. penyelesaian sinkronisasi regulasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; e. peningkatan sarana dan prasarana; f. peningkatan kerja sama internasional dan hubungan antar lembaga; dan g. peningkatan partisipasi masyarakat pengguna laut.</p>	Badan Keamanan Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan 2. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi 3. Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora 4. Organisasi Riset Elektronika dan Informatika 5. Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>Penyelenggaraan KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan <i>whole-government approach</i>, mengingat isu kelautan bersifat multisektor dan kompleks. Kebijakan dan strategi KPPH harus dilakukan untuk mendukung sistem pertahanan negara demi menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>		
8	<p>Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi</p> <p>(Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029: "Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru")</p>	<p>Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi 2025-2029 mencakup: 1) Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Produksi Budidaya Rumput Laut (Hulunisasi); 2) Pengembangan Industri, Nilai Tambah, Diversifikasi, Akses Pasar dan Ekspor Rumput Laut (Hilirisasi); 3) Pengembangan Data, Inovasi, Intermediasi Teknologi, Kolaborasi dan Jejaring; 4) Peningkatan Dukungan Pembiayaan dan Investasi, dan 5) Penguatan Ekosistem dan Tata Kelola Rumput Laut (Regulasi dan Kelembagaan).</p> <p>BRIN memberikan dukungan pada empat pilar utama. Pertama, pada aspek peningkatan kualitas produktivitas dan produksi budidaya (hulunisasi), BRIN melakukan riset pengembangan varietas unggul, deteksi patogen, desain kapal multifungsi, serta pembentukan bank benih dan konservasi genetik rumput laut untuk memastikan ketersediaan bibit unggul nasional. Kedua, pada pilar pengembangan industri dan nilai tambah (hilirisasi), BRIN mendorong hilirisasi hasil riset seperti pengembangan produk pangan, pakan, kosmetik, <i>nutraceutical</i>, material biomedis, serta biomanufaktur vaksin dan biostimulan berbasis rumput laut. Ketiga, BRIN memperkuat inovasi intermediasi teknologi melalui pengembangan purwarupa hasil riset, aplikasi teknologi seperti IoT untuk monitoring kualitas air, serta eksplorasi pemanfaatan rumput laut sebagai pakan ternak ramah lingkungan dan bahan aditif alami. Keempat, BRIN menyediakan dukungan pembiayaan dan fasilitasi investasi untuk riset teknologi budidaya, pengembangan ekosistem serta inkubasi teknologi industri hilir rumput laut seperti hidrogel dan fungsida nabati. Selain itu, BRIN juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi, untuk</p>	Kementerian PPN/ Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi 2. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi 3. Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim 4. Organisasi Riset Pangan dan Pertanian 5. Organisasi Riset Energi dan Manufaktur 6. Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material 7. Organisasi Riset Kesehatan

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		memperkuat ekosistem inovasi dan memastikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir.		
	<p>Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal</p> <p>(Perpres Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal)</p>	<p>Pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan diharapkan menjadi solusi dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, gejolak harga global, serta kerentanan rantai pasok, sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, inovasi pangan, dan peningkatan gizi masyarakat. Perpres ini hadir untuk mempercepat kemandirian dan ketahanan pangan nasional dengan mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan tertentu, terutama beras, melalui optimalisasi potensi pangan lokal yang kaya, beragam, dan tersebar di seluruh Indonesia.</p> <p>BRIN berperan sebagai pengampu 12 kegiatan kunci dalam percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui empat strategi utama. Pertama, penguatan dukungan kebijakan dan regulasi untuk mendorong pemanfaatan pangan lokal, termasuk penyusunan naskah akademik, penguatan landasan hukum, serta harmonisasi kebijakan lintas sektor. Kedua, optimalisasi pemanfaatan pangan, termasuk pangan pekarangan, melalui penyusunan pedoman pemanfaatan lahan, pengembangan model integrasi tanaman-ternak, dan peningkatan literasi pangan lokal bagi masyarakat. Ketiga, penguatan dan percepatan produksi pangan lokal melalui riset perbenihan, budidaya, pascapanen, serta pengembangan teknologi pengolahan yang meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Keempat, pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pangan lokal, termasuk teknologi pengolahan, standardisasi mutu, inovasi logistik, dan dukungan pembiayaan berbasis sains.</p>	Badan Pangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi 2. Organisasi Riset Pertanian dan Pangan
Rencana Aksi Nasional dengan regulasi yang masih berupa rancangan				
9	<p>Manajemen Talenta Nasional</p> <p>(Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI tentang Rencana Aksi Desain Besar Manajemen Talenta</p>	<p>Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DBMTN) mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan Talenta unggul di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga. Dalam bidang riset dan inovasi, DBMTN diarahkan untuk menciptakan talenta unggul yang berprestasi dan berdampak secara nasional dan/atau global.</p>	Kementerian PPN/Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek 2. Deputi Bidang Fasilitasi

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
	Nasional Tahun 2025-2029)	<p>BRIN memiliki peran penting dalam DBMTN dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Talenta di Bidang Riset, Inovasi, dan Teknologi; 2. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Industri; 3. Pemetaan dan Identifikasi Talenta Nasional; 4. Pengembangan Kebijakan Berbasis Riset; 5. Pendukung Gugus Tugas DBMTN; dan 6. Pemantauan dan Evaluasi. 		<p>Riset dan Inovasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi 4. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan
10	<p>Pemanfaatan Persetujuan <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP)</p> <p>(Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemanfaatan Persetujuan <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>)</p>	<p>RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan enam negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India). RCEP membuka jalan bagi produk Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan peluang investasi yang lebih besar, dimana perjanjian ini meningkatkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, dengan adanya penguatan kepastian hukum dan perlindungan investasi.</p> <p>Adanya penyederhanaan peraturan perdagangan, pengurangan tarif, dan kemudahan akses pasar menciptakan kesempatan besar bagi barang dan jasa Indonesia untuk bersaing di tingkat regional. Selain itu, daya beli negara-negara anggota RCEP yang diklasifikasikan sebagai negara maju menjadi potensi yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Proyeksi peningkatan ekspor barang Indonesia hingga 5,01 miliar dolar AS pada tahun 2040 merupakan keuntungan bagi Indonesia.</p> <p>Dalam mendukung Pemanfaatan Persetujuan RCEP, BRIN memberikan kontribusi dengan melakukan analisis, kajian dan riset yang berkaitan dengan perdagangan Indonesia pada level internasional.</p>	Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan 2. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi 3. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi 4. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi 5. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi 6. Organisasi Riset Pertanian dan Pangan 7. Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material 8. Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim 9. Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
				Masyarakat
11	<p>Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Labuan Bajo</p> <p>(Rancangan Peraturan Presiden tentang RIDPN Labuan Bajo Tahun 2023-2044)</p>	<p>RIDPN Labuan Bajo memfokuskan pada pelestarian keanekaragaman satwa endemik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Dukungan riset dan inovasi yang melibatkan multisektor juga dibutuhkan dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Labuan Bajo ini.</p> <p>BRIN sebagai koordinator pelaksana riset dan inovasi telah mengusulkan topik riset dan inovasi yang dapat dilakukan dalam mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Labuan Bajo, antara lain: 1) Ekonomi Kreatif dan Pemertabatan Bahasa di Ruang Publik; 2) Internasionalisasi Bahasa Indonesia dan Pengembangan Sastra untuk Wisatawan Asing; 3) Riset mengenai kebencanaan dan riset-riset terapan yang mengarah kepada peningkatan rasio biaya-manfaat dan mempertimbangkan proses adaptasi pengetahuan asli lokal di tatanan masyarakat; 4) Riset tentang penataan ruang dan lahan pada daerah prioritas nasional berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air, tanah, dan hutan sesuai dengan hasil kajian risiko bencana dan kajian lingkungan hidup strategis daerah; dan 5) Riset tentang konservasi (genetik) sumber daya ikan, dan rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati di wilayah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.</p>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan 2. Organisasi Riset Bidang Kebumihan dan Maritim 3. Organisasi Riset Bidang Agama, Bahasa dan Sastra 4. Organisasi Riset Bidang Hayati dan Lingkungan
12	<p>Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Morotai</p> <p>(Rancangan Peraturan Presiden tentang RIDPN Morotai Tahun 2024-2044)</p>	<p>Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)/ <i>Integrated Tourism Master Plan (ITMP)</i> merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari program percepatan proyek strategis nasional pada sektor Pariwisata. RIDPN Morotai berfokus pada pengalaman wisata Bahari dan wisata sejarah Perang Dunia II sebagai daya tarik pariwisata. Sasaran pengembangan DPN Morotai adalah meningkatnya sektor Kepariwisata yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, pendapatan Pariwisata, lama waktu kunjungan (<i>length of stay</i>), dan pengeluaran rata-rata wisatawan.</p> <p>Dukungan riset dan inovasi yang melibatkan multisektor juga dibutuhkan dalam Pengembangan</p>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan; 2. Organisasi Riset Bidang Kebumihan dan Maritim 3. Organisasi Riset Bidang Agama, Bahasa dan Sastra 4. Organisasi Riset Bidang Hayati dan

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>Destinasi Pariwisata Labuan Bajo ini. BRIN sebagai koordinator pelaksana riset dan inovasi telah mengusulkan topik riset dan inovasi yang dapat dilakukan dalam mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Labuan Bajo, antara lain: 1) Ekonomi Kreatif dan Pemertabatan Bahasa di Ruang Publik; 2) Internasionalisasi Bahasa Indonesia dan Pengembangan Sastra untuk Wisatawan Asing; 3) Riset mengenai kebencanaan dan riset-riset terapan yang mengarah kepada peningkatan rasio biaya-manfaat dan mempertimbangkan proses adaptasi pengetahuan asli lokal di tatanan masyarakat; 4) Riset tentang penataan ruang dan lahan pada daerah prioritas nasional berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air, tanah, dan hutan sesuai dengan hasil kajian risiko bencana dan kajian lingkungan hidup strategis daerah; dan 5) Riset tentang konservasi (genetik) sumber daya ikan, dan rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati di wilayah Morotai, Maluku Utara.</p>		Lingkungan
13	<p>Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Wakatobi (Rancangan Peraturan Presiden tentang RIDPN Wakatobi Tahun 2024-2044)</p>	<p>Wakatobi merupakan salah satu di antara 10 (sepuluh) destinasi Pariwisata prioritas, untuk dipersiapkan dalam rangka menyongsong perkembangan Pariwisata bahari. Wakatobi sebagai prioritas nasional juga sekaligus dikaitkan dengan upaya penyelamatan kekayaan alam bahari dan keanekaragaman sumber daya hayati bawah laut. Maka, RIDPN Wakatobi difokuskan pada: 1) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, terhapusnya kemiskinan dan pengangguran; 2) pelestarian lingkungan alam dan pemajuan budaya melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab; 3) meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 4) mendorong pariwisata nusantara dalam rangka cinta tanah air, kesatuan dan persatuan nasional. Tahun 2025-2029 merupakan tahap awal pengembangan dengan fokus keberlanjutan yang dikaitkan dengan keberlanjutan Taman Nasional dan Cagar Biosfer Wakatobi yang menjadi penentu kualitas yang didukung oleh masyarakat yang makin sejahtera.</p>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan 2. Organisasi Riset Bidang Kebumihan dan Maritim 3. Organisasi Riset Bidang Agama, Bahasa dan Sastra 4. Organisasi Riset Bidang Hayati dan Lingkungan

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
14	<p>Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf)</p> <p>(Rancangan Peraturan Presiden tentang Rindekraf)</p>	<p>Dalam Rencana Pembangunan 20 tahun ke depan, ekonomi kreatif menjadi bagian dari Agenda Transformasi Ekonomi pada IE 4 “Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi”, dimana ekonomi kreatif sebagai salah satu pendorong produktivitas sektor ekonomi. Arah Kebijakan dan Strategi Ekonomi Kreatif 2025-2045 dalam Kerangka Pembangunan Jangka Panjang Nasional direncanakan dalam empat tahap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap 1 (2025-2029): Penguatan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi berbasis inovasi b. Tahap 2 (2030-2034): Akselerasi peningkatan daya saing global ekonomi kreatif c. Tahap 3 (2035-2039): Ekspansi sektor ekonomi kreatif dalam rantai pasok global d. Tahap 4 (2040-2045): Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif dan digital kelas dunia <p>Dalam mendukung Rencana Induk Ekonomi Kreatif, BRIN memberikan kontribusi dalam beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf); b. Pengembangan Riset dan Inovasi di Sektor Ekonomi Kreatif; c. Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI); d. Penyediaan Skema Pendanaan dan Fasilitasi; dan e. Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. 	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan 2. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi
15	<p>Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional</p> <p>(Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional)</p>	<p>Pembangunan Pergaraman nasional bertujuan untuk mewujudkan swasembada garam nasional pada tahun 2027 melalui percepatan pembangunan garam nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional. Tujuan lainnya untuk pengembangan garam yang dilindungi Indikasi Geografis (IG), dimana pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Intensifikasi, ekstensifikasi; dan teknologi dengan lahan terbatas menjadi upaya dalam mencapai swasembada garam nasional.</p> <p>Rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional</p>	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan 2. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi 3. Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim 4. Organisasi Riset Pertanian dan Pangan 5. Organisasi Riset Energi

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang meliputi: a) praproduksi; b) produksi; c) pascaproduksi; d) pengolahan; dan e. pemasaran. Adapun keterlibatan BRIN dalam upaya percepatan pergaraman nasional diantaranya melalui dukungan tenaga ahli dalam bimbingan teknis dan penyediaan teknologi untuk mendukung para petani garam dalam meningkatkan tingkat produktivitasnya.</p>		<p>dan Manufaktur</p>
16	<p>Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029</p> <p>(Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029)</p>	<p>Dalam rangka mempercepat pembangunan di Papua, penguatan kelembagaan BRIDA / Bapperida dan optimalisasi potensi daerah menjadi prioritas. Fokus ini penting karena banyak wilayah di Papua masih tergolong daerah tertinggal dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Lima kabupaten yang dipilih sebagai lokus pendampingan adalah Yahukimo, Pegunungan Bintang, Keerom, Mappi, dan Asmat yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. BRIN akan mendampingi penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID), memperkuat ekosistem riset dan inovasi, serta memberikan solusi berbasis kajian untuk mengoptimalkan potensi unggulan di setiap kabupaten. Selain itu, Riset tentang Keindonesiaan yang merupakan bagian dari Riset bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan terkait kebangsaan dan kemanusiaan, seperti identitas dan jati diri sebagai bangsa yang majemuk.</p> <p>Berdasarkan hasil pembahasan pada awal tahun 2025, BRIN telah berkomitmen untuk turut serta memberikan kontribusi nyata pada beberapa program percepatan yang akan didukung. Program percepatan pertama adalah Program Percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan, yang merupakan upaya untuk menjawab akar masalah: (1) penghasilan masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar; (2) terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan; (3) terbatasnya akses masyarakat dalam membuka/mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan (4) belum optimalnya</p>	Kementerian PPN/ Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah 2. Organisasi Riset Sosial Humaniora

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan.		
17	Pangan dan Gizi (Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi)	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. UU ini juga mengatur tentang pentingnya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari mandat tersebut, pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) sebagai instrumen perencanaan terpadu yang mengoordinasikan berbagai program lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. RAN-PG berfungsi untuk menjawab tantangan kerawanan pangan dan permasalahan gizi, seperti stunting, gizi kurang, dan pola konsumsi yang belum beragam.</p> <p>BRIN memberikan dukungan pada dua tujuan strategis RAN-PG, yaitu Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim serta Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi yang Berketahanan Iklim. BRIN menjadi penanggung jawab delapan indikator yang mendukung kedua tujuan strategis tersebut.</p>	Kementerian PPN/ Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Riset Pertanian dan Pangan 2. Organisasi Riset Tata Kelola, Kebijakan Publik, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat 3. Organisasi Riset Elektronika dan Informatika
18	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (RPerpres tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	<p>Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) sebagaimana tertuang dalam dokumen <i>Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development</i>.</p> <p>Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dilakukan dengan menetapkan sasaran nasional yang selaras dengan tujuan global dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Memasuki dekade aksi, dibutuhkan upaya percepatan pencapaian target TPB oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.</p> <p>Dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini, BRIN menjadi salah satu instansi pelaksana beberapa sasaran TPB pada tujuan global SDGs yang ke-9 yaitu membangun infrastruktur yang</p>	Kementerian PPN/ Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi 2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.		
19	Kepemudaan (Rencana Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan)	<p>Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut evaluasi RAN Pelayanan Kepemudaan 2021–2024 yang menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan terminologi, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pemuda. Penyusunan RAN ini selaras dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pemuda sebagai subjek pembangunan, penggerak ekonomi, serta agen inovasi.</p> <p>Dalam mendukung pelaksanaan RAN Kepemudaan 2025-2029 dan untuk masukan pada Arah Kebijakan Kepemudaan pada RPJMN 2025-2029, BRIN turut berkontribusi dengan dukungan RO BRIN yang terkait dengan kepemudaan yaitu indikator RO Pembibitan dan Akuisisi Talenta Potensial, Pendampingan Talenta Riset dan Inovasi (<i>Talenta Technopreneur</i>), dan RO Mahasiswa Pendidikan Tinggi Bidang Teknologi Nuklir.</p>	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Politeknik Teknologi Nuklir
20	Penanggulangan Ekstremisme (RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029)	<p>Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, dirancang Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2025-2025. Upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tetap menjadi agenda penting dan prioritas dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional lima tahun ke depan. RAN PE fase kedua mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang sama dengan fase sebelumnya, yaitu Hak Asasi Manusia, Supremasi Hukum dan Keadilan, serta Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak Anak; Keamanan dan Keselamatan; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>); Partisipasi dan Pemangku Kepentingan yang Majemuk; Kebhinekaan dan Kearifan Lokal.</p>	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan; 2. Pusat Data dan Informasi

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>Secara substantif pelaksanaan RAN PE Tahun 2025-2029 mengambil pendekatan tematik yang terdiri dari 9 (sembilan) tema, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapsiagaan Nasional; 2. Ketahanan Komunitas dan Keluarga; 3. Pendidikan, Keterampilan Masyarakat, dan Fasilitas Lapangan Kerja; 4. Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Anak; 5. Komunikasi Strategis, Media, dan Sistem Elektronik; 6. Deradikalisasi dan Pemutusan Kekerasan (<i>Disengagement</i>) untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial; 7. Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Keadilan; 8. Pelindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban; 9. Kemitraan dan Kerja Sama Internasional. <p>Dalam hal ini BRIN mendukung dan menjadi penanggung jawab lima (5) tema RAN PE yaitu tema Kesiapsiagaan Nasional, Ketahanan Komunitas dan Keluarga, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak, Komunikasi Strategis, Media dan Sistem Elektronik, Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Keadilan, dan Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.</p>		
21	Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta	<p>Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 53 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dirancang Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta (RIPKA Jakarta). Rancangan ini bertujuan sebagai pedoman sinkronisasi pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Aglomerasi Jakarta, diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. Visi pembangunan kawasan ini didasarkan pada tiga kerangka kerja utama, yaitu Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB). Secara umum, misi pembangunan ini mengedepankan prinsip: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Merata, Peningkatan Kualitas Hidup yang Unggul dan</p>	Kementerian PPN/ Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Riset Energi dan Manufaktur 2. Organisasi Hayati dan Lingkungan 3. Organisasi Riset Kebumihan Dan Maritim Badan Riset Dan Inovasi Nasional 4. Organisasi Riset Pertanian Dan Pangan

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>Berdaya Saing Global, serta Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Ekologi yang Seimbang.</p> <p>Secara substantif, pelaksanaan RIPKA Jakarta mengambil pendekatan tematik yang terdiri dari tiga belas (13) bidang program. Beberapa tema utama (bidang program strategis) yang ditekankan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Transportasi; 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Program Air Minum dan Air Limbah Domestik; 4. Program Pengelolaan Sampah; 5. Program Penanggulangan Banjir; 6. Program Pengelolaan Pesisir; 7. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Program Energi; 9. Program Penataan Ruang. <p>Dalam hal ini, BRIN berperan sebagai lembaga intermediasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (iptekin) yang mendukung salah satu strategi yaitu Strategi Pembangunan Program Pendidikan. Lembaga intermediasi iptekin berperan strategis salah satunya dalam menjembatani interaksi (<i>link & match</i>) dan kolaborasi <i>supply-demand</i> agar riset dan inovasi yang dihasilkan tepat guna, kontekstual, dan mudah diadopsi.</p>		5. Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
22	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	<p>Dalam rangka menindaklanjuti kondisi geografis Indonesia yang memiliki sumber daya ikan yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber protein hewani untuk pemenuhan gizi masyarakat, dan mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan dan pemerataan konsumsi ikan untuk kesehatan dan kecerdasan masyarakat, dirancang Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Gerakan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.</p> <p>Kebijakan strategis Gemarikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, memperatakan konsumsi ikan, dan/atau meningkatkan perekonomian nasional.</p>	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Riset Kebu mian dan Maritim 2. Organisasi Pertanian dan Pangan

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>Secara substantif, pelaksanaan Gemarikan diselenggarakan dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat dan mengambil pendekatan kebijakan strategis yang terdiri dari 3 (tiga) pilar utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi; 2. Pemberian kemudahan akses; 3. Peningkatan minat konsumsi Ikan <p>Dalam hal ini BRIN berperan sebagai instansi terkait untuk pengelolaan produksi perikanan tangkap dan peningkatan produksi perikanan budi daya dengan yang kegiatannya adalah pelaksanaan pemantauan kualitas air.</p>		
23	Pengembangan Kewirausahaan Nasional	<p>Dalam rangka mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta lapangan kerja yang berkualitas, dirancang Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Upaya percepatan peningkatan rasio kewirausahaan ini dilakukan melalui penumbuhkembangan wirausaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. PKN dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia pendidikan, asosiasi, dan komunitas.</p> <p>Pengembangan Kewirausahaan Nasional bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan masyarakat; b. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas; c. menyinergikan kebijakan dan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan; d. memperkuat Ekosistem Kewirausahaan; e. menumbuhkembangkan Wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi; dan 	Kementerian UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi 2. Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>f. meningkatkan kapasitas Wirausaha dan skala usaha.</p> <p>Beberapa kegiatan BRIN yang mendukung diantaranya terkait pelatihan/bimbingan teknis/diseminasi penguatan kapasitas pengguna riset dan inovasi pada masyarakat, pendampingan usaha mikro berbasis iptek, Pendampingan inovasi akar rumput, Pendampingan Pemanfaatan Insentif Pajak untuk Industri/pelaku usaha yang melakukan investasi R&D, Pendampingan Pemanfaatan Katalog Elektronik Sektor Inovasi, Inkubasi perusahaan pemula berbasis riset, Fasilitasi pemagangan calon teknopreneur, Fasilitasi Lisensi kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi ke pelaku usaha, Fasilitasi pemanfaatan produk riset dan inovasi oleh industri/pelaku usaha, Kerjasama Pemanfaatan Riset dan inovasi dengan Industri, Kerjasama Alih Teknologi, dan pendataan wirausaha.</p>		
24	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Bahan Bakar Nuklir Bekas	<p>Dalam rangka menindaklanjuti meningkatnya kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang menghasilkan Limbah Radioaktif dan Bahan Bakar Nuklir Bekas (BBNB) serta perlunya pengelolaan yang komprehensif, mutakhir, dan memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dari bahaya radiasi, dirancang Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Bahan Bakar Nuklir Bekas. Kebijakan dan strategi ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun (2026-2045) dan bertujuan untuk menjamin Pengelolaan Limbah Radioaktif dan BBNB memenuhi persyaratan keselamatan radiasi, keamanan, dan garda-Aman (<i>safeguards</i>).</p> <p>Secara substantif, Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif dan BBNB mengambil pendekatan tematik yang terdiri dari 4 (empat) fokus utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Pengelolaan Limbah Radioaktif; 2. Penataan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas (BBNB); 3. Penerapan Ekonomi Sirkular Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan (ZRTTD); dan 	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Riset Tenaga Nuklir 2. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan 3. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi 4. Direktorat pengelolaan fasilitas ketenaganukliran/ DIRI

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>4. Penerapan Ekonomi Sirkular BBNB.</p> <p>Dalam hal ini, BRIN berkontribusi sebagai sektor utama dan sektor pendukung yang melaksanakan beberapa program kerja.</p>		
25	Pengelolaan Kesehatan	<p>Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta untuk menyelenggarakan Pengelolaan Kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, dan berkeadilan, dirancang Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan. Upaya ini ditujukan untuk mencapai masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pengelolaan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi, sinkronisasi, dan koordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>Pengelolaan kesehatan dilaksanakan untuk mencapai keluaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kemudahan akses pelayanan Kesehatan; 2. peningkatan cakupan pelayanan Kesehatan; 3. peningkatan pemerataan pelayanan Kesehatan; 4. peningkatan keamanan dan mutu pelayanan Kesehatan; dan 5. pelayanan Kesehatan dengan biaya yang terjangkau. 	Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Riset Tenaga Nuklir 2. Organisasi Riset Kesehatan
26	Komite Nasional Perkeretaapian Kecepatan Tinggi	<p>Dalam rangka menindaklanjuti bahwa penyelenggaraan Perkeretaapian Kecepatan Tinggi harus didukung dengan kebijakan strategis secara terintegrasi, serta perlunya kelembagaan sebagai forum koordinasi yang menggantikan Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, dirancang Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Perkeretaapian Kecepatan Tinggi. Komite ini dibentuk sebagai forum koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rekomendasi kepada Presiden mengenai kebijakan strategis dalam penyelenggaraan Perkeretaapian Kecepatan Tinggi di Indonesia.</p> <p>Secara substantif, pelaksanaan Komite Nasional Perkeretaapian Kecepatan Tinggi mengambil pendekatan tematik yang terdiri dari 7 (tujuh) Bidang Tugas Komite, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum dan Regulasi 2. Pembiayaan dan Pendanaan 	Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Kebijakan Pembangunan 2. Organisasi Riset Energi dan Manufaktur 3. Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora 4. Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi,

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pertanahan dan Tata Ruang 4. Pembangunan, Operasional, dan Keselamatan 5. Pengelolaan Risiko. 		Dan Kesejahteraan Masyarakat
27	Tata Kelola dan Organisasi Pelaksana dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	<p>Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, yang memfokuskan transisi energi pada penyiapan regulasi dan implementasi pembangunan serta pengoperasian PLTN, dirancang Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola dan Organisasi Pelaksana Dalam Pembangunan Dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Peraturan Presiden ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan dan ketahanan energi nasional, mendukung pencapaian bauran energi, serta mewujudkan penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan untuk pencapaian <i>Net Zero Emission</i>.</p>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Riset Tenaga Nuklir 2. Deputi Kebijakan Pembangunan 3. Organisasi Riset Energi dan Manufaktur
28	Gender dan Perubahan Iklim (GPI) 2024 - 2030 (Rancangan Perpres PKN)	<p>Indonesia menyadari pentingnya peran perempuan untuk efektifitas aksi iklim dan memastikan bahwa akses, partisipasi, kontrol dan manfaat secara adil dan setara diterima oleh perempuan dan laki-laki. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi dampak perubahan iklim di tingkat lokal, nasional dan internasional melalui perencanaan pembangunan yang responsif gender. Adanya RAN-GPI menjadi acuan strategis untuk memastikan adaptasi dan aksi perubahan iklim di Indonesia responsif gender dan inklusif, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Ketahanan Pangan, Pertanian berkelanjutan, Air dan Irigasi serta Ekosistem Mangrove; 2. Strategi FOLU (<i>Forestry and Other Land Use</i>); 3. Strategi Pemanfaatan EBT, efisiensi energi, pengelolaan sampah dan limbah, kesehatan lingkungan dan perlinfos; 4. Strategi pengembangan ekonomi hijau dan industri hijau, ekonomi biru, penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan, iptek dan inovasi; serta 5. Strategi Ketahanan terhadap bencana. <p>BRIN berkomitmen untuk mendukung RAN GPI yang diawali dengan pengusulan Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Pelaksanaan RAN GPI pada beberapa sektor, diantaranya:</p>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi 2. Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritim, Sumber Daya Alam, dan Ketenagakerjaan 3. Pusat Riset Tanaman Pangan 4. Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air 5. Pusat Riset Botani Terapan 6. Pusat Riset Ekologi

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor I: Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan, Air dan Irigasi; 2. Sektor II: Tutupan Hutan dan Lahan, Pencegahan Deforestasi/Degradasi Hutan, Penghutan kembali, Perbaikan Lahan Kritis, Pengelolaan Air Gambut, Restorasi Lahan Gambut 3. Sektor III: Energi Baru Terbarukan, Efisiensi Energi, Konservasi Energi (EBTKE) untuk Rumah Tangga dan Usaha, Pengelolaan Limbah dan Sampah, Kesehatan Lingkungan; 4. Sektor IV: Industri dan Ekonomi Hijau, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi; 5. Sektor V: Ketahanan terhadap Bencana dan Dukungan untuk Perbaikan Kerusakan dan Kehilangan; 6. Sektor VI: Ketahanan Sosial, Budaya, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Perlindungan Hak Anak; dan 7. Sektor VII: Kelautan, Pesisir dan Ekonomi Biru. 		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pusat Riset Tanaman Perkebunan 8. Pusat Riset Teknologi Konversi Energi 9. Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih 10. Direktorat Manajemen Talenta 11. Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi 12. Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan 13. Pusat Riset Kebencanaan Geologi 14. Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan 15. Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi 16. Pusat Riset Masyarakat dan Budaya 17. Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan,

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
				<p>dan Pengembangan Regional</p> <p>18. Pusat Riset Budidaya Laut</p> <p>19. Pusat Riset Budidaya Air Tawar</p>
29	<p>Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (P3AKS) Tahun 2025-2029 (Rancangan Permenko PMK)</p>	<p>RAN P3AKS merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi bermakna. RAN ini selaras dengan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Resolusi DK PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (dan resolusi turunannya), CEDAW, BPfA, serta RPJPN/RPJMN yang menempatkan kesetaraan gender dan keamanan insani sebagai agenda strategis nasional. Pelaksanaan RAN P3AKS akan memasuki periode ketiga 2025-2029, sejak ditetapkan. Ruang lingkup program/kegiatan RAN ini meliputi: 1) Pencegahan, 2) Penanganan, 3) Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi Anak.</p> <p>Harapannya negara dapat memastikan mekanisme perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak dalam situasi konflik sosial, termasuk mencegah diskriminasi, menghindari kriminalisasi terhadap perempuan penyintas atau perempuan yang kembali dari situasi eksploitasi atau ekstremisme kekerasan, memastikan ketersediaan layanan yang responsif gender, serta menyediakan data terpilah.</p>	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Kebijakan Pembangunan 2. Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
30	<p>Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial (RPerpres Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika</p>	<p>Masukan BRIN pada Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial menekankan penguatan fondasi ekosistem inovasi kecerdasan artifisial nasional melalui pembangunan infrastruktur komputasi dan data yang andal, peningkatan kapasitas riset melalui <i>AI Center of Excellence</i>, serta percepatan hilirisasi inovasi melalui pendanaan penelitian berbasis prioritas dan mekanisme pendanaan yang lebih adaptif. Selain itu, BRIN mendorong integrasi riset</p>	Kemenkomdi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Kebijakan Riset Dan Inovasi 2. Organisasi Riset Elektronika Dan Informatika 3. Organisasi Riset dan Energi

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
	Kecerdasan Artifisial)	lintas sektor dan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan startup untuk mempercepat pengembangan teknologi strategis seperti pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa Indonesia, prediksi kesehatan, keamanan siber, dan teknologi deteksi.		Manufaktur
31	Penyandang Disabilitas (RPermenPPN/Bappenas)	<p>Urgensi perubahan RAN Penyandang Disabilitas muncul dari berbagai tantangan implementasi periode sebelumnya, seperti belum menyeluruhnya internalisasi pembangunan inklusif oleh K/L, minimnya sosialisasi capaian, serta koordinasi antar-K/L yang masih terbatas. Selain itu, RAN PD sebelumnya belum sepenuhnya merefleksikan keragaman hambatan yang dialami kelompok disabilitas. Perubahan diperlukan untuk mempertegas periode perencanaan, memperbaiki mekanisme penyusunan RAN PD di pusat dan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan instrumen perencanaan dan penganggaran lebih inklusif. Penyempurnaan matriks RAN PD termasuk pembaruan target, kegiatan, indikator, dan penetapan indikator makro menjadi langkah penting agar implementasi berjalan lebih terukur, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.</p> <p>BRIN telah mengusulkan kegiatan/riset pada Sasaran Strategi 7 (tujuh) Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas “Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas” untuk mendukung RAN PD ini.</p>	Kementerian PPN/Bappenas - Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. DKP - Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia Kependudukan dan Kebudayaan 2. OR EI - Pusat Riset Mekatronika
32	Buku Putih Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru 2026-2030 (RPerpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru 2026-2030)	<p>Industri semikonduktor dan teknologi baru merupakan sektor baru dan cepat berkembang. Peta Jalan ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru ini sebagai salah satu “mesin ekonomi baru” nasional untuk mendorong transformasi digital, inovasi, investasi, dan kemandirian industri di Indonesia.</p> <p>Strategi yang dirumuskan dalam peta jalan ini diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memperkuat talenta di bidang desain chip, riset pengembangan semikonduktor, serta pendidikan tinggi dan vokasi bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, Matematika); 	Kemenko Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi 2. Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material 3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek 4. Deputi Bidang

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>2) membangun ekosistem dan rantai nilai semikonduktor lokal;</p> <p>3) kerjasama internasional dan investasi; dan</p> <p>4) sinergi lintas sektor dan regulasi adaptif.</p> <p>BRIN akan mengambil peran melalui riset berbasis kebutuhan industri, co-development produk bersama industri, dan pembentukan Pusat Kolaborasi Riset. Kontribusi ini diperkuat dengan pembangunan infrastruktur riset dan komputasi berkinerja tinggi, pengembangan talenta melalui riset dan pendidikan, serta dukungan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas.</p>		<p>Infrastruktur Riset dan Inovasi</p> <p>5. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi</p> <p>6. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi</p>
33	<p>Pemerintahan Digital</p> <p>(RPerpres Pemerintahan Digital)</p>	<p>Pemerintah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai landasan konseptual dalam mengelola pemerintahan digital di Indonesia. Pemerintah fokus pada percepatan pembangunan pusat data nasional dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia untuk memastikan layanan digital yang andal di seluruh pelosok negeri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengangkat peringkat Indonesia dalam indeks global <i>e-government</i> dan mempercepat transformasi digital yang inklusif (Komdigi).</p> <p>Pemerintah digital menjadi sarana untuk mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan nasional melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang didukung oleh data dan teknologi digital. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital akan menjadi payung kebijakan penting dalam mendorong integrasi dan peningkatan kualitas layanan digital nasional (Kemen PanRB, 2025).</p> <p>Ruang lingkup yang diatur dalam RPerpres Pemerintah Digital meliputi Tata Kelola Pemerintah Digital, Ekosistem Pemerintah Digital, riset dan inovasi Pemerintah Digital, Penyelenggara Pemerintah Digital, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. Konsep utamanya bukan untuk memperbanyak aplikasi, tapi keterpaduan layanan yang memudahkan dan memberdayakan, juga penyederhanaan proses bisnis</p>	Kementerian PANRB	<p>1. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi</p> <p>2. Pusat Data dan Informasi</p> <p>3. Organisasi Riset Tata Kelola, Kebijakan Publik, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat</p>

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		<p>tematik yang berorientasi kemudahan layanan (Kemen PanRB, 2025).</p> <p><i>Use case</i> prioritas nasional untuk pemerintah digital dalam RPJMN antara lain pengentasan kemiskinan, layanan berusaha, administrasi pemerintahan, penerimaan negara, serta layanan siklus hidup. Penentuan fokus inisiatif harus diselaraskan dengan program prioritas presiden dan sektor pendukung strategis (Kemen PanRB, 2025).</p>		
34	<p>Peta Jalan Hilirisasi Rempah 2025-2045 (RPerpres Peta Jalan Hilirisasi Rempah 2025-2045)</p>	<p>Peta Jalan Hilirisasi Rempah 2025–2045 disusun untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi dan pengolahan rempah dunia melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dan pemanfaatan komoditas unggulan seperti pala, lada, cengkeh, kayu manis, vanili, dan temulawak. Upaya ini diarahkan untuk mendorong tumbuhnya industri rempah bernilai tambah, memperluas pasar domestik dan ekspor, serta menjadikan temulawak dan komoditas strategis lainnya sebagai ikon global produk herbal Indonesia. Dengan misi penguatan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan petani, efektivitas ekosistem penunjang, serta optimalisasi pemanfaatan rempah dalam dan luar negeri, Indonesia ditargetkan mampu mencapai kemandirian, inovasi, dan kepemimpinan global di sektor rempah pada tahun 2045.</p>	<p>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; 2. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi; 3. Organisasi Riset Pertanian dan Pangan; 4. Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan; 5. Organisasi Riset Kesehatan
35	<p>Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH), (RPermen IPHK - Peraturan Turunan IBSAP)</p>	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.</p> <p>Peran BRIN pada rancangan IPKH diperlukan dalam metode perhitungan IPKH yang terbagi menjadi 7 pilar IPKH; Bentang Alam (BA), Pengelolaan (PG), Spesies dan Genetik (SG), Ancaman (AN), Pemulihan (PM), Pemanfaatan Berkelanjutan (PB), dan Tata Kelola (TK).</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; 2. Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati; 3. Organisasi Riset Pertanian dan Pangan; 4. Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan;

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
				5. Organisasi Riset Kesehatan
36	<p>Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah</p> <p>(RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah)</p>	<p>Sampah berpotensi mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang sistematis dari hulu ke hilir. Adapun pengelolaannya sendiri memerlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif. Peran BRIN pada rancangan RPerpres ini diperlukan dalam aspek kebijakan, strategi, dan program pengembangan riset, teknologi, dan sistem pemantauan. Salah satu programnya yaitu pelaksanaan riset dan pemantauan berbasis geospasial untuk memetakan sampah di darat, di danau, di sungai dan di badan air lain yang tidak tertangani, serta pelaksanaan riset mikroplastik mengenai dampak mikroplastik terhadap manusia, produk perikanan dan dampak lainnya.</p>	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi 2. Organisasi Riset Energi dan Manufaktur 3. Organisasi Riset Elektronika dan Informatika 4. Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan
37	<p>Pengelolaan Sumber Daya Genetik/ Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik</p> <p>(Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan Sumber Daya Genetik/ Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.</p>	<p>Sumber Daya Genetik, yang selanjutnya disingkat SDG adalah materi dan atau informasi genetik yang terdapat dalam bagian dari tumbuhan, satwa, dan mikroorganisme yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat beserta turunan lainnya yang mempunyai nilai aktual atau potensial.</p> <p>Sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait sumber daya genetik merupakan kekayaan negara yang mempunyai nilai penting dan strategis bagi kelestarian fungsi lingkungan, ketahanan pangan, kesehatan, keamanan negara, pembangunan dan perekonomian nasional sehingga harus dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.</p> <p>Peran BRIN pada RPP ini diperlukan dalam hal sebagai salah satu Otoritas Nasional yang berkompeten dan memiliki izin akses terhadap Sumber Daya Genetik.</p>	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi 2. Deputi Bidang Pembangunan 3. Organisasi Riset Pertanian dan Pangan 4. Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan 5. Organisasi Riset Kesehatan 6. Direktorat Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kemaritiman Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan

No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
				7. Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati.
38	<p>Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional</p> <p>(Rancangan Revisi Peraturan Presiden (RPerpres)).</p>	<p>Industri Gim mempunyai potensi ekonomi yang perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mendorong sinergi dalam mengembangkan Industri Gim Nasional. Peran BRIN pada RPerpres ini diperlukan dalam hal mendukung misi meningkatkan riset dan pengembangan berbasis IPTEK serta pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendukung proses kreatif dan produksi konten gim dengan sasaran tersedianya ekosistem riset dan inovasi yang mendukung pengembangan konten gim nasional berbasis IPTEK.</p>	Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf)/ Badan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi 2. Organisasi Riset Tata Kelola, Kebijakan Publik, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
39	<p>Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera</p> <p>(Rancangan Renduk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat)</p>	<p>Terbitnya Keppres Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai respons atas bencana alam di ketiga wilayah tersebut yang telah menimbulkan dampak luas pada aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat menjadi agenda mendesak yang perlu segera disusun rencana aksi dari seluruh K/L terkait baik yang dapat berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam percepatan penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada ketiga wilayah tersebut.</p> <p>BRIN telah mengusulkan rencana aksi untuk dicantumkan dalam rancanangan renduk tersebut agar dapat berkontribusi pada isu dan dampak pascabencana yang ditangani, diantaranya: Hunian Tetap pasca bencana, Tata Ruang Pasca Bencana, Perlindungan Sosial Adaptif dan Penguatan Resiliensi Komunitas, Penyediaan Air Minum, Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pemulihan Kesehatan Masyarakat Terdampak, Pemulihan Produktivitas Lahan Pertanian, Pemulihan Kehutanan, Desain Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk UMKM Terdampak, Penyediaan Data Citra</p>	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, 2. Organisasi Riset Kesehatan, 3. Organisasi Riset Elektronika Dan Informatika, 4. Organisasi Riset dan Energi Manufaktur, 5. Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, 6. Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat,




No	Judul Rencana Aksi Nasional	Gambaran Umum	K/L Pengampu	Satuan Kerja Terkait
		Satelit, Penyediaan <i>Early Warning System</i> .		7. Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material.

3.2.10 Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi Global dalam Riset dan Inovasi





Dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa, diperlukan ekosistem inovasi berbasis riset yang terintegrasi dan kondusif. Ekosistem ini menjadi landasan penting untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif dalam ekonomi global yang semakin berbasis sains. Sebagai salah satu komponen utama ekosistem tersebut, sumber daya manusia iptek yang unggul dan berdaya saing tinggi memainkan peranan kunci. Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi SDM iptek perlu dirancang secara strategis agar selaras dengan kebutuhan nasional dan tren industri di masa depan.


Sejalan dengan hal tersebut, penguatan kemitraan dan kolaborasi global menjadi langkah strategis yang tidak terelakkan. Di tingkat internasional, BRIN telah menjalin hubungan dengan berbagai lembaga ilmiah dunia dan aktif berpartisipasi dalam berbagai forum pertemuan dan jejaring regional-multilateral. Sebagai anggota aktif dalam sejumlah organisasi ilmiah internasional, BRIN berfungsi sebagai *focal point* nasional atau instansi penjurur Indonesia yang menjadi narahubung utama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi internasional dan bertanggung jawab mengkoordinasikan pemanfaatan keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada berbagai program kegiatan didalamnya untuk seluas-luasnya kepentingan nasional. Hal ini juga merupakan bentuk nyata perwujudan peran BRIN dalam diplomasi multilateral sekaligus diplomasi sains. Adapun organisasi internasional dimana BRIN menjadi instansi penjurur dan aktif berpartisipasi di dalamnya adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Daftar Organisasi Internasional dengan Partisipasi Aktif BRIN

No	Organisasi Internasional		Unit Kerja Pengampu/ <i>Focal Point</i>
ORGANISASI ANTARPEMERINTAH			
1		<i>International Atomic Energy Agency (IAEA)</i> <i>Technical Cooperation Program</i> 1) <i>Cash Contribution</i> 2) <i>NPCs</i> <i>Working Capital Fund</i> <i>Reguler Budget EUR</i> <i>Reguler Budget USD</i>	<i>International Nuclear Agency Indonesia (INuA)</i> - Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan (DKP)
2		<i>Non-Alignment Movement on Science and Technology Centre (NAM S&T Centre)</i>	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia IPTEK (DSDMI)
3		<i>Asian and Pacific Center for Transfer of Technology (APCTT) - UNESCAP</i>	Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi (DPRI)

No	Organisasi Internasional		Unit Kerja Pengampu/ Focal Point
4		<i>Research Centre for Islamic History Art and Culture (IRCICA)</i>	DKP (BRIN FP mulai 2025)
5		<i>Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)</i>	Indonesian Space Agency (INASA) – DKP
6		<i>ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation (ASEAN COSTI)</i>	Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi (DKRI)
7		<i>Organization of Islamic Cooperation's Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH)</i>	DKRI
8		<i>D-8 Organization for Economic Cooperation on Technology Transfer and Exchange Network (D-8 TTEN)</i>	DKP
9		<i>APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation (APEC PPSTI)</i>	DKP
10		<i>United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)</i>	INuA – DKP
11		<i>Regional Space Applications Program for Sustainable Development (RESAP) - United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)</i>	INASA – DKP
12		<i>Committee on Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) - United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)</i>	INASA – DKP
13		<i>United Nations Platform for Space-Based Information for Disaster Management and Emergency Response (UNSPIDER) – UNOOSA</i>	INASA – DKP
14		<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)</i>	Kemendikti saintek
		1) <i>Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)</i>	Komite Pelaksana Program IOC - DKP
		2) <i>Man and The Biosphere (MAB)</i>	Komite Pelaksana Program MAB – DKP
		3) <i>Intergovernmental Hydrological Program (IHP)</i>	Komite Pelaksana IHP - DKP
		4) <i>Management of Social Transformation (MOST)</i>	Komite Pelaksana Program MOST – DKP
15		<i>Center for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific (CSSTEAP)</i>	INASA – DKP
16		<i>Regional Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific (China) (RCSSTEAP)</i>	INASA – DKP
17		<i>Group on Earth Observation - Global Earth Observation System of Systems (GEO-GEOSS)</i>	INASA – DKP

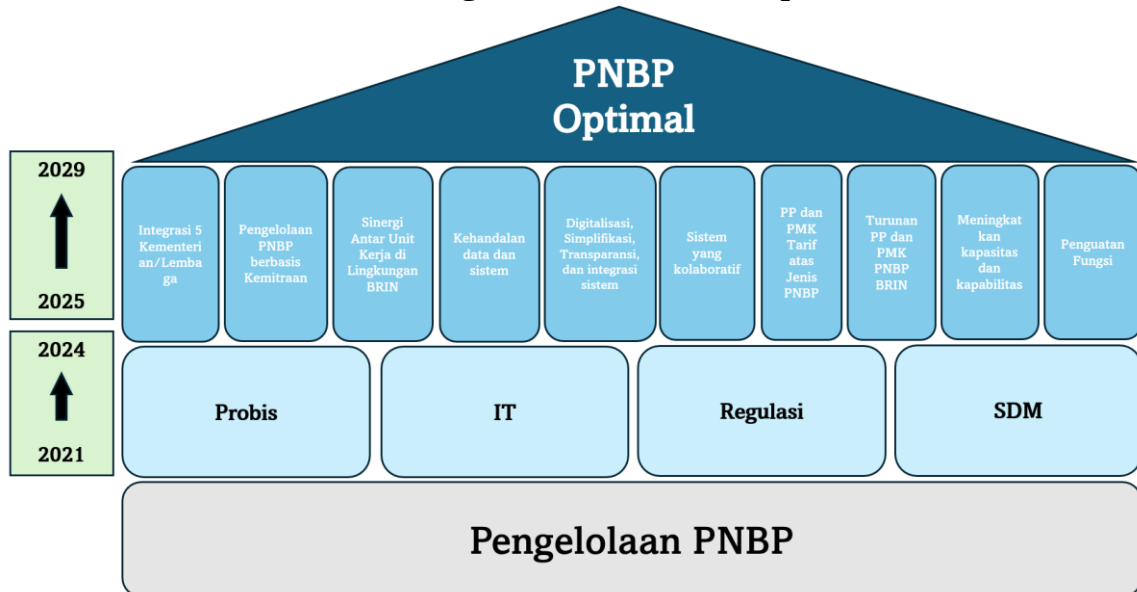
No	Organisasi Internasional		Unit Kerja Pengampu/ Focal Point
18		<i>Commission on Science and Technology for Development (CSTD) – ECOSOC</i>	DKP (FP mulai Juli 2024)
ORGANISASI NONPEMERINTAH			
19		<i>Committee on Space Research (COSPAR)</i>	Indonesian Space Agency (INASA) – DKP
20		<i>International Science Council (ISC)</i>	Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi (DKRI)
21		<i>International Astronautical Forum (IAF)</i>	INASA – DKP
22		<i>Scientific Committee on Solar Terrestrial Physics (SCOSTEP)</i>	INASA – DKP
23		<i>Asia Pacific Center for Theoretical Physics (APCTP)</i>	DpI
24		<i>A Large Ion Collider Experiment – CERN (ALICE CERN)</i>	DSDMI
25		<i>The World Association of Industrial and Technological Research Organizations (WAITRO)</i>	DPRI
26		<i>Global Research Council (GRC)</i>	DFRI
27		<i>Asia Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF)</i>	INASA – DKP
28		<i>International Space Environment Service (ISES)</i>	
FORUM/JEJARING REGIONAL-MULTILATERAL ANTARPEMERINTAH			
29		<i>Group of 20</i>	
		1) <i>Research and Innovation Working Group (RIWG)</i>	DKRI
		2) <i>Science 20</i>	DKRI
		3) <i>Chief Science Advisers Roundtable (CSAR)</i>	DKRI
		4) <i>Space Economy Leaders Meeting (SELM)</i>	INASA – DKP
30		<i>Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA)</i>	DPRI
31		<i>Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA)</i>	INUA – DKP
32		<i>The Science Technology Engineering Innovation Policy Asia and the Pacific Network (STEPAN-UNESCO)</i>	DKRI

No	Organisasi Internasional		Unit Kerja Pengampu/ <i>Focal Point</i>
33		Asia-Oceania Space Weather Alliance (AOSWA)	INASA – DKP

Melalui perannya sebagai *focal point* nasional, BRIN mendorong terciptanya kolaborasi lintas negara di bidang sains, teknologi, dan inovasinya, sekaligus membuka akses bagi para periset Indonesia untuk berpartisipasi dalam program-program internasional yang berstandar tinggi. Kemitraan global ini tidak hanya memperluas jejaring kerja sama, tetapi juga memperkaya wawasan serta pengalaman SDM iptek Indonesia. Melalui pertukaran pengetahuan dan transfer teknologi, kolaborasi internasional memberikan peluang untuk meningkatkan kompetensi SDM iptek nasional. Hal ini penting untuk mendukung terciptanya inovasi yang relevan dan berdampak luas, baik di tingkat domestik maupun global. Dengan demikian, penguatan kemitraan global tidak hanya menjadi katalis bagi peningkatan kapasitas nasional, tetapi juga mendorong posisi Indonesia sebagai pemain strategis dalam ekosistem riset dan inovasi dunia.

3.2.11 Peta Jalan Penerimaan Negara Bukan Pajak BRIN Tahun 2021-2029

Pengelolaan PNBPN untuk dapat mengoptimalkan perolehan PNBPN BRIN tahun 2021-2029 dituangkan dalam *Roadmap* PNBPN BRIN berikut:



Pengelolaan PNBPN di lingkungan BRIN terbagi menjadi 4 (empat) *milestone* diantaranya proses bisnis, teknologi informasi/*information technology* (IT), regulasi, dan SDM.

1. Proses Bisnis (Probis)

Tujuan *milestone* proses bisnis yaitu untuk mencapai tujuan dan fungsi BRIN terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan PNBPN di lingkungan BRIN.

a. Integrasi 5 kementerian/lembaga (Tahun 2021–2023)

BRIN merupakan integrasi 5 (lima) kementerian/lembaga yaitu Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

- 1) Penggabungan 5 (lima) kementerian/lembaga menjadi BRIN sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 - 2) Terintegrasinya pengelolaan dan pelaksanaan PNBP untuk 5 (lima) kementerian/lembaga (BPPT, LIPI, LAPAN, BATAN, dan Kementerian Riset dan Teknologi).
- b. Pengelolaan PNBP Berbasis Kemitraan (Tahun 2024)
- 1) Perbaiki pengelolaan dan pelaksanaan PNBP di lingkungan BRIN dampak integrasi 5 (lima) kementerian/lembaga melalui Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 - 2) Perbaiki pola penyelenggaraan kerja sama PNBP di lingkungan BRIN melalui Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 210/I/HK/2024 tentang Pedoman Tata Kelola Penugasan Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- c. Sinergi Antar Unit Kerja di Lingkungan BRIN (Tahun 2025–2029)
- 1) Peningkatan kolaborasi lintas satuan kerja di lingkungan BRIN dalam penyelenggaraan jasa layanan PNBP.
 - 2) Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pelaksanaan pengawasan APIP di lingkungan BRIN.
 - 3) Optimalisasi peran APIP dalam rangka memberikan pembinaan dalam rangka pengelolaan PNBP.
2. Teknologi Informasi/ *Information Technology* (IT)
- Tujuan *milestone* IT yaitu untuk memperkuat keandalan data dan sistem IT; pembangunan dan pengembangan sistem IT dalam rangka digitalisasi, simplifikasi, transparansi, dan integrasi sistem pengelolaan PNBP di lingkungan BRIN; dan penguatan sistem IT melalui kolaborasi dan sinergi dengan Kementerian Keuangan.
- a. Tahun 2021-2024
- 1) Membangun dan mengembangkan data dan sistem IT dalam rangka pengelolaan PNBP dari pelaksanaan PNBP dan pelaporan pendapatan PNBP dalam kerangka pembangunan sistem informasi PNBP terintegrasi (ELSA).
 - 2) Penguatan sistem IT bersama dengan kementerian/lembaga terkait integrasi sistem dalam rangka pelaksanaan pengelolaan PNBP antar BRIN dengan Kementerian Keuangan melalui aplikasi ELSA.
 - 3) Rencana pembangunan dan pengembangan IT dalam rangka pengelolaan PNBP berbasis kontrak kerja sama dengan tujuan melakukan digitalisasi, simplifikasi, dan transparansi terhadap skema kerja sama PNBP di lingkungan BRIN melalui aplikasi SIMORA.
- b. Tahun 2025-2029
- 1) Membangun profiling mitra kerja sama PNBP berdasarkan *risk management*.
 - 2) Pengembangan ELSA dalam rangka memenuhi kebutuhan BRIN.

- 3) Membangun dan mengembangkan data intelligence PNBP/data analitik/data algoritma dalam upaya meningkatkan penerimaan PNBP di lingkungan BRIN.

3. Regulasi

Tujuan *milestone* regulasi yaitu menjadikan regulasi sebagai dasar hukum dalam menentukan pemungutan tarif layanan PNBP dan penggunaan PNBP di lingkungan BRIN, serta optimalisasi tarif PNBP melalui kontrak kerja sama yang disesuaikan dengan permintaan pengguna layanan.

a. Tahun 2021-2023

- 1) Terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 2) Terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak pada Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 3) Terbit Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 36 Tahun 2022 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 4) Terbit Surat Nomor S-39/MK.02/2022 tertanggal 23 Januari 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 5) Mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.

b. Tahun 2024

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.

c. Tahun 2025-2029

- 1) Terbit Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 2) Rencana penyusunan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 3) Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 4) Terbit peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 5) Terbit Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan lainnya yang mendukung pengelolaan PNBP di lingkungan BRIN.

- 6) Terbit Peraturan Badan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan 0% atau Rp0,00.
- 7) Terbentuknya suatu regulasi di bidang PNBPN yang dapat mengoptimalkan penerimaan PNBPN dan memperbaiki tata kelola di bidang PNBPN.
- 8) Melaksanakan diseminasi dan sosialisasi regulasi.
- 9) Evaluasi atas implementasi Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional dan regulasi turunannya dengan memperhatikan perkembangan kebijakan baru di lingkungan BRIN.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tujuan *milestone* meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM, dan penguatan fungsi SDM khususnya di bidang pelaksanaan dan pengelolaan PNBPN.

a. Tahun 2021-2024

- 1) Optimalisasi sistem manajemen kompetensi SDM.
- 2) Membangun dan mengembangkan SDM yang menguasai, mengolah, dan menganalisis data terkait pelaksanaan dan pengelolaan PNBPN.
- 3) Membangun dan mengembangkan SDM yang memiliki keahlian di bidang pelaksanaan dan pengelolaan PNBPN.
- 4) Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi dalam rangka optimalisasi PNBPN dan kepatuhan wajib bayar di lingkungan BRIN.

b. Tahun 2025-2029

- 1) Melakukan percepatan pengembangan kompetensi dan kualifikasi SDM.
- 2) Terciptanya SDM yang memiliki kompetensi, kualifikasi global, dan responsif terhadap situasi terkini.
- 3) Menciptakan SDM yang inovatif dalam rangka simplifikasi proses bisnis dan kemudahan layanan.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan penjelasan umum regulasi yang dibutuhkan BRIN dalam menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BRIN serta untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam RPJMN 2025-2029.

Kerangka Regulasi BRIN Tahun 2025-2029 BRIN yang disusun dan ditetapkan harus mendukung tercapainya visi BRIN yaitu “Menjadi Penghela Utama dalam Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi yang Berdaya Saing dan Berkualitas untuk Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Kerangka Regulasi BRIN Tahun 2025-2029 ditetapkan juga harus mendukung BRIN menjadi lembaga riset utama yang berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan riset yang dapat mendorong daya saing nasional, dengan berfokus pada program-program yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, BRIN diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu

berinovasi dan mandiri dalam teknologi serta mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan.

Penyusunan Kerangka Regulasi BRIN Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BRIN, sehingga operasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerangka Regulasi juga ditujukan guna mewujudkan koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan riset dan inovasi, serta mendorong pengembangan riset dan inovasi yang lebih terstruktur dan terarah, sesuai dengan kebutuhan nasional dan prioritas pembangunan.

Sedangkan manfaat dari penyusunan Kerangka Regulasi BRIN Tahun 2025-2029 untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia guna mendukung lingkungan yang lebih stabil dan kondusif untuk riset, meningkatkan kompetensi dan kapasitas pelaksana riset dan inovasi nasional, meningkatkan pemanfaatan riset dan inovasi untuk masyarakat, pemerintah, badan usaha dan industri, serta meningkatkan tata kelola BRIN yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk itu, prinsip penetapan kerangka regulasi ditujukan untuk penyederhanaan dalam proses pembentukan regulasi, berkualitas, harmonis, relevan, dan tidak tumpang tindih. Oleh karena itu ditetapkan sebanyak 4 (empat) pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 5 (lima) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai berikut:

1. RPP tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. RPP tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. RPP tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa
4. RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
5. RPP tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan
6. RPP tentang Tata Kelola Pertambangan Bahan Galian Nuklir
7. RPerpres tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jangka Menengah
8. RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016- 2040
9. RPerpres tentang Penyelenggaraan Fasilitas Keantariksaan
10. RPerpres tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional
11. RPerpres tentang Tunjangan Keselamatan Reaktor Nuklir

Selain peraturan pemerintah dan peraturan presiden, ditetapkan juga Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan, dan mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN. Berikut antara lain usulan Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional:

1. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh;
4. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan;
5. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa;
6. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan;
7. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pertambangan Bahan Galian Nuklir;
8. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme;
9. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Fasilitas Keantariksaan;
10. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Keantariksaan;
11. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Rencana Strategis BRIN Tahun 2025-2029;
12. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi;
13. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penyusunan Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi;
14. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi;
15. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional;
16. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tata Kelola Data Riset dan Inovasi;
17. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional;

18. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional;
19. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset;
20. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;
21. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Standar Biaya Keluaran Riset dan Inovasi;
22. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
23. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 24 Tahun 2022 tentang Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Mobilitas Periset; dan
24. Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 25 Tahun 2022 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

3.4 Kerangka Kelembagaan

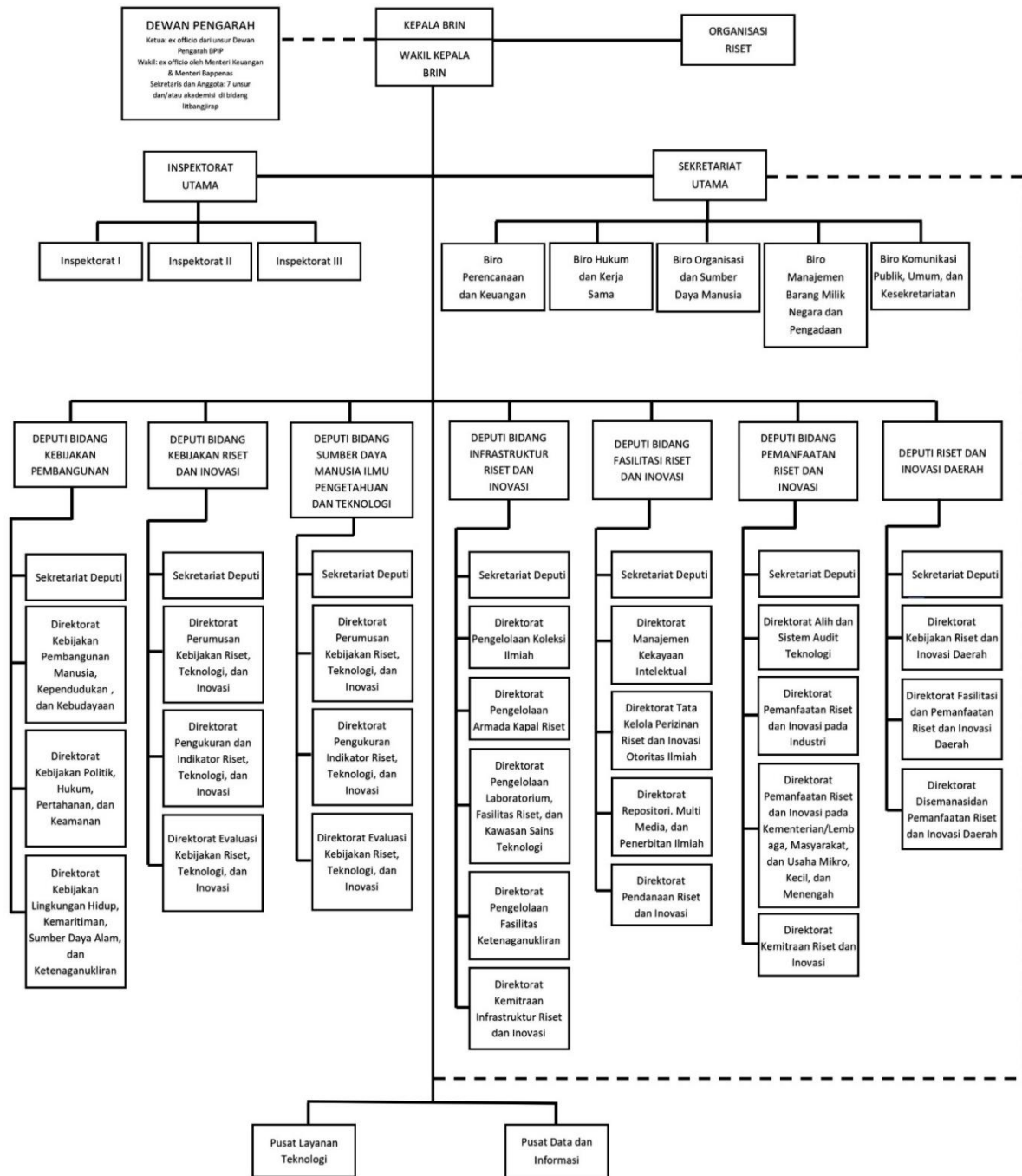
3.4.1 Struktur Organisasi

Dalam Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional ditetapkan bahwa BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan *monitoring*, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BRIN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
3. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitas riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi;

4. Pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
5. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
6. Pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
7. Pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
9. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi kebijakan yang mengatur, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa;
10. Pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
11. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;
12. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;
13. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Gambar 19. Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Tugas dan fungsi BRIN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala BRIN memperhatikan arahan strategis dari Dewan Pengarah melalui Ketua Dewan Pengarah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kepala BRIN dibantu oleh seorang Wakil Kepala serta didukung oleh sembilan unit organisasi setingkat eselon I yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Selain 9 (sembilan) unit eselon 1, BRIN juga memiliki Organisasi Riset (OR) yang bertugas untuk menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan

ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan. Adapun OR dipimpin oleh seorang Kepala OR yang merupakan pejabat fungsional.

Dalam Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BRIN, Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kepala BRIN melalui Sekretaris Utama. Kedua unit ini menjalankan fungsi teknis operasional yang bersifat strategis, masing-masing dalam bidang pelayanan teknologi, pengelolaan data dan informasi riset inovasi. Sebagai UPT, Pusyantek dan Pusdatin berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas BRIN, dengan menjalankan kegiatan teknis sesuai kebijakan dan arahan yang ditetapkan oleh pimpinan BRIN, guna menunjang efektivitas sistem nasional riset dan inovasi.

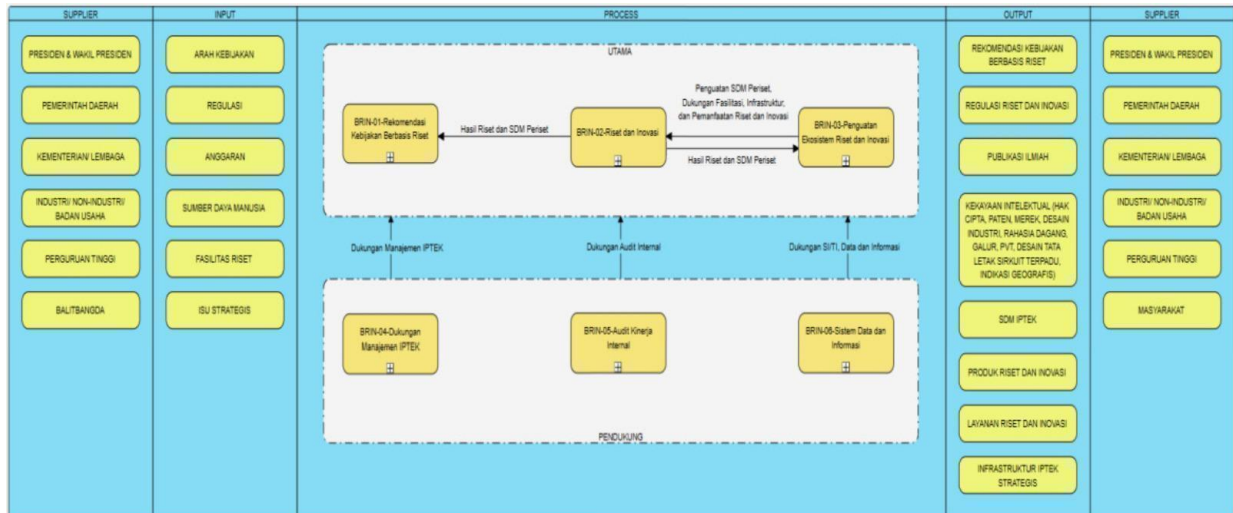
Dalam rangka menjaga keselarasan organisasi dengan dinamika kebijakan nasional, perkembangan iptek, serta kebutuhan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN, penataan dan penyesuaian organisasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kinerja organisasi, serta mendukung pelaksanaan riset dan inovasi nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3.4.2 Keterkaitan Fungsi Antar Satuan Kerja di Lingkungan BRIN

3.4.2.1 Proses Bisnis BRIN dalam penerapan metode SIPOC

Untuk memastikan seluruh kegiatan riset dan inovasi berjalan secara terstruktur, terukur, dan terintegrasi, BRIN menerapkan pendekatan SIPOC (*Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers*) dalam merancang proses bisnis utamanya. Pendekatan ini memberikan kerangka sistematis dalam memetakan alur kerja dari hulu ke hilir, sekaligus memperjelas peran berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem riset dan inovasi nasional. Gambar 20 merepresentasikan alur proses bisnis yang terjadi di BRIN, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) proses utama meliputi: (BRIN01) rekomendasi kebijakan berbasis riset, (BRIN02) penyelenggaraan riset dan inovasi, dan (BRIN03) penguatan ekosistem riset dan inovasi; serta 3 (tiga) proses pendukung meliputi (BRIN04) dukungan manajemen iptek, (BRIN05) pengawasan dan audit kinerja internal, dan (BRIN06) pengembangan sistem data dan informasi.

Gambar 20. Proses Bisnis Badan Riset dan Inovasi Nasional



Pada (BRIN03) proses penguatan ekosistem riset dan inovasi, BRIN ditopang oleh 5 (lima) deputy bidang serta didukung oleh Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek) dan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Satuan kerja ini memiliki peran yang beragam untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi. Deputy Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Deputy Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi memiliki peran melaksanakan fasilitasi dan pemanfaatan riset mulai dari pendanaan, layanan kemitraan, promosi, diseminasi hasil riset inovasi, serta menghubungkan (*link and match*) kebutuhan masyarakat dengan hasil teknologi tepat guna. Sebagai pintu masuk operasional hilirisasi, Pusyantek menyelenggarakan fungsi manajemen pemasaran, proyek, serta kontrak dan lisensi melalui pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Melalui peran tersebut, BRIN memberikan layanan profesional kepada pemangku kepentingan eksternal dengan orientasi pada potensi pasar (*market driven*) sebagai pusat (*hub*) kolaborasi dan fasilitator multipihak.

Adapun dalam (BRIN03) proses penguatan ekosistem riset dan inovasi, Deputy Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi berperan untuk memperkuat dan meningkatkan sumber daya riset dan inovasi, serta menyediakan layanan infrastruktur dan fasilitas riset yang dapat dimanfaatkan oleh mitra dalam negeri maupun internasional. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memiliki peran untuk meningkatkan kapabilitas SDM Indonesia dengan program manajemen talenta nasional bidang riset dan inovasi. Sementara itu, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia memiliki fungsi untuk menyiapkan serta menjaring talenta-talenta muda menjadi SDM iptek unggul, khususnya di bidang ketenaganukliran, guna menjamin keberlanjutan regenerasi pakar di ekosistem riset nasional.

Dalam (BRIN02) proses penyelenggaraan riset dan inovasi, kegiatan riset dan inovasi dilakukan oleh 12 (dua belas) Organisasi Riset BRIN. Dengan skema ini diharapkan para pelaku riset dapat fokus menjalankan riset dan inovasi sesuai ruang lingkup dan isu-isu penting riset yang telah dituangkan dalam peta jalan riset 5 (lima) tahun.

Selanjutnya dalam (BRIN01) proses rekomendasi kebijakan berbasis riset. BRIN ditopang oleh 3 (tiga) deputy yakni Deputy Bidang Kebijakan Pembangunan, Deputy Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi dan Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang berperan melakukan perumusan

berbasis sains untuk menghasilkan landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan. Komitmen BRIN, berupaya untuk menghasilkan *output* riset dan inovasi yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam menyelesaikan isu-isu strategis pembangunan nasional.

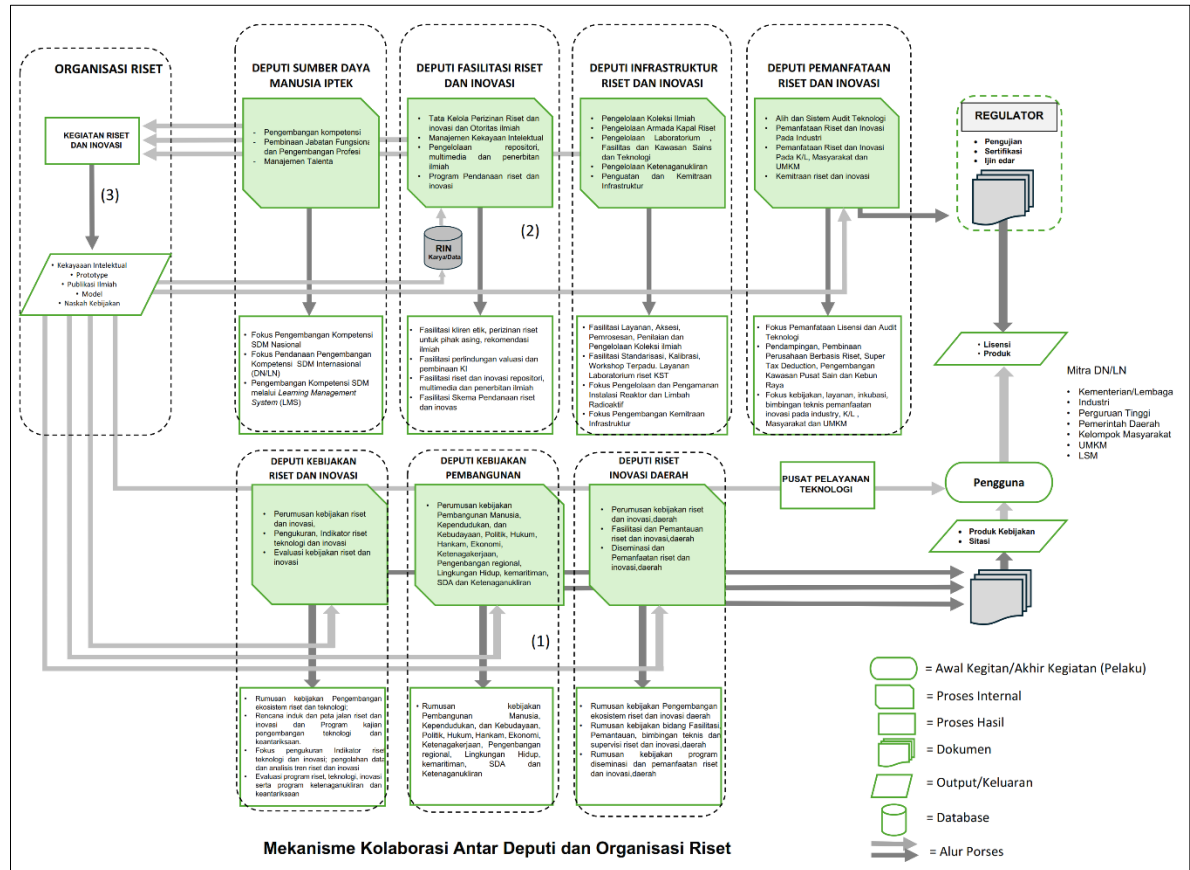
Pada alur proses bisnis, 3 (tiga) proses pendukung berperan menjalankan fungsi layanan internal yang menopang secara langsung terselenggaranya keberhasilan dari proses utama. Proses dukungan manajemen ilmu pengetahuan dan teknologi (BRIN04) ditopang oleh Sekretariat Utama yang berperan mendukung kinerja kelembagaan BRIN dalam penyelenggaraan administrasi dan layanan internal, serta bertanggungjawab melaksanakan beberapa fungsi yakni: fungsi perencanaan dan keuangan; fungsi pengelolaan dan pembinaan SDM; fungsi hukum dan kerja sama; fungsi komunikasi publik dan urusan umum; dan fungsi pengelolaan barang milik negara.

Untuk proses pengawasan dan audit kinerja internal (BRIN05) berada di bawah koordinasi Inspektorat Utama yang berperan dalam layanan internal terhadap fungsi pengawasan dan audit internal. Sedangkan proses pengembangan sistem data dan informasi (BRIN06) berada di bawah koordinasi Pusat Data dan Informasi yang berfungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi serta pengelolaan data dan informasi.

3.4.2.2 Mekanisme Kolaborasi antar Satuan Kerja di Lingkungan BRIN

Kolaborasi antar Deputi dan Organisasi Riset meliputi (1) Penguatan dan dukungan kebijakan pembangunan berbasis bukti/sains, (2) Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional, dan (3) Pelaksanaan riset dan inovasi. Mekanisme kolaborasi ini merupakan penjabaran untuk menjaga konsistensi, kesinambungan, dan sinergi antara kebijakan pembangunan, penguatan ekosistem pendukung, serta pelaksanaan riset dan inovasi nasional yang disusun antar unit kerja.

Gambar 21. Mekanisme Kolaborasi antar Satuan Kerja di Lingkungan BRIN



Gambar 21 menjelaskan alur kolaborasi antar Deputy dan Organisasi Riset, meliputi (1) Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional, (2) Pelaksanaan riset dan inovasi, (3) Penguatan dan pendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti/sains. Mekanisme kolaborasi ini merupakan penjabaran untuk konsistensi dan sinergi kebijakan pembangunan dan pelaksanaan riset dan inovasi nasional yang disusun antar unit kerja, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan dan pendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti/sains.

Penguatan kebijakan pembangunan untuk mendukung Ekosistem riset dan inovasi, dilakukan Deputy Kebijakan Pembangunan melalui pengembangan hub iptekin di kementerian/lembaga sesuai bidang prioritas; Deputy Kebijakan Riset dan Inovasi melalui pengolahan statistik sektoral (iptek dan inovasi) yang berkualitas; Deputy Riset dan Inovasi Daerah terhadap pembentukan dan pembinaan riset dan inovasi di daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota).

2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional,

Ekosistem riset dan inovasi dilakukan penguatan oleh Deputy Sumber Daya Manusia iptek terhadap penguatan SDM iptek; Deputy Fasilitas Riset dan Inovasi terhadap penguatan kemitraan multipihak pendanaan riset dan inovasi; Deputy Infrastruktur Riset dan Inovasi terhadap penguatan infrastruktur riset; Deputy Pemanfaatan Riset dan Inovasi terhadap hilirisasi dan komersialisasi Pemanfaatan riset dan inovasi, Inovasi (Hasil Inovasi). Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional dilakukan melalui *matching fund* dalam negeri dan luar negeri dengan mitra/pemangku kepentingan guna mendukung peningkatan

produktivitas riset, akselerasi inovasi dan kolaborasi multipihak dalam ekosistem iptek dan inovasi.

3. Pelaksanaan riset dan inovasi,
 - a. Riset dan inovasi dilakukan Organisasi Riset sebagai *executing agency* dalam lingkup riset dan inovasinya, dengan dukungan Pusat Riset dan SDM pelaksana riset untuk menghasilkan target-target luaran riset dan inovasi yang berkualitas, berdampak dan memberikan manfaat yang signifikan serta menjadi solusi bagi permasalahan atau isu-isu strategis nasional yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
 - b. Organisasi Riset meliputi riset bidang: Pertanian dan Pangan; Kesehatan; Tenaga nuklir; Energi dan manufaktur; Nanoteknologi dan material; Elektronika dan informatika; Hayati dan lingkungan; Kebumihan dan maritim; Penerbangan dan antariksa; Ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; Tata kelola pemerintah, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; Arkeolog, Bahasa dan Sastra.
 - c. Luaran riset dan inovasi yang dihasilkan menjadi dasar penguatan kebijakan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung transformasi ekonomi dan kontribusi nyata sektor iptek terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional.

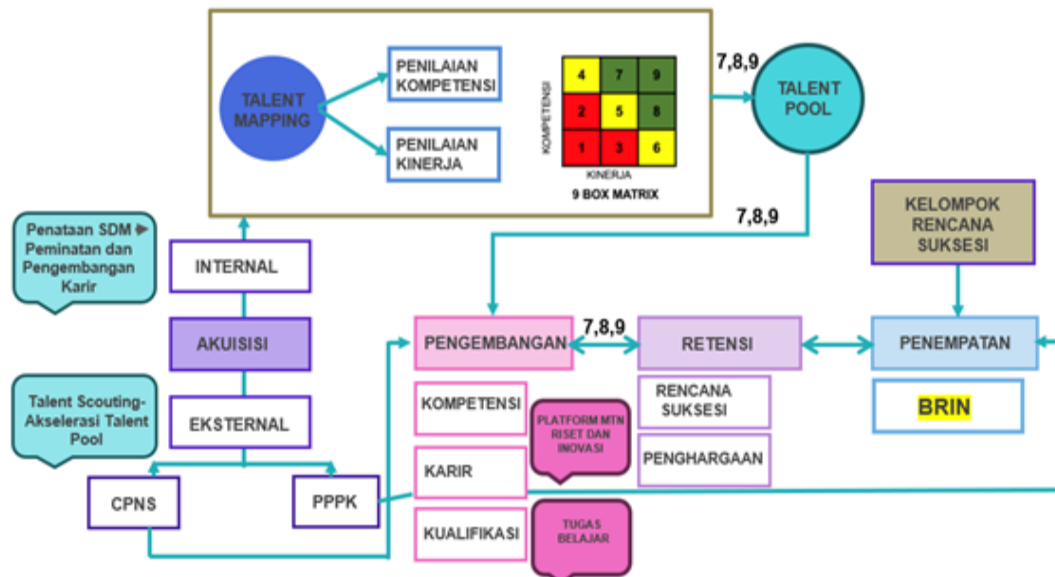
Selain itu, penghubung pemanfaatan kepada pengguna diperankan oleh Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek), yang berfungsi sebagai kanal agar hasil riset dan inovasi dapat diakses oleh pengguna. Namun demikian, hasil riset dan inovasi dari Organisasi Riset juga dapat dimanfaatkan oleh pengguna secara langsung sesuai karakter layanan, kebutuhan, dan mekanisme kolaborasi yang disepakati.

3.4.3 Pengelolaan ASN BRIN

Salah satu dari empat pilar Visi Indonesia 2045 yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemampuan suatu bangsa untuk menjadi sejahtera, cerdas serta berdaya saing di tengah isu globalisasi dan unggul dalam penguasaan inovasi teknologi akan bertumpu pada kualitas sumber daya manusianya. SDM merupakan elemen strategis yang tidak hanya mendukung operasional kelembagaan, tetapi juga menentukan arah dan keberhasilan pelaksanaan riset dan inovasi nasional. Sebagai aset tak berwujud, SDM memiliki nilai fundamental dalam mewujudkan visi BRIN sebagai penggerak ekosistem riset dan inovasi yang unggul, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendorong peningkatan peran SDM dalam pencapaian sasaran strategis BRIN sebagai institusi riset pemerintah, serta untuk mendukung percepatan pembangunan nasional, BRIN berupaya mengimplementasikan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pengelolaan manajemen ASN di lingkungan BRIN. Berbagai upaya dilakukan dalam melaksanakan agenda transformasi pengelolaan ASN, yang mencakup: perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan pemberhentian sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 22. Ruang Lingkup Transformasi Pengelolaan ASN di lingkungan BRIN



Sumber: Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN

Selain melakukan transformasi dalam ruang lingkup pengelolaan ASN, BRIN juga berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi manajemen ASN. Upaya digitalisasi ini telah diinisiasi sejak BRIN berdiri pada tahun 2021, sebagai bentuk penegasan komitmen BRIN untuk mengimplementasikan manajemen ASN yang lebih modern, terstruktur dan sistematis. Melalui digitalisasi, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN di lingkungan BRIN dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akurat. Adapun penjelasan dari masing-masing ruang lingkup transformasi pengelolaan ASN di lingkungan BRIN, dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan SDM

BRIN mengembangkan pola karier SDM yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, integritas, kapasitas, serta adaptabilitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi riset dan inovasi. Dalam lima tahun ke depan, BRIN akan mengembangkan sistem informasi pola karier yang terintegrasi dengan proses bisnis dan formasi jabatan, sehingga memungkinkan SDM memantau lowongan jabatan serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendukung mobilitas karier secara horizontal, vertikal, maupun diagonal.

2. Pengadaan SDM

Pengadaan SDM iptek merupakan langkah strategis BRIN dalam menciptakan SDM unggul guna mendukung penguatan kapasitas riset dan inovasi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 serta mengacu pada Frascati Manual, SDM iptek mencakup peneliti, perekayasa, dosen, dan tenaga pendukung riset yang terlibat langsung dalam kegiatan penelitian dan layanan riset.

BRIN berkomitmen membangun sistem dan mekanisme pengadaan SDM berbasis ekosistem akademik dan prinsip meritokrasi secara konsisten. Sejalan dengan Keputusan Kepala BRIN Nomor 77/I/HK/2024 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon ASN Formasi JF Peneliti, Analis Pemanfaatan Iptek, Kurator Koleksi Hayati, Analis Data Ilmiah, Penata Penerbitan Ilmiah, Analis Perkebunrayaan, Teknisi Perkebunrayaan, Perekayasaan dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dalam lima tahun ke depan BRIN merencanakan pembukaan 2.500

formasi calon ASN (CASN), mencakup berbagai jabatan fungsional dengan latar belakang pendidikan S1, S2, dan S3. Khusus untuk pengadaan SDM iptek yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang riset, invensi dan inovasi, diperuntukkan bagi lulusan minimal master (S2) dan diutamakan doktor (S3), sedangkan untuk pengadaan SDM manajemen diperuntukkan bagi lulusan minimal sarjana (S1).

Selain seleksi berdasarkan kualifikasi pendidikan, BRIN akan menerapkan seleksi kompetensi tambahan berbasis teknis untuk SDM iptek, seperti publikasi ilmiah terindeks global, kekayaan intelektual, dan rekam jejak riset. Dengan demikian, BRIN akan mendapatkan SDM baru yang siap bekerja dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, professional dan adaptif untuk memperkuat posisi dan tugas fungsinya di bidang riset dan inovasi.

3. Pengelolaan Kinerja SDM

Pengelolaan kinerja SDM yang saat ini diatur dalam Peraturan BRIN Nomor 4 Tahun 2025 mampu mendorong pegawai dalam mencapai keluaran riset yang berkualitas. Selain itu juga mampu mendorong pegawai agar memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan organisasi dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menuntut lebih dari itu. Riset dan inovasi harus mendukung kemajuan bangsa lewat kontribusinya dalam pembangunan nasional sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, Keluaran Kerja Minimal (KKM) yang diatur dalam Peraturan BRIN Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2023 harus disempurnakan demi mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan kinerja semestinya tidak hanya mengatur batas minimal yang disebut KKM, tetapi juga mengatur dan mengakomodir seluruh ruang lingkup tugas dan tanggung jawab pegawai di lingkungan BRIN sambil tetap memperhatikan ruang lingkup tugas dan jabatan fungsionalnya.

Kinerja pegawai yang terdiri dari hasil kerja dan perilaku kerja secara ideal harus merepresentasikan profesionalisme dalam bekerja dan bertindak. Hasil kerja SDM Iptek dan SDM Manajemen Iptek setidaknya dapat memperhatikan beberapa perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam hal penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan bagi SDM Iptek maka perspektif di atas dijabarkan dalam target hasil kerja yang dibagi menjadi 4 komponen hasil kerja, yaitu peran strategis, *outcome*, *output*, dan pengembangan kompetensi dan penghargaan.

Dalam hal penilaian kinerja, penilaian hasil kerja dilaksanakan dengan menghitung ketercapaian pegawai terhadap 4 komponen hasil kerja yang dihasilkan baik dalam bentuk *outcome* antara, *output*, atau *output* antara. Penilaian kinerja juga harus mengatur ketentuan penilaian perilaku kerja yang mempertimbangkan pelanggaran kode etik dan perilaku serta hukuman disiplin berdasarkan jenis hukuman yang diterima. Hal ini selaras dengan *core values* ASN BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif) yang menjadi indikator penilaian perilaku kerja pegawai. Pengelolaan kinerja yang lebih komprehensif diharapkan dapat mendorong penilaian yang lebih objektif agar pengembangan karir pegawai berjalan dengan baik. Pengelolaan kinerja yang baru juga diharapkan dapat menjadi dasar akuisisi talenta yang lebih ideal agar sistem merit terimplementasikan dengan lebih optimal dan mendorong pegawai untuk lebih banyak berkontribusi bagi pembangunan nasional.

4. Penghargaan Pegawai Berbasis Kinerja

Dalam rangka meningkatkan motivasi dan budaya kerja unggul, BRIN menerapkan sistem penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, loyalitas, dan dedikasi pegawai. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kontribusi terhadap capaian organisasi sesuai jenjang jabatan fungsional. Terdapat dua bentuk penghargaan utama yang diberikan setiap tahun, yaitu:

- a. Pegawai Berkinerja Tinggi, bagi pegawai yang menunjukkan kinerja unggul dan berdampak signifikan bagi organisasi.
- b. *Future Leader*, bagi pegawai dengan kinerja sangat baik serta memiliki potensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya.

Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan akuntabel melalui usulan unit kerja, penilaian oleh tim independen, hingga penetapan oleh Kepala BRIN. Selain sertifikat, penerima penghargaan memperoleh manfaat strategis seperti prioritas dalam program suksesi, *talent pool*, dan pengembangan kompetensi. Sistem ini menjadi bagian dari manajemen karir BRIN untuk memperkuat peran SDM dalam pencapaian target strategis riset dan inovasi nasional.

5. Talenta dan Perencanaan Suksesi

BRIN melaksanakan manajemen ASN berbasis sistem merit guna memastikan setiap jabatan strategis diisi oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Sebagai institusi riset, BRIN berkomitmen untuk membina talenta yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi melalui peningkatan kualitas, kuantitas, dan kualifikasi SDM secara berkelanjutan.

Dalam mendukung penerapan sistem merit, BRIN menyusun perencanaan suksesi yang objektif, transparan, terencana, dan akuntabel. Perencanaan ini dilakukan melalui pemetaan dan pengembangan talenta terbaik yang diproyeksikan untuk menduduki jabatan strategis, khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepala Organisasi Riset, dan Kepala Pusat Riset.

Rencana suksesi juga menjadi dasar dalam penyusunan pola karier ASN, sekaligus menjadi strategi antisipatif untuk mencegah kekosongan jabatan manajerial. Dengan demikian, BRIN dapat memastikan tersedianya SDM yang siap mengisi posisi strategis dan mendukung pencapaian tujuan kelembagaan di bidang riset dan inovasi.

6. Pengembangan Kompetensi SDM

BRIN menerapkan pendekatan pembelajaran terintegrasi melalui sistem *Corporate University* sebagai strategi utama dalam pengembangan kompetensi SDM. Pendekatan ini menempatkan organisasi sebagai pusat pembelajaran dengan mendorong otonomi unit kerja untuk mengelola pengembangan kompetensi secara mandiri, sesuai kebutuhan tugas dan hasil penilaian kompetensi.

Pengembangan kompetensi dilakukan secara holistik melalui kombinasi pengalaman kerja (70%), interaksi sosial dan umpan balik (20%), serta pelatihan klasikal dan nonklasikal (10%), sesuai dengan prinsip normalisasi pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018. Proses ini didukung oleh pemanfaatan teknologi digital melalui integrasi platform STAR BRIN sebagai sistem penilaian kompetensi dan BRILIANT sebagai *Learning Management System* yang menyediakan akses pembelajaran daring secara fleksibel dan berkelanjutan.

BRIN selalu mendorong pengembangan kompetensi SDMnya. Melalui pengembangan kompetensi yang terintegrasi dan otonom, BRIN melalui direktorat Manajemen Talenta selain menyediakan program unggulan pengembangan Kompetensi untuk menjaring talenta riset dan inovasi

juga merupakan platform pengembangan kompetensi bagi SDMnya. Dari semua program unggulan Direktorat MT seperti *visiting researcher*, *postdoctoral*, *research assistant*, dan pascasarjana berbasis riset mensyaratkan SDM BRIN sebagai pembimbing/promotor. Dari proses itu, pengembangan kompetensi tidak hanya didapatkan oleh talenta riset dan inovasi secara umum, namun juga SDM BRIN sebagai talenta riset dan inovasi di institusi pemerintah.

Melalui pengembangan kompetensi yang terus-menerus dan terintegrasi, diharapkan terwujud SDM BRIN yang profesional, kompetitif, berwawasan global serta berkinerja tinggi sehingga mampu mendukung target organisasi dan pembangunan nasional.

7. Penegakan Disiplin SDM

BRIN melalui BOSDM melaksanakan pembinaan disiplin SDM secara preventif dan responsif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kode etik, dan kode perilaku. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi secara berkelanjutan melalui berbagai media, guna meningkatkan pemahaman SDM terhadap ketentuan yang berlaku.

Pembinaan responsif dilaksanakan melalui penegakan disiplin secara konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi. Penegakan ini merupakan tanggung jawab bersama antara BOSDM dan seluruh pimpinan unit kerja, di mana setiap atasan langsung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin sesuai tingkat kewenangan. Proses penyelesaian dilakukan secara berjenjang, termasuk pembentukan Tim Pemeriksa untuk pelanggaran disiplin yang tergolong sedang atau berat.

8. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

BRIN berkomitmen membangun budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung ekosistem riset dan inovasi yang terbuka dan kolaboratif. Untuk itu, BRIN mendorong terciptanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (*work-life balance*) serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental SDM sebagai bagian dari strategi menjaga produktivitas dan kreativitas periset.

Sebagai institusi riset, BRIN menyadari bahwa ide dan inovasi bertumbuh dari SDM yang sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, BRIN mengembangkan kebijakan fleksibilitas kerja, menyediakan layanan konseling kesehatan mental profesional, serta memperkuat budaya kerja positif berbasis nilai-nilai BerAKHLAK. Langkah ini diharapkan memperkuat citra institusi sebagai organisasi modern yang adaptif dan peduli terhadap kesejahteraan SDM.

3.4.4 Peta Kondisi Sumber Daya Manusia

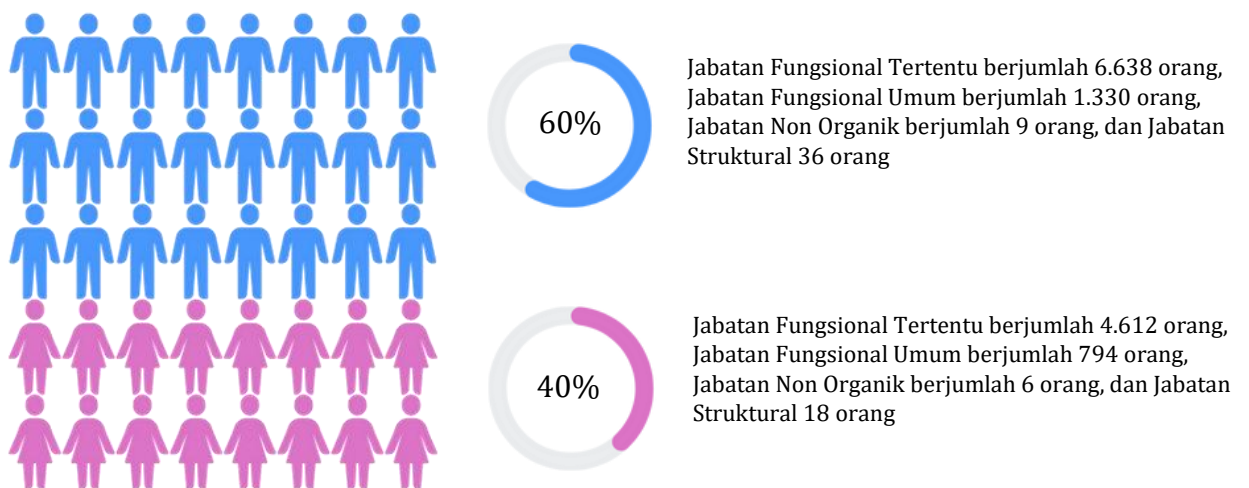
3.4.4.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatannya

Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Di lingkungan BRIN, isu gender dipandang tidak hanya sebagai persoalan komposisi demografis, melainkan sebagai elemen strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Representatif gender antara laki-laki dan perempuan memberikan ruang bagi keberagaman sudut pandang, yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dan mendorong terciptanya budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif. Selain mencerminkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dalam akses dan kesempatan kerja, penerapan kesetaraan gender juga memperkuat posisi

BRIN sebagai institusi yang berperan aktif dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang inklusif dan berdaya saing di tingkat nasional

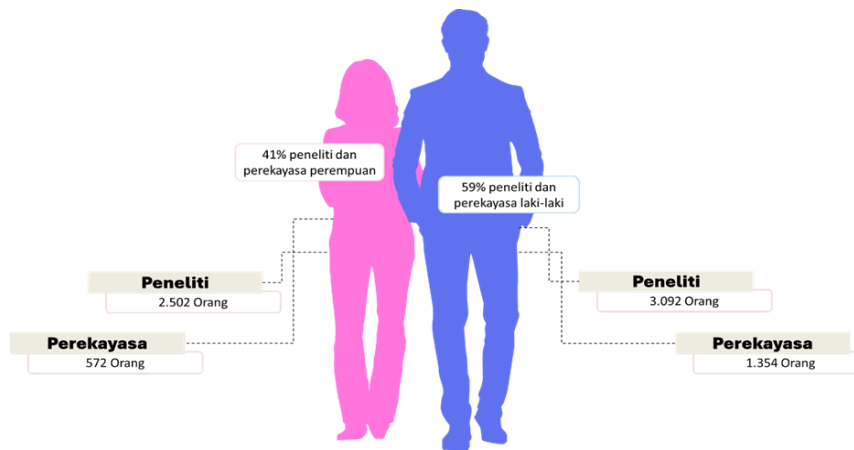
Sementara itu, distribusi jabatan dalam organisasi juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi kelembagaan. Penempatan pegawai yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, serta kapasitas individu menjadi pondasi dalam mewujudkan struktur organisasi yang fungsional dan adaptif. Komposisi jabatan yang proporsional mencerminkan penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), sekaligus memastikan bahwa setiap unit kerja dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi BRIN. Sampai dengan awal tahun 2025, SDM BRIN tercatat sebanyak 13.443 orang yang terdiri dari 5.430 pegawai perempuan (40%) dan 8.013 pegawai laki-laki (60%).

Gambar 23. Distribusi Pegawai menurut Jenis Jabatan dan Gender



BRIN memiliki periset yang terdiri atas peneliti dan perekayasa dengan proporsi 41% perempuan dan 59% laki-laki. Keterlibatan seluruh gender dalam berbagai bidang riset dan inovasi menunjukkan bahwa BRIN membuka kesempatan setara untuk berkontribusi pada pengembangan iptek. Hal ini mencerminkan komitmen kuat terhadap inklusivitas dan kesetaraan gender, sekaligus menegaskan bahwa BRIN tidak hanya mengejar keunggulan ilmiah, tetapi juga membangun ekosistem riset yang berkeadilan dan memberdayakan keragaman SDM. Proporsi ini sejalan dengan kebijakan BRIN yang mengintegrasikan prinsip GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) dalam manajemen SDM, memperkuat peran strategis perempuan dan kelompok beragam lainnya dalam memajukan riset nasional.

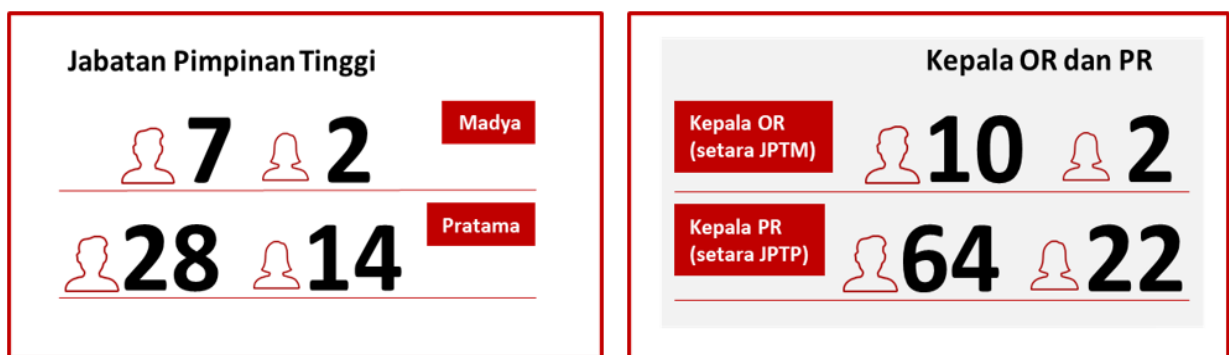
Gambar 24. Proporsi Peneliti dan Perekayasa berdasarkan Jenis Kelamin



BRIN berkomitmen menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan inklusivitas dalam seluruh aspek kelembagaan, termasuk dalam kepemimpinan. Perempuan di BRIN tidak hanya berperan aktif dalam kegiatan riset dan inovasi, tetapi juga telah menempati posisi strategis dan jabatan tinggi di berbagai satuan kerja. Kehadiran perempuan dalam jajaran pimpinan BRIN merupakan bukti nyata bahwa institusi ini menerapkan prinsip meritokrasi dan tidak mengenal hambatan struktural, seperti *glass ceiling*, yang kerap membatasi peran perempuan di lingkungan profesional. Penilaian terhadap kompetensi, integritas, dan kapabilitas dilakukan secara objektif, tanpa memandang gender.

Melalui kebijakan pengembangan karier yang setara dan adil, BRIN menciptakan lingkungan kerja yang mendorong setiap individu untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya, termasuk dalam bidang kepemimpinan. Dengan semangat tersebut, BRIN terus berupaya menjadi institusi riset yang progresif, inklusif, dan berorientasi pada keunggulan. Berikut ini disajikan komposisi pimpinan dalam manajemen maupun organisasi riset di lingkungan BRIN.

Gambar 25. Komposisi Pimpinan dalam Manajemen dan Organisasi Riset



Sumber: Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN (data 30 Juni 2025)

Selain itu, peran perempuan dalam dunia riset semakin menunjukkan kontribusi yang signifikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan iptek. Perempuan periset di BRIN berkontribusi secara aktif dalam berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu dasar hingga riset terapan, serta turut terlibat dalam kolaborasi riset baik di tingkat nasional maupun internasional. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya perspektif ilmiah,

tetapi juga berperan dalam membentuk arah riset yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara luas. Salah satu bukti konkret atas kontribusi perempuan periset di BRIN adalah diraihnya penghargaan bergengsi *L'Oréal-UNESCO For Women in Science*, yang secara khusus diberikan kepada ilmuwan perempuan atas kontribusi luar biasa dalam bidang sains. Capaian tersebut tidak hanya mempertegas peran strategis perempuan dalam ekosistem riset nasional, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda, khususnya perempuan, untuk menekuni dan mengembangkan karir di bidang iptek.

Gambar 26. Penerima Penghargaan *L'Oréal-UNESCO For Women in Science*

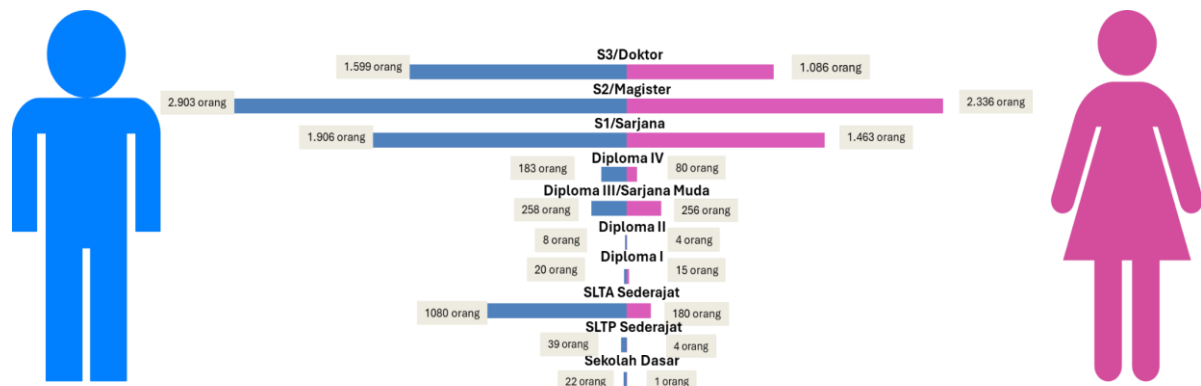


3.4.4.2 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kapasitas, keterampilan, dan kesiapan SDM dalam menghadapi kompleksitas tugas dan tantangan dunia kerja. Di lingkungan BRIN keberagaman jenjang pendidikan dalam komposisi SDM menjadi aset strategis yang saling melengkapi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. SDM dengan latar belakang pendidikan Diploma dan Sarjana umumnya memiliki keterampilan teknis dan operasional yang menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Kelompok ini kerap kali menjadi tulang punggung organisasi karena peran mereka yang langsung bersentuhan dengan aspek implementatif dan administratif dari berbagai program. Sementara itu, SDM dengan kualifikasi pascasarjana (magister dan doktor) umumnya memiliki kemampuan analisis yang lebih mendalam serta kecakapan dalam memahami permasalahan yang kompleks secara konseptual. Keberadaan kelompok ini sangat penting dalam perumusan kebijakan strategis, pengembangan riset, serta inovasi berbasis iptek. Keberagaman tingkat pendidikan ini menciptakan ekosistem kerja yang sinergis, di mana setiap jenjang berkontribusi sesuai kapasitasnya dalam mewujudkan tujuan organisasi. Di samping itu, BRIN juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses

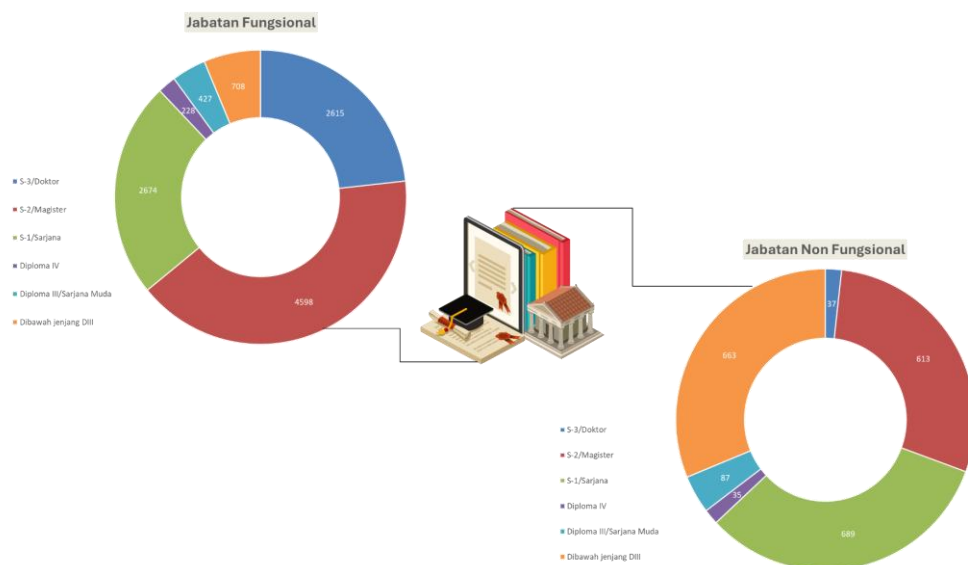
terhadap peluang pengembangan diri dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, guna mendorong kontribusi optimal bagi kemajuan lembaga.

Gambar 27. Komposisi Pegawai Menurut Gender dan Tingkat Pendidikan



Persentase pegawai dengan tingkat pendidikan S3 di BRIN sebesar 20%, pegawai berpendidikan S2 memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 39%, dan pegawai yang mengenyam pendidikan S1/D4 yakni sebesar 27%. Selain itu masih banyak pegawai dengan tingkat pendidikan di bawah S1/D4 dengan persentase sebesar 14%. Sebagai lembaga riset yang memiliki tujuan menjadi lembaga riset berkelas dunia, porsi SDM di BRIN yang memiliki kualifikasi pendidikan S3 akan selalu diupayakan peningkatannya. Hal ini telah menjadi perhatian dan acuan bagi BRIN dalam menentukan kebijakan pengembangan SDM di 5 (lima) tahun mendatang. Berikut grafik yang menggambar secara lebih detail tingkat pendidikan berdasarkan kategori fungsional dan nonfungsional.

Gambar 28. Proporsi Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan pada Jabatan Fungsional dan Non Fungsional



3.4.4.3 Perbandingan Sumber Daya Manusia Manajemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dari total pegawai aktif BRIN, SDM manajemen iptek berjumlah 6.144 pegawai, terdiri dari 4.045 pegawai dengan jabatan fungsional tertentu,

2.036 pegawai dengan jabatan fungsional umum, 52 pegawai pejabat struktural dan 11 pegawai dengan jabatan non organik. Sedangkan pegawai yang tergolong sebagai SDM iptek berjumlah 7.299 pegawai yang tersebar pada 13 Organisasi Riset, SDM iptek ini terdiri dari 4.045 pegawai jabatan fungsional tertentu, 2.036 pegawai fungsional umum, 11 pegawai jabatan non organik, dan 52 pegawai struktural.

Gambar 29. Perbandingan Jumlah SDM Iptek dan Manajemen Iptek BRIN



Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang iptek, BRIN telah mengimplementasikan berbagai skema penguatan SDM. Salah satu strategi utama adalah merekrut periset berkualifikasi tinggi (S3), termasuk diaspora Indonesia yang telah atau sedang berkarya di berbagai belahan dunia. Para diaspora ini difasilitasi untuk mengembangkan risetnya di Indonesia guna memperkuat kapasitas nasional dalam penguasaan dan pengembangan iptek.

Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BRIN tahun 2025–2029, ketersediaan SDM manajemen iptek yang kompeten dan memadai merupakan salah satu komponen kelembagaan yang sangat penting. SDM manajemen iptek yang berkualitas tidak hanya menjadi motor penggerak pelaksanaan riset dan inovasi, tetapi juga berperan dalam pengelolaan manajerial, tata kelola kelembagaan, serta pembangunan ekosistem riset yang adaptif, efisien, dan berdaya saing.

Saat ini, BRIN memiliki 38 jenis Jabatan Fungsional (JF) dalam kategori SDM Manajemen iptek yang mencerminkan beragam peran dalam mendukung kegiatan riset dan inovasi. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya kompleksitas tata kelola riset dan kebutuhan kelembagaan, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat formasi jabatan fungsional tertentu yang belum tersedia atau belum mencukupi. Beberapa formasi JF yang dibutuhkan antara lain: Penata Kelola Informatika SPBE untuk mendukung transformasi digital dan integrasi sistem informasi kelembagaan; Analis Pengembangan Kompetensi ASN untuk memastikan pengelolaan talenta riset selaras dengan kebutuhan organisasi; Analis Kerja Sama untuk memperkuat jejaring lintas sektor di tingkat nasional dan internasional; serta Analis Standardisasi untuk menjamin mutu proses dan luaran riset sesuai standar yang berlaku.

Pemenuhan formasi-formasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak, mengingat peran strategisnya dalam memastikan operasional kelembagaan

berjalan optimal, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menopang agenda riset dan inovasi nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan jabatan fungsional di bidang manajemen iptek perlu menjadi bagian integral dari kebijakan pengembangan SDM BRIN ke depan.

3.4.5 Sinergi Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional

BRIN dalam implementasi kebijakan riset dan inovasi, melaksanakan sinergi dan kolaborasi strategis dengan kementerian/lembaga terkait. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang berkualitas, efektif dan efisien, berdampak dan memberikan manfaat yang signifikan serta menjadi solusi bagi permasalahan atau isu-isu strategis nasional yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah, serta mendorong optimalisasi sumber daya untuk mendukung percepatan pencapaian arah pembangunan nasional. Sinergi dan pola kolaborasi antara BRIN dengan kementerian/lembaga terkait adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi

BRIN bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui penyelarasan dan optimalisasi program riset prioritas nasional. Kolaborasi dilakukan melalui penguatan sumber daya iptek dan koordinasi teknis untuk mendorong riset-riset strategis yang memiliki potensi hilirisasi dan dampak ekonomi tinggi sehingga terjalin simpul penggerak riset yang berkelanjutan terhadap potensi dan permasalahan di daerah.

2. Kementerian/Lembaga

a. Sinergi dengan K/L sebagai pengguna hasil riset dan inovasi

Kementerian/Lembaga (K/L) dapat berperan sebagai pemanfaat produk riset strategis (inovasi dan inovasi) dalam mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Adapun BRIN berperan dalam mengakomodir kebutuhan riset dan inovasi dari setiap kementerian/lembaga, seperti adanya Forum Komunikasi Riset dan Inovasi BRIN sebagai *platform* bagi kementerian/lembaga untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi terkait agenda riset dan inovasi.

b. Sinergi dengan K/L sebagai mitra tata kelola riset dan inovasi

Kementerian/Lembaga (K/L) berperan sebagai mitra strategis tata kelola dalam riset dan inovasi meliputi:

1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas)

Sinergi yang terjalin berkenaan dengan perencanaan dan menyelaraskan kegiatan riset melalui harmonisasi peran dan kebijakan dalam memperkuat integrasi riset, sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional. BRIN menjadi koordinator desain riset nasional dan perumusan kebijakan berbasis sains bersama Bappenas seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) riset dan inovasi, program KONEKSI berupa ekspansi riset internasional.

- 2) Kementerian Keuangan
Sinergi BRIN dan Kementerian Keuangan mencakup dengan upaya membangun tata kelola riset dan inovasi melalui kolaborasi program pendanaan riset (LPDP), dengan skema RIIM, dukungan transformasi digital melalui integrasi digital sistem riset dan keuangan,
 - 3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan sebagai pendamping dalam peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Resiko dan sebagai pembina dalam Penguatan Sumber daya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan BRIN, serta sebagai pengguna hasil riset dalam menganalisis kebijakan dan pengembangan sistem informasi pengawasan internal. BRIN berperan dalam penyediaan data, hasil kajian pengawasan serta akuntabilitas tata kelola di lingkungan BRIN.
 - 4) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersinergi melalui kolaborasi tata kelola SDM di lingkungan BRIN secara berkelanjutan dalam penguatan talenta riset dan diaspora, pengukuran budaya kerja dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan dalam tata kelola reformasi birokrasi. BRIN berperan dalam mendorong penguatan analisis dan rekomendasi kinerja berbasis riset yang berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah.
 - 5) Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan sebagai auditor dalam melakukan audit kinerja kepatuhan keuangan dan aset terhadap efektivitas pengelolaan riset dan inovasi yang dilakukan BRIN, dan merekomendasikan peningkatan sistem dan tata kelola riset untuk mendukung program strategis nasional. Adapun BRIN berperan dalam penguatan sumber daya dan regulasi atas hasil audit kinerja kepatuhan dalam mendorong peningkatan tata kelola riset dan pengendalian internal
 - 6) Kementerian Hukum
Sinergi BRIN dengan Kementerian Hukum dilakukan secara integratif dan strategis mendorong ekosistem riset secara nasional dan daerah terhadap penguatan integrasi data, perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual (KI), termasuk penguatan SDM dalam pengelolaan KI. Kolaborasi teknis diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas riset dan inovasi secara berkelanjutan dan arah pembangunan nasional.
- c. Sinergi dengan K/L yang berperan sebagai regulator hasil riset dan inovasi
- 1) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sinergi BRIN dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilakukan secara integratif dan multilevel melalui penguatan

regulasi dan teknis peningkatan mutu dan keamanan uji klinik, pembentukan dan akreditasi Komisi Etik kesehatan, pendanaan pra dan uji klinik, pengawasan/pelaksanaan uji klinik, serta penguatan kompetensi SDM, serta percepatan hilirisasi riset obat dan makanan.

2) Kementerian Kesehatan

Sinergi yang dilakukan BRIN dengan Kementerian Kesehatan melalui integrasi membangun ekosistem riset dan kebijakan/regulasi dalam rangka mendukung prioritas nasional bidang kesehatan. Kolaborasi riset dan inovasi yang dilakukan bersama diharapkan dapat menciptakan akselerasi standarisasi kualitas baik alat kesehatan maupun pengembangan obat lokal serta penguatan kapasitas teknis SDM untuk kemandirian kesehatan.

3) Kementerian Pertanian

Sinergi BRIN dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dilakukan melalui penguatan agenda hilirisasi dan fokus riset di sektor pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan, penguatan SDM dan infrastruktur riset. BRIN berperan menyusun roadmap riset bidang pertanian pangan, sedangkan Kementan berperan merumuskan kebijakan pangan, ekspor pertanian dan mitigasi iklim di sektor pertanian.

4) Kementerian Perhubungan

BRIN dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersinergi dalam penguatan riset dan inovasi melalui keterlibatan dalam Forum Riset dan Inovasi Transportasi Nasional dalam upaya untuk harmonisasi riset, penguatan kapasitas SDM bidang transportasi secara bersama. Kemenhub berperan merumuskan kebijakan transportasi merujuk hasil riset BRIN (*science-based policy*).

5) Kementerian Komunikasi dan Digital

BRIN bersama-sama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan sinergi dalam peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis penulisan ilmiah dan teknologi AI dalam mendeteksi hoaks media sosial, Penguatan audit TIK dan Sistem Pemerintahan Elektronik

3. Badan Riset dan Inovasi Daerah

BRIN berperan dalam fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi riset daerah. Adapun BRIDA berperan sebagai fasilitator dan koordinator riset dan kebijakan daerah. Sinergi BRIN dan BRIDA dilakukan melalui peningkatan kualitas manajemen riset, pendampingan teknis riset daerah berkelanjutan sesuai prioritas daerah dan pemantauan integrasi riset daerah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan daerah.

4. Perguruan Tinggi

BRIN dengan Perguruan Tinggi bersinergi secara komprehensif dan multi-jalur melalui penguatan dan pengembangan talenta dalam bentuk MBKM riset berbasis kampus, pendanaan program riset dengan skema kompetitif, pelaksanaan riset dan pemanfaatan fasilitas riset secara bersama dalam mendorong hilirisasi inovasi yang berdampak untuk industri dan masyarakat. Penguatan sumber daya dilakukan BRIN dengan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kompetensi riset melalui jalur asisten penelitian dan *postdoctoral*.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja tahun 2025-2029, BRIN menjalankan 2 (dua) program yang terdiri atas:

1. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (program teknis); dan
2. Program dukungan manajemen (program generik).

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan dan kebermanfaatannya kedua program tersebut, BRIN menetapkan sasaran/indikator yang mengacu pada sasaran/indikator bidang iptek pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Tabel 21 dan Tabel 22).

Tabel 21. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BRIN 2025

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (<i>Outcome</i>)	Satuan	Target
		2025
Menguatnya Kapasitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi		
1.1 Peringkat Indeks Inovasi Global	Peringkat	53
1.2 Pengeluaran Iptek dan Inovasi (Indikator RPJMN)	Persen PDB	0,3
1.3 Rasio Riset dan Inovasi yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat, Pemerintah, Badan Usaha dan Industri	Rasio	0,1-0,15
Menguatnya Tata Kelola BRIN yang Efisien, Efektif, Prioriter, Transparan dan Akuntabel		
2.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,5

Tabel 22. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BRIN 2026-2029

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (<i>Outcome</i>)	Satuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
Menguatnya Kapasitas Sumber Daya Riset dan Inovasi					
1.1 Jumlah SDM Iptek yang Mendapatkan Rekognisi Internasional (Indikator RPJMN)	Orang	103	107	111	116
1.2 Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H index ≥ 10 (Indikator RPJMN)	Persen	0,20	0,25	0,30	0,35
1.3 Rasio pemanfaatan infrastruktur riset dan inovasi	Rasio	0,27	0,58	0,92	1,00
1.4 Proporsi Anggaran Litbang Non Pemerintah/Swasta (Indikator RPJMN)	Persen	27	29	31	35
Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi					
2.1 Proporsi penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN terhadap anggaran yang dikelola oleh BRIN	Persen	0,6	0,5	0,6	0,7
2.2 Rasio pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang berdampak	Rasio	0,16	0,21	0,26	0,31
Menguatnya Tata Kelola BRIN yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel					
3.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88	88,5	89	90

Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan BRIN selama periode 2025-2029, seperti yang tertuang dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan BRIN (Sublampiran 1). Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum dalam Sublampiran 1 merupakan indikator minimum. Dalam pelaksanaannya pada tahun berjalan, dimungkinkan penambahan indikator kinerja lain apabila diperlukan. Sementara itu, penetapan target *output* serta alokasi anggarannya akan disesuaikan dengan Pagu Alokasi yang ditetapkan bagi BRIN.

4.2 Kerangka Pendanaan

Keberhasilan riset dan inovasi di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sinergi antar pemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk mendorong pengembangan riset dan inovasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam rangka mencapai target riset dan inovasi di BRIN, kolaborasi lintas sektor menjadi suatu keharusan, baik dalam pelaksanaan riset, fasilitasi, maupun pemanfaatan hasilnya. Pemanfaatan

hasil riset merupakan tahap akhir dari proses hilirisasi penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi, yang memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kapasitas produksi sekaligus menjadi pengguna teknologi.

Sebagai satu-satunya lembaga penelitian, pengembangan, dan penerapan milik pemerintah, BRIN memerlukan dukungan pendanaan yang memadai dari berbagai sumber untuk memastikan kelancaran pelaksanaan riset dan inovasi. Indikasi kebutuhan pendanaan BRIN untuk periode 2025–2029 disusun berdasarkan prioritas program yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Tabel 23. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BRIN 2025-2029 per Program

Program	Alokasi (dalam Miliar Rupiah)					Total
	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.865,33	2.396,96	10.383,11	10.292,44	12.062,13	36.999,97
Program Dukungan Manajemen	3.826,93	3.747,60	3.874,31	3.874,31	3.874,31	19.197,46
Total	5.692,26	6.144,56	14.257,42	14.166,75	15.936,44	56.197,43

Indikasi kebutuhan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BRIN sampai dengan tahun 2029 adalah sebesar Rp 56.197,43 Miliar Rupiah. Indikasi pendanaan pada Program Dukungan Manajemen sudah termasuk dengan biaya operasional berupa layanan perkantoran dan belanja gaji. Berdasarkan proyeksi, kebutuhan pendanaan pada program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Namun, keterbatasan kapasitas APBN mengharuskan BRIN untuk mengupayakan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini sumber pendanaan utama BRIN berasal dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, BRIN tidak hanya fokus dengan peningkatan pendanaan saja tetapi juga pada efektivitas pendanaan dengan memfokuskan kembali pemanfaatan PNBP. Rencana pendapatan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak BRIN selama 5 (lima) tahun dituangkan dalam Tabel 24. Optimalisasi tersebut tidak hanya dipandang sebagai upaya peningkatan penerimaan, tetapi juga sebagai strategi penguatan kemandirian pendanaan dan peningkatan kualitas layanan riset dan inovasi.

Sejalan dengan arah tersebut, diversifikasi sumber pembiayaan non-APBN menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat struktur pendanaan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Pembiayaan Non-APBN yang terus ditingkatkan potensinya bersumber dari PNBP dan pendapatan yang dikelola melalui pola Badan Layanan Umum (BLU). Optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan SDM, infrastruktur riset, dan kekayaan intelektual untuk penyediaan layanan riset dan inovasi kepada pemangku kepentingan, meliputi royalti lisensi, pendidikan dan pelatihan, serta jasa layanan lainnya

melalui mekanisme PNB. Pusat Pelayanan Teknologi menerapkan pola BLU dalam penyediaan layanan teknologi, diseminasi, dan alih teknologi. Fleksibilitas pengelolaan pendapatan layanan memungkinkan reinvestasi langsung untuk pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas teknis, dan peningkatan mutu layanan, sehingga mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan pendanaan riset dan inovasi.

Selain optimalisasi PNB dan pola BLU, penguatan struktur pendanaan jangka menengah juga dilakukan melalui integrasi berbagai skema pembiayaan alternatif. BRIN menginisiasi berbagai skema pendanaan melalui kerja sama dengan beragam lembaga penyedia dana. Pada lingkup nasional, BRIN telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS). Kerja sama dengan LPDP bersumber dari imbal hasil dana abadi penelitian yang dilaksanakan melalui skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) berbasis kompetisi, dengan proses seleksi yang dilakukan oleh BRIN dan terbuka bagi periset dari lembaga riset, perguruan tinggi, maupun industri. Sementara itu, kerja sama dengan BPDKS yang dananya berasal dari dana abadi sawit juga bersifat kompetitif, namun proses pelaksanaannya dilakukan oleh BPDKS, dimana peneliti BRIN mengajukan proposal penelitian untuk kemudian diseleksi oleh BPDKS. Sumber pembiayaan dari imbal hasil dana abadi ini dirancang sedemikian rupa agar menghasilkan luaran riset yang saling melengkapi dan tidak tumpang tindih dengan luaran riset yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal dan efektif.

Selain pendanaan dari lembaga pemerintah, BRIN juga memperoleh *matching fund* dari lembaga riset asing, universitas asing, LSM/NGO, serta dukungan pendanaan dari organisasi filantropi internasional, seperti Bill & Melinda Gates Foundation. Di sektor swasta, BRIN mengoptimalkan pola pendanaan kerja sama untuk mendorong keterlibatan industri dalam kegiatan riset yang memiliki potensi pasar besar di masa mendatang. Sebagai bagian dari penguatan skema pembiayaan alternatif, BRIN juga menginisiasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema *business-to-business* (B2B) untuk mendukung pembangunan infrastruktur riset dan inovasi bidang kemaritiman, keantariksaan dan ketenaganukliran. Untuk rincian penghitungan perkiraan maju disajikan dalam Sublampiran 2 terkait Matriks Pendanaan APBN dan Non APBN terhadap Kegiatan Prioritas BRIN.

Tabel 24. Penerimaan Negara Bukan Pajak BRIN 2025-2029 (dalam ribuan rupiah)

No	Satuan Kerja	TA 2025		TA 2026		TA 2027		TA 2028		TA 2029	
		Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan
1	Sekretariat Utama	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia	4.603.200	4.511.136	4.946.800	4.847.864	5.375.200	5.267.696	5.492.800	5.382.944	5.660.800	5.547.584
3	Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500
4	Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500
5	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek	4.250.000	4.107.500	4.250.000	4.107.500	4.250.000	4.107.500	4.250.000	4.107.500	4.250.000	4.107.500
6	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi	381.549.300	204.419.378	241.535.550	213.549.805	240.835.781	212.861.144	242.209.170	214.058.540	243.597.300	215.268.749
7	Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi	1.000.000	910.000	1.000.000	910.000	1.000.000	910.000	1.000.000	910.000	1.000.000	910.000
8	Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi	200.000	182.000	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500
9	Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500

No	Satuan Kerja	TA 2025		TA 2026		TA 2027		TA 2028		TA 2029	
		Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan
10	Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan	1.100.000	1.001.000	670.000	609.700	700.000	637.000	735.000	668.850	775.000	705.250
11	Organisasi Riset Elektronika dan Informatika	200.000	182.000	225.000	204.750	225.000	204.750	250.000	227.500	250.000	227.500
12	Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim	1.100.000	1.001.000	1.100.000	1.001.000	1.100.000	1.001.000	1.200.000	1.092.000	1.200.000	1.092.000
13	Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	500.000	455.000	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500
14	Organisasi Riset Tenaga Nuklir	200.000	182.000	300.000	273.000	300.000	273.000	300.000	273.000	300.000	273.000
15	Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa	300.000	273.000	200.000	182.000	200.000	182.000	200.000	182.000	200.000	182.000
16	Organisasi Riset Energi dan Manufaktur	200.000	182.000	1.000.000	910.000	1.000.000	910.000	1.000.000	910.000	1.000.000	910.000
17	Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra	200.000	182.000	225.000	204.750	250.000	227.500	275.000	250.250	300.000	273.000
18	Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material	1.060.000	964.600	378.400	344.344	416.240	378.778	457.864	416.656	503.650	458.321
19	Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan. Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1.575.000	1.433.250	1.653.750	1.504.912	1.736.450	1.580.169	1.823.275	1.659.180	1.850.000	1.683.500

No	Satuan Kerja	TA 2025		TA 2026		TA 2027		TA 2028		TA 2029	
		Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan	Target Penerimaan	Pagu Penggunaan
20	Organisasi Riset Pertanian dan Pangan	1.262.500	1.148.875	2.215.500	2.016.105	2.326.275	2.116.910	2.442.588	2.222.755	2.564.717	2.333.892
21	Organisasi Riset Kesehatan	200.000	182.000	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500	50.000	45.500
Jumlah		400.000.000	221.453.239	260.000.000	230.938.730	260.014.946	230.930.449	261.935.697	232.634.175	263.751.467	234.245.297

Sumber: Data Simponi Target dan Pagu 2026

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis BRIN 2025-2029 merupakan pedoman untuk merencanakan pengembangan sektor riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan utama BRIN dalam melanjutkan komitmennya, yang selama empat tahun berdiri telah berupaya berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai isu pembangunan nasional, terutama terkait peningkatan daya saing dan kesejahteraan bangsa. Sebagai bagian dari tanggung jawab strategisnya, BRIN berkomitmen aktif untuk mengatasi masalah rendahnya *critical mass* sektor riset dan inovasi di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045. Penyelesaian masalah fundamental ini sangat penting, karena tanpa langkah konkret, sektor riset nasional tidak akan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui pelaksanaan Rencana Strategis ini, BRIN menempatkan dirinya sebagai orkestrator dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis BRIN 2025–2029 difokuskan pada pencapaian target substansi penelitian yang relevan, memiliki dampak nyata, dan selaras dengan upaya mendukung pencapaian Asta Cita. Implementasi program tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja BRIN sesuai dengan kompetensi, tugas, dan fungsi yang diemban. Selain itu, Rencana Strategis BRIN ini juga disusun dengan memperhatikan prinsip manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain dengan memuat identifikasi risiko terhadap pencapaian sasaran strategis BRIN, sehingga setiap potensi hambatan dapat diantisipasi secara dini dan ditangani dengan langkah mitigasi yang tepat. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya terarah dan terukur, tetapi juga tanggap terhadap dinamika dan tantangan yang mungkin muncul di masa mendatang.

Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, pelaksanaan Rencana Strategis ini akan dievaluasi setiap tahun untuk menjamin ketercapaian target secara optimal. Apabila diperlukan, revisi terhadap muatan Rencana Strategis, termasuk indikator kinerjanya, dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah visi, misi, dan tujuan strategis BRIN.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIF SATRIA

Sublampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Matriks Kinerja dan Pendanaan BRIN Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL					5.692.259,59			
Sasaran Strategis 1	Menguatnya Kapasitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi							
IKSS 1.1	Peringkat Indeks Inovasi Global		Peringkat	53				
IKSS 1.2	Pengeluaran iptek dan inovasi *)		Persen PDB	0,3				
IKSS 1.3	Rasio riset dan inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, badan usaha dan industri		Rasio	0,1- 0,15				
Sasaran Strategis 2	Menguatnya Tata Kelola BRIN yang Efisien, Efektif, Prioriter, Transparan dan Akuntabel							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	87,5				
PROGRAM RISET DAN INOVASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI					1.865.326,17			
Sasaran Program 1	Peningkatan Kapasitas Riset dan Inovasi							
IKSP 1.1	Proporsi jumlah SDM iptek dengan H Index ≥ 10 *)		Persen	0,15				
IKSP 1.2	Jumlah SDM iptek yang mendapatkan rekognisi internasional *)		Orang	99				
IKSP 1.3	Proporsi SDM iptek kualifikasi s3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya *)		Persen	25				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP 1.4	Rasio SDM iptek per satu juta penduduk *)		SDM iptek per 1 juta penduduk	1.265				
IKSP 1.5	Jumlah SDM iptek masuk ke dalam pemeringkatan World's Top 2% Scientist *)		Orang	99				
IKSP 1.6	Nilai dampak sitasi brin terhadap sitasi global		Nilai	0,87				
IKSP 1.7	Jumlah kekayaan intelektual (KI) per 100 periset *)		KI per 100 periset	4,56				
IKSP 1.8	Jumlah infrastruktur riset dan inovasi yang beroperasi optimal		Infrastruktur	2				
Sasaran Program 2	Peningkatan Peran Sektor Non-pemerintah dalam Pendanaan Litbang							
IKSP 2.1	Proporsi anggaran litbang non pemerintah/swasta *)		Persen	25				
Sasaran Program 3	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Kolaborasi Riset dan Inovasi							
IKSP 3.1	Indeks Daya Saing Daerah		Indeks	3,45				
Sasaran Program 4	Peningkatan Fungsi Pemanfaatan Riset dan Inovasi							
IKSP 4.1	Rasio riset dan inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, badan usaha dan industri		Rasio	0,1-0,15				
Kegiatan 1: Manajemen Sumber Daya Manusia Iptek					154.107,50	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							
	Proporsi SDM iptek (BRIN) dengan H Index \geq 10		Persen	0,05			Direktorat Manajemen Talenta	Direktorat Pengembangan Kompetensi
	Jumlah SDM iptek (BRIN) yang mendapatkan rekognisi internasional		Orang	10				Direktorat Pembinaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Proporsi SDM iptek kualifikasi S3 (BRIN) yang berkolaborasi dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya		Persen	3				Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi
	Rasio SDM iptek (BRIN) per sejuta penduduk		Rasio	50,45				
	Jumlah SDM Iptek (BRIN) masuk ke dalam pemeringkatan <i>World's Top 2% Scientist</i>		Orang	10				
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Anggaran <i>Matching fund</i> Pihak Eksternal di Bidang SDM Iptek							
	Rasio anggaran <i>matching fund</i> pihak eksternal di bidang SDM iptek		Rasio	0,13-0,15			Direktorat Pengembangan Kompetensi	Direktorat Manajemen Talenta Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi
<i>Rincian Output</i>	<i>Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Bidang Riset dan Inovasi</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Orang</i>	<i>2.000</i>	<i>4.107,50</i>			
	<i>Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Fungsional Bidang Riset dan Inovasi yang disusun</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Standar</i>	<i>9</i>	<i>1.204,42</i>			
	<i>Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Orang</i>	<i>800</i>	<i>51.804,05</i>			
	<i>Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Orang</i>	<i>18.710</i>	<i>96.991,53</i>			
Kegiatan 2: Penguatan Infrastruktur Riset dan Inovasi					1.401.589,596	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Riset dan Inovasi yang Berfungsi Optimal untuk mendukung Kegiatan Riset dan Inovasi							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah Kawasan Sains dan Teknologi strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara optimal		Kawasan	6			Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi	Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran
	Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dibangun *)		Infrastruktur	1				Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah Direktorat Pengelolaan Armada Kapal Riset
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Proporsi Anggaran Eksternal dari Pemanfaatan Fasilitas Iptek dan Inovasi								
	Rasio anggaran eksternal dari pemanfaatan infrastruktur riset dan inovasi terhadap anggaran non operasional yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	0,4-0,5			Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah Direktorat Pengelolaan Armada Kapal Riset
<i>Rincian Output</i>	<i>Dukungan Perencanaan KPBU Armada Kapal Riset</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1.000,00</i>			
	<i>Layanan Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Riset</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>76.445,48</i>			
	<i>Evidence-based and Sustainable Ocean Management in Indonesia</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Data</i>	<i>1</i>	<i>11.809,35</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Procurement of Multi Purposes Research Vessels</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Unit</i>	<i>2</i>	<i>559.626,63</i>			
	<i>Peralatan Laboratorium Bidang Teknik</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Unit</i>	<i>2</i>	<i>386.030,00</i>			
	<i>Peralatan Laboratorium Bidang Hayati</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Unit</i>	<i>2</i>	<i>232.000,00</i>			
	<i>Prasarana Kawasan Sains yang Direvitalisasi</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>134.678,14</i>			
Kegiatan 3: Fasilitasi Riset dan Inovasi					35.910,00	Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi							
	Jumlah kekayaan intelektual per 100 periset (BRIN)		Rasio	4,56		Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual	Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi, dan Otoritas Ilmiah Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi	
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Anggaran <i>Matching fund</i> Pihak Eksternal di Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi							
	Rasio anggaran <i>matching fund</i> pihak eksternal di bidang fasilitasi riset dan inovasi terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	3,8-4,0		Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi	Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi, dan Otoritas Ilmiah Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
<i>Rincian Output</i>	<i>Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>7.930</i>	<i>26.860,00</i>			
	<i>Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>35</i>	<i>9.050,00</i>			
Kegiatan 4: Pemanfaatan Riset dan Inovasi					70.182,00	Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Penerimaan dan Kontribusi atas Pemanfaatan Iptek dan Produk Hasil Riset dan Inovasi							
	Jumlah penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN *)		Miliar Rupiah	20			Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri	Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi
	Nilai <i>tax deduction</i> atas investasi R&D sektor swasta		Nilai	300 Miliar				Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi
	Nilai transaksi produk inovasi dan/atau label inovasi pada katalog elektronik		Nilai	60 Miliar				Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian/Lembaga, Masyarakat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Iptek dan Inovasi oleh Masyarakat, Industri, UMKM dan Lembaga							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat pada bidang-bidang prioritas *)		Produk	25			Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian/Lembaga, Masyarakat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri
	Jumlah produk riset dan inovasi yang dimanfaatkan industri		Produk	150			Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri	Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi
	Jumlah kerja sama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan industri/badan usaha pada bidang-bidang prioritas *)		Kerja Sama	25				Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian/Lembaga, Masyarakat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
<i>Rincian Output</i>	<i>Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>100</i>	<i>8.682,00</i>			
	<i>Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Masyarakat dan UMKM</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>680</i>	<i>57.900,00</i>			
	<i>Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi Lembaga Lainnya</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>85</i>	<i>3.600,00</i>			
Kegiatan 5: Manajemen Riset dan Inovasi Daerah								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Sasaran Kegiatan 1: Menguatnya Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah				5.045,50	Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah		
	Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal *)		Lembaga	2			Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah	Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah
	Indeks Daya Saing Daerah		Indeks	3,45				Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah
<i>Rincian Output</i>	<i>Badan Riset dan Inovasi Daerah Terbina</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	21				
Kegiatan 6: Perumusan Kebijakan Pembangunan					5.045,50	Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang dihasilkan di Bidang Kebijakan Pembangunan							
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang kebijakan pembangunan		Sitasi	75			Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan	Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Proporsi Anggaran Eksternal dalam Pendanaan Riset dan Inovasi di Bidang Kebijakan Pembangunan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama di bidang kebijakan pembangunan terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	0,05-0,06			Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan	Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran
	Sasaran Kegiatan 3: Termanfaatkannya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan							
	Rasio naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dari kegiatan perumusan kebijakan pembangunan		Rasio	1			Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan	Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran
<i>Rincian Output</i>	<i>Naskah Kebijakan Aktual Strategis</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>101</i>	<i>5.045,50</i>			
Kegiatan 7: Perumusan Kebijakan Riset dan Inovasi								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang Dihilangkan di bidang Kebijakan Riset dan Inovasi				20.045,50	Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi		
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang kebijakan riset dan inovasi		Sitasi	75			Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi	Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi
	Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Pengukuran Data Indikator Riset dan Inovasi yang Berkualitas							
	Persentase institusi yang memanfaatkan data rilis		Persen	60			Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi	Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Proporsi Anggaran Eksternal dalam Pendanaan Riset dan Inovasi di Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi							
	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama di bidang kebijakan riset dan inovasi terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	0,05-0,06			Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi	Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi
	Sasaran Kegiatan 4: Termanfaatkannya Rekomendasi Kebijakan Riset dan Inovasi							
	Rasio naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dari kegiatan perumusan kebijakan riset dan inovasi		Rasio	1			Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi	Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
<i>Rincian Output</i>	<i>Naskah Kebijakan Aktual Strategis</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Rekomendasi Kebijakan</i>	75	3.750,00			
	<i>Data Indikator Riset, Teknologi dan Inovasi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Layanan</i>	2	1.600,00			
	<i>Data Dasar Sektoral</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Layanan</i>	2	14.695,50			
Kegiatan 8: Riset Bidang Hayati dan Lingkungan						26.001,00	Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan	
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang Dihasilkan di Bidang Hayati dan Lingkungan								
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang hayati dan lingkungan		Sitasi	25.000				
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Hasil Inovasi dan Teknologi di Bidang Hayati dan Lingkungan								
	Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati *)		Inovasi	100				
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Proporsi Anggaran Eksternal dalam Pendanaan Riset dan Inovasi di Bidang Hayati dan Lingkungan								
	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi di bidang hayati dan lingkungan terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	2,3- 2,5				
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di Bidang Hayati dan Lingkungan								
	Rasio kekayaan intelektual di bidang hayati dan lingkungan yang dimanfaatkan		Rasio	0,05- 0,10				
	Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi *)		Produk	50				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Laboratorium Riset Hayati dan Lingkungan</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>3.650,15</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Bersih</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>12</i>	<i>6.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Biota yang Terkonservasi</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>11</i>	<i>5.500,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>22</i>	<i>10.850,85</i>			
Kegiatan 9: Riset Bidang Elektronika dan Informatika					10.182,00	Organisasi Riset Elektronika dan Informatika		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang dihasilkan di Bidang Elektronika dan Informatika								
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang elektronika dan informatika		Sitasi	6.000				
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Proporsi Anggaran Eksternal Dalam Pendanaan Riset dan Inovasi di Bidang Elektronika dan Informatika								
	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi di bidang elektronika dan informatika terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	1,8- 2,0				
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di Bidang Elektronika dan Informatika								
	Rasio kekayaan intelektual di bidang elektronika dan informatika yang termanfaatkan		Rasio	0,05- 0,10				
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Riset Elektronika dan Informatika</i>	<i>Kota Bandung</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>2.100,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Big Data</i>	<i>Kota Bandung</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>9</i>	<i>4.082,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Sistem Telekomunikasi IoT</i>	<i>Kota Bandung</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>5</i>	<i>2.500,00</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Jaringan Detektor Bawah Air</i>	<i>Kota Bandung</i>	<i>Purwarupa</i>	3	1.500,00			
Kegiatan 10: Riset Bidang Kebumian dan Maritim					9.001,00	Organisasi Riset Kebumian dan Maritim		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang dihasilkan di Bidang Kebumian dan Maritim								
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang kebumian dan maritim		Sitasi	15.000				
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Proporsi Anggaran Eksternal dalam Pendanaan Riset dan Inovasi di Bidang Kebumian dan Maritim								
	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi di bidang kebumian dan maritim terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	3,0-3,2				
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di Bidang Kebumian dan Maritim								
	Rasio model/ kekayaan intelektual di bidang kebumian dan maritim yang dimanfaatkan		Rasio	0,05-0,10				
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Riset Kebumian dan Maritim</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Utara</i>	<i>Unit</i>	1	122,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Kebencanaan dan Sumber Daya Kebumian</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Utara</i>	<i>Purwarupa</i>	13	4.687,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Kelautan untuk Ekonomi Biru</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Utara</i>	<i>Purwarupa</i>	3	1.000,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Untuk Hilirisasi Sumber Daya Akuatik</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Utara</i>	<i>Purwarupa</i>	7	3.192,00			
Kegiatan 11: Riset Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora						8.455,00	Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang dihasilkan di Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora							
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang ilmu pengetahuan sosial humaniora		Sitasi	2.000				
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Proporsi Anggaran Eksternal dalam Pendanaan Riset dan Inovasi di Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora							
	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	2,0-2,2				
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora							
	Rasio model/ kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang termanfaatkan		Rasio	0,05-0,10				
<i>Rincian Output</i>	<i>Model Hasil Riset dan Inovasi tentang Ke-Indonesiaan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	18	4.455,00			
	<i>Model Hasil Riset dan Inovasi tentang Dinamika Kontemporer</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	16	4.000,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
Kegiatan 13: Riset Bidang Penerbangan dan Antariksa					11.273,00	Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang dihasilkan di Bidang Penerbangan dan Antariksa							
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang penerbangan dan antariksa		Sitasi	700				
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Proporsi Anggaran Eksternal dalam Pendanaan Riset dan Inovasi di Bidang Penerbangan dan Antariksa							
	rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	1,0- 1,2				
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di Bidang Penerbangan dan Antariksa							
	Rasio kekayaan intelektual di bidang penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan		Rasio	0,05- 0,10				
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Riset Penerbangan dan Antariksa</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.500,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Pesawat Udara</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>8</i>	<i>4.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Satelit</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>12</i>	<i>5.773,00</i>			
Kegiatan 14: Riset Bidang Energi dan Manufaktur					10.182,00	Organisasi Riset Energi dan Manufaktur		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang dihasilkan di Bidang Energi dan Manufaktur							
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang energi dan manufaktur		Sitasi	6.000				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Proporsi Anggaran Eksternal dalam Pendanaan Riset dan Inovasi di Bidang Energi dan Manufaktur							
	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi di bidang energi dan manufaktur terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	1,5- 1,7				
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di Bidang Energi dan Manufaktur							
	Rasio kekayaan intelektual di bidang energi dan manufaktur yang dimanfaatkan		Rasio	0,05- 0,10				
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Riset Energi dan Manufaktur</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	Unit	1	1.294,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Energi Berkelanjutan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	10	4.956,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Manufaktur Industri Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	8	3.932,00			
Kegiatan 15: Riset Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra					7.182,00	Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang dihasilkan di Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra							
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra		Sitasi	1.200				
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Proporsi Anggaran Eksternal dalam Pendanaan Riset dan Inovasi di Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra							
	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	1,0- 1,2				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra							
	Rasio model/ kekayaan intelektual di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra yang termanfaatkan		Rasio	0,05-0,10				
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Riset Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	Unit	1	382,42			
	<i>Model Hasil Riset dan Inovasi Budaya Berkelanjutan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	Model	20	4.799,58			
	<i>Model Hasil Riset dan Inovasi Data Raya Arkeologi, Bahasa, dan Sastra</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	Model	5	1.250,00			
	<i>Model Hasil Riset Dasar Arkeologi, Bahasa, dan Sastra</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	Model	3	750,00			
Kegiatan 16: Riset Bidang Nanoteknologi dan Material					19.964,60	Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang dihasilkan di Bidang Nanoteknologi dan Material							
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang nanoteknologi dan material		Sitasi	20.000				
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Proporsi Anggaran Eksternal dalam Pendanaan Riset dan Inovasi di Bidang Nanoteknologi dan Material							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi di bidang nanoteknologi dan material terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	1,8- 2,0				
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di Bidang Nanoteknologi dan Material							
	Rasio kekayaan intelektual di bidang nanoteknologi dan material yang dimanfaatkan		Rasio	0,05- 0,10				
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Riset Nanoteknologi dan Material</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>4.750,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>8</i>	<i>4.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Material Maju untuk Kesehatan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>11</i>	<i>5.214,60</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Pengembangan Teknologi Proses Material Terbarukan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>6</i>	<i>3.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan berbasis Nanoteknologi dan Material</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>6</i>	<i>3.000,00</i>			
Kegiatan 17: Riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat					7.433,25	Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang dihasilkan di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat		Sitasi	3.000		Kesejahteraan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Proporsi Anggaran Eksternal Dalam Pendanaan Riset Dan Inovasi di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat							
	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	1,5-1,7				
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat							
	Rasio model di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang dimanfaatkan		Rasio	0,05-0,10				
<i>Rincian Output</i>	<i>Model Hasil Riset Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Integratif</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	<i>11</i>	<i>2.633,25</i>			
	<i>Model Hasil Riset Akselerasi Pembangunan Perdesaan untuk Kesejahteraan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	<i>7</i>	<i>1.600,00</i>			
	<i>Model Hasil Riset Kemandirian Ekonomi yang Kompetitif dan Berkelanjutan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	<i>7</i>	<i>1.600,00</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Model Hasil Riset Industrialisasi dan Pengembangan Bisnis yang Inklusif</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	<i>7</i>	<i>1.600,00</i>			
Kegiatan 18: Riset Bidang Pertanian dan Pangan						18.148,88	Organisasi Riset Pertanian dan Pangan	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang dihasilkan di Bidang Pertanian dan Pangan							
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang pertanian dan pangan		Sitasi	12.000				
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Proporsi Anggaran Eksternal dalam Pendanaan Riset dan Inovasi di Bidang Pertanian dan Pangan							
	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi di bidang pertanian dan pangan terhadap anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni		Rasio	1,8-2,0				
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di Bidang Pertanian dan Pangan							
	Rasio kekayaan intelektual di bidang pertanian dan pangan yang termanfaatkan		Rasio	0,05-0,10				
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Riset Pertanian dan Pangan</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.500,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Tanaman</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>12</i>	<i>5.648,88</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Ternak</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>8</i>	<i>4.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Produk Pertanian</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>14</i>	<i>7.000,00</i>			
Kegiatan 19: Riset Bidang Kesehatan						23.182,00	Organisasi Riset Kesehatan	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Publikasi Ilmiah Global yang dihasilkan di Bidang Kesehatan							
	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global di bidang kesehatan		Sitasi	20.000				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
Sasaran Program 5	Peningkatan Kualitas Tata Kelola BRIN yang Efisien, Efektif, Prioriter, Transparan, dan Akuntabel							
IKSP 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai	87,5				
Kegiatan 21: Dukungan Manajemen Iptek					3.804.311,35	Sekretariat Utama		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Penguatan Pelayanan Publik, Sistem Digital, Akuntabilitas Kinerja, dan Budaya Kerja							
	Indeks SPBE BRIN		Indeks	4,15		Pusat Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi	
	Nilai SAKIP BRIN		Nilai	72		Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Hukum dan Kerja Sama Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Biro Perencanaan dan Keuangan	
	Indeks Pelayanan Publik BRIN		Indeks	4,7		Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan	Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan	
	Indeks BerAKHLAK BRIN		Indeks	70		Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94			Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				Pusat Data dan Informasi Biro Hukum dan Kerja Sama
	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Materil/Signifikan		Temuan	0				Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya		Persen	85				Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
<i>Rincian Output</i>	<i>Layanan BMN</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Layanan</i>	3	995,17			
	<i>Layanan Hukum</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Layanan</i>	1	1.000,00			
	<i>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Layanan</i>	1	998,10			
	<i>Layanan Umum</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Layanan</i>	1	20.011,07			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Layanan Data dan Informasi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Layanan</i>	1	995,66			
	<i>Layanan Perkantoran</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Layanan</i>	1	3.767.811,35			
	<i>Layanan Manajemen SDM</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Layanan</i>	1	8.200,99			
	<i>Layanan Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Layanan</i>	1	3.000,00			
	<i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Dokumen</i>	1	545,12			
	<i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Dokumen</i>	2	203,89			
	<i>Layanan Reformasi Kinerja</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Dokumen</i>	1	550,00			
Kegiatan 22: Pengawasan dan Audit Kinerja Internal					5.000,00	Inspektorat Utama		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Riset dan Inovasi							
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRIN		Level	3		Inspektorat I	Inspektorat I Inspektorat II	
	Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh BPK RI		Opini	WTP			Inspektorat III	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Persentase Jumlah Rekomendasi LHP BPK RI yang telah ditindaklanjuti		Persen	100				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan BRIN tahun sebelumnya		Persen	80				
	Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Tata Kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan, yang berorientasi pada pengelolaan risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94		Inspektorat I	Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III	
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
<i>Rincian Output</i>	<i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Dokumen</i>	7	1.300,00			
	<i>Layanan Audit Internal</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Dokumen</i>	13	3.700,00			
Kegiatan 20: Dukungan Manajemen Pendidikan Teknologi Nuklir					17.622,07		Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia	Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia
	Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Dukungan Manajemen Politeknik Nuklir							
	Jumlah layanan dukungan internal politeknik nuklir		Layanan	1				
	Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77	17.622,07			
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
<i>Rincian Output</i>	<i>Layanan Perkantoran</i>	<i>Kab. Sleman</i>	<i>Layanan</i>	1				
Kegiatan 21: Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia Iptek					-	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek	Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek	Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek; Direktorat Pengembangan Kompetensi; Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi; Direktorat Manajemen Talenta
Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan yang Berorientasi pada Pelayanan dan Pengelolaan Risiko								
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materil/signifikan		Temuan	0				
	Indeks Layanan Publik		Indeks	4				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 22: Dukungan Manajemen Iptek					-	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi	Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi	Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi; Direktorat Pengelolaan Armada Kapal Riset;
Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan yang Berorientasi pada Pelayanan dan Pengelolaan Risiko								
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi;
	Indeks Layanan Publik		Indeks	4				Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran;
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	85				Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi;
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah
Kegiatan 23: Dukungan Manajemen Fasilitasi Riset dan Inovasi					-	Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi	Sekretariat Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi	Sekretariat Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi;
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan yang Berorientasi pada Pelayanan dan Pengelolaan Risiko							Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi, dan Otoritas Ilmiah;
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual;
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah;
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi
	Indeks Layanan Publik		Indeks	4,5				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 24: Dukungan Manajemen Pemanfaatan Riset dan Inovasi						Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi	Sekretariat Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi	Sekretariat Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi;
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan yang Berorientasi pada Pelayanan dan Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi;
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri;
	Indeks Layanan Publik		Indeks	4				Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian/Lembaga, Masyarakat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 25: Dukungan Manajemen Riset dan Inovasi Daerah								
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko					Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Sekretariat Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Sekretariat Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				Direktorat Fasilitas dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah;
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 26: Dukungan Manajemen Perumusan Kebijakan Pembangunan								
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko					Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan	Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan	Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan;
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia,

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				Kependudukan, dan Kebudayaan;
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional;
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran
Kegiatan 27: Dukungan Manajemen Perumusan Kebijakan Riset dan Inovasi								
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, Transparan, dan Berkualitas yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko					Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi	Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi	Sekretariat Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi;
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi;
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi; Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Indeks Kualitas Kebijakan		Indeks	90				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 28: Dukungan Manajemen Riset Bidang Hayati dan Lingkungan								
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko					Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 29: Dukungan Manajemen Riset Bidang Elektronika dan Informatika						Organisasi Riset Elektronika dan Informatika		
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 30: Dukungan Manajemen Riset Bidang Kebumian dan Maritim						Organisasi Riset Kebumian dan Maritim		
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 31: Dukungan Manajemen Riset Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora						Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora		
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 32: Dukungan Manajemen Riset Bidang Tenaga Nuklir						Organisasi Riset Tenaga Nuklir		
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
Kegiatan 33: Dukungan Manajemen Riset Bidang Penerbangan dan Antariksa						Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa		
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 34: Dukungan Manajemen Riset Bidang Energi dan Manufaktur						Organisasi Riset Energi dan Manufaktur		
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 35: Dukungan Manajemen Riset Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra						Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra		
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 36: Dukungan Manajemen Riset Bidang Nanoteknologi dan Material						Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material		
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 37: Dukungan Manajemen Riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat						Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target	Alokasi (dalam Juta Rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana		
						UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 38: Dukungan Manajemen Riset Bidang Pertanian dan Pangan						Organisasi Riset Pertanian dan Pangan		
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				
Kegiatan 39: Dukungan Manajemen Riset Bidang Kesehatan						Organisasi Riset Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel, Efisien, dan Transparan, yang Berorientasi pada Pengelolaan Risiko							
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94				
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	77				
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0				
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100				
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,2				

Matriks Kinerja dan Pendanaan BRIN Tahun 2026-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL								6.144.562,19	14.257.421,28	14.166.751,53	15.936.437,07			
Tujuan 1	Terwujudnya ekosistem riset dan inovasi yang berdaya saing global													
Indikator Tujuan 1.1	Peringkat Indeks Inovasi Global		Peringkat	52	51	50	49							
Indikator Tujuan 1.2	Pengeluaran iptek dan inovasi *)		Persen PDB	0,31	0,33	0,37	0,45							
Tujuan 2	Terwujudnya peningkatan kontribusi riset dan inovasi dalam pembangunan nasional													
Indikator Tujuan 2.1	Pertumbuhan penerimaan atas pemanfaatan kekayaan intelektual		Persen	10	10	10	10							
Tujuan 3	Terwujudnya tata kelola yang berkualitas dalam penyelenggaraan riset dan inovasi													
Indikator Tujuan 3.1	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	88,0	88,5	89,0	90,0							
Sasaran Strategis 1	Menguatnya Kapasitas Sumber Daya Riset dan Inovasi													
IKSS 1.1	Jumlah SDM Iptek yang mendapatkan rekognisi internasional *)		Orang	103	107	111	116							
IKSS 1.2	Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H index ≥ 10 *)		Persen	0,20	0,25	0,30	0,35							
IKSS 1.3	Rasio pemanfaatan infrastruktur riset dan inovasi		Rasio	0,27	0,58	0,92	1,00							
IKSS 1.4	Proporsi anggaran litbang non		Persen	27	29	31	35							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	pemerintah/swasta *)													
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi													
IKSS 2.1	Proporsi penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN terhadap anggaran yang dikelola oleh BRIN		Persen	0,6	0,5	0,6	0,7							
IKSS 2.2	Rasio pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang berdampak		Rasio	0,16	0,21	0,26	0,31							
Sasaran Strategis 3	Menguatnya tata kelola BRIN yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel													
IKSS 3.1	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	88,0	88,5	89,0	90,0							
PROGRAM RISET DAN INOVASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI								2.396.960,05	10.383.113,07	10.292.443,32	12.062.128,86			
Sasaran Program 1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Riset dan Inovasi													
IKSP 1.1	Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi Top 100 dunia di bidangnya *)		Persen	30	35	45	50					Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek		
IKSP 1.2	Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan World's Top 2% Scientist *)		Orang	103	107	111	116							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP 1.3	Rasio SDM Iptek per satu juta penduduk *)		SDM Iptek per satu juta penduduk	1.379	1.493	1.607	1.721							
Sasaran Program 2	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global													
IKSP 2.1	Proporsi jumlah SDM Iptek (BRIN) dengan H index \geq 10		Persen	1,5	2,0	2,5	3,0					Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi		
IKSP 2.2	Jumlah sitasi atas publikasi ilmiah global		Sitasi	84.171	96.797	108.413	119.255							
Sasaran Program 3	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Riset dan Inovasi untuk mendukung Kegiatan Riset dan Inovasi													
IKSP 3.1	Jumlah infrastruktur riset dan inovasi yang beroperasi optimal		Infrastruktur	4	6	8	10					Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi		
IKSP 3.2	Jumlah Pusat Inovasi Berbasis Maritim yang beroperasi optimal		Unit	0	0	1	2							
IKSP 3.3	Jumlah Kawasan Sains dan Teknologi strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara optimal		Unit (kumulatif)	10	10	15	20							
IKSP 3.4	Jumlah infrastruktur riset dan inovasi yang dikelola Organisasi Riset hingga beroperasi optimal		Unit	12	12	12	12						12 Organisasi Riset	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
Sasaran Program 4	Peningkatan Investasi R&D Sektor Swasta dalam Pendanaan Litbang													
IKSP 4.1	Nilai rekomendasi tax deduction atas investasi R&D sektor swasta		Miliar Rupiah	300	300	300	300					Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi		
Sasaran Program 5	Peningkatan Proporsi Anggaran Matching Fund dalam Pendanaan Riset dan Inovasi													
IKSP 5.1	Rasio anggaran matching fund pihak eksternal di bidang fasilitasi riset dan inovasi terhadap anggaran yang digunakan untuk mitra fasilitasi riset dan inovasi		Rasio	4,1	4,4	4,6	4,8					Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi		
Sasaran Program 6	Peningkatan Proporsi Anggaran Eksternal dari Kerja Sama Riset dan Inovasi													
IKSP 6.1	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap anggaran fasilitasi riset dan inovasi yang diperoleh di bidang hayati dan lingkungan		Rasio	3,0	3,2	3,3	3,5					Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan		
IKSP 6.2	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap anggaran fasilitasi riset dan inovasi		Rasio	2,4	2,5	2,6	2,8					Organisasi Riset Elektronika dan Informatika		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	yang diperoleh di bidang elektronika dan informatika													
IKSP 6.3	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap anggaran fasilitasi riset dan inovasi yang diperoleh di bidang kebumihan dan maritim		Rasio	2,3	2,4	2,5	2,7						Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim	
IKSP 6.4	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap anggaran fasilitasi riset dan inovasi yang diperoleh di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora		Rasio	2,3	2,4	2,5	2,7						Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	
IKSP 6.5	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap anggaran fasilitasi riset dan inovasi yang diperoleh di bidang tenaga nuklir		Rasio	2,9	3,0	3,2	3,4						Organisasi Riset Tenaga Nuklir	
IKSP 6.6	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap		Rasio	1,4	1,5	1,5	1,6						Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	anggaran fasilitasi riset dan inovasi yang diperoleh di bidang penerbangan dan antariksa													
IKSP 6.7	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap anggaran fasilitasi riset dan inovasi yang diperoleh di bidang energi dan manufaktur		Rasio	2,1	2,2	2,3	2,4						Organisasi Riset Energi dan Manufaktur	
IKSP 6.8	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap anggaran fasilitasi riset dan inovasi yang diperoleh di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra		Rasio	1,1	1,2	1,2	1,3						Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra	
IKSP 6.9	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap anggaran fasilitasi riset dan inovasi yang diperoleh di bidang nanoteknologi dan material		Rasio	2,4	2,5	2,6	2,8						Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP 6.10	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap anggaran fasilitasi riset dan inovasi yang diperoleh di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat		Rasio	1,8	1,9	2,0	2,1					Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat		
IKSP 6.11	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap anggaran fasilitasi riset dan inovasi yang diperoleh di bidang pertanian dan pangan		Rasio	2,1	2,2	2,3	2,4					Organisasi Riset Pertanian dan Pangan		
IKSP 6.12	Rasio anggaran eksternal dari kerja sama riset dan inovasi terhadap anggaran fasilitasi riset dan inovasi yang diperoleh di bidang kesehatan		Rasio	2,5	2,6	2,8	2,9					Organisasi Riset Kesehatan		
Sasaran Program 7	Peningkatan Fungsi Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset dan Inovasi													
IKSP 7.1	Jumlah penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN *)		Miliar Rupiah	50	75	100	125					Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
Sasaran Program 8	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Kolaborasi Riset dan Inovasi													
IKSP 8.1	Jumlah hub tematik yang bermanfaat		Lembaga (kumulatif)	1	2	3	4					Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi		
IKSP 8.2	Jumlah hub iptekin di KL yang bermanfaat		Lembaga (kumulatif)	1	2	3	4					Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi		
IKSP 8.3	Jumlah BRIDA/ekosistem daerah yang beroperasi optimal *)		Lembaga	5	7	10	15					Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah		
Sasaran Program 9	Peningkatan Kualitas dan Fungsi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi													
IKSP 9.1	Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Masyarakat pada bidang-bidang prioritas *)		Produk	40	60	90	115					Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi		
IKSP 9.2	Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi *)		Produk	75	100	125	150					Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan		
IKSP 9.3	Rasio kekayaan intelektual di bidang hayati dan lingkungan yang dimanfaatkan		Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13					Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP 9.4	Rasio kekayaan intelektual di bidang elektronika dan informatika yang dimanfaatkan		Rasio	0,06	0,06	0,07	0,07					Organisasi Riset Elektronika dan Informatika		
IKSP 9.5	Rasio kekayaan intelektual di bidang kebumihan dan maritim yang dimanfaatkan		Rasio	0,05	0,05	0,06	0,06					Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim		
IKSP 9.6	Rasio model di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang dimanfaatkan		Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13					Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora		
IKSP 9.7	Rasio kekayaan intelektual di bidang tenaga nuklir yang dimanfaatkan		Rasio	0,06	0,06	0,07	0,07					Organisasi Riset Tenaga Nuklir		
IKSP 9.8	Rasio kekayaan intelektual di bidang penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan		Rasio	0,07	0,07	0,08	0,08					Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa		
IKSP 9.9	Rasio kekayaan intelektual di bidang energi dan manufaktur yang dimanfaatkan		Rasio	0,10	0,11	0,11	0,12					Organisasi Riset Energi dan Manufaktur		
IKSP 9.10	Rasio model di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra yang dimanfaatkan		Rasio	0,10	0,11	0,11	0,12					Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra		
IKSP 9.11	Rasio kekayaan intelektual di bidang		Rasio	0,06	0,06	0,07	0,07					Organisasi Riset Nanoteknologi		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)	
	nanoteknologi dan material yang dimanfaatkan												ogi dan Material		
IKSP 9.12	Rasio model di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang dimanfaatkan		Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13						Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat		
IKSP 9.13	Rasio kekayaan intelektual di bidang pertanian dan pangan yang dimanfaatkan		Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13						Organisasi Riset Pertanian dan Pangan		
IKSP 9.14	Rasio kekayaan intelektual di bidang kesehatan yang dimanfaatkan		Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13						Organisasi Riset Kesehatan		
IKSP 9.15	Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset *)		KI per 100 Periset	5,54	6,52	7,5	8,48						Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi		
IKSP 9.16	Persentase institusi yang memanfaatkan data rilis		Persen	90	100	100	100						Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi		
Sasaran Program 10	Peningkatan Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan oleh Pemangku Kepentingan														
IKSP 10.1	Rasio naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan		Rasio	1	1	1	1						Deputi Bidang Riset dan		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)	
	yang dimanfaatkan dari kegiatan perumusan kebijakan riset dan inovasi daerah												Inovasi Daerah		
IKSP 10.2	Rasio naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dari kegiatan perumusan kebijakan pembangunan		Rasio	1	1	1	1						Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan		
IKSP 10.3	Rasio naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dari kegiatan perumusan kebijakan riset dan inovasi		Rasio	1	1	1	1						Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi		
Kegiatan 6680: Manajemen Sumber Daya Manusia Iptek								155.317,54	220.192,64	245.589,00	275.149,37	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek			
	Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas talenta nasional riset dan inovasi														
	Jumlah talenta yang sedang mengikuti Program Peningkatan Kualifikasi		Orang	895	968	1.065	1.171						Direktorat Manajemen Talenta	Direktorat Manajemen Talenta	Direktorat Pengembangan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)	
	Pendidikan Pascasarjana														Kompetensi
	Jumlah talenta yang sedang mengikuti Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi		Orang	11.000	18.710	18.710	18.710								Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi
Rincian Output	<i>Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Orang</i>	895	968	1.065	1.171	86.106,78	85.188,90	93.725,39	103.053,93				
	<i>Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Orang</i>	11.000	18.710	18.710	18.710	64.716,17	128.384,53	144.061,43	162.873,72				
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kompetensi SDM riset dan inovasi														
	Jumlah peserta pelatihan pengembangan kompetensi		Orang	2.050	2.880	3.456	4.147							Direktorat Pengembangan Kompetensi	Direktorat Pengembangan Kompetensi
	Jumlah pejabat fungsional bidang iptek, riset, dan inovasi yang lulus uji kompetensi		Orang	500	500	500	500							Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi
	Jumlah peserta yang telah tersertifikasi profesi di bidang iptek, riset, dan inovasi		Orang	100	100	100	100								
Rincian Output	<i>Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Bidang Riset dan Inovasi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Orang</i>	2.000	2.880	3.456	4.147	4.107,50	5.914,80	7.097,76	8.517,31				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Fungsional Bidang Riset dan Inovasi yang disusun</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Standar</i>	9	9	9	9	387,09	704,42	704,42	704,42			
Kegiatan 6681: Penguatan Infrastruktur Riset dan Inovasi								1.614.376,53	8.475.465,97	8.118.137,60	9.297.765,69	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi		
Sasaran Kegiatan 1: Menguatnya ekosistem kolaborasi riset melalui pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi														
	Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dibangun *)		Infrastruktur	5	10	10	10						Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi	Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan kapal riset baru melalui pinjaman luar negeri		Laporan	1	1	0	0						Direktorat Pengelolaan Armada Kapal Riset	Direktorat Pengelolaan Armada Kapal Riset
	Jumlah pembangunan kapal riset melalui pinjaman luar negeri		Unit	0	0	2	2							
	Pusat Inovasi Berbasis Maritim *)		Unit (Kumulatif)	1	1	1	2						Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi	Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah Kawasan Sains dan Teknologi strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara optimal		Unit (kumulatif)	10	10	15	20						Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
	Jumlah peralatan fasilitas ketenaganukliran yang dimutakhirkan		Fasilitas	2	2	2	2						Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran	Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran
	Jumlah koleksi yang direhabilitasi		Spesimen	100	100	100	100						Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah	Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah
	Jumlah PKS Baru dari Infrastruktur Riset Strategis		PKS	4	4	4	4						Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infratraktur Riset dan Inovasi	Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infratraktur Riset dan Inovasi
Rincian Output	<i>Procurement of Multi Purposes Research Vessels</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Unit</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>236.466,15</i>	<i>605.476,00</i>	<i>33.804,00</i>	<i>45.307,00</i>			
	<i>Infrastruktur Laboratorium Penyakit Infeksi dengan Tingkat Keamanan Tinggi (High Containment Infectious Laboratory)</i>	<i>Kota Bogor</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Armada Kapal Riset (KPBU)</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Unit</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Dukungan Perencanaan KPBU Armada Kapal Riset</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>526,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>Evidence-based and Sustainable Ocean Management in Indonesia</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Data</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>16.759,78</i>	<i>19.070,00</i>	<i>14.546,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>Fasilitas Pendukung Ekosistem Kelautan dan Maritim</i>	<i>Kab. Gunung Kidul</i>	<i>Unit</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>300.000,00</i>			
	<i>Prasarana Kawasan Sains yang Direvitalisasi</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>248.054,76</i>	<i>172.960,38</i>	<i>204.256,42</i>	<i>227.182,06</i>			
	<i>Peralatan Laboratorium Bidang Teknik</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Unit</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>258.767,31</i>	<i>6.107.778,87</i>	<i>6.281.653,51</i>	<i>7.768.059,28</i>			
	<i>Peralatan Laboratorium Bidang Hayati</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Unit</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>394.335,04</i>	<i>539.194,32</i>	<i>480.655,50</i>	<i>528.913,99</i>			
	<i>Layanan Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Riset</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>107.317,51</i>	<i>136.728,90</i>	<i>150.401,79</i>	<i>165.441,97</i>			
	<i>Data Citra Satelit</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Data</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>			
	<i>Peralatan Riset Flagship Riset dan Inovasi untuk Kemandirian Kesehatan</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>118.121,23</i>	<i>124.027,29</i>	<i>130.228,66</i>	<i>136.740,09</i>			
	<i>Peralatan Riset Flagship Riset dan Inovasi Pangan</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>16.728,77</i>	<i>17.565,21</i>	<i>18.443,47</i>	<i>19.365,64</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Peralatan Riset Flagship Riset dan Inovasi Energi Berkelanjutan</i>	<i>Provinsi DKI Jakarta</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>47.300,00</i>	<i>49.665,00</i>	<i>52.148,25</i>	<i>54.755,66</i>			
Kegiatan 6682: Fasilitas Riset dan Inovasi								390.606,97	1.216.500,00	1.434.200,00	1.887.850,00	Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi		
Sasaran Kegiatan 1: Menguatnya ekosistem kolaborasi riset melalui pengembangan hub tematik														
	Jumlah hub tematik yang dikembangkan di BRIN *)		Lembaga	1	2	3	4						Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi	Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi
Rincian Output	<i>Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi</i>	<i>Kota Administra si Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>40</i>	<i>45</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>12.150,00</i>	<i>13.820,00</i>	<i>15.320,00</i>	<i>16.820,00</i>			
	<i>Mitra Fasilitas Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi</i>	<i>Kota Administra si Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>8.910</i>	<i>9.970</i>	<i>10.880</i>	<i>11.890</i>	<i>23.527,22</i>	<i>28.650,00</i>	<i>29.150,00</i>	<i>29.900,00</i>			
	<i>Pengembangan Hub Kelautan dan Maritim</i>	<i>Kota Administra si Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>			
	<i>Pengembangan Hub Energi dan Manufaktur</i>	<i>Kota Administra si Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>			
	<i>Pengembangan Hub Pengolahan Sampah dan Limbah</i>	<i>Kota Administra si Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>			
	<i>Pengembangan Hub Pertanian dan Pangan</i>	<i>Kota Administra</i>	<i>Lembaga</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
		si Jakarta Pusat												
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kuantitas hasil riset dan inovasi														
	Jumlah kekayaan intelektual granted		Kekayaan Intelektual	360	370	380	390						Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual	Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual
	Jumlah mitra fasilitasi riset dan inovasi bidang repositori, multimedia, dan penerbitan ilmiah		Mitra	1.100	1.300	1.400	1.500						Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah	Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
	Jumlah mitra tata kelola perizinan riset dan inovasi		Mitra	3.010	3.170	3.280	3.390						Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi, dan Otoritas Ilmiah	Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi, dan Otoritas Ilmiah
	Jumlah kekayaan intelektual bidang hayati dan lingkungan yang difasilitasi		Kekayaan Intelektual	0	40	60	80							
	Jumlah kekayaan intelektual bidang elektronika dan informatika yang difasilitasi		Kekayaan Intelektual	7	29	44	135						Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual	Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual
	Jumlah kekayaan intelektual bidang kebumihan dan maritim yang difasilitasi		Kekayaan Intelektual	3	10	20	30							
	Jumlah kekayaan intelektual bidang ilmu pengetahuan sosial dan		Kekayaan Intelektual	0	40	50	60							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	humaniora yang difasilitasi													
	Jumlah kekayaan intelektual bidang energi dan manufaktur yang difasilitasi		Kekayaan Intelektual	4	86	146	205							
	Jumlah kekayaan intelektual bidang arkeologi, bahasa, dan sastra yang difasilitasi		Kekayaan Intelektual	4	7	7	60							
	Jumlah kekayaan intelektual bidang nanoteknologi dan material yang difasilitasi		Kekayaan Intelektual	7	55	106	190							
	Jumlah kekayaan intelektual bidang pertanian dan pangan yang difasilitasi		Kekayaan Intelektual	4	58	90	140							
	Jumlah kekayaan intelektual bidang kesehatan yang difasilitasi		Kekayaan Intelektual	0	20	50	80							
Rincian Output	<i>Kekayaan Intelektual Biota yang Terkonservasi</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>28.000,00</i>			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>28.000,00</i>			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Big Data</i>	<i>Kota Bandung</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>12</i>	<i>37</i>	<i>1.380,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>25.900,00</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Sistem Telekomunikasi IoT</i>	<i>Kota Bandung</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	3	15	20	70	2.070,00	10.500,00	14.000,00	49.000,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Jaringan Detektor Bawah Air</i>	<i>Kota Bandung</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	2	7	12	28	1.380,00	4.900,00	8.400,00	19.600,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Kebencanaan dan Sumber Daya Kebumian</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	3	10	20	30	2.070,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi tentang Ke-Indonesiaan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	0	20	25	30	0,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi tentang Dinamika Kontemporer</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	0	20	25	30	0,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Energi Berkelanjutan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	2	20	40	50	1.380,00	14.000,00	28.000,00	35.000,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Manufaktur Industri Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	2	20	40	50	1.380,00	14.000,00	28.000,00	35.000,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Bersih</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	0	20	30	40	0,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Produk Pertanian</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	0	26	36	65	0,00	18.200,00	25.200,00	45.000,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Budaya Berkelanjutan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	2	1	1	30	1.380,00	700,00	700,00	21.000,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Data Raya Arkeologi Bahasa dan Sastra</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	2	6	6	30	1.380,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	0	10	20	44	0,00	7.000,00	14.000,00	30.500,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Material Maju untuk Kesehatan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	3	20	40	70	2.070,00	13.600,00	27.900,00	49.000,00			
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Pengembangan Teknologi Proses Material Terbarukan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	2	20	40	70	1.380,00	13.500,00	27.600,00	48.400,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana			
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)	
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan berbasis Nanoteknologi dan Material</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>1.380,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>				
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Tanaman</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>30</i>	<i>56</i>	<i>0,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>39.200,00</i>				
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Ternak</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>20</i>	<i>24</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>16.800,00</i>				
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Kelautan untuk Ekonomi Biru</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>1.380,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>21.000,00</i>				
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Untuk Hilirisasi Sumber Daya Akuatik</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>1.380,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>21.000,00</i>				
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Alat Kesehatan</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Kekayaan Intelektual</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>50</i>	<i>80</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>56.000,00</i>				
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi														
	Jumlah publikasi ilmiah global yang dihasilkan		Publikasi	5.223	5.484	5.758	6.046						Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah	Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah purwarupa bidang hayati dan lingkungan yang difasilitasi		Purwarupa	38	50	56	63							
	Jumlah purwarupa bidang elektronika dan informatika yang difasilitasi		Purwarupa	20	70	88	118							
	Jumlah purwarupa bidang kebumiharian dan maritim yang difasilitasi		Purwarupa	16	10	11	13							
	Jumlah purwarupa bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang difasilitasi		Purwarupa	0	2	4	5							
	Jumlah purwarupa bidang tenaga nuklir yang difasilitasi		Purwarupa	30	28	31	34							
	Jumlah purwarupa bidang penerbangan dan antariksa yang difasilitasi		Purwarupa	24	34	34	35							
	Jumlah purwarupa bidang energi dan manufaktur yang difasilitasi		Purwarupa	42	117	129	194							
	Jumlah purwarupa bidang arkeologi, bahasa, dan sastra yang difasilitasi		Purwarupa	0	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah purwarupa bidang nanoteknologi dan material yang difasilitasi		Purwarupa	32	84	90	123							
	Jumlah purwarupa bidang pertanian dan pangan yang difasilitasi		Purwarupa	37	132	166	246							
	Jumlah purwarupa bidang kesehatan yang difasilitasi		Purwarupa	47	81	89	172							
	Jumlah model bidang kebumihan dan maritim yang difasilitasi		Model	8	9	10	10							
	Jumlah model bidang pertanian dan pangan yang difasilitasi		Model	0	5	6	6							
	Jumlah model bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang difasilitasi		Model	36	17	18	18							
	Jumlah model bidang arkeologi, bahasa, dan sastra yang difasilitasi		Model	20	29	32	35							
	Jumlah model bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi		Model	30	52	86	132							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah model bidang kesehatan yang difasilitasi		Model	0	9	10	20							
Rincian Output	<i>Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden</i>	<i>Kota Administra si Jakarta Pusat</i>	<i>Paket</i>	1	0	0	0	181.739,76	0,00	0,00	0,00			
	<i>Purwarupa Biota yang Terkonservasi</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	12	14	16	18	5.520,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	26	36	40	45	11.960,00	17.850,00	19.850,00	22.350,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Big Data</i>	<i>Kota Bandung</i>	<i>Purwarupa</i>	4	18	21	26	1.840,00	9.000,00	10.500,00	13.000,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Sistem Telekomunikasi IoT</i>	<i>Kota Bandung</i>	<i>Purwarupa</i>	10	34	46	65	4.600,00	17.000,00	23.000,00	32.500,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Jaringan Detektor Bawah Air</i>	<i>Kota Bandung</i>	<i>Purwarupa</i>	6	18	21	27	2.760,00	9.000,00	10.500,00	13.500,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Kebencanaan dan Sumber Daya Kebumian</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	16	10	11	13	7.360,00	4.700,00	5.250,00	6.300,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi tentang Ke- Indonesiaan</i>	<i>Kota Administra si Jakarta Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	0	1	2	3	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi tentang Dinamika Kontemporer</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Nuklir untuk Energi</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>14</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>6.440,00</i>	<i>4.180,00</i>	<i>4.680,00</i>	<i>5.180,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Nuklir untuk Medis dan Industri</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>5.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Nuklir untuk Radioisotop dan Radiofarmaka</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>6</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>2.760,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Pesawat Udara</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>12</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>5.520,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Satelit</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>5.520,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Energi Berkelanjutan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>4.600,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Manufaktur Industri Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>16</i>	<i>3.680,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>8.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Bersih</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>6</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>2.760,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.000,00</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Produk Pertanian</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	10	75	85	140	4.600,00	37.500,00	42.500,00	70.000,00			
	<i>Purwarupa Flagship Riset dan Inovasi PLTU Hijau untuk Mendukung Swasembada Energi</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	8	8	8	8	3.680,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Budaya Berkelanjutan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	0	1	1	1	0,00	500,00	500,00	500,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	9	18	24	31	4.140,00	9.000,00	12.000,00	15.500,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Material Maju untuk Kesehatan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	8	10	10	10	3.680,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Pengembangan Teknologi Proses Material Terbarukan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	7	8	8	10	3.220,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan berbasis Nanoteknologi dan Material</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Purwarupa</i>	8	48	48	72	3.680,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Tanaman</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	12	65	75	120	5.520,00	32.500,00	37.500,00	60.000,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Ternak</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>11</i>	<i>45</i>	<i>65</i>	<i>100</i>	<i>5.060,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>50.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Kelautan untuk Ekonomi Biru</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>2.760,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.250,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Untuk Hilirisasi Sumber Daya Akuatik</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>1.840,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>			
	<i>Purwarupa Flagship Riset dan Inovasi Pangan untuk Mendukung MBG</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>1.840,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Obat dan Vaksin</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>15</i>	<i>30</i>	<i>35</i>	<i>60</i>	<i>6.900,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>30.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Alat Kesehatan</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>12</i>	<i>26</i>	<i>28</i>	<i>60</i>	<i>5.520,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>13.900,00</i>	<i>30.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Kedokteran Presisi</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>12</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>44</i>	<i>5.520,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>22.000,00</i>			
	<i>Purwarupa Flagship Riset dan Inovasi Pengembangan Platform Vaksin TB untuk Mendukung Kemandirian Kesehatan</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Purwarupa</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>3.680,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>			
	<i>Model Hasil Riset dan Inovasi Kebencanaan dan Sumber Daya Kebumihan</i>	<i>Kota Tangerang Selatan</i>	<i>Model</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>1.840,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Model Hasil Riset dan Inovasi tentang Ke-Indonesiaan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	19	10	10	10	4.370,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	<i>Model Hasil Riset dan Inovasi tentang Dinamika Kontemporer</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	17	7	8	8	3.910,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00			
	<i>Model Hasil Riset dan Inovasi Budaya Berkelanjutan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	15	24	27	30	3.450,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00			
	<i>Model Hasil Riset Dasar Arkeologi, Bahasa, dan Sastra</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	5	5	5	5	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			
	<i>Model Hasil Riset Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Integratif</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	7	12	13	40	1.610,00	3.000,00	3.250,00	10.000,00			
	<i>Model Hasil Riset Akselerasi Pembangunan Perdesaan untuk Kesejahteraan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	8	13	28	30	1.840,00	3.250,00	7.000,00	7.500,00			
	<i>Model Hasil Riset Kemandirian Ekonomi yang Kompetitif dan Berkelanjutan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	8	15	32	34	1.840,00	3.750,00	8.000,00	8.500,00			
	<i>Model Hasil Riset Industrialisasi dan Pengembangan Bisnis yang Inklusif</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Selatan</i>	<i>Model</i>	7	12	13	28	1.610,00	3.000,00	3.250,00	7.000,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Model Hasil Riset dan Inovasi Kelautan untuk Ekonomi Biru</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Model</i>	0	4	5	5	0,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00			
	<i>Model Hasil Riset dan Inovasi Untuk Hilirisasi Sumber Daya Akuatik</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Model</i>	0	1	1	1	0,00	250,00	250,00	250,00			
	<i>Model Hasil Riset dan Inovasi Kedokteran Presisi</i>	<i>Kab. Bogor</i>	<i>Model</i>	0	9	10	20	0,00	2.250,00	2.500,00	5.000,00			
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatkan anggaran matching fund pihak eksternal di bidang fasilitasi riset dan inovasi														
	Jumlah anggaran matching fund pihak eksternal di bidang fasilitasi riset dan inovasi		Rupiah	174,9 M	2.826,9 M	2.964,6 M	3.104,3 M						Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi	Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi
Kegiatan 6683: Pemanfaatan Riset dan Inovasi								192.344,26	104.062,08	109.874,50	126.954,06	Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi		
Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya Dukungan Peningkatan Investasi R&D Sektor Swasta dalam Pendanaan Litbang														
	Jumlah mitra yang mengajukan proposal fasilitas pemotongan pajak bruto Badan Usaha yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu		Mitra	18	20	22	24						Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi	Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
Rincian Output	Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi Lembaga Lainnya	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Lembaga	69	122	147	176	3.654,32	5.184,00	6.220,80	7.464,96			
	Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Dukungan Peningkatan Fungsi Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset dan Inovasi													
	Jumlah perjanjian kerja sama lisensi		Kerja Sama	30	35	40	50						Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi	Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi
Rincian Output	Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Lembaga	519	144	173	207	40.406,97	12.502,08	15.002,50	18.003,00			
	Sasaran Kegiatan 3: Tersedianya Dukungan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi													
	Jumlah mitra masyarakat dan UMKM yang dibina dalam pemanfaatan sumber daya dan/atau hasil riset dan inovasi		Lembaga	90	90	90	90						Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian /Lembaga, Masyarakat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian/ Lembaga, Masyarakat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	Jumlah mitra lembaga lainnya (selain industri) yang mendapatkan layanan peningkatan kapasitas pengguna riset dan inovasi		Lembaga	750	750	750	750						Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi	Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi
	Jumlah kerja sama pemanfaatan iptek		Kerja Sama	30	35	45	50						Direktorat Pemanfaatan Riset dan	Direktorat Pemanfaatan Riset dan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah Badan Riset dan Inovasi Daerah terbina		Lembaga (kumulatif)	26	31	37	45						Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Direktorat Fasilitas dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah; Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah; Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah
	Jumlah hub inovasi daerah yang dikembangkan		Lembaga (kumulatif)	1	2	3	4						Direktorat Fasilitas dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah	Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah; Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah; Direktorat Fasilitas dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah
<i>Rincian Output</i>	<i>Hub Inovasi Daerah yang Dikembangkan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Lembaga</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>600,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>145.104,67</i>			
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kuantitas Naskah Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Riset dan Inovasi Daerah														
	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait inisiasi Rumah Inovasi Daerah		Rekomendasi Kebijakan (kumulatif)	5	10	15	20						Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah	Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan perumusan kebijakan riset dan inovasi daerah		Rekomendasi Kebijakan	11	29	29	29							
	Jumlah naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan fasilitasi dan pemantauan riset dan inovasi daerah		Rekomendasi Kebijakan	13	28	28	28						Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah	Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah
	Jumlah naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan diseminasi dan pemanfaatan riset dan inovasi daerah		Rekomendasi Kebijakan	11	28	28	28						Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah
<i>Rincian Output</i>	<i>Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Rekomendasi Kebijakan</i>	40	95	100	105	2.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00			
Kegiatan 6685: Perumusan Kebijakan Pembangunan								3.000,00	8.700,00	10.500,00	12.540,00	Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kuantitas naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kebijakan pembangunan														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan perumusan kebijakan pembangunan di bidang pembangunan manusia, kependudukan, dan kebudayaan		Rekomendasi Kebijakan	10	37	45	54						Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan	Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan
	Jumlah naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan perumusan kebijakan pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan		Rekomendasi Kebijakan	7	36	44	52						Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
	Jumlah naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan perumusan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan pengembangan regional		Rekomendasi Kebijakan	13	36	43	52						Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional	Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan perumusan kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kemaritiman, sumber daya alam, dan ketenaganukliran		Rekomendasi Kebijakan	20	36	43	51						Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran	Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran
<i>Rincian Output</i>	<i>Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi Bidang Kebijakan Pembangunan</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Rekomendasi Kebijakan</i>	50	145	175	209	3.000,00	8.700,00	10.500,00	12.540,00			
Kegiatan 6686: Perumusan Kebijakan Riset dan Inovasi								2.250,00	6.980,00	8.300,00	9.860,00	Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kuantitas naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kebijakan Riset dan Inovasi														
	Jumlah naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi kebijakan riset dan inovasi		Rekomendasi Kebijakan	10	34	35	43						Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi	Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi
	Jumlah naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan perumusan		Rekomendasi Kebijakan	10	40	60	70						Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi	Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	kebijakan riset dan inovasi													
	Jumlah naskah kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan pengukuran dan indikator riset, teknologi dan inovasi		Rekomendasi Kebijakan	10	34	35	43						Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi	Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi
<i>Rincian Output</i>	<i>Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Rekomendasi Kebijakan</i>	30	108	130	156	1.750,00	6.480,00	7.800,00	9.360,00			
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya pengukuran data indikator riset dan inovasi yang berkualitas														
	Jumlah data (iptek riset dan inovasi) yang dirilis		Data	2	2	2	2						Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi	Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi
<i>Rincian Output</i>	<i>Model Pengukuran Riset dan Inovasi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Model</i>	2	2	2	2	500,00	500,00	500,00	500,00			
Kegiatan 6687: Riset Bidang Hayati dan Lingkungan								1.521,65	10.092,75	11.102,03	12.212,23	Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kuantitas Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan dan dimanfaatkan di Bidang Hayati dan Lingkungan														
	Jumlah inovasi dan teknologi		Inovasi	120	140	160	180							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	terkait keanekaragaman hayati *)													
	Jumlah produk hasil riset dan inovasi yang dihasilkan di bidang hayati dan lingkungan		Produk	50	50	50	50							
<i>Rincian Output</i>	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Hayati dan Lingkungan</i>		<i>Produk</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.050,00</i>			
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kuantitas Kerja Sama di Bidang Hayati dan Lingkungan													
	Jumlah kerja sama riset dan inovasi di bidang hayati dan lingkungan		Kesepakatan	1	1	1	1							
<i>Rincian Output</i>	<i>Kerja Sama Riset dan Inovasi di Bidang Hayati dan Lingkungan</i>		<i>Kesepakatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>455,00</i>	<i>477,75</i>	<i>525,53</i>	<i>578,08</i>			
	Sasaran Kegiatan 3: Berfungsinya Peralatan Riset dan Inovasi Bidang Hayati dan Lingkungan													
	Jumlah peralatan laboratorium riset hayati dan lingkungan		Unit	1	1	1	1							
	Jumlah layanan pemeliharaan dan operasional fasilitas riset hayati dan lingkungan		Unit	0	1	1	1							
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Riset Hayati dan Lingkungan</i>		<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1.066,65</i>	<i>3.615,00</i>	<i>3.976,50</i>	<i>4.374,15</i>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Layanan Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Riset Bidang Hayati dan Lingkungan</i>		<i>Unit</i>	0	1	1	1	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00			
Kegiatan 6688: Riset Bidang Elektronika dan Informatika								1.167,00	10.182,00	11.200,20	12.320,22	Organisasi Riset Elektronika dan Informatika		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kuantitas Produk Riset dan Inovasi yang dihasilkan di Bidang Elektronika dan Informatika													
	Jumlah produk hasil riset dan inovasi yang dihasilkan di bidang elektronika dan informatika		Produk	5	6	6	6							
<i>Rincian Output</i>	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Elektronika dan Informatika</i>		<i>Produk</i>	5	6	6	6	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00			
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kuantitas Kerja Sama di Bidang Elektronika dan Informatika													
	Jumlah kerja sama riset dan inovasi di bidang elektronika dan informatika		Kesepakatan	1	1	1	1							
<i>Rincian Output</i>	<i>Kerja Sama Riset dan Inovasi di Bidang Elektronika dan Informatika</i>		<i>Kesepakatan</i>	1	1	1	1	182,00	182,00	200,20	220,22			
	Sasaran Kegiatan 3: Berfungsinya Peralatan Riset dan Inovasi Bidang Elektronika dan Informatika													
	Jumlah peralatan laboratorium riset elektronika dan informatika		Unit	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah layanan pemeliharaan dan operasional fasilitas riset elektronika dan informatika		Unit	0	1	1	1							
Rincian Output	<i>Peralatan Riset Elektronika dan Informatika</i>		Unit	1	1	1	1	985,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00			
	<i>Layanan Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Riset Bidang Elektronika dan Informatika</i>		Unit	0	1	1	1	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00			
Kegiatan 6689: Riset Bidang Kebumian dan Maritim								2.223,37	16.791,70	18.470,87	20.317,96	Organisasi Riset Kebumian dan Maritim		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kuantitas Produk Riset dan Inovasi yang dihasilkan di Bidang Kebumian dan Maritim														
	Jumlah produk hasil riset dan inovasi yang dihasilkan di bidang kebumian dan maritim		Produk	5	6	6	6							
Rincian Output	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Kebumian dan Maritim</i>		Produk	5	6	6	6	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00			
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kuantitas Kerja Sama di Bidang Kebumian dan Maritim														
	Jumlah kerja sama riset dan inovasi di bidang kebumian dan maritim		Kesepakatan	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
<i>Rincian Output</i>	<i>Kerja Sama Riset dan Inovasi di Bidang Kebumian dan Maritim</i>		<i>Kesepakatan</i>	1	1	1	1	1.123,37	791,70	870,87	957,96			
Sasaran Kegiatan 3: Berfungsinya Peralatan Riset dan Inovasi Bidang Kebumian dan Maritim														
	Jumlah peralatan laboratorium riset kebumian dan maritim		Unit	1	1	1	1							
	Jumlah layanan pemeliharaan dan operasional fasilitas riset kebumian dan maritim		Unit	0	1	1	1							
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Riset Kebumian dan Maritim</i>		<i>Unit</i>	1	1	1	1	1.100,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00			
	<i>Layanan Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Riset Bidang Kebumian dan Maritim</i>		<i>Unit</i>	0	1	1	1	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00			
Kegiatan 6690: Riset Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora								975,54	1.497,75	1.647,53	1.812,28	Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kuantitas Produk Riset dan Inovasi yang dihasilkan di Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora														
	Jumlah produk hasil riset dan inovasi yang dihasilkan di bidang ilmu pengetahuan		Produk	1	2	2	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	sosial dan humaniora													
Rincian Output	Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora		Produk	1	2	2	2	0,00	500,00	550,00	605,00			
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kuantitas Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora													
	Jumlah kerja sama riset dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora		Kesepakatan	1	1	1	1							
Rincian Output	Kerja Sama Riset dan Inovasi di Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora		Kesepakatan	1	1	1	1	22,75	22,75	25,03	27,53			
	Sasaran Kegiatan 3: Berfungsinya Peralatan Riset dan Inovasi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora													
	Jumlah peralatan laboratorium riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora		Unit	1	1	1	1							
Rincian Output	Peralatan Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora		Unit	1	1	1	1	952,79	975,00	1.072,50	1.179,75			
Kegiatan 6691: Riset Bidang Tenaga Nuklir								962,58	16.082,00	17.690,20	19.459,22	Organisasi Riset Tenaga Nuklir		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
Kegiatan 6692: Riset Bidang Penerbangan dan Antariksa								1.364,00	22.864,00	25.150,40	27.665,44	Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kuantitas Produk Riset dan Inovasi yang dihasilkan di Bidang Penerbangan dan Antariksa														
	Jumlah produk hasil riset dan inovasi yang dihasilkan di bidang penerbangan dan antariksa		Produk	1	1	1	1							
Rincian Output	Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Penerbangan dan Antariksa		Produk	1	2	2	2	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00			
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kuantitas Kerja Sama di Bidang Penerbangan dan Antariksa														
	Jumlah kerja sama riset dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa		Kesepakatan	1	1	1	1							
Rincian Output	Kerja Sama Riset dan Inovasi di Bidang Penerbangan dan Antariksa		Kesepakatan	1	1	1	1	364,00	364,00	400,40	440,44			
Sasaran Kegiatan 3: Berfungsinya Peralatan Riset dan Inovasi Bidang Penerbangan dan Antariksa														
	Jumlah peralatan laboratorium riset penerbangan dan antariksa		Unit	1	1	1	1							
	Jumlah layanan pemeliharaan dan operasional fasilitas riset		Unit	0	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	penerbangan dan antariksa													
Rincian Output	<i>Peralatan Riset Penerbangan dan Antariksa</i>		Unit	1	1	1	1	1.000,00	7.500,00	8.250,00	9.075,00			
	<i>Layanan Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Riset Bidang Penerbangan dan Antariksa</i>		Unit	0	1	1	1	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00			
Kegiatan 6693: Riset Bidang Energi dan Manufaktur								4.185,00	17.185,00	18.903,50	20.793,85	Organisasi Riset Energi dan Manufaktur		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kuantitas Produk Riset dan Inovasi yang dihasilkan di Bidang Energi dan Manufaktur														
	Jumlah produk hasil riset dan inovasi yang dihasilkan di bidang energi dan manufaktur		Produk	5	6	6	6							
Rincian Output	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Energi dan Manufaktur</i>		Produk	5	6	6	6	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00			
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kuantitas Kerja Sama di Bidang Energi dan Manufaktur														
	Jumlah kerja sama riset dan inovasi di bidang energi dan manufaktur		Kesepakatan	1	1	1	1							
Rincian Output	<i>Kerja Sama Riset dan Inovasi di</i>		Kesepakatan	1	1	1	1	3.185,00	3.185,00	3.503,50	3.853,85			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Bidang Energi dan Manufaktur</i>													
	Sasaran Kegiatan 3: Berfungsinya Peralatan Riset dan Inovasi Bidang Energi dan Manufaktur													
	Jumlah peralatan laboratorium riset energi dan manufaktur		Unit	1	1	1	1							
	Jumlah layanan pemeliharaan dan operasional fasilitas riset energi dan manufaktur		Unit	0	1	1	1							
Rincian Output	<i>Peralatan Riset Energi dan Manufaktur</i>		Unit	1	1	1	1	1.000,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00			
	<i>Layanan Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Riset Bidang Energi dan Manufaktur</i>		Unit	0	1	1	1	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00			
Kegiatan 6855: Riset Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra								1.450,85	1.109,92	1.220,91	1.343,00	Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kuantitas Produk Riset dan Inovasi yang dihasilkan di Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra													
	Jumlah produk hasil riset dan inovasi yang dihasilkan di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra		Produk	1	2	2	2							
Rincian Output	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi</i>		Produk	1	2	2	2	0,00	500,00	550,00	605,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra</i>													
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kuantitas Kerja Sama di Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra													
	Jumlah kerja sama riset dan inovasi di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra		Kesepakata n	4	2	2	2							
<i>Rincian Output</i>	<i>Kerja Sama Riset dan Inovasi di Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra</i>		<i>Kesepakat an</i>	4	2	2	2	455,00	227,50	250,25	275,28			
	Sasaran Kegiatan 3: Berfungsinya Peralatan Riset dan Inovasi Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra													
	Jumlah peralatan laboratorium riset arkeologi, bahasa, dan sastra		Unit	1	1	1	1							
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra</i>		<i>Unit</i>	1	1	1	1	995,85	382,42	420,66	462,73			
Kegiatan 6856: Riset Bidang Nanoteknologi dan Material								1.769,34	20.932,00	23.025,20	25.327,72	Organisasi Riset Nanoteknol ogi dan Material		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kuantitas Produk Riset dan Inovasi yang dihasilkan di Bidang Nanoteknologi dan Material													
	Jumlah produk hasil riset dan inovasi yang dihasilkan di bidang nanoteknologi dan material		Produk	5	6	6	6							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
Kegiatan 6857: Riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat								1.637,00	3.215,70	3.537,27	3.891,00	Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kuantitas Produk Riset dan Inovasi yang dihasilkan di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat														
	Jumlah produk hasil riset dan inovasi yang dihasilkan di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat		Produk	1	2	2	2							
<i>Rincian Output</i>	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat</i>		<i>Produk</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>550,00</i>	<i>605,00</i>			
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kuantitas Kerja Sama di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat														
	Jumlah kerja sama riset dan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat		Kesepakatan	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
Rincian Output	<i>Kerja Sama Riset dan Inovasi di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat</i>		<i>Kesepakatan</i>	1	1	1	1	637,00	700,70	770,77	847,85			
Sasaran Kegiatan 3: Berfungsinya Peralatan Riset dan Inovasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat														
	Jumlah peralatan laboratorium riset tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat		Unit	1	1	1	1							
Rincian Output	<i>Peralatan Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat</i>		<i>Unit</i>	1	1	1	1	1.000,00	2.015,00	2.216,50	2.438,15			
Kegiatan 6858: Riset Bidang Pertanian dan Pangan								2.596,59	9.406,58	10.347,24	11.381,96	Organisasi Riset Pertanian dan Pangan		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kuantitas Produk Riset dan Inovasi yang dihasilkan di Bidang Pertanian dan Pangan														
	Jumlah produk hasil riset dan inovasi yang dihasilkan di bidang pertanian dan pangan		Produk	5	6	6	6							
Rincian Output	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Pertanian dan Pangan</i>		<i>Produk</i>	5	6	6	6	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kuantitas Kerja Sama di Bidang Pertanian dan Pangan													
	Jumlah kerja sama riset dan inovasi di bidang pertanian dan pangan		Kesepakatan	1	1	1	1							
<i>Rincian Output</i>	<i>Kerja Sama Riset dan Inovasi di Bidang Pertanian dan Pangan</i>		<i>Kesepakatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1.596,59</i>	<i>1.646,53</i>	<i>1.811,18</i>	<i>1.992,30</i>			
	Sasaran Kegiatan 3: Berfungsinya Peralatan Riset dan Inovasi Bidang Pertanian dan Pangan													
	Jumlah peralatan laboratorium riset pertanian dan pangan		Unit	1	1	1	1							
	Jumlah layanan pemeliharaan dan operasional fasilitas riset pertanian dan pangan		Unit	0	1	1	1							
<i>Rincian Output</i>	<i>Peralatan Riset Pertanian dan Pangan</i>		<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.760,06</i>	<i>1.936,06</i>	<i>2.129,67</i>			
	<i>Layanan Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Riset Bidang Pertanian dan Pangan</i>		<i>Unit</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.210,00</i>			
Kegiatan 6859: Riset Bidang Kesehatan							3.274,29	13.939,13	15.333,04	16.866,34	Organisasi Riset Kesehatan			
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kuantitas Produk Riset dan Inovasi yang dihasilkan di Bidang Kesehatan													
	Jumlah produk hasil riset dan		Produk	5	5	5	5							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	inovasi yang dihasilkan di bidang kesehatan													
Rincian Output	Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan		Produk	5	5	5	5	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00			
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kuantitas Kerja Sama di Bidang Kesehatan														
	Jumlah kerja sama riset dan inovasi di bidang kesehatan		Kesepakatan	10	10	10	10							
Rincian Output	Kerja Sama Riset dan Inovasi di Bidang Kesehatan		Kesepakatan	10	10	10	10	2.274,29	2.275,00	2.502,50	2.752,75			
Sasaran Kegiatan 3: Berfungsinya Peralatan Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan														
	Jumlah peralatan laboratorium riset kesehatan		Unit	1	1	1	1							
	Jumlah layanan pemeliharaan dan operasional fasilitas riset kesehatan		Unit	1	1	1	1							
Rincian Output	Peralatan Riset Kesehatan		Unit	1	1	1	1	1.000,00	5.664,13	6.230,54	6.853,59			
Rincian Output	Layanan Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Riset Bidang Kesehatan		Unit	0	1	1	1	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00			
Kegiatan 6860: Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir								11.937,53	12.213,85	12.213,85	12.213,85		Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia	Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir														
	Persentase mahasiswa		Persen	96	97	97	98							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	politeknik yang lulus tepat waktu													
Rincian Output	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Bidang Teknologi Nuklir	Kab. Sleman	Orang	450	450	450	450	11.937,53	12.213,85	12.213,85	12.213,85			
Kegiatan XXXX: Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Teknologi								1.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		Pusat Pelayanan Teknologi	Pusat Pelayanan Teknologi
	Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pelayanan Jasa dan Produk Teknologi													
	Jumlah pelayanan jasa teknologi		Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi	70	85	85	85							
	Jumlah pelayanan produk teknologi		Layanan	30	30	30	30							
Rincian Output	Layanan Jasa Teknologi		Layanan	70	85	85	85	500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
	Layanan Produk Teknologi		Layanan	30	30	30	30	500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								3.747.602,14	3.874.308,22	3.874.308,22	3.874.308,22			
Sasaran Program 11	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan pelayanan publik, sistem digital, akuntabilitas kinerja, dan budaya kerja													
IKSP 11.1	Indeks Pemerintah Digital		Indeks	1,7	2,0	2,4	3,0							
IKSP 11.2	Indeks Pelayanan Publik BRIN		Indeks	4,75	4,80	4,85	4,90						Sekretariat Utama	
IKSP 11.3	Nilai SAKIP BRIN		Nilai	74	76	78	80							
IKSP 11.4	Indeks BerAKHLAK BRIN		Indeks	72	74	76	78							
Sasaran Program 12	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan riset dan inovasi													
IKSP 12.1	Tingkat maturitas Sistem		Level	3	3	4	4						Inspektorat Utama	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRIN													
IKSP 12.2	Opini penilaian Laporan Keuangan oleh BPK RI		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP							
IKSP 12.3	Persentase jumlah rekomendasi LHP BPK RI yang telah ditindaklanjuti		Persen	100	100	100	100							
IKSP 12.4	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan BRIN		Persen	82	82	86	88							
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam manajemen sumber daya manusia iptek													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94							
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Materiil/Signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Indeks Layanan Publik		Indeks	4	4	4	4							
IKSP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
												Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam penguatan infrastruktur riset dan inovasi													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Materil/Signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Indeks Layanan Publik		Indeks	4	4	4	4							
IKSP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya		Persen	85	90	90	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam fasilitasi riset dan inovasi													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Materiil/Signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Indeks Layanan Publik		Indeks	4	4	4	4							
IKSP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pemanfaatan riset dan inovasi													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94							
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Materiil/Signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Indeks Layanan Publik		Indeks	4	4	4	4							
IKSP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
												Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam manajemen riset dan inovasi daerah													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Materiil/Signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam perumusan kebijakan pembangunan													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Materiil/Signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase Penyelesaian		Persen	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya													
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam perumusan kebijakan riset dan inovasi													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94							
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Materiil/Signifikan		Temuan	0	0	0	0						Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi	
IKSP	Indeks Kualitas Kebijakan		Indeks	90	90	90	90							
IKSP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang hayati dan lingkungan													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94						Organisasi Riset Hayati dan Lingkunga n	
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas		Nilai	78	81	81	82							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)													
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang elektronika dan informatika													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94							
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0						Organisasi Riset Elektronika dan Informatika	
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang kebumih dan maritim													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang tenaga nuklir													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Organisasi Riset Tenaga Nuklir		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang energi dan manufaktur													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Organisasi Riset Energi dan Manufaktur		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi		Nilai	78	81	81	82							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Pemerintah (SAKIP)													
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang nanoteknologi dan material													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94							
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94							
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang pertanian dan pangan													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94							
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan yang berorientasi pada pelayanan dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan riset dan inovasi di bidang kesehatan													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Organisasi Riset Kesehatan		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan, yang berorientasi pada pengelolaan risiko dalam dukungan manajemen Iptek													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Sekretariat Utama		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Materiil/Signifikan		Temuan	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
IKSP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya		Persen	85	90	90	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan, yang berorientasi pada pengelolaan risiko dalam pengawasan dan audit kinerja internal													
IKSP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94					Inspektorat Utama		
IKSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	78	81	81	82							
IKSP	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Materiil/Signifikan		Temuan	0	0	0	0							
IKSP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
IKSP	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							
Kegiatan 6676: Dukungan Manajemen Iptek								3.731.604,27	3.858.310,35	3.858.310,35	3.858.310,35	Sekretariat Utama		
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan arsip digital													
	Integrasi layanan digital internal BRIN		Persen	92	94	95	96						Pusat Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		Nilai	89	89	90	91						Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretaria tan	Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretarian
Rincian Output	Layanan Data dan Informasi	Kota Administra si Jakarta Pusat	Layanan	1	1	1	1	525,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	Layanan Umum	Kota Administra si Jakarta Pusat	Layanan	1	1	1	1	10.678,94	20.024,50	20.024,50	20.024,50			
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Kota Administra si Jakarta Pusat	Layanan	1	1	1	1	231,36	458,00	458,00	458,00			
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi													
	Indeks Perencanaan Pembangunan		Indeks	90	91	92	92						Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Nilai	94	95	95	95						Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan	Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
	Indeks Pengelolaan Aset		Indeks	3	3	4	4							
Rincian Output	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Kota Administra si Jakarta Pusat	Layanan	1	1	1	1	415,93	800,00	800,00	800,00			
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Kota Administra si Jakarta Pusat	Rekomenda si	1	1	1	1	106,72	240,00	240,00	240,00			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Layanan Perkantoran	Kota Administra si Jakarta Pusat	Layanan	1	1	1	1	3.712.028,85	3.824.877,85	3.824.877,85	3.824.877,85			
	Layanan BMN	Kota Administra si Jakarta Pusat	Layanan	1	1	1	1	253,06	480,00	480,00	480,00			
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas Core Value ASN BerAKHLAK													
	Peningkatan nilai Indeks BerAKHLAK		Indeks	72	74	76	78						Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Rincian Output	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Administra si Jakarta Pusat	Orang	490	490	490	490	3.560,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya sistem merit dan manajemen ASN yang profesional													
	Indeks Sistem Merit		Indeks	350	350	355	360						Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Rincian Output	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Kota Administra si Jakarta Pusat	Layanan	1	1	1	1	396,29	781,20	781,20	781,20			
	Layanan Manajemen SDM	Kota Administra si Jakarta Pusat	Orang	880	880	880	880	3.075,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan													
	Indeks Reformasi Hukum		Nilai	100	100	100	100						Biro Hukum dan Kerja Sama	Biro Hukum dan Kerja Sama

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
<i>Rincian Output</i>	<i>Layanan Hukum</i>	<i>Kota Administra si Jakarta Pusat</i>	<i>Layanan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>332,22</i>	<i>648,80</i>	<i>648,80</i>	<i>648,80</i>			
Kegiatan 6677: Pengawasan dan Audit Kinerja Internal								499,42	499,42	499,42	499,42	Inspektorat Utama		
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan riset dan inovasi														
Jumlah satuan kerja di lingkup pengawasan Inspektorat I yang mendapatkan nilai hasil penjaminan kualitas SPIP 3,3			Satuan Kerja	12	12	12	12						Inspektorat I	Inspektorat I
Jumlah satuan kerja di lingkup pengawasan Inspektorat II yang mendapatkan nilai hasil penjaminan kualitas SPIP 3,3			Satuan Kerja	6	6	6	6						Inspektorat II	Inspektorat II
Jumlah satuan kerja di lingkup pengawasan Inspektorat III yang mendapatkan nilai hasil penjaminan kualitas SPIP 3,3			Satuan Kerja	4	4	4	4						Inspektorat III	Inspektorat III
Jumlah satuan kerja di lingkup pengawasan Inspektorat I yang bebas dari temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan dengan target 0 temuan			Satuan Kerja	12	12	12	12						Inspektorat I	Inspektorat I

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Jumlah satuan kerja di lingkup pengawasan Inspektorat II yang bebas dari temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/ signifikan dengan target 0 temuan		Satuan Kerja	6	6	6	6						Inspektorat II	Inspektorat II
	Jumlah satuan kerja di lingkup pengawasan Inspektorat III yang bebas dari temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/ signifikan dengan target 0 temuan		Satuan Kerja	4	4	4	4						Inspektorat III	Inspektorat III
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di lingkup pengawasan Inspektorat I yang telah ditindaklanjuti		Persen	100	100	100	100						Inspektorat I	Inspektorat I
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di lingkup pengawasan Inspektorat II yang telah ditindaklanjuti		Persen	100	100	100	100						Inspektorat II	Inspektorat II
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI di lingkup pengawasan		Persen	100	100	100	100						Inspektorat III	Inspektorat III

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Inspektorat III yang telah ditindaklanjuti													
	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI tahun sebelumnya di lingkup pengawasan Inspektorat I		Persen	92	94	96	98						Inspektorat I	Inspektorat I
	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI tahun sebelumnya di lingkup pengawasan Inspektorat II		Persen	92	94	96	98						Inspektorat II	Inspektorat II
	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI tahun sebelumnya di lingkup pengawasan Inspektorat III		Persen	92	94	96	98						Inspektorat III	Inspektorat III
Rincian Output	<i>Layanan Audit Internal Dalam Perkantoran yang Sama</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Rekomendasi</i>	14	14	14	14	75,15	75,15	75,15	75,15			
	<i>Layanan Audit Internal Dalam Kota</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Rekomendasi</i>	3	3	3	3	72,30	72,30	72,30	72,30			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	<i>Layanan Audit Internal Luar Provinsi</i>	<i>Kota Administrasi Jakarta Pusat</i>	<i>Rekomendasi</i>	7	7	7	7	351,97	351,97	351,97	351,97			
Kegiatan 6996: Dukungan Manajemen Pendidikan Teknologi Nuklir								15.498,45	15.498,45	15.498,45	15.498,45		Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia	Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia
	Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya dukungan manajemen politeknik teknologi nuklir													
	Jumlah layanan dukungan internal politeknik teknologi nuklir		Layanan	1	1	1	1							
<i>Rincian Output</i>	<i>Layanan Perkantoran</i>	<i>Kab. Sleman</i>	<i>Layanan</i>	1	1	1	1	15.498,45	15.498,45	15.498,45	15.498,45			
	Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan, yang berorientasi pada pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan pendidikan teknologi nuklir													
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94	94	94	94							
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	80	81	81	82							
	Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang materiil/signifikan		Temuan	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	UKE I	UKE II (Koordinator)	UKE II (Pengampu)
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun sebelumnya		Persen	100	100	100	100							
	Indeks Manajemen Risiko		Indeks	3,4	3,5	3,6	3,7							

Sublampiran 2. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KP 02.16.03 - Penguatan Tata Kelola Keaneekaragaman Hayati	Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati	Inovasi	100	120	140	160	180	238.000,00	370.796,87	564.558,60	489.655,50	538.913,99						238.000,00	370.796,87	564.558,60	489.655,50	538.913,99
Pro-P 02.16.03.02 - Integrasi Data dan Pengayaan IPTEK Keaneekaragaman Hayati								238.000,00	370.796,87	564.558,60	489.655,50	538.913,99						238.000,00	370.796,87	564.558,60	489.655,50	538.913,99
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Bersih	Purwarupa	12	6	16	18	20	6.000,00	3.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00						6.000,00	3.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
	Peralatan Laboratorium Bidang Hayati	Unit	2	2	2	2	2	232.000,00	367.796,87	556.558,60	480.655,50	528.913,99						232.000,00	367.796,87	556.558,60	480.655,50	528.913,99
	Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Hayati dan Lingkungan	Inovasi		120	140	160	180															
		Produk		50	50	50	50		0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00						0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KP 02.16.05 - Peningkatan BioProspeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioProspeksi	Produk	50	75	100	125	150	16.350,85	19.000,00	24.850,00	27.850,00	31.350,00						16.350,85	19.000,00	24.850,00	27.850,00	31.350,00
Pro-P 02.16.05.01 - Pengembangan BioProspeksi, Bioteknologi, serta akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik								10.850,85	13.000,00	17.850,00	19.850,00	22.350,00						10.850,85	13.000,00	17.850,00	19.850,00	22.350,00
Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara	Jumlah Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara yang dihasilkan	Purwarupa	22	26	36	40	45	10.850,85	13.000,00	17.850,00	19.850,00	22.350,00						10.850,85	13.000,00	17.850,00	19.850,00	22.350,00
Pro-P 02.16.05.02 - Pengelolaan Keamanan Hayati (Biosafety and Biosecurity)								5.500,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00						5.500,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Purwarupa Biota yang Terkonservasi	Jumlah Purwarupa Biota yang Terkonservasi yang dihasilkan	Purwarupa	11	12	14	16	18	5.500,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00						5.500,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
KP 02.22.07 - Pengembangan Iptek, Inovasi dan SDM Ekonomi Biru	Pusat Inovasi berbasis maritim	Unit (Kumulatif)	0	1	1	1	2	0,00	0,00	650,00	850,00	450,00						0,00	0,00	650,00	850,00	450,00
Pro-P 02.22.07.01 - Peningkatan Sarana dan Prasarana								0,00	0,00	500,00	700,00	300,00						0,00	0,00	500,00	700,00	300,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Kelautan dan Perikanan																						
	<i>Fasilitas pendukung ekosistem kelautan dan maritim</i>	Jumlah Infrastruktur Fasilitas pendukung ekosistem kelautan dan maritim	Unit	0	0	1	1	1	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00	300.000,00						0,00	0,00	500.000,00	700.000,00	300.000,00
	Pro-P 02.22.07.03 - Penguatan Riset di Bidang Maritim, Kelautan dan Perikanan								0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Pengembangan Hub Kelautan dan Maritim</i>	Jumlah Pengembangan Hub Kelautan dan Maritim	Lembaga	0	0	1	1	1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Kebumihan dan Maritim</i>	Jumlah produk hasil riset dan inovasi bidang kebumihan dan maritim	Produk		5	6	6	6		0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00						0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
KP 04.08.01 - Penguatan Kapasitas Iptek dan Inovasi	Proporsi SDM iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya	Persen	25	30	35	45	50	643.602,60	513.774,60	1.138.534,12	587.081,57	894.082,66	1.447.095,27	1.483.285,68	2.120.225,00	2.803.450,00	2.154.000,00	2.090.697,87	1.997.060,28	3.258.759,12	3.390.531,57	3.048.082,66	
	Proporsi jumlah SDM iptek dengan H index ≥ 10	Persen	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35																
	Jumlah kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset	KI/100 periset	4,56	5,54	6,52	7,05	8,48																

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Infrastruktur Laboratorium Penyakit Infeksi dengan Tingkat Keamanan Tinggi (High Containment Infectious Laboratory)	Unit	0	1	1	0	0	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Armada Kapal Riset (KPBU)	Unit	0	0	2	2	2	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00			340,00	1.020,00	340,00	0,00	0,00	362,00	1.042,00	362,00
	Pro-P 04.08.01.04 - Pengembangan Skema Rekrutmen dan Jenjang karier SDM iptek							1.204,42	699,91	704,42	704,42	704,42						1.204,42	699,91	704,42	704,42	704,42
	Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Fungsional Bidang Riset dan Inovasi yang disusun	Standar	9	9	9	9	9	1.204,42	699,91	704,42	704,42	704,42						1.204,42	699,91	704,42	704,42	704,42
	Jumlah Peserta Sertifikasi Profesi	Orang	50	50	50	50	50															
	Pro-P 04.08.01.05 - Pengembangan Skema Insentif SDM Iptek,							26,86	52,09	269,25	429,75	714,50	1.447,09	1.483,28	1.780,25	1.783,45	1.814,00	1.473,95	1.535,38	2.049,47	2.213,20	2.528,50

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Lembaga Riset dan Industri																							
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Bersih</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Bersih yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	0	20	30	40	0,00	0,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00						0,00	0,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00
	<i>Kekayaan Intelektual Biota yang Terkonservasi</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Biota yang Terkonservasi yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	0	20	30	40	0,00	0,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00						0,00	0,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	0	20	30	40	0,00	0,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00						0,00	0,00	14.000,00	21.000,00	28.000,00
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Big Data</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Big Data yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	2	7	12	37	0,00	1.500,00	4.900,00	8.400,00	25.900,00						0,00	1.500,00	4.900,00	8.400,00	25.900,00
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Sistem Telekomunikasi IoT</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Sistem Telekomunikasi IoT yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	3	15	20	70	0,00	2.250,00	10.500,00	14.000,00	49.000,00						0,00	2.250,00	10.500,00	14.000,00	49.000,00
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset	Kekayaan Intelektual	0	2	7	12	28	0,00	1.500,00	4.900,00	8.400,00	19.600,00						0,00	1.500,00	4.900,00	8.400,00	19.600,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jaringan Detektor Bawah Air																						
	Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Kebencanaan dan Sumber Daya Kebumian	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Kebencanaan dan Sumber Daya Kebumian yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	3	10	20	30	0,00	2.250,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00						0,00	2.250,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00
	Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Kelautan untuk Ekonomi Biru	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Kelautan untuk Ekonomi Biru yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	2	10	20	30	0,00	1.500,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00						0,00	1.500,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00
	Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Untuk Hilirisasi Sumber Daya Akuatik	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Untuk Hilirisasi Sumber Daya Akuatik yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	2	10	20	30	0,00	1.500,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00						0,00	1.500,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00
	Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi tentang Ke-Indonesiaan	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi tentang Ke-Indonesiaan yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	0	20	25	30	0,00	0,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00						0,00	0,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi tentang Dinamika Kontemporer</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi tentang Dinamika Kontemporer yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	0	20	25	30	0,00	0,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00						0,00	0,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Energi Berkelanjutan</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Energi Berkelanjutan yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	2	20	40	50	0,00	1.500,00	14.000,00	28.000,00	35.000,00						0,00	1.500,00	14.000,00	28.000,00	35.000,00
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Manufaktur Industri Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Manufaktur Industri Berbasis Sumber Daya Lokal yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	2	20	40	50	0,00	1.500,00	14.000,00	28.000,00	35.000,00						0,00	1.500,00	14.000,00	28.000,00	35.000,00
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Budaya Berkelanjutan</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Budaya Berkelanjutan yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	2	1	1	30	0,00	1.500,00	700,00	700,00	21.000,00						0,00	1.500,00	700,00	700,00	21.000,00
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Data Raya Arkeologi Bahasa dan Sastra</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Data Raya Arkeologi Bahasa	Kekayaan Intelektual	0	2	6	6	30	0,00	1.500,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00						0,00	1.500,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			dan Sastra yang dihasilkan																					
			Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	0	10	20	44	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	30.500,00						0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	30.500,00
			Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Material Maju untuk Kesehatan yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	3	20	40	70	0,00	2.250,00	13.600,00	27.900,00	49.000,00						0,00	2.250,00	13.600,00	27.900,00	49.000,00
			Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Pengembangan Teknologi Proses Material Terbarukan yang dihasilkan	Kekayaan Intelektual	0	2	20	40	70	0,00	1.500,00	13.500,00	27.600,00	48.400,00						0,00	1.500,00	13.500,00	27.600,00	48.400,00
			Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi untuk kedaulatan Berbasis Nanoteknologi dan Material	Kekayaan Intelektual	0	2	5	6	6	0,00	1.500,00	3.500,00	4.200,00	4.200,00						0,00	1.500,00	3.500,00	4.200,00	4.200,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Tanaman</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Tanaman yang dihasilkan	Kekayaan Intektual	0	0	23	30	56	0,00	0,00	16.100,00	21.000,00	39.200,00						0,00	0,00	16.100,00	21.000,00	39.200,00
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Ternak</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Ternak yang dihasilkan	Kekayaan Intektual	0	0	15	20	24	0,00	0,00	10.500,00	14.000,00	16.800,00						0,00	0,00	10.500,00	14.000,00	16.800,00
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Produk Pertanian</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Produk Pertanian yang dihasilkan	Kekayaan Intektual	0	0	26	36	65	0,00	0,00	18.200,00	25.200,00	45.000,00						0,00	0,00	18.200,00	25.200,00	45.000,00
	<i>Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Alat Kesehatan</i>	Jumlah Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Alat Kesehatan yang dihasilkan	Kekayaan Intektual	0	0	20	50	80	0,00	0,00	14.000,00	35.000,00	56.000,00						0,00	0,00	14.000,00	35.000,00	56.000,00
	<i>Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi</i>	Jumlah Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi	Lembaga	7.930	8.910	9.970	10.880	11.890	26.860,00	30.347,00	28.650,00	29.150,00	29.900,00	1.447.095,27	1.483.285,68	1.780.225,00	1.783.450,00	1.814.000,00	1.473.955,27	1.513.632,68	1.808.875,00	1.812.600,00	1.843.900,00
KP 04.08.02 - Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan	Jumlah BRIDA/ekosistem daerah yang	Lembaga	2	5	7	10	15	5.045,50	3.000,00	555.700,00	556.000,00	636.509,34			0,00	0,00	0,00	5.045,50	3.000,00	555.700,00	556.000,00	636.509,34	

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	beroperasi optimal																					
	Jumlah hub tematik yang dikembangkan di BRIN	Lembaga	0	1	2	3	4															
	Jumlah hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk	Lembaga	0	1	2	3	4															
	Jumlah penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN	miliar rupiah	20	50	75	100	125															
Pro-P 04.08.02.03 Pengembangan Layanan dan Fasilitasi BRIDA/ Ekosistem Daerah								5.045,50	3.000,00	80.700,00	81.000,00	151.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,50	3.000,00	80.700,00	81.000,00	151.404,67	
	Badan Riset dan Inovasi Daerah Terbina	Jumlah Badan Riset dan Inovasi Daerah Terbina	Lembaga	21	26	31	37	45	5.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00				5.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi di bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah Naskah Kebijakan Hasil Riset dan Inovasi dibidang Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah	Naskah	0	40	95	100	105	0,00	2.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00				0,00	2.400,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	
	Hub Inovasi Daerah yang Dikembangkan	Jumlah Hub Inovasi Daerah yang	Lembaga	0	1	1	1	2	0,00	600,00	75.000,00	75.000,00	145.104,67				0,00	600,00	75.000,00	75.000,00	145.104,67	

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Dikembangkan																						
Pro-P 04.08.02.04 Pengembangan Hub Inovasi Sektoral dan Tematik								0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	485.104,67						0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	485.104,67	
	Pengembangan Hub Energi dan Manufaktur	Jumlah Hub Energi dan Manufaktur yang Dikembangkan	Lembaga	0	0	1	1	1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Pengembangan Hub Pengolahan Sampah dan Limbah	Jumlah Hub Pengolahan Sampah dan Limbah yang Dikembangkan	Lembaga	0	0	1	1	1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Pengembangan Hub Pertanian dan Pangan	Jumlah Hub Pertanian dan Pangan yang Dikembangkan	Lembaga	0	0	1	1	1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Hub Inovasi Sektoral yang Dikembangkan	Jumlah Hub Inovasi Sektoral yang Dikembangkan	Lembaga	0	0	1	1	1	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	35.104,67						0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	35.104,67
KP 04.08.03 - Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi secara masif di berbagai bidang termasuk pengawasan ketenaganukliran		Jumlah Produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat pada bidang-bidang prioritas	Produk	25	40	60	90	115	187.732,31	340.500,00	355.642,08	413.154,50	571.029,40						187.732,31	340.500,00	355.642,08	413.154,50	571.029,40

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan industri/badan usaha pada bidang-bidang prioritas	Kerjasama	25	30	35	45	50																
Pro-p 04.08.03.01 - Pemanfaatan Riset Bidang Pangan								16.648,88	18.500,00	94.500,00	114.500,00	182.000,00						16.648,88	18.500,00	94.500,00	114.500,00	182.000,00	
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Produk Pertanian	Purwarupa	14	10	75	85	140	7.000,00	5.000,00	37.500,00	42.500,00	70.000,00						7.000,00	5.000,00	37.500,00	42.500,00	70.000,00	
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Tanaman	Purwarupa	12	12	65	75	120	5.648,88	6.000,00	32.500,00	37.500,00	60.000,00						5.648,88	6.000,00	32.500,00	37.500,00	60.000,00	
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Ternak	Purwarupa	8	11	45	65	100	4.000,00	5.500,00	22.500,00	32.500,00	50.000,00						4.000,00	5.500,00	22.500,00	32.500,00	50.000,00	
	Purwarupa Flagship Riset dan Inovasi Pangan untuk	Purwarupa	0	4	4	4	4	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Mendukung MBG	Mendukung MBG yang dihasilkan																				
	Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Pertanian dan Pangan	Jumlah produk hasil riset dan inovasi bidang pertanian dan pangan	Produk	5	6	6	6	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00							0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Pro-p 04.08.03.02 - Pemanfaatan Riset Bidang Energi							7.658,00	16.000,00	13.180,00	13.680,00	14.180,00						7.658,00	16.000,00	13.180,00	13.680,00	14.180,00
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Nuklir untuk Energi	Jumlah Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Nuklir untuk Energi yang dihasilkan	Purwarupa	6	14	8	9	10	2.702,00	7.000,00	4.180,00	4.680,00	5.180,00					2.702,00	7.000,00	4.180,00	4.680,00	5.180,00
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Energi Berkelanjutan	Jumlah Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Energi Berkelanjutan yang dihasilkan	Purwarupa	10	10	10	10	10	4.956,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					4.956,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Purwarupa Flagship Riset dan Inovasi PLTU Hijau untuk Mendukung Swasembada Energi	Jumlah Purwarupa Flagship Riset dan Inovasi PLTU Hijau untuk Mendukung Swasembada Energi yang dihasilkan	Purwarupa	0	8	8	8	8	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Energi dan Manufaktur</i>	Produk		5	6	6	6		0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00						0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Pro-p 04.08.03.03 - Pemanfaatan Riset Bidang Pertahanan dan Keamanan							17.855,00	22.000,00	52.000,00	61.000,00	76.500,00						17.855,00	22.000,00	52.000,00	61.000,00	76.500,00
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Pesawat Udara yang dihasilkan</i>	Purwarupa	8	12	20	20	21	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00						4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Satelit yang dihasilkan</i>	Purwarupa	12	12	14	14	14	5.773,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						5.773,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Big Data yang dihasilkan</i>	Purwarupa	9	4	18	21	26	4.082,00	2.000,00	9.000,00	10.500,00	13.000,00						4.082,00	2.000,00	9.000,00	10.500,00	13.000,00
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Sistem Telekomunikasi IoT yang dihasilkan</i>	Purwarupa	5	10	34	46	65	2.500,00	5.000,00	17.000,00	23.000,00	32.500,00						2.500,00	5.000,00	17.000,00	23.000,00	32.500,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Jaringan Detektor Bawah Air	Jumlah Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Jaringan Detektor Bawah Air yang dihasilkan	Purwarupa	3	6	18	21	27	1.500,00	3.000,00	9.000,00	10.500,00	13.500,00						1.500,00	3.000,00	9.000,00	10.500,00	13.500,00
	Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Penerbangan dan Antariksa	Jumlah produk hasil riset dan inovasi bidang penerbangan dan antariksa	Produk		1	2	2	2	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00							0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	
	Pro-P 04.08.03.04 - Pemanfaatan Riset Bidang Sumber Daya Air								3.192,00	2.000,00	4.400,00	5.450,00	5.450,00						3.192,00	2.000,00	4.400,00	5.450,00	5.450,00
	Model Hasil Riset dan Inovasi Untuk Hilirisasi Sumber Daya Akuatik	Jumlah Model Bidang Kebumihan dan Maritim yang dihasilkan	Model	0	0	1	1	1	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00						0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Untuk Hilirisasi Sumber Daya Akuatik	Jumlah Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Untuk Hilirisasi Sumber Daya Akuatik yang dihasilkan	Purwarupa	7	4	9	11	11	3.192,00	2.000,00	4.150,00	5.200,00	5.200,00						3.192,00	2.000,00	4.150,00	5.200,00	5.200,00
	Pro-P 04.08.03.05 - Pemanfaatan Riset Bidang Manufaktur yang mendukung hilirisasi SDA								7.932,00	8.500,00	13.000,00	16.000,00	23.500,00						7.932,00	8.500,00	13.000,00	16.000,00	23.500,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan</i>	Jumlah Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Hilirisasi Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan yang dihasilkan	Purwarupa	8	9	18	24	31	4.000,00	4.500,00	9.000,00	12.000,00	15.500,00						4.000,00	4.500,00	9.000,00	12.000,00	15.500,00
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Manufaktur Industri Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	Jumlah Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Manufaktur Industri Berbasis Sumber Daya Lokal yang dihasilkan	Purwarupa	8	8	8	8	16	3.932,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00						3.932,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan berbasis Nanoteknologi dan Material</i>	Jumlah Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan berbasis Nanoteknologi dan Material yang dihasilkan	Purwarupa	6	8	48	48	72	3.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00						3.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00
	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Nanoteknologi dan Material</i>	Jumlah produk hasil riset dan inovasi bidang nanoteknologi dan material	Produk		5	6	6	6		0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00						0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
Pro-P 04.08.03.06 - Pemanfaatan Riset Bidang Kesehatan									34.139,60	35.500,00	57.350,00	62.900,00	108.000,00						34.139,60	35.500,00	57.350,00	62.900,00	108.000,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Kedokteran Presisi	Purwarupa	15	12	17	18	44	7.334,00	6.000,00	8.500,00	9.000,00	22.000,00						7.334,00	6.000,00	8.500,00	9.000,00	22.000,00
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Material Maju untuk Kesehatan yang dihasilkan	Purwarupa	11	8	10	10	10	5.214,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.214,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Obat dan Vaksin yang dihasilkan	Purwarupa	19	15	30	35	60	9.211,00	7.500,00	15.000,00	17.500,00	30.000,00						9.211,00	7.500,00	15.000,00	17.500,00	30.000,00
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Alat Kesehatan yang dihasilkan	Purwarupa	12	12	26	28	60	5.600,00	6.000,00	12.600,00	13.900,00	30.000,00						5.600,00	6.000,00	12.600,00	13.900,00	30.000,00
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Nuklir untuk Medis dan Industri yang dihasilkan	Purwarupa	6	10	8	9	10	2.520,00	5.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00						2.520,00	5.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Nuklir untuk	Purwarupa	10	6	12	13	14	4.260,00	3.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00						4.260,00	3.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Radioisotop dan Radiofarmaka	Teknologi Nuklir untuk Radioisotop dan Radiofarmaka yang dihasilkan																					
	Purwarupa Flagship Riset dan Inovasi Platform Pengembangan Vaksin TB untuk Mendukung Kemandirian Kesehatan	Jumlah Purwarupa Flagship Riset dan Inovasi Platform Pengembangan Vaksin TB untuk Mendukung Kemandirian Kesehatan yang dihasilkan	Purwarupa	0	8	8	8	8	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Model Hasil Riset dan Inovasi Kedokteran Presisi	Jumlah Model Bidang Kesehatan yang dihasilkan	Model	0	0	9	10	20	0,00	0,00	2.250,00	2.500,00	5.000,00						0,00	0,00	2.250,00	2.500,00	5.000,00
	Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan	Jumlah produk hasil riset dan inovasi bidang kesehatan	Produk		5	5	5	5		0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00						0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Tenaga Nuklir	Jumlah produk hasil riset dan inovasi bidang tenaga nuklir	Produk		1	2	2	2		0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00						0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	Pro-P 04.08.03.07 - Pemanfaatan Riset Bidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup								7.687,00	13.500,00	10.950,00	11.750,00	13.800,00						7.687,00	13.500,00	10.950,00	11.750,00	13.800,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Kebencanaan dan Sumber Daya Kebumian	Purwarupa	13	16	10	11	13	4.687,00	8.000,00	4.700,00	5.250,00	6.300,00						4.687,00	8.000,00	4.700,00	5.250,00	6.300,00
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Pengembangan Teknologi Proses Material Terbarukan	Purwarupa	6	7	8	8	10	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00						3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
	Model Hasil Riset dan Inovasi Kebencanaan dan Sumber Daya Kebumian	Model	0	8	9	10	10	0,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00						0,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00
	Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Elektronika dan Informatika	Produk		5	6	6	6		0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00						0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
Pro-P 04.08.03.08 - Pemanfaatan Riset Bidang Kebijakan, Sosial Humaniora, Kebudayaan								21.437,83	21.500,00	26.000,00	36.500,00	49.250,00						21.437,83	21.500,00	26.000,00	36.500,00	49.250,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi tentang Ke-Indonesiaan	Purwarupa	0	0	1	2	3	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00						0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi tentang Dinamika Kontemporer	Purwarupa	0	0	1	2	2	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00						0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Budaya Berkelanjutan	Purwarupa	0	0	1	1	1	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00						0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Model Hasil Riset dan Inovasi tentang Ke-Indonesiaan	Model	18	19	10	10	10	4.455,00	4.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						4.455,00	4.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Model Hasil Riset dan Inovasi tentang Dinamika Kontemporer	Model	16	17	7	8	8	4.000,00	4.250,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00						4.000,00	4.250,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00
	Model Hasil Riset dan Inovasi Budaya Berkelanjutan	Model	20	15	24	27	30	4.799,58	3.750,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00						4.799,58	3.750,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	yang dihasilkan																							
	<i>Model Hasil Riset Dasar Arkeologi, Bahasa, dan Sastra</i>	Jumlah Model Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra yang dihasilkan	Model	3	5	5	5	5	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00							750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	<i>Model Hasil Riset Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Integratif</i>	Jumlah Model Bidang Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat yang dihasilkan	Model	11	7	12	13	40	2.633,25	1.750,00	3.000,00	3.250,00	10.000,00							2.633,25	1.750,00	3.000,00	3.250,00	10.000,00
	<i>Model Hasil Riset Akselerasi Pembangunan Perdesaan untuk Kesejahteraan</i>	Jumlah Model Bidang Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat yang dihasilkan	Model	7	8	13	28	30	1.600,00	2.000,00	3.250,00	7.000,00	7.500,00							1.600,00	2.000,00	3.250,00	7.000,00	7.500,00
	<i>Model Hasil Riset Kemandirian Ekonomi yang Kompetitif dan Berkelanjutan</i>	Jumlah Model Bidang Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat yang dihasilkan	Model	7	8	15	32	34	1.600,00	2.000,00	3.750,00	8.000,00	8.500,00							1.600,00	2.000,00	3.750,00	8.000,00	8.500,00

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Model Hasil Riset Industrialisasi dan Pengembangan Bisnis yang Inklusif</i>	Jumlah Model Bidang Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat yang dihasilkan	Model	7	7	12	13	28	1.600,00	1.750,00	3.000,00	3.250,00	7.000,00						1.600,00	1.750,00	3.000,00	3.250,00	7.000,00
	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora</i>	Jumlah produk hasil riset dan inovasi bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	Produk		1	2	2	2	0,00	500,00	550,00	605,00						0,00	0,00	500,00	550,00	605,00	
	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra</i>	Jumlah produk hasil riset dan inovasi bidang arkeologi, bahasa, dan sastra	Produk		1	2	2	2	0,00	500,00	550,00	605,00						0,00	0,00	500,00	550,00	605,00	
	<i>Produk Hasil Riset dan Inovasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat</i>		Produk		1	2	2	2	0,00	500,00	550,00	605,00						0,00	0,00	500,00	550,00	605,00	
	Pro-P 04.08.03.09 - Pemanfaatan Riset Bidang Kelautan								1.000,00	3.000,00	5.200,00	6.500,00	6.500,00					1.000,00	3.000,00	5.200,00	6.500,00	6.500,00	
	<i>Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Kelautan</i>	Jumlah Purwarupa Hasil Riset dan	Purwarupa	3	6	9	11	11	1.000,00	3.000,00	4.200,00	5.250,00	5.250,00					1.000,00	3.000,00	4.200,00	5.250,00	5.250,00	

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pengembangan BioProspeksi																					
	Jumlah mitra pemanfaatan model/kekayaan intelektual yang dihasilkan	Lembaga	25	25	25	25	25															
	Mitra Pemanfaatan Riset dan Inovasi Lembaga Lainnya	Lembaga	85	69	122	147	176	3.600,00	5.000,00	5.184,00	6.220,80	7.464,96						3.600,00	5.000,00	5.184,00	6.220,80	7.464,96
KP 04.09.02 - Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Rasio SDM iptek per satu juta penduduk	Rasio	1265	1379	1493	1607	1721															
	Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan world's Top 2% Scientists	Orang	99	103	107	111	116	114.242,52	112.386,06	147.204,53	164.381,43	184.693,72						114.242,52	112.386,06	147.204,53	164.381,43	184.693,72
Pro-P 04.09.02.02 - Memperkuat Pembinaan serta Fasilitasi Talenta Riset dan Inovasi								17.250,99	17.300,00	18.820,00	20.320,00	21.820,00						17.250,99	17.300,00	18.820,00	20.320,00	21.820,00
	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Layanan	1	1	1	1	1	8.200,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						8.200,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi	Lembaga	35	40	45	50	55	9.050,00	12.300,00	13.820,00	15.320,00	16.820,00						9.050,00	12.300,00	13.820,00	15.320,00	16.820,00
Pro-P 04.09.02.03 -								96.991,53	95.086,06	128.384,53	144.061,43	162.873,72						96.991,53	95.086,06	128.384,53	144.061,43	162.873,72

Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan Sarana Prasana esensial manajemen talenta																						
<i>Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi</i>	Jumlah Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi	Orang	18.71 0	12.00 0	18.71 0	18.71 0	18.71 0	96.991 ,53	95.086 ,06	128.384 ,53	144.06 1,43	162.87 3,72						96.991, 53	95.086, 06	128.384 ,53	144.061 ,43	162.873 ,72

Sublampiran 3. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH					
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a. menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana strategis bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan; b. menjadi pedoman untuk menyusun rencana aksi dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; c. meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perekonomian; d. meningkatnya partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Unit Eselon I terkait; d. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Kementerian Sekretariat Negara; c. Kementerian Hukum; d. Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas; e. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; f. Kementerian Keuangan. 	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu dan Pengetahuan dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kapasitas bangsa dalam mengelola sumber daya dan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional agar dapat meningkatkan daya saing serta mewujudkan kemandirian bangsa; b. menjamin kemandirian dan kebebasan ilmiah dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. memberikan perlindungan kekayaan intelektual dan pemanfaatannya sebagai hasil invensi dan inovasi untuk pembangunan nasional; d. menjamin pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan kode etik bidang ilmu; e. meningkatkan kualitas, efisiensi dan pemanfaatan sumber daya iptek; f. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan iptek; g. memberikan perlindungan bagi sumber daya manusia iptek dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; h. memberikan fasilitasi berupa pendanaan dan sarana prasarana iptek; i. mewujudkan sinergi dan kolaborasi antar unsur kelembagaan dan sumber daya iptek. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Unit Eselon I terkait; d. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Kementerian Sekretariat Negara; c. Kementerian Hukum; d. Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas; e. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; f. Kementerian Keuangan. 	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa	<p>a. menjadi pedoman dalam memfasilitasi proses pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa dengan memperhatikan kepentingan nasional, keamanan dan keselamatan peluncuran wahana antariksa, serta kelestarian lingkungan sekitar;</p> <p>b. mendorong kemandirian penguasaan teknologi keantariksaan nasional sehingga dalam jangka panjang dapat memangkas ketergantungan dalam penggunaan jasa peluncuran dari negara lain serta memunculkan <i>deterrence effect</i> terhadap pertahanan dan keamanan nasional;</p> <p>c. memberikan manfaat ekonomi dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>d. memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi geografis strategis sehingga memberikan keunggulan komparatif dalam pemanfaatan teknologi antariksa apabila dibandingkan dengan wilayah negara lainnya.</p>	<p>a. Sekretariat Utama;</p> <p>b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi;</p> <p>c. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Riset dan Penerbangan dan Antariksa;</p> <p>e. Unit Eselon I terkait;</p> <p>f. Organisasi Riset terkait.</p>	<p>a. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;</p> <p>b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>c. Kementerian Sekretariat Negara;</p> <p>d. Kementerian Hukum;</p> <p>e. Kementerian Luar Negeri;</p> <p>f. Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>g. Kementerian Pertahanan;</p> <p>h. Kementerian Keuangan;</p> <p>i. Kementerian Perhubungan;</p> <p>j. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;</p> <p>k. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>l. Kementerian Investasi/BKPM;</p> <p>m. TNI Angkatan Udara.</p>	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional; b. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara umum yang berlaku bagi masyarakat selaku wajib bayar dan bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku Instansi yang mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Unit Eselon I terkait; c. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; b. Kementerian Sekretariat Negara; c. Kementerian Hukum; d. Kementerian Keuangan. 	2025
5.	RPP tentang Tata Kelola Pertambangan Bahan Galian Nuklir	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tata kelola pertambangan bahan galian nuklir termasuk mineral ikutan radioaktif; b. komitmen Indonesia dalam mencapai target <i>net zero emission</i>; c. mendorong pertumbuhan industri, ekonomi dan penyediaan bahan bakar nuklir domestik; d. optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral, khususnya mineral radioaktif dan asosiasinya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan d. Organisasi Riset Tenaga Nuklir e. Unit Eselon I terkait; f. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Kementerian Sekretariat Negara; c. Kementerian Hukum; d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; f. Kementerian Keuangan. 	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan dasar hukum dan kepastian hukum dalam penguasaan teknologi b. memastikan para pelaku kegiatan komersial keantariksaan dapat berjalan tertib dan tetap menjaga serta melindungi kepentingan negara; c. mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara melalui komersialisasi keantariksaan; d. memberikan manfaat ekonomi dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. e. menumbuhkan industri keantariksaan, mendorong investasi komersial di bidang keantariksaan baik nasional maupun internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa; d. Unit Eselon I terkait; e. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; b. Kementerian Sekretariat Negara; c. Kementerian Hukum; d. Kementerian Perdagangan; e. Kementerian Keuangan; f. Kementerian Pertahanan; dan g. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman. 	2028
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN					
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional; b. meningkatkan kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Unit Eselon I terkait; c. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; b. Kementerian Sekretariat Negara; c. Kementerian Hukum; d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; e. Kementerian Keuangan. 	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Keselamatan Reaktor Nuklir	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pembayaran tunjangan keselamatan reaktor nuklir; b. meningkatkan kinerja Pegawai yang mendapatkan penugasan mengelola reaktor nuklir sehingga tercipta kondisi yang selamat dan aman, serta tidak membahayakan dirinya maupun lingkungan di sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Unit Eselon I terkait; c. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; b. Kementerian Sekretariat Negara; c. Kementerian Hukum; d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; e. Kementerian Keuangan. 	2025
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jangka Menengah	<ul style="list-style-type: none"> a. menjadi acuan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan; b. menjadi pedoman untuk menyusun rencana aksi dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; c. meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perekonomian; d. meningkatnya partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Unit Eselon I terkait d. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Kementerian Sekretariat Negara; c. Kementerian Hukum; d. Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas; e. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; f. Kementerian Keuangan. 	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016- 2040	<ul style="list-style-type: none"> a. menjadi acuan rencana induk keantariksaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; b. menjadi pedoman untuk menyusun rencana aksi dalam penyelenggaraan keantariksaan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. meningkatkan kontribusi keantariksaan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan d. Unit Eselon I terkait; e. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Kementerian Sekretariat Negara; c. Kementerian Hukum; d. Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas; e. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; f. Kementerian Keuangan. 	2026
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Fasilitas Keantariksaan	<ul style="list-style-type: none"> a. berperan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, pertahanan negara, dan penyelenggaraan keantariksaan sehingga memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat dan kemajuan bangsa; dan b. melakukan supervisi keantariksaan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan standarisasi yang mencakup kebutuhan proteksi dan zonasi di fasilitas keantariksaan untuk mendukung operasional penyelenggaraan keantariksaan pada tahap pembangunan dan pengelolaan yang terencana dan terkoordinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa; d. Unit Eselon I terkait; e. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; b. Kementerian Sekretariat Negara; c. Kementerian Hukum; d. Kementerian Perdagangan; e. Kementerian Keuangan; f. Kementerian Pertahanan; dan g. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman. 	2026
RANCANGAN PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL					

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
12.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2025-2029	memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN untuk mendukung visi, misi, dan arah kebijakan BRIN.	a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Unit Eselon I terkait; d. Organisasi Riset terkait.	a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.	2025
13.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh	melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh.	a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Deputi Bidang Pembangunan d. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa; e. Unit Eselon I terkait; f. Organisasi Riset terkait.	a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; c. Kementerian Keuangan; d. Badan Informasi Geospasial.	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
14.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tata Kelola Data Riset dan Inovasi	<p>a. mewujudkan ketersediaan data riset dan inovasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional, instansi pusat, dan instansi daerah;</p> <p>b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data riset dan inovasi yang selaras dengan Satu Data Indonesia.</p>	<p>a. Sekretariat Utama;</p> <p>b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi;</p> <p>c. Pusat Data dan Informasi;</p> <p>d. Unit Eselon I terkait;</p> <p>e. Organisasi Riset terkait.</p>	<p>a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <p>b. Kementerian Sekretariat Negara;</p> <p>c. Kementerian Hukum;</p> <p>d. Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas;</p> <p>e. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.</p>	2025
15.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional	<p>a. memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pengelolaan kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional;</p> <p>b. meningkatkan kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional.</p>	<p>a. Sekretariat Utama;</p> <p>b. Unit Eselon I terkait;</p> <p>c. Organisasi Riset terkait.</p>	<p>a. Kementerian Hukum;</p> <p>b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;</p> <p>c. Kementerian Keuangan.</p>	2025
16.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi	<p>a. melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi;</p> <p>b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi.</p>	<p>a. Sekretariat Utama;</p> <p>b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi;</p> <p>c. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;</p> <p>d. Unit Eselon I terkait;</p> <p>e. Organisasi Riset terkait.</p>	<p>a. Kementerian Hukum;</p> <p>b. Kementerian Keuangan;</p> <p>c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p>	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
17.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penyelenggaraan Platform Digital Geoinformatika;	<p>a. mewujudkan teknologi geoinformatika dalam menyediakan informasi yang akurat dan waktu nyata dalam mendukung perencanaan serta pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor terutama dalam pengelolaan dan perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, pemantauan lingkungan, serta mitigasi dan manajemen bencana, dan mendukung keamanan dan pertahanan negara di Indonesia; dan</p> <p>b. berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan perekonomian, daya saing, dan kemandirian bangsa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>a. Sekretariat Utama; b. Organisasi Riset Elektronika dan Informatika c. Unit Eselon I terkait; d. Organisasi Riset terkait.</p>	<p>a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Kehutanan; c. Badan Informasi Geospasial; d. Badan Informasi Geospasial; e. Badan Pusat Statistik.</p>	2025
18.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset	<p>a. melaksanakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; b. melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset; c. memberikan kepastian hukum terhadap kelembagaan Organisasi Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.</p>	<p>a. Sekretariat Utama; b. Unit Eselon I terkait; c. Organisasi Riset terkait.</p>	<p>a. Sekretariat Kabinet; b. Kementerian Hukum; c. Kementerian Keuangan; d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; e. Kementerian Keuangan.</p>	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
19.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; b. melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset; c. memberikan kepastian hukum terhadap kelembagaan Organisasi Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Unit Eselon I terkait; c. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Kabinet; b. Kementerian Hukum; c. Kementerian Keuangan; d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; e. Kementerian Keuangan. 	2025
20.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. mewujudkan tata kelola penghunian rumah negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baik dan akuntabel; b. memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi penghunian rumah negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam penghunian rumah negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Unit Eselon I terkait; c. Organisasi Riset terkait. 	Kementerian Hukum.	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
21.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme	melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme	a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan d. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi; e. Unit Eselon I terkait; f. Organisasi Riset terkait.	a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Pertanian; c. Kementerian Kesehatan; d. Kementerian Lingkungan Hidup; e. Kementerian Kelautan dan Perikanan; f. Kementerian Keuangan.	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
22.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 25 Tahun 2022 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset	a. meningkatkan indeks kompetitif sumber daya manusia global di Indonesia bidang inovasi; b. membangun talenta unggul bidang Riset dan inovasi nasional; c. meningkatkan jumlah proporsi sumber daya manusia tingkat pendidikan program magister dan doktor.	a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; c. Unit Eselon I terkait; dan d. Organisasi Riset terkait.	a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
23.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 24 Tahun 2022 tentang Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Mobilitas Periset	<ul style="list-style-type: none"> a. menciptakan ekosistem inovasi untuk penguatan sistem inovasi nasional; b. meningkatkan kapasitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional; c. meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan, dan/atau industri; d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berkompetisi secara global serta berkontribusi untuk daya saing dan kemandirian bangsa; dan e. meningkatkan keluaran ilmiah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; c. Unit Eselon I terkait; dan d. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 	2025
24.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Standar Biaya Keluaran Riset dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. acuan dalam melaksanakan riset dan inovasi berdasarkan standar biaya keluaran; dan b. acuan dalam pengelolaan anggaran riset dan inovasi dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Unit Eselon I terkait; dan d. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Keuangan; c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; d. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; e. Kementerian Agama. 	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
25.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penyusunan Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi; b. memberikan pedoman dalam menentukan jumlah dan komposisi Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi yang diperlukan sebagai acuan dasar rekrutmen baru dan kenaikan jenjang jabatan; c. memetakan jumlah dan komposisi Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi untuk melihat kebutuhan secara nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d. Unit Eselon I terkait; e. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Keuangan; c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
26.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi Pejabat Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi tentang Jabatan Fungsional Peneliti; b. memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi bagi penyelenggara pelatihan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d. Unit Eselon I terkait; e. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Keuangan; c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 	2026
27.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional; b. meningkatkan kinerja Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Unit Eselon I terkait; c. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Keuangan; c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; d. Kementerian Keuangan. 	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
28.	Rancangan Peraturan BRIN tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan	melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan d. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa; e. Unit Eselon I terkait; f. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Perdagangan; e. Kementerian Keuangan. 	2026
29.	Rancangan Peraturan BRIN tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Unit Eselon I terkait; d. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; c. Kementerian Keuangan. 	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
30.	Rancangan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.	a. Sekretariat Utama; b. Unit Eselon I terkait; c. Organisasi Riset terkait.	a. Sekretariat Kabinet; b. Kementerian Hukum; c. Kementerian Keuangan.	2026
31.	Rancangan Peraturan BRIN tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa	melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa.	a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan d. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa; e. Unit Eselon I terkait f. Organisasi Riset terkait.	a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Perhubungan; e. Kementerian Keuangan.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
32.	Rancangan Peraturan BRIN tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Fasilitas Keantariksaan	melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden tentang Kawasan Observatorium Nasional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan d. Unit Eselon I terkait; e. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Dalam Negeri; d. Kementerian Keuangan. 	2028
33.	Rancangan Peraturan BRIN tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pertambangan Bahan Galian Nuklir	melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pertambangan Bahan Galian Nuklir.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan d. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir; e. Unit Eselon I terkait; f. Organisasi Riset terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; c. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; d. Kementerian Keuangan. 	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Riset	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
34.	Rancangan Peraturan BRIN tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Komersialisasi Keantariksaan	melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Komersialisasi Keantariksaan.	a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi; c. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan d. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa; e. Unit Eselon I terkait; f. Organisasi Riset terkait.	a. Kementerian Hukum; b. Kementerian Perdagangan; c. Kementerian Luar Negeri; d. Kementerian Keuangan.	2029

Sublampiran 4. Definisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Tujuan, dan Indikator RPJMN

Tujuan 1: Terwujudnya ekosistem riset dan inovasi yang berdaya saing global		
Indikator Tujuan 1		
1.	Indikator	Peringkat Indeks Inovasi Global
	Konsep/Definisi	Indeks Inovasi Global (<i>Global Innovation Index</i>) adalah peringkat tahunan yang diterbitkan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang mengukur kapasitas inovasi suatu negara berdasarkan input (<i>institutions, human capital and research, infrastructure, market sophistication, dan business sophistication</i>) dan output (<i>knowledge and technology outputs dan creative outputs</i>).
	Metode/Rumus perhitungan	Peringkat diambil berdasarkan skor total dalam Indeks Inovasi Global, yang dihitung dari agregasi berbagai indikator input dan output inovasi. Perhitungan dilakukan oleh WIPO menggunakan bobot dan metodologi standar internasional.
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Kepala BRIN
	Sumber Data	Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) <i>(https://www.wipo.int)</i>
2.	Indikator	Pengeluaran Iptek dan Inovasi *)
	Konsep/Definisi	<p>a. Pengeluaran iptek dan inovasi adalah jumlah belanja riset yaitu banyaknya uang yang dikeluarkan untuk kegiatan riset, meliputi belanja operasional (belanja pegawai, belanja barang habis pakai) dan non-operasional. Belanja riset nasional adalah agregat dari belanja riset pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha/industri, dan swasta non-profit (<i>foundation, asosiasi, konsorsium, joint ventura, charities, non-governmental organisations (NGOs), dsb</i>).</p> <p>b. Pengeluaran iptek dan inovasi per PDB adalah jumlah Belanja Riset Nasional dibagi dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) menurut lapangan usaha.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	a. Belanja Riset Nasional = Belanja Riset BRIN + Belanja Riset Pemda + Belanja Riset LPDP + Belanja Riset Perguruan Tinggi + Belanja Riset Badan Usaha/Industri + Belanja Riset Lembaga Riset Swasta (NGO).

		<p>b. Perhitungan ini mengadopsi perhitungan Persentase Belanja Riset Nasional Terhadap PDB pada dokumen Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia.</p> <p>c. Pengeluaran iptek dan inovasi terhadap PDB dihitung dengan Belanja Riset Nasional dibagi dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Menurut Lapangan Usaha.</p>
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Kepala BRIN
	Sumber Data	Buku Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia
Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kontribusi riset dan inovasi dalam pembangunan nasional		
Indikator Tujuan 2		
1.	Indikator	Pertumbuhan Penerimaan atas Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
	Konsep/Definisi	<p>Penerimaan atas pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) merujuk pada penerimaan atas KI berdasarkan tanda terima (<i>receipts</i>) yang dilaporkan dalam Indikator Iptek, Riset dan Inovasi (IIRI). Nilai ini mengukur penerimaan oleh penduduk dan bukan penduduk untuk penggunaan sah hak milik (seperti paten, merek dagang, hak cipta, proses industri dan desain termasuk rahasia dagang, dan waralaba) dan untuk penggunaan, melalui perjanjian lisensi, karya asli atau purwarupa yang dihasilkan (seperti hak cipta pada buku dan naskah, perangkat lunak komputer, karya sinematografi, dan rekaman suara) serta hak terkait (seperti untuk pertunjukan langsung dan siaran televisi, kabel, atau satelit).</p> <p>Pertumbuhan penerimaan atas pemanfaatan KI adalah persentase perubahan nilai yang diperoleh tahun ini dibandingkan dengan nilai yang diperoleh tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan yang positif mengindikasikan peningkatan peran penting transaksi KI dalam perekonomian dan ketergantungan negara pada KI sebagai sumber pendapatan atau pengeluaran.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	<p>Konsep Pengukuran: Mengidentifikasi penerimaan atas penggunaan kekayaan intelektual yang dilisensikan, dinyatakan dalam harga berlaku (<i>current prices</i>) dalam satuan dolar Amerika Serikat (USD).</p> <p>Persentase pertumbuhan dihitung dengan membandingkan selisih penerimaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan penerimaan tahun sebelumnya.</p>

		<p>Pertumbuhan</p> $= \frac{(\text{Realisasi Penerimaan KI Tahun } n - \text{Realisasi Penerimaan KI Tahun } n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan KI Tahun } n - 1} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n = Tahun berjalan • n-1 = Tahun sebelumnya <p>Penerimaan dihitung berdasarkan penerimaan atas KI berdasarkan tanda terima (<i>receipts</i>) yang dilaporkan dalam Indikator Iptek, Riset dan Inovasi (IIRI).</p>
Frekuensi Penyajian Data	Tahunan	
Unit Kerja Pengampu	Kepala BRIN	
Sumber Data	Buku Indikator Iptek, Riset dan Inovasi (IIRI), Portal Bank Indonesia - Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia	

Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola yang berkualitas dalam penyelenggaraan riset dan inovasi

Indikator Tujuan 3

1.	Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
	Konsep/Definisi	<p>a. Reformasi birokrasi memiliki makna yang mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. 2) Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. 3) Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. 4) Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. 5) Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen Pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. <p>b. Reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.</p> <p>c. Nilai reformasi birokrasi diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</p>

		Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai <i>good governance</i> .
	Metode/Rumus perhitungan	Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Kepala BRIN
	Sumber Data	Hasil evaluasi reformasi birokrasi berupa surat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
Sasaran Strategis 1: Menguatnya Kapasitas Sumber Daya Riset dan Inovasi		
Indikator Sasaran Strategis 1		
1.	Indikator	Jumlah SDM Iptek yang Mendapatkan Rekognisi Internasional *)
	Konsep/Definisi	<p>a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) iptek: banyaknya SDM iptek nasional yang terlibat di dalam kegiatan riset.</p> <p>b. Rekognisi internasional: rekognisi berupa penghargaan dan/atau pengakuan dari pemerintah asing, lembaga/organisasi atau komunitas internasional yang kredibel atas kepakaran/keahlian, prestasi, atau kontribusinya yang berdampak bagi kemajuan iptek maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.</p> <p>c. Jumlah SDM iptek yang mendapatkan rekognisi internasional adalah jumlah SDM iptek yang mendapatkan penghargaan dan/atau pengakuan dari pemerintah asing, lembaga/organisasi, atau komunitas internasional yang kredibel, atas kepakaran/keahlian, prestasi, atau kontribusinya yang berdampak bagi kemajuan iptek maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	Diukur dengan menjumlahkan seluruh SDM iptek Nasional yang mendapatkan rekognisi internasional
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Kepala BRIN
	Sumber Data	Buku Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia
2.	Indikator	Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H index ≥ 10 *)

	Konsep/Definisi	<p>a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek: Banyaknya SDM iptek nasional yang terlibat di dalam kegiatan riset.</p> <p>b. H-index adalah metrik yang digunakan untuk mengukur produktivitas dan dampak sitasi karya ilmiah seseorang, yang menunjukkan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>c. H-Index ≥ 10 berdasarkan <i>database</i> internasional. Nilai 10 menunjukkan bahwa seorang peneliti memiliki setidaknya 10 publikasi yang masing-masing telah dikutip minimal 10 kali.</p> <p>d. Proporsi jumlah SDM iptek dengan H Index ≥ 10 adalah jumlah SDM iptek dengan H-Index ≥ 10 dari basis data internasional, dibagi dengan total SDM iptek.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	<p>Jumlah SDM iptek H ≥ 10 diambil dari <i>database</i> internasional.</p> <p>Proporsi jumlah SDM iptek dengan H Index ≥ 10 = Jumlah SDM iptek H ≥ 10 dibagi dengan total SDM iptek dikali 100</p>
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Kepala BRIN
	Sumber Data	Buku Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia
3.	Indikator	Rasio Pemanfaatan Infrastruktur Riset dan Inovasi
	Konsep/Definisi	<p>Rasio Pemanfaatan Infrastruktur Riset dan Inovasi adalah perbandingan antara jumlah infrastruktur riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan (beroperasi optimal) dengan total infrastruktur riset dan inovasi yang tersedia/dikelola oleh BRIN.</p> <p>Definisi operasional mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur Riset dan Inovasi: Fasilitas fisik strategis (gedung, laboratorium, peralatan riset, dan fasilitas pendukung lainnya) yang dibangun atau direvitalisasi untuk mendukung kegiatan riset, pengembangan, dan penerapan iptek. 2. Dimanfaatkan (Beroperasi Optimal): Kondisi dimana infrastruktur telah memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Digunakan secara aktif sesuai peruntukannya untuk kegiatan riset/layanan. • Menghasilkan nilai ekonomi melalui layanan (PNBP) atau Elsa Poin. • Digunakan dalam kerangka kerja sama dengan pihak eksternal.
	Metode/Rumus perhitungan	Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah infrastruktur yang memenuhi kriteria pemanfaatan

		(optimal) terhadap total populasi infrastruktur riset dan inovasi yang tercatat sebagai aset aktif. $\text{Rasio Pemanfaatan} = \frac{\text{Jumlah Infrastruktur yang Dimanfaatkan}}{\text{Total Infrastruktur yang Tersedia}}$
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Kepala BRIN
	Sumber Data	Laporan pemanfaatan infrastruktur dari dokumen hasil audit Inspektorat Utama dan dokumen pendukung lainnya dari Sekretariat Deputy Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi.
4.	Indikator	Proporsi Anggaran Litbang Non Pemerintah/Swasta *)
	Konsep/Definisi	Anggaran litbang non pemerintah/swasta adalah jumlah anggaran riset yang digunakan untuk kegiatan riset oleh non-pemerintah yaitu badan usaha/industri dan lembaga riset swasta non-profit.
	Metode/Rumus perhitungan	Proporsi anggaran litbang non pemerintah/swasta dihitung dengan membandingkan anggaran riset dari sektor non pemerintah/swasta dengan total anggaran riset nasional. Dengan rincian: Anggaran litbang non pemerintah/swasta = Anggaran riset Badan Usaha/Industri + Lembaga Riset Swasta non-profit + Perguruan Tinggi (non-APBN). Anggaran Riset Nasional = Anggaran Riset BRIN + Anggaran Riset Pemda + Anggaran Riset LPDP + Anggaran Riset Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) + Anggaran Riset Badan Usaha/Industri + Anggaran Riset Lembaga Riset Swasta non-profit.
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Kepala BRIN
	Sumber Data	Buku Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Pemanfaatan Riset dan Inovasi		
Indikator Sasaran Strategis 2		
1.	Indikator	Proporsi Penerimaan dari Pemanfaatan Iptek dan Inovasi di BRIN terhadap Anggaran yang Dikelola oleh BRIN
	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur seberapa besar kontribusi pendapatan yang dihasilkan dari komersialisasi dan pemanfaatan Iptek/Inovasi terhadap total anggaran yang dikelola oleh BRIN.

		<p>Definisi operasional mencakup:</p> <p>Penerimaan dari Pemanfaatan Iptek dan Inovasi (Pembilang): Total realisasi pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset intelektual, hasil riset, dan inovasi. Ini mencakup PNBP Fungsional (Layanan Sains), Royalti, Lisensi, serta pendapatan lain yang sah dari kerjasama pemanfaatan.</p> <p>Anggaran yang Dikelola oleh BRIN (Penyebut): Total pagu anggaran efektif (DIPA) yang dikelola oleh BRIN pada tahun berjalan, yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) ditambah dengan potensi anggaran yang dikelola oleh BRIN yang bersumber dari hibah dana abadi penelitian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun berjalan.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	<p>Proporsi</p> $= \frac{\text{Total Realisasi Penerimaan Pemanfaatan Iptek}}{\text{Total Anggaran DIPA BRIN}} \times 100\%$ <p>Dihitung dengan membandingkan total realisasi penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan Inovasi terhadap total anggaran DIPA efektif BRIN ditambah dana yang dikelola oleh BRIN yang bersumber dari LPDP pada tahun berjalan.</p>
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Kepala BRIN
	Sumber Data	Data dihimpun dan diolah oleh Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	Indikator	Rasio Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi yang Berdampak
	Konsep/Definisi	<p>Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan hilirisasi hasil riset BRIN dengan membandingkan jumlah hasil riset dan inovasi yang telah berdampak terhadap hasil riset dan inovasi yang siap dimanfaatkan.</p> <p>Definisi operasional mencakup:</p> <p>Hasil Riset dan Inovasi yang Berdampak (Pembilang): Produk riset, teknologi, atau kekayaan intelektual (KI) milik BRIN yang telah memenuhi salah satu kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah diadopsi/digunakan oleh pemerintah/masyarakat untuk penyelesaian masalah (intervensi kebijakan/teknologi tepat guna). • Menghasilkan dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan. • Merupakan riset dan inovasi yang dihasilkan sejak tahun 2022 dan memberikan dampak bagi masyarakat/pemerintah/industri.

		Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Siap Dimanfaatkan (Penyebut): Jumlah hasil riset dan inovasi yang dihasilkan sejak tahun 2022 hingga tahun berjalan dan telah didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual (KI) atau ditetapkan sebagai produk siap alih teknologi.
Metode/Rumus perhitungan		Jumlah hasil riset dan inovasi yang berdampak sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah riset dan inovasi yang dihasilkan sampai dengan tahun berjalan yang siap dimanfaatkan. Rasio Pemanfaatan = $\frac{\text{Jumlah Hasil Riset yang Berdampak}}{\text{Jumlah Hasil Riset yang Siap Dimanfaatkan}} \times 100\%$
Frekuensi Penyajian Data		Tahunan
Unit Kerja Pengampu		Kepala BRIN
Sumber Data		Data dihimpun dan diolah kembali oleh Tim yang memiliki tugas dan fungsi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Lembaga di BRIN yang bersumber diantaranya dari: <ul style="list-style-type: none"> • Data Perjanjian Lisensi/Kerjasama Pemanfaatan dari Sekretariat Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi. • Data Kekayaan Intelektual (KI) terdaftar dari Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi. • Data hasil riset dan inovasi yang berdampak dari Tim Program pada Organisasi Riset.

Sasaran Strategis 3: Menguatnya Tata kelola BRIN yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel

Indikator Sasaran Strategis 3

1.	Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
	Konsep/Definisi	<p>a. Reformasi birokrasi memiliki makna yang mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. 2) Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. 3) Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. 4) Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh- sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. 5) Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik

		<p>manajemen Pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.</p> <p>b. Reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.</p> <p>c. Nilai reformasi birokrasi diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai <i>good governance</i>.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	<p>Nilai Reformasi Birokrasi berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai Reformasi Birokrasi, maka semakin baik tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah.</p> <p>Kategori nilai Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AA >90-100 (istimewa) • A >80-90 (memuaskan) • BB >70-80 (sangat baik) • B >60-70 (baik) • CC >50-60 (cukup) • C >30-50 (kurang) • D 0-30 (sangat kurang)
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Kepala BRIN
	Sumber Data	Hasil evaluasi reformasi birokrasi berupa surat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
Indikator RPJMN		
1.	Indikator	Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati
	Konsep/Definisi	a. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

		<p>b. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.</p> <p>c. Jumlah keseluruhan inovasi dan teknologi yang dihasilkan atas kegiatan riset dan inovasi terkait keanekaragaman hayati, tidak terbatas pada tiga taksa utama yaitu flora, fauna, dan mikroba, namun juga termasuk inovasi dan teknologi pengelolaan keanekaragaman hayatinya.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	Diukur dengan menghitung jumlah riil inovasi dan teknologi yang dihasilkan terkait keanekaragaman hayati pada tahun berjalan.
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan
	Sumber Data	Biro Perencanaan dan Keuangan (Tim Program dan Keuangan Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan)
2.	Indikator	Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi
	Konsep/Definisi	<p>a. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sel, atau sistem biologi untuk menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi mencakup berbagai bidang, seperti pertanian, kesehatan, industri, maupun lingkungan;</p> <p>b. Bioprospeksi adalah proses pencarian, pengumpulan, dan eksplorasi sumber daya alam (terutama organisme) untuk menemukan senyawa atau bahan yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam bidang pertanian, kesehatan, industri, maupun lingkungan.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	Diukur dengan menghitung jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan dalam pengembangan bioprospeksi pada tahun berjalan.
	Frekuensi Penyajian Data	Triwulanan dan Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan
	Sumber Data	Biro Perencanaan dan Keuangan (Tim Program dan Keuangan Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan)
3.	Indikator	Pusat inovasi berbasis maritim

	Konsep/Definisi	<p>a. Pusat inovasi berbasis maritim adalah lembaga/program yang berfokus pada riset, penerapan teknologi, inovasi, dan kebijakan inovatif di sektor maritim. Pusat ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri maritim, mempercepat adopsi teknologi baru, serta mendukung keberlanjutan ekosistem kelautan dan pesisir.</p> <p>b. Pusat inovasi berbasis maritim dari segi infrastruktur adalah suatu entitas atau kawasan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana strategis yang mendukung ekosistem riset, pengembangan, dan inovasi di bidang kemaritiman (di luar infrastruktur yang menjadi target di indikator pembangunan infrastruktur strategis). Infrastruktur ini mencakup:</p> <p>1) Fasilitas Penelitian dan Pengembangan (R&D): seperti laboratorium, pusat uji, dan fasilitas eksperimen yang memungkinkan pengembangan teknologi baru dan peningkatan kapasitas ilmiah di sektor maritim.</p> <p>2) Infrastruktur Pendukung Inovasi: seperti pusat data, jaringan, serta fasilitas logistik yang menunjang kegiatan kolaborasi, diseminasi hasil riset, dan pengembangan teknologi maritim secara berkelanjutan.</p> <p>c. Untuk mendukung pemanfaatan infrastruktur tersebut, perlu dibentuk Pusat Kolaborasi Riset (PKR) Maritim sebagai wadah riset multidisiplin yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong penelitian yang aplikatif dan memberikan dampak nyata bagi penguatan sektor kemaritiman Indonesia.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	Diukur dengan menghitung jumlah pusat inovasi berbasis maritim hingga tahun berjalan.
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
	Sumber Data	Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
4.	Indikator	Proporsi SDM iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya

	Konsep/Definisi	Proporsi SDM iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya adalah proporsi SDM iptek yang diterima pada program studi S3 di perguruan tinggi top 100 dunia di bidangnya terhadap total SDM iptek yang diterima pada program studi S3 pada tahun berjalan.
	Metode/Rumus perhitungan	Diukur dengan melakukan perbandingan jumlah SDM iptek yang diterima pada program studi S3 di perguruan tinggi top 100 dunia di bidangnya terhadap total SDM iptek yang diterima pada program studi S3 pada tahun berjalan.
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek
	Sumber Data	Buku Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia (data diolah) & Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek
5.	Indikator	Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset
	Konsep/Definisi	<p>a. Kekayaan Intelektual (KI) adalah kreasi dan inovasi hasil olah pikir manusia (dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra) yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum.</p> <p>b. Kekayaan intelektual yang dimaksud dalam indikator ini adalah kekayaan intelektual yang berbasis riset dengan kepemilikan personal dan bukan kepemilikan komunal, yang terdiri atas hak cipta berbasis riset, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.</p> <p>c. Periset adalah SDM iptek yang melaksanakan kegiatan riset, kecuali kegiatan layanan riset. Periset nasional terdiri dari periset sektor pemerintah, sektor pendidikan tinggi, dan sektor badan usaha/industri (Buku IIRI).</p>
	Metode/Rumus perhitungan	Jumlah Kekayaan Intelektual per 100 Periset = (Jumlah permohonan paten dan paten sederhana, hak cipta berbasis riset, PVT, dan desain industri dari pemohon dalam negeri / Jumlah Periset) x 100
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Kepala BRIN
	Sumber Data	Buku Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia
6.	Indikator	Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dibangun

	Konsep/Definisi	<p>a. Infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dibangun mengacu pada jumlah fasilitas fisik yang secara strategis dibangun dan dikembangkan (termasuk infrastruktur dan fasilitas yang direvitalisasi) untuk mendukung kegiatan riset, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta inovasi.</p> <p>b. Ruang lingkup infrastruktur iptek yang dibangun dan dikembangkan seperti gedung atau struktur, laboratorium, fasilitas riset lainnya yang mencakup peralatan laboratorium, kamar wisma/asrama yang menunjang tugas dan fungsi riset.</p> <p>c. Satuan yang digunakan untuk menghitungnya adalah jumlah per unit gedung atau struktur fisik yang dibangun dan dikembangkan.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	Diukur dengan menghitung jumlah infrastruktur iptek strategis yang dibangun di tahun berjalan dengan bukti dukung berupa laporan progres pelaksanaan dan dokumen pendukung lainnya.
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
	Sumber Data	Sekretariat Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
7.	Indikator	Jumlah BRIDA/ekosistem daerah yang beroperasi optimal
	Konsep/Definisi	BRIDA/Ekosistem (Riset dan Inovasi) Daerah yang beroperasi optimal didefinisikan sebagai BRIDA/Ekosistem (Riset dan Inovasi) Daerah yang telah mengalami proses pengembangan kelembagaan dan proses inovasi yang berdampak langsung terhadap optimalisasi potensi dan pemecahan permasalahan pembangunan daerah secara kolaboratif, sebagai <i>outcome</i> dari pembinaan BRIN. Ekosistem (Riset dan Inovasi) Daerah yang dimaksud mencakup efektivitas jejaring kolaborasi, dukungan kebijakan, serta koordinasi dan keberlanjutan pemanfaatan riset dan inovasi dalam upaya peningkatan kapasitas daya saing daerah.
	Metode/Rumus perhitungan	Diukur dengan menghitung jumlah BRIDA/Ekosistem (Riset dan Inovasi) Daerah yang beroperasi optimal sesuai dengan penilaian BRIN pada tahun berjalan.
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
	Sumber Data	Sekretariat Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
8.	Indikator	Jumlah hub tematik yang dikembangkan di BRIN

	Konsep/Definisi	Hub tematik adalah suatu platform atau pusat kolaborasi yang dirancang untuk mempertemukan Perguruan Tinggi dan industri yang fokus pada tema strategis tertentu. Hub ini bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, pertukaran informasi, serta pengembangan inovasi dan solusi yang relevan dengan topik tertentu.
	Metode/Rumus perhitungan	Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah hub tematik yang telah dikembangkan di BRIN hingga tahun berjalan.
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
	Sumber Data	Sekretariat Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
9.	Indikator	Jumlah penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN
	Konsep/Definisi	<p>a. Jumlah penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN adalah total pendapatan yang diperoleh oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dari hasil kerjasama/pendampingan riset, hilirisasi dan/atau komersialisasi teknologi dan inovasi yang dikembangkan oleh BRIN dalam berbagai sektor industri, akademik, dan masyarakat. 2) penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi dapat berupa lisensi, royalti, kerjasama riset maupun kerjasama pemanfaatan atas teknologi dan inovasi BRIN, dan/atau komersialisasi produk inovasi. <p>b. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.</p> <p>c. Nilai Lisensi adalah nilai tertentu yang dibayarkan oleh penerima lisensi (mitra) kepada pemberi lisensi, sebagai biaya atas pemberian izin pemanfaatan ekonomi terhadap suatu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemberi lisensi.</p> <p>d. Nilai Royalti adalah nilai tertentu yang dibayarkan oleh penerima lisensi (mitra) kepada pemilik kekayaan intelektual sebagai kompensasi atas manfaat ekonomi yang didapat dari pemanfaatan kekayaan intelektual.</p> <p>e. Nilai Kerjasama Riset adalah nilai tertentu yang dibayarkan oleh mitra riset kepada Organisasi Riset</p>

		<p>maupun Pusat Riset sebagai PNBPN atas kerjasama riset yang memanfaatkan teknologi maupun inovasi BRIN.</p> <p>f. Nilai Kerjasama Pemanfaatan adalah nilai tertentu yang dibayarkan oleh mitra kepada Deputi, Organisasi Riset maupun Pusat Riset sebagai PNBPN atas kerjasama pemanfaatan hasil riset dan inovasi, teknologi, maupun layanan fungsional BRIN.</p> <p>g. Nilai Komersialisasi Produk Inovasi adalah nilai tertentu yang dibayarkan oleh mitra kepada Deputi, Organisasi Riset maupun Pusat Riset terkait komersialisasi produk inovasi di luar skema lisensi, royalti, kerjasama riset, atau kerjasama pemanfaatan.</p> <p>h. Besaran Nilai Lisensi, Nilai Royalti, Nilai Kerjasama Riset, Nilai Kerjasama Pemanfaatan, dan Nilai Komersialisasi Produk Inovasi merupakan kesepakatan oleh para pihak, yang akan dibayarkan dalam kurun waktu tertentu.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah penerimaan (PNBP fungsional) dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN yang dibayarkan oleh mitra di tahun berjalan disertai dengan data dukung terkait berupa Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran Lisensi, Royalti, Nilai Kerjasama Riset, Nilai Kerjasama Pemanfaatan maupun Nilai Komersialisasi Produk Inovasi.
	Frekuensi Penyajian Data	Triwulanan dan Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
	Sumber Data	Sekretariat Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
10.	Indikator	Jumlah hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk
	Konsep/Definisi	<p>Hub Iptekin K/L adalah platform kolaborasi tematik yang dikoordinasikan oleh BRIN untuk mempertemukan kebutuhan riset dan inovasi K/L dengan kapasitas dan hasil riset BRIN yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan.</p> <p>Hub ini berfungsi sebagai wadah fasilitasi dan orkestrasi kolaborasi lintas sektor, yang mencakup pertukaran informasi, penyalarsan kebutuhan kebijakan dan program K/L dengan agenda riset, serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi secara terarah.</p> <p>Hub Iptekin dirancang tidak hanya sebagai mekanisme yang bergantung pada BRIN, tetapi juga mendorong</p>

		<p>penguatan peran K/L melalui pembentukan atau penugasan tim/fungsi internal di K/L yang bertanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan riset dan inovasi yang relevan dengan tugas dan fungsi K/L; dan b. Menerjemahkan serta memanfaatkan hasil riset dan inovasi BRIN (dan mitra lainnya) ke dalam kebijakan, program, atau layanan K/L, pertukaran informasi, serta pengembangan inovasi dan solusi yang relevan dengan topik tertentu.
	Metode/Rumus perhitungan	Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah hub iptekin K/L yang mengampu bidang prioritas yang telah dikembangkan hingga tahun berjalan.
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
	Sumber Data	Sekretariat Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
11.	Indikator	Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat pada bidang-bidang prioritas
	Konsep/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Produk riset dan inovasi adalah produk hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi berupa: kekayaan intelektual, purwarupa, produk, formula, metode, desain, model, modul, publikasi ilmiah atau rekomendasi teknis di bidang riset dan inovasi yang mengandung unsur kebaruan. b. Produk hasil riset dan inovasi pada bidang-bidang prioritas yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat adalah produk hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah didiseminasikan dan diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial yang dihasilkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional pada bidang-bidang prioritas. c. Produk hasil riset dan inovasi strategis adalah karakteristik dari produk riset dan inovasi yang memiliki nilai penting dan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta secara nyata mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah di bidang-bidang utama pembangunan. d. Bidang Prioritas adalah bidang yang terdapat dalam 'Asta Cita', meliputi: Ketahanan Pangan, Transisi Energi, Penurunan Kemiskinan, Sistem

		Persampahan, Penurunan Stunting, Peningkatan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Makan Bergizi Gratis, Hilirisasi dan Koperasi Merah Putih, serta bidang terkait lainnya.
	Metode/Rumus perhitungan	Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah produk hasil riset dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh individu, kelompok masyarakat, UMKM, Badan Usaha Milik Desa, asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, koperasi, lembaga pendidikan, lembaga pesantren, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, science center, dan kebun raya daerah pada bidang-bidang prioritas di tahun berjalan dengan data dukung terkait berupa Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Lisensi/Berita Acara Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN.
	Frekuensi Penyajian Data	Triwulanan dan Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
	Sumber Data	Sekretariat Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
12.	Indikator	Jumlah kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan industri/badan usaha pada bidang-bidang prioritas
	Konsep/Definisi	<p>a. Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis adalah kegiatan kerjasama teknis terkait iptek dan inovasi antara satuan Kerja BRIN (Organisasi Riset/Pusat Riset/Deputi/Direktorat) dengan Mitra Industri/Badan Usaha pada bidang-bidang prioritas.</p> <p>b. Produk hasil riset dan inovasi strategis adalah karakteristik dari produk riset dan inovasi yang memiliki nilai penting dan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta secara nyata mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah di bidang-bidang utama pembangunan</p> <p>c. Bidang Prioritas adalah bidang yang terdapat dalam 'Asta Cita', meliputi: Ketahanan Pangan, Transisi Energi, Penurunan Kemiskinan, Sistem Persampahan, Penurunan Stunting, Peningkatan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Makan Bergizi Gratis, Hilirisasi dan Koperasi Merah Putih, serta bidang terkait lainnya.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	Diukur dengan menghitung jumlah Kerjasama teknis, Kerjasama riset dan/atau kerjasama pemanfaatan hasil riset dan inovasi antara satuan Kerja BRIN (Organisasi Riset/Pusat Riset/Deputi/Direktorat) dengan industri/badan usaha pada tahun berjalan dengan

		dilengkapi data dukung terkait seperti Perjanjian Kerja Sama/NDA pemanfaatan iptek dan inovasi strategis.
	Frekuensi Penyajian Data	Triwulanan dan Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
	Sumber Data	Sekretariat Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
13.	Indikator	Rasio SDM iptek per satu juta penduduk
	Konsep/Definisi	<p>a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) iptek: banyaknya SDM iptek nasional yang terlibat di dalam kegiatan riset.</p> <p>b. Rasio sumber daya manusia iptek terhadap penduduk adalah banyaknya sumber daya manusia iptek untuk setiap 1 juta penduduk.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	Rasio SDM iptek per sejuta penduduk = jumlah SDM Iptek dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 1 juta
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek
	Sumber Data	Buku Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia (data diolah) & Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek
14.	Indikator	Jumlah SDM iptek masuk ke dalam pemeringkatan <i>World's Top 2% Scientist</i>
	Konsep/Definisi	<p>a. Definisi Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) iptek: banyaknya SDM iptek nasional yang terlibat di dalam kegiatan riset.</p> <p>b. Pemeringkatan <i>World's Top 2% Scientists</i> adalah pemeringkatan yang didasarkan pada SDM iptek Indonesia yang masuk pada 2% dari 100000 publikasi ilmiah internasional dengan sitasi tertinggi.</p> <p>c. Jumlah SDM iptek masuk ke dalam pemeringkatan <i>World's Top 2% Scientist</i> adalah Jumlah SDM iptek Indonesia yang termasuk <i>author/co-author</i> pada 2% dari 100000 publikasi tersitasi tertinggi melalui basis data internasional.</p>
	Metode/Rumus perhitungan	Diukur dengan menghitung jumlah SDM iptek yang masuk ke dalam pemeringkatan <i>World's Top 2% Scientists</i> .
	Frekuensi Penyajian Data	Tahunan
	Unit Kerja Pengampu	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek

	Sumber Data	Buku Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia (data diolah) & Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Iptek
--	-------------	--

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIF SATRIA